



DISKOMINFO
KALTIM

Ringkasan Metadata Statistik Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur



DISKOMINFO
KALTIM

Ringkasan Metadata Statistik Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Jumlah Halaman : x +730 halaman

Naskah:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Desain Cover dan Layout:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Ilustrator:

<https://www.freepik.com>

Diterbitkan dan Dicitak oleh:

© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung jawab

Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penulis dan Penyunting

H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si.

Ika Wahyuni, S.E.

Untung Maryono, S.T., M.M.

Nazarruddin, S.Kom.

Nadia Paramitha Nazmah, S.T.

Pengolah Data

Hari Adam Suharto

Irfan Fadil, S.Stat.

Rizmalani Syawitri, S.Sos.

Desain Sampul dan Tata Letak

Febri Irawan, S.E.

Eka Indah Justisiani, S.I.Kom.

Vebi Regina, S.E.

Penerbit

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Redaksi

Bidang Statistik

Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar,

Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.

Website : <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>

Email : diskominfo@kaltimprov.go.id

Telp/Fax: 0541-731963

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Ringkasan Metadata Statistik Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam era informasi digital yang terus berkembang, pengelolaan data dan statistik sektoral menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan publik, pengambilan keputusan bisnis, dan pengembangan masyarakat. Metadata statistik sektoral adalah kunci untuk memahami sumber data, metodologi pengumpulan, dan definisi yang digunakan dalam proses statistik.

Ringkasan metadata statistik sektoral ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik data yang disajikan. Dengan pemahaman yang baik tentang metadata ini, pengguna data akan dapat menginterpretasikan statistik dengan benar, menghindari kesalahan pemahaman, dan membuat keputusan yang berbasis pada informasi yang akurat dan reliabel.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan ringkasan metadata statistik sektoral ini. Semoga ringkasan metadata statistik sektoral ini bermanfaat bagi para pengguna data, peneliti, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan informasi statistik yang akurat dan terpercaya.

Samarinda, 10 November 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

H.M FAISAL, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

Badan Kepegawaian Daerah	1
Metadata Variabel.....	3
Metadata Indikator.....	15
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23
Metadata Kegiatan.....	25
Metadata Variabel.....	26
Metadata Indikator.....	39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47
Metadata Variabel.....	49
Metadata Indikator.....	55
Badan Pendapatan Daerah	59
Metadata Variabel.....	61
Metadata Indikator.....	64
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	73
Metadata Kegiatan.....	75
Metadata Variabel.....	76
Metadata Indikator.....	80
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83
Metadata Variabel.....	85
Metadata Indikator.....	86
Biro Hukum	87
Metadata Variabel.....	89
Metadata Indikator.....	92
Biro Organisasi dan Tatalaksana	95
Metadata Variabel.....	97
Metadata Indikator.....	101
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	105
Metadata Variabel.....	107
Metadata Indikator.....	109
Biro Perekonomian	111
Metadata Variabel.....	113
Metadata Indikator.....	119

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	123
Metadata Kegiatan.....	125
Metadata Variabel.....	128
Metadata Indikator.....	138
Dinas Kehutanan.....	145
Metadata Variabel.....	147
Metadata Indikator.....	158
Dinas Kelautan dan Perikanan.....	167
Metadata Kegiatan.....	169
Metadata Variabel.....	174
Metadata Indikator.....	199
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	219
Metadata Variabel.....	221
Metadata Indikator.....	236
Dinas Kesehatan	245
Metadata Kegiatan.....	247
Metadata Variabel.....	249
Metadata Indikator.....	263
Dinas Komunikasi dan Informatika	271
Metadata Kegiatan.....	273
Metadata Variabel.....	282
Metadata Indikator.....	293
Dinas Lingkungan Hidup	301
Metadata Kegiatan.....	303
Metadata Variabel.....	305
Metadata Indikator.....	313
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	321
Metadata Variabel.....	323
Metadata Indikator.....	332
Dinas Pariwisata	339
Metadata Variabel.....	341
Metadata Indikator.....	350
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.....	357
Metadata Variabel.....	359
Metadata Indikator.....	379

Dinas Pemuda dan Olahraga	403
Metadata Kegiatan.....	405
Metadata Variabel.....	406
Metadata Indikator.....	417
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	425
Metadata Variabel.....	427
Metadata Indikator.....	441
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	453
Metadata Variabel.....	455
Metadata Indikator.....	470
Dinas Perhubungan	479
Metadata Variabel.....	481
Metadata Indikator.....	491
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	499
Metadata Variabel.....	501
Metadata Indikator.....	515
Dinas Perkebunan	523
Metadata Variabel.....	525
Metadata Indikator.....	546
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.....	561
Metadata Kegiatan.....	563
Metadata Variabel.....	564
Metadata Indikator.....	577
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	585
Metadata Kegiatan.....	587
Metadata Variabel.....	588
Metadata Indikator.....	598
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.....	607
Metadata Kegiatan.....	609
Metadata Variabel.....	612
Metadata Indikator.....	625
Dinas Sosial	633
Metadata Kegiatan.....	635
Metadata Variabel.....	636
Metadata Indikator.....	649

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	657
Metadata Kegiatan.....	659
Metadata Variabel.....	660
Metadata Indikator.....	681
Inspektorat Wilayah	689
Metadata Variabel.....	691
Metadata Indikator.....	696
Satuan Polisi Pamong Praja	701
Metadata Kegiatan.....	703
Metadata Variabel.....	705
Metadata Indikator.....	718

Badan Kepegawaian Daerah

VARIABEL 1

Nomor Induk Pegawai (NIP)

Alias

NIP

Konsep

Nomor Induk Pegawai (NIP)

Definisi

NIP merupakan identitas numerik yang diberikan kepada pegawai sebagai tanda pengenal yang unik untuk mengidentifikasi dan melacak riwayat pegawai, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Panjangnya harus tepat 18 digit

Kalimat Pertanyaan

NIP =

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Kelamin

Alias

JENIS_KLMN

Konsep

Jenis Kelamin

Definisi

Jenis kelamin adalah klasifikasi biologis yang membedakan manusia berdasarkan karakteristik fisik dan fisiologis yang berkaitan dengan reproduksi

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Laki-laki
2. Perempuan

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_KLMN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Golongan PNS

Alias

GOL_PNS

Konsep

Golongan PNS

Definisi

Golongan PNS mengacu pada sistem pembagian golongan atau tingkatan PNS di Indonesia yang digunakan untuk mengklasifikasikan PNS berdasarkan pangkat, jabatan, masa kerja, dan pendidikan.

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Golongan I
2. Golongan II
3. Golongan III
4. Golongan IV

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

GOL_PNS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jabatan Struktural

Alias

JBTN_STRKTRL

Konsep

Jabatan Struktural

Definisi

Jabatan struktural merupakan jabatan yang memiliki tingkatan atau hirarki tertentu dalam suatu lembaga pemerintah

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Eselon I
2. Eselon II
3. Eselon III
4. Eselon IV

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JBTN_STRKTRL=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jabatan Fungsional

Alias

JBTN_FNCSNL

Konsep

Jabatan Fungsional

Definisi

Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Fungsional Tertentu
2. Fungsional Umum/Staff

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JBTN_FNCSNL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Tingkat Pendidikan

Alias

TNGKT_PNDKKN

Konsep

Tingkat Pendidikan

Definisi

Tingkat pendidikan merujuk pada tingkat pendidikan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan masuk dan menduduki posisi dalam pemerintahan

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Tamat SD dan Sederajat
2. SMP dan Sederajat
3. SMA dan Sederajat
4. Diploma
5. Strata 1
6. Strata 2
7. Strata 3

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

TNGKT_PNDKKN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Alias

SKPD

Konsep

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Definisi

SKPD adalah unit organisasi dalam pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah.

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Biro
2. Badan
3. Dinas
4. Rumah Sakit/Lembaga

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

SKPD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Nama

Alias

NM

Konsep

Nama

Definisi

Nama merupakan sebutan atau pengenal yang diberikan kepada individu untuk membedakannya dari orang lain

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Pangkat

Alias

PNGKT

Konsep

Pangkat

Definisi

Pangkat adalah peringkat atau tingkatan dalam struktur kepegawaian yang mengindikasikan tingkat jabatan atau posisi seseorang dalam hierarki PNS

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. I/A (Juru Muda)
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)
3. I/C (Juru)
4. I/D (Juru Tingkat I)
5. II/A (Pengatur Muda)
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)
7. II/C (Pengatur)
8. II/D (Pengatur Tingkat I)
9. III/A (Penata Muda)
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)
11. III/C (Penata)
12. III/D (Penata Tingkat I)
13. IV/A (Pembina)
14. IV/B (Pembina Tingkat I)
15. IV/C (Pembina Utama Muda)
16. IV/D (Pembina Utama Madya)
17. IV/E (Pembina Utama)

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

PNGKT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jenis Diklat

Alias

JNS_DKLT

Konsep

Jenis Diklat

Definisi

Jenis diklat adalah pengelompokan berbagai program diklat berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membantu dalam membedakan dan mengidentifikasi tujuan, fokus, atau spesialisasi dari setiap program diklat

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

1. Diklatpim Tingkat IV
2. Diklatpim Tingkat III
3. Diklatpim Tingkat II
4. Diklatpim Tingkat I

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

JNS_DKLT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah SDM Aparatur yang Berkontribusi dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja

Alias

JMLH_SDM_APRTR_BMKK

Konsep

Jumlah SDM Aparatur yang Berkontribusi dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja

Definisi

Jumlah SDM Aparatur yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja adalah banyaknya pegawai dalam sebuah organisasi pemerintah atau sektor publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi tersebut

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PNS_BMKK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah PNS Yang Didistribusikan dalam Rangka Penataan dan Pemenuhan Kebutuhan

Alias

JMLH_PNS_DPPK

Konsep

Jumlah PNS Yang Didistribusikan dalam Rangka Penataan dan Pemenuhan Kebutuhan

Definisi

PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan mengacu pada proses penempatan PNS ke berbagai unit kerja atau instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PNS_DPPK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jumlah Pegawai Yang Dimutasi Sesuai Job Description

Alias

JML_PNS_M_JOBDESC

Konsep

Jumlah Pegawai Yang Dimutasi Sesuai Job Description

Definisi

Jumlah Pegawai yang dimutasi sesuai dengan job description adalah banyaknya pegawai yang dipindahkan dari satu unit kerja ke unit kerja lain yang lebih sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JML_PNS_M_JOBDESC = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Data Kepegawaian Yang Terintegrasi dengan Sistem Kepegawaian

Alias

JMLH_DT_TSK

Konsep

Jumlah Data Kepegawaian Yang Terintegrasi dengan Sistem Kepegawaian

Definisi

Jumlah data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian adalah banyaknya data yang terkait dengan PNS yang dikumpulkan, dikelola, dan disimpan dalam sistem kepegawaian yang terpusat

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DT_TSK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Data Kepegawaian Yang Terupdate/Terbarukan

Alias

JMLH_DT_UPDATE

Konsep

Jumlah Data Kepegawaian Yang Terupdate/Terbarukan

Definisi

Jumlah data kepegawaian yang terupdate/terbarukan adalah banyaknya informasi atau catatan mengenai pegawai yang diperbarui secara teratur agar tetap akurat dan relevan

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DT_UPDATE = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Data Kepegawaian Yang Digunakan dalam Proses , Penempatan Pegawai, Mutasi dan Promosi Jabatan

Alias

JMLH_DT_PPMP

Konsep

Jumlah Data Kepegawaian Yang Digunakan dalam Proses , Penempatan Pegawai, Mutasi dan Promosi Jabatan

Definisi

Jumlah data kepegawaian yang digunakan dalam proses, penempatan pegawai, mutasi, dan promosi jabatan adalah banyaknya data pegawai yang digunakan dalam rangka melakukan proses penempatan pegawai, mutasi, dan promosi jabatan

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DT_PPMP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Data PNS

Alias

JML_DT_PNS

Konsep

Jumlah Data PNS

Definisi

Jumlah data PNS adalah banyaknya informasi atau catatan yang tersedia mengenai PNS dalam suatu sistem atau basis data

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JML_DT_PNS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jumlah SDM Aparatur

Alias

JML_SDM_APRTR

Konsep

Jumlah SDM Aparatur

Definisi

Jumlah SDM Aparatur adalah banyaknya jumlah individu yang bekerja di sektor pemerintahan yang mencakup PNS dan non PNS

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JML_SDM_APRTR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Nama Pensiunan

Alias

NAMA_PENSIUN

Konsep

Nama Pensiunan

Definisi

Nama merupakan sebutan atau pengenal yang diberikan kepada individu untuk membedakannya dari orang lain, dalam hal ini merujuk pada nama seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PENSIUN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Data Kepegawaian

Alias

JMLH_DT_PEGAWAI

Konsep

Jumlah Data Kepegawaian

Definisi

Jumlah data kepegawaian adalah banyaknya informasi atau catatan yang berkaitan dengan pegawai di suatu organisasi atau lembaga

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DT_PEGAWAI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah Pegawai yang Telah Memenuhi Persyaratan dan Standar Penataan Pegawai yang Telah Ditetapkan

Alias

JMLH_PMPSP

Konsep

Jumlah Pegawai yang Telah Memenuhi Persyaratan dan Standar Penataan Pegawai yang Telah Ditetapkan

Definisi

Jumlah Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan standar penataan pegawai yang telah ditetapkan adalah banyaknya Pegawai yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh aturan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PMPSP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Alias

JMLH_SDM_MSKJ

Konsep

Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Definisi

Jumlah SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah banyaknya SDM yang bekerja dalam sektor publik atau pemerintahan dan telah memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan untuk posisi atau jabatan tertentu

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SDM_MSKJ = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Jumlah PNS yang dinilai berkinerja baik

Alias

JMLH_PNS_K_BAIK

Konsep

Jumlah PNS yang dinilai berkinerja baik

Definisi

Jumlah PNS yang dinilai berkinerja baik adalah banyaknya PNS yang telah dinilai dan dianggap memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PNS_K_BAIK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Jumlah PNS dengan Capaian Kinerja diatas 80%

Alias

JML_PNS_K80%

Konsep

Jumlah PNS dengan Capaian Kinerja diatas 80%

Definisi

Jumlah PNS dengan Capaian Kinerja di atas 80% adalah banyaknya PNS yang telah mencapai tingkat kinerja di atas 80% dari standar atau target yang ditetapkan dalam evaluasi kinerja

Referensi Pemilihan

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JML_PNS_K80% = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah PNS

Konsep

Jumlah PNS

Definisi

Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah banyaknya pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan dalam suatu wilayah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah PNS menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan dalam suatu wilayah tertentu. Jumlah ini haruslah berimbang dikarenakan jumlah PNS yang terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan dapat menyebabkan birokrasi yang berlebihan, keterlambatan pengambilan keputusan, atau kualitas layanan yang menurun. Sebaliknya, jika jumlah PNS terlalu sedikit, pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NIP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Jenis Kelamin, Golongan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Tingkat Pendidikan, SKPD Pemprov Kaltim

Variabel Penyusun

NIP, Jenis Kelamin, Golongan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Tingkat Pendidikan, SKPD

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Pensiunan PNS

Konsep

Jumlah Pensiunan PNS

Definisi

Jumlah pensiunan PNS adalah banyaknya PNS yang telah memasuki masa pensiun dan menerima tunjangan pensiun dari negara.

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pensiunan PNS menunjukkan bahwa semakin banyak PNS yang telah memasuki masa pensiun dan menerima tunjangan dari negara. Jumlah pensiunan PNS dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan penggantian tenaga kerja di sektor pemerintahan. Jika jumlah pensiunan PNS melebihi jumlah penerimaan pegawai baru, hal ini dapat menimbulkan kekosongan jabatan yang perlu diisi atau mempengaruhi kontinuitas layanan publik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PENSIUN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pensiunan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah pembinaan PNS

Konsep

Jumlah Pembinaan PNS

Definisi

Jumlah pembinaan PNS adalah banyaknya kegiatan pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan mereka

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pembinaan PNS, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta produktivitas dari PNS

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PMBN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Diklat

Variabel Penyusun

Nama, NIP, Golongan, Pangkat, Jenis Diklat

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Persentase SDM Aparatur dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja

Konsep

Persentase SDM Aparatur dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja

Definisi

Persentase dari total jumlah SDM aparatur yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja suatu instansi

Interpretasi

Semakin tinggi angka ini mengindikasikan bahwa semakin banyak SDM aparatur yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja suatu instansi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\text{JMLH_PNS_BMKK}}{\text{JMLH_SDM_APRTR}} \right) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah SDM Aparatur yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja, Jumlah SDM Aparatur

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Persentase Kualitas Penataan Pegawai

Konsep

Persentase Kualitas Penataan Pegawai

Definisi

Persentase dari total jumlah pegawai yang memenuhi kriteria atau standar tertentu dalam proses penataan pegawai

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penataan pegawai maka semakin baik pula pengelolaan SDM dan penempatan pegawai di suatu organisasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_PMSPP} / \text{JMLH_SDM_APRTR}) \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan standar penataan pegawai yang telah ditetapkan, Jumlah PNS

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Persentase SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Konsep

Persentase SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Definisi

Persentase dari total SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk jabatan tertentu dalam suatu instansi pemerintah

Interpretasi

Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang mereka emban

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_SDM_MSKJ} / \text{JMLH_SDM_APRTR}) \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan, Jumlah SDM Aparatur

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Persentase capaian kinerja PNS di atas 80 %

Konsep

Persentase capaian kinerja PNS di atas 80 %

Definisi

Persentase dari total PNS yang mencapai atau melebihi tingkat kinerja minimal dari 80% dari target yang telah ditetapkan

Interpretasi

Persentase ini menunjukkan keberhasilan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi angka ini mengindikasikan semakin banyak PNS dengan kinerja di atas 80 persen

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PNS_K80\% / JMLH_PNS) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah PNS dengan capaian kinerja di atas 80% , Jumlah PNS

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Persentase PNS berkinerja baik

Konsep

Persentase PNS berkinerja baik

Definisi

Persentase dari total jumlah PNS yang berhasil mencapai atau melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan untuk jabatan atau tugas mereka

Interpretasi

Persentase PNS berkinerja baik yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak PNS dalam suatu organisasi atau unit kerja yang telah berhasil mencapai atau melampaui standar kinerja yang ditetapkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PNS_K_BAIK / JMLH_PNS) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah PNS yang dinilai berkinerja baik, Jumlah PNS

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan

Konsep

Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan

Definisi

Persentase dari total jumlah PNS yang dipindahkan atau didistribusikan ke unit atau posisi kerja tertentu dalam upaya untuk mengatur penempatan yang lebih efisien dan memenuhi kebutuhan instansi pemerintah

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi yang bersangkutan telah melakukan penataan yang baik dalam struktur organisasi dan penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan yang ada, sebaliknya persentase yang rendah mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi PNS.

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PNS_DPPK / JMLH_PNS) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan, Jumlah PNS

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Pegawai yang dimutasi sesuai job description

Konsep

Persentase Pegawai yang dimutasi sesuai job description

Definisi

Persentase dari total jumlah pegawai yang dipindahkan atau dimutasi ke posisi atau jabatan tertentu yang sesuai dengan job description yang telah ditetapkan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kesesuaian antara kompetensi pegawai dan tugas yang diemban, serta memaksimalkan potensi dan kualitas kinerja pegawai

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PNS_M_JOBDESC / JMLH_SDM_APRTR) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pegawai yang dimutasi sesuai job description, Jumlah PNS

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian

Konsep

Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian

Definisi

Persentase dari total data kepegawaian yang berhasil terhubung dan terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang digunakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah

Interpretasi

Jika persentase tersebut tinggi, dapat diartikan bahwa organisasi atau instansi tersebut telah berhasil mengintegrasikan sebagian besar atau seluruh data kepegawaian mereka ke dalam sistem kepegawaian. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan data, penggunaan teknologi informasi yang baik, dan kemampuan untuk mengakses informasi kepegawaian dengan cepat dan akurat.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_DT_TSK} / \text{JMLH_DT_PEGAWAI}) \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Data Kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian, Total Jumlah Data Kepegawaian

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan

Konsep

Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan

Definisi

Persentase dari total data kepegawaian yang telah diperbaharui dengan informasi terbaru tentang pegawai

Interpretasi

Jika persentase tersebut tinggi, dapat diartikan bahwa organisasi atau instansi tersebut secara rutin melakukan pembaruan data kepegawaian sesuai dengan perubahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap integritas data kepegawaian dan kualitas informasi yang diperoleh dari data tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_DT_UPDATE} / \text{JMLH_DT_PEGAWAI}) \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan, Total Jumlah Data Kepegawaian

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Persentase data kepegawaian yang digunakan dalam proses, penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan

Konsep

Persentase data kepegawaian yang digunakan dalam proses, penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan

Definisi

Persentase dari total data kepegawaian yang digunakan atau menjadi dasar dalam melakukan proses penempatan pegawai, mutasi, dan promosi jabatan

Interpretasi

Jika persentase tersebut tinggi, dapat diartikan bahwa organisasi atau instansi tersebut memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menggunakan data kepegawaian sebagai acuan dalam penempatan pegawai, mutasi, dan promosi jabatan. Penggunaan data yang tepat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis bukti, serta meningkatkan peluang untuk memanfaatkan potensi dan kompetensi pegawai dengan lebih efektif.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_DT_PPMP}}{\text{JMLH_DT_PEGAWAI}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses, penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan, Jumlah Data Kepegawaian

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengumpulan Data Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kalimantan Timur 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Untuk Mendapatkan Data Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Jumlah Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
Periodisasi:	Triwulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

VARIABEL 1

Kegiatan Pembinaan LSM Ormas dan OKP

Alias

PEMBINAAN_LSM_ORMAS_OKP

Konsep

Kegiatan Pembinaan LSM Ormas dan OKP

Definisi

Kegiatan pembinaan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

PEMBINAAN_LSM_ORMAS_OKP=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Nama Organisasi

Alias

NAMA_ORG

Konsep

Nama Organisasi

Definisi

Nama organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_ORG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Ketua

Alias

KETUA

Konsep

Ketua

Definisi

Ketua organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KETUA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Wakil Ketua

Alias

WAKIL_KETUA

Konsep

Wakil Ketua

Definisi

Wakil ketua organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

WAKIL_KETUA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Sekretaris

Alias

SEKRETARIS

Konsep

Sekretaris

Definisi

Sekretaris organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

SEKRETARIS=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Bendahara

Alias

BENDAHARA

Konsep

Bendahara

Definisi

Bendahara organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

BENDAHARA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Periode

Alias

PERIODE

Konsep

Periode

Definisi

Periode kepengurusan sesuai dengan SK Organisasi

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

PERIODE=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jenis Ormas

Alias

JENIS_ORMAS

Konsep

Jenis Ormas

Definisi

Jenis Organisasi Masyarakat sebagaimana diklasifikasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Ormas
- LSM
- Keagamaan
- Profesi
- Olahraga
- Sosial
- Lingkungan dan Sumber Daya

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_ORMAS=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Tahun Terdaftar

Alias

TAHUN_TERDAFTAR

Konsep

Tahun Terdaftar

Definisi

Tahun ketika Organisasi Masyarakat terdaftar di Badan Kesbangpol

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Terisi dalam format tahun (4 digit angka)

Kalimat Pertanyaan

TAHUN_TERDAFTAR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Alamat

Alias

ALAMAT

Konsep

Alamat

Definisi

Alamat Organisasi Masyarakat sesuai yang tertulis di Akta Notaris

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAMAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Status

Alias

STATUS

Konsep

Status

Definisi

Status organisasi berdasarkan masa kepengurusan atau aktivitas kegiatan organisasi masyarakat

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Aktif
- Tidak Aktif

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

STATUS=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Keterangan

Alias

KETERANGAN

Konsep

Keterangan

Definisi

Keterangan tambahan berupa informasi SKM yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi / Kabupaten/ Kota

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KETERANGAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Alias

KEGIATAN_PEMBINAAN_POLITIK

Konsep

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Definisi

Kegiatan pembinaan sebagaimana tercantum dalam tugas badan kesbangpol terkait pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KEGIATAN_PEMBINAAN_POLITIK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Pemilih

Alias

JUM_PEMILIH

Konsep

Jumlah Pemilih

Definisi

Jumlah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin

Referensi Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus berupa bilangan bulat positif

Kalimat Pertanyaan

JUM_PEMILIH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jenis Kelamin

Alias

JK

Konsep

Jenis Kelamin

Definisi

Karakteristik biologis yang membedakan individu sebagai laki-laki atau perempuan

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Laki-laki
- Perempuan

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Anggota DPRD

Alias

ANGGOTA_DPRD

Konsep

Anggota DPRD

Definisi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

ANGGOTA_DPRD=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Fraksi DPRD

Alias

FRAKSI_DPRD

Konsep

Fraksi DPRD

Definisi

Wadah berhimpun anggota DPRD provinsi yang dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

FRAKSI_DPRD=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Partai Politik Peserta Pemilu

Alias

PARPOL_PESERTA_PEMILU

Konsep

Partai Politik Peserta Pemilu

Definisi

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Referensi Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

PARPOL_PESERTA_PEMILU=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Konflik Sosial

Alias

KONFLIK_SOSIAL

Konsep

Konflik Sosial

Definisi

Perseteraan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KONFLIK_SOSIAL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Penduduk

Alias

JUM_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus berupa bilangan bulat positif

Kalimat Pertanyaan

JUM_PENDUDUK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah Pelajar SMA

Alias

JUM_PELAJAR_SMA

Konsep

Jumlah Pelajar SMA

Definisi

Jumlah Peserta didik pada jenjang menengah atas

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus berupa bilangan bulat positif

Kalimat Pertanyaan

JUM_PELAJAR_SMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan

Alias

ORMAS_PERAN_AKTIF_KETAHANAN

Konsep

Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan

Definisi

Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

ORMAS_PERAN_AKTIF_KETAHANAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Alias

GNRM

Konsep

Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Definisi

Pembentukan Program yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila

Referensi Pemilihan

Instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

GNRM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Alias

GIAT_CEGAH_NARKOBA

Konsep

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Definisi

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Narkotika Nasional No 7 Tahun 2019 tentang Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

GIAT_CEGAH_NARKOBA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Alias

FKUB

Konsep

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Definisi

Pembentukan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan

Referensi Pemilihan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 / No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

FKUB=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Alias

FKDM

Konsep

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Definisi

Pembentukan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

FKDM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Konsep

Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Definisi

Jumlah kegiatan pembinaan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ormas (Organisasi Masyarakat), dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda), maka kemungkinan terjadinya pengembangan dan penguatan organisasi-organisasi ini akan semakin besar. Hal ini dapat menghasilkan dampak positif berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, pengembangan kapasitas, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PEMBINAAN_LSM_ORMAS_OKP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kegiatan Pembinaan LSM Ormas dan OKP

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Konsep

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Definisi

Jumlah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan terdaftar sebagai ormas

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah organisasi masyarakat (Ormas), maka semakin banyak potensi keterlibatan aktif warga dalam berbagai aktivitas sosial dan kegiatan bersama yang mampu memperkaya kehidupan komunitas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_ORG}) \text{ WHERE } (\text{JENIS_ORMAS}) = \text{"Ormas"}$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Ormas

Variabel Penyusun

Nama Organisasi, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Periode, Jenis Ormas, Tahun Terdaftar, Alamat, Status, Keterangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Konsep

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Definisi

Jumlah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan terdaftar sebagai LSM

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maka semakin besar potensi adanya pengawasan dan advokasi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, atau hak asasi manusia

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_ORG) WHERE  
(JENIS_ORMAS)="LSM"
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Status

Variabel Penyusun

Nama Organisasi, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Periode, Jenis Ormas, Tahun Terdaftar, Alamat, Status, Keterangan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Konsep

Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Definisi

Jumlah kegiatan pembinaan sebagaimana tercantum dalam tugas badan kesbangpol terkait pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah, maka semakin besar potensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(KEGIATAN_PEMBINAAN_POLITIK)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Pemilih

Konsep

Jumlah Pemilih

Definisi

Jumlah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pemilih dalam suatu pemilihan, maka semakin besar potensi bagi demokrasi untuk mencerminkan suara mayoritas masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PEMILIH}) \text{ BY (JK)}$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kelamin

Variabel Penyusun

Jumlah Pemilih, Jenis Kelamin

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Anggota DPRD

Konsep

Jumlah Anggota DPRD

Definisi

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), maka semakin besar representasi dan keberagaman pendapat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{ANGGOTA_DPRD}) \text{ BY (JK)}$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kelamin

Variabel Penyusun

Anggota DPRD, Jenis Kelamin

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Fraksi DPRD

Konsep

Jumlah Fraksi DPRD

Definisi

Jumlah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi yang dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah fraksi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), maka semakin beragam representasi pandangan politik dalam proses legislasi di tingkat daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{FRAKSLDPRD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Fraksi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Fraksi DPRD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu

Konsep

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu

Definisi

Jumlah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah partai politik peserta pemilu, maka semakin besar variasi pilihan politik yang tersedia bagi pemilih

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PARPOL_PESERTA_PEMILU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Partai

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Partai Politik Peserta Pemilu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur

Konsep

Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur

Definisi

Penurunan jumlah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional di Kalimantan Timur

Interpretasi

Semakin tinggi tingkat penurunan jumlah konflik sosial, maka semakin kondusif lingkungan sosial untuk perkembangan masyarakat dan ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KONFLIK_SOSIAL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Konflik

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Konflik Sosial

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Masyarakat Kalimantan Timur Khususnya Pelajar SLTA

Konsep

Persentase Masyarakat Kalimantan Timur Khususnya Pelajar SLTA

Definisi

Perbandingan antara Jumlah Peserta didik pada jenjang menengah atas dengan jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pelajar SLTA, maka semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu wilayah atau negara

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JUM_PELAJAR_SMA}) \times 100\%}{\Sigma(\text{JUM_PENDUDUK})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Pelajar

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk, Jumlah Pelajar SMA

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan

Konsep

Jumlah Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan

Definisi

Jumlah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan, maka semakin kuat sinergi masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan dan krisis

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{ORMAS_PERAN_AKTIF_KETAHANAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ormas

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Konsep

Jumlah pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Definisi

Jumlah Pembentukan Program yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental, maka semakin besar komitmen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, nilai-nilai positif, dan etika dalam kehidupan sehari-hari

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{GNRM})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

GNRM

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba

Konsep

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba

Definisi

Jumlah Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka semakin efektif upaya masyarakat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{GIAT_CEGAH_NARKOBA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kegiatan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Konsep

Jumlah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Definisi

Jumlah Pembentukan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, maka semakin kuat semangat dialog antaragama dan toleransi dalam masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{FKUB})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

FKUB

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Konsep

Jumlah pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Definisi

Jumlah Pembentukan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, maka semakin besar kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman atau situasi darurat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{FKDM})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

FKDM

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

VARIABEL 1

Tanggal Kejadian

Alias

Tanggal

Konsep

Tanggal Kejadian

Definisi

Awal kejadian bencana

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Date

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Tidak boleh terisi tanggal yang belum terjadi

Kalimat Pertanyaan

Tanggal=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Kabupaten/Kota

Alias

Kab/Kota

Konsep

Kabupaten/Kota

Definisi

Kabupaten/Kota tempat terjadinya bencana

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

- 01: Kab. Paser
- 02: Kab. Kutai Barat
- 03: Kab. Kutai Kartanegara
- 04: Kab. Kutai Timur
- 05: Kab. Berau
- 09: Penajam Paser Utara
- 11: Mahakam Ulu
- 71: Kota Balikpapan
- 72: Kota Samarinda
- 74: Kota Bontang

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kab/Kota=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Kecamatan

Alias

Kecamatan

Konsep

Kecamatan

Definisi

Kecamatan tempat terjadinya bencana

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus merupakan kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimat Pertanyaan

Kecamatan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Desa

Alias

Desa

Konsep

Desa

Definisi

Desa tempat terjadinya bencana

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus merupakan desa di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimat Pertanyaan

Desa=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jenis Bencana

Alias

Jenis Bencana

Konsep

Jenis Bencana

Definisi

Jenis peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

101: Banjir	202: Kebakaran Hutan
102: Gunung Meletus	203: Kecelakaan Transportasi
103: Gempa Bumi	204: Industri
104: Tsunami	205: Kejadian Luar Biasa
105: Tanah Longsor	206: Bangunan Runtuh
106: Banjir Bandang	207: Ledakan
107: Kekeringan	208: Keracunan
108: Angin Puting Beliung	209: Warga Tenggelam
109: Gelombang Pasang / Badai	301: Konflik Sosial
110: Abrasi	302: Sabotase
111: Kabut Asap	303: Aksi Teror
201: Kebakaran	

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Bencana=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Korban Meninggal

Alias

Korban Meninggal

Konsep

Korban Meninggal

Definisi

Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan diatasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Korban Meninggal=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Korban Hilang

Alias

Korban Hilang

Konsep

Korban Hilang

Definisi

Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan di atasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Korban Hilang=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Korban Terluka

Alias

Korban Terluka

Konsep

Korban Terluka

Definisi

Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan di atasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Korban Terluka=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Korban Pengungsi

Alias

Korban Pengungsi

Konsep

Korban Pengungsi

Definisi

Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan di atasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Korban Pengungsi=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Kerusakan Infrastruktur Berat

Alias

Kerusakan Infrastruktur Berat

Konsep

Kerusakan Infrastruktur Berat

Definisi

Infrastruktur dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total / sebagian besar struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan lantai bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul jebol atau putus; (4) saluran pengairan tidak dapat berfungsi.

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan di atasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Kerusakan Infrastruktur Berat=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Kerusakan Infrastruktur Sedang

Alias

Kerusakan Infrastruktur Sedang

Konsep

Kerusakan Infrastruktur Sedang

Definisi

Infrastruktur dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (3) saluran pengairan terputus.

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan di atasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Kerusakan Infrastruktur Sedang=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Kerusakan Infrastruktur Ringan

Alias

Kerusakan Infrastruktur Ringan

Konsep

Kerusakan Infrastruktur Ringan

Definisi

Infrastruktur dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak pada dinding plesteran; (3) sebagian kecil pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (4) saluran pengairan masih bisa digunakan

Referensi Pemilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia

Referensi Waktu

Saat Pencatatan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Hanya bisa terisi dengan angka nol dan di atasnya (tidak boleh angka negatif)

Kalimat Pertanyaan

Kerusakan Infrastruktur Ringan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Kerusakan Akibat Bencana

Konsep

Jumlah Kerusakan Akibat Bencana

Definisi

Jumlah Kerusakan yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Kerusakan Akibat Bencana, maka semakin besar dampak kerusakan fisik dan ekonomi yang terjadi akibat bencana

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Kerusakan Infrastruktur Berat} + \text{Kerusakan Infrastruktur Sedang} + \text{Kerusakan Infrastruktur Ringan})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Bencana

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana, Kerusakan Infrastruktur Berat, Kerusakan Infrastruktur Sedang, Kerusakan Infrastruktur Ringan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Frekuensi Terjadinya Bencana

Konsep

Frekuensi Terjadinya Bencana

Definisi

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan

Interpretasi

Semakin tinggi Frekuensi Terjadinya Bencana, maka semakin sering bencana alam atau bencana lainnya terjadi dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Jenis Bencana})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali per Tahun

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Bencana

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

Konsep

Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

Definisi

Jumlah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Pengungsi Akibat Bencana, maka semakin banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena bencana alam atau bencana lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Korban Pengungsi})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana, Korban Pengungsi

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana

Konsep

Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana

Definisi

Jumlah Kabupaten yang terdapat peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana, maka semakin banyak kabupaten yang sering mengalami bencana alam

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Kab/Kota}) \text{ WHERE } (\text{Kab/Kota} = 01, 02, 03, 04, 05, 09, \text{OR } 11)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kabupaten

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Kota Lokasi Bencana

Konsep

Jumlah Kota Lokasi Bencana

Definisi

Jumlah Kota yang terdapat peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Kota Lokasi Bencana, maka semakin banyak kota yang sering mengalami bencana alam

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Kab/Kota})$ WHERE (Kab/Kota = 71, 72, OR 74)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kota

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal

Konsep

Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal

Definisi

Jumlah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meninggal adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal, maka semakin banyak individu yang kehilangan nyawa mereka sebagai dampak dari bencana alam

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Korban Meninggal})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana, Korban Meninggal

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Korban Bencana Alam Hilang

Konsep

Jumlah Korban Bencana Alam Hilang

Definisi

Jumlah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Korban Bencana Alam Hilang, maka semakin banyak individu yang belum ditemukan atau diidentifikasi akibat bencana alam tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Korban Hilang})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana, Korban Hilang

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka

Konsep

Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka

Definisi

Jumlah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka, maka semakin banyak individu yang mengalami cedera atau luka-luka akibat bencana alam tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Korban Terluka})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Kejadian, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Jenis Bencana, Korban Terluka

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Badan Pendapatan Daerah

VARIABEL 1

Pendapatan Asli Daerah

Alias

PAD

Konsep

Pendapatan Asli Daerah

Definisi

Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

PAD=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Dana Perimbangan

Alias

Dana Perimbangan

Konsep

Dana Perimbangan

Definisi

Komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Dana Perimbangan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Alias

DBH Pajak Bukan Pajak

Konsep

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Definisi

Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

DBH Pajak Bukan Pajak=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Dana Alokasi Khusus

Alias

DAK

Konsep

Dana Alokasi Khusus

Definisi

Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

DAK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Pendapatan Daerah

Alias

Pendapatan Daerah

Konsep

Pendapatan Daerah

Definisi

Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Pendapatan Daerah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Total APBD

Alias

APBD

Konsep

Total APBD

Definisi

Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

APBD=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total APBD

Konsep

Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total APBD

Definisi

Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap total rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total APBD, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai program-programnya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat

Metode/Rumus Penghitungan

$$(PAD / APBD) \times 100\%$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pendapatan Asli Daerah, Total APBD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Persentase Pertumbuhan PAD

Konsep

Persentase Pertumbuhan PAD

Definisi

Perubahan nilai Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin baik kinerja pendapatan lokal pemerintah daerah. Pertumbuhan yang tinggi dapat menunjukkan peningkatan dalam penerimaan pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$[(PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ tahun } t-1) / (PAD \text{ tahun } t-1)] \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pendapatan Asli Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Pelampauan Penerimaan PAD

Konsep

Pelampauan Penerimaan PAD

Definisi

Pelampauan penerimaan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan target

Interpretasi

Semakin besar pelampauan penerimaan PAD, maka semakin positif kondisi keuangan daerah. Pelampauan yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengumpulkan pendapatan melebihi target yang ditetapkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t-1$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta Rupiah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pendapatan Asli Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan

Konsep

Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan

Definisi

Perubahan nilai komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pertumbuhan Dana Perimbangan, maka semakin besar sumber pendapatan tambahan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left[\frac{\text{Dana Perimbangan tahun } t - \text{Dana Perimbangan tahun } t-1}{\text{Dana Perimbangan tahun } t-1} \right] \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Perimbangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total APBD

Konsep

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total APBD

Definisi

Perbandingan antara komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap total rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total APBD, maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan eksternal. Rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pendapatan lokal pemerintah daerah mungkin tidak mencukupi untuk mendukung operasional dan program-program yang direncanakan, sehingga pemerintah daerah perlu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber-sumber eksternal lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$(\text{Dana Perimbangan} / \text{APBD}) \times 100\%$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Perimbangan, Total APBD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

Konsep

Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

Definisi

Pelampauan penerimaan komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dibandingkan dengan target

Interpretasi

Semakin besar pelampauan penerimaan dana perimbangan, maka semakin positif kondisi keuangan daerah. Pelampauan yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerima dana perimbangan melebihi target yang ditetapkan

Metode/Rumus Penghitungan

$\text{Dana Perimbangan tahun } t - \text{Dana Perimbangan tahun } t-1$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta Rupiah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Perimbangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah

Konsep

Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah

Definisi

Perbandingan antara Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Interpretasi

Semakin besar Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah, maka semakin besar keragaman sumber pendapatan daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$(\text{DBH Pajak Bukan Pajak} / \text{Pendapatan Daerah}) \times 100\%$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Pendapatan Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan

Konsep

Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan

Definisi

Perbandingan antara Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Interpretasi

Semakin besar Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan, maka semakin besar andil dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak dalam pendapatan dana perimbangan pemerintah daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$(\text{DBH Pajak Bukan Pajak} / \text{Dana Perimbangan}) \times 100\%$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Perimbangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Konsep

Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Definisi

Perubahan nilai Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, maka semakin besar pertumbuhan total penerimaan dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak) dalam pendapatan daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{[(DBH \text{ Pajak Bukan Pajak tahun } t - DBH \text{ Pajak Bukan Pajak tahun } t-1) / (DBH \text{ Pajak Bukan Pajak tahun } t-1)]}{100\%}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah

Konsep

Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah

Definisi

Perbandingan antara Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Interpretasi

Semakin besar Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah, maka semakin besar ketergantungan pendapatan daerah pada dana alokasi khusus

Metode/Rumus Penghitungan

$$(DAK / \text{Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus

Konsep

Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus

Definisi

Perubahan nilai Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pertumbuhan Dana Alokasi Khusus, maka semakin besar peningkatan dalam dana yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk alokasi khusus

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{[(DAK \text{ tahun } t - DAK \text{ tahun } t-1) / (DAK \text{ tahun } t-1)] \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Alokasi Khusus

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD

Konsep

Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD

Definisi

Perbandingan antara Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap total rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD, maka semakin besar kontribusi dana alokasi khusus dalam total pendapatan dan belanja daerah. Rasio yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada dana alokasi khusus atau dana tambahan dari pihak eksternal untuk mendukung operasional dan program-program yang dianggarkan dalam APBD

Metode/Rumus Penghitungan

$$(DAK / APBD) \times 100\%$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Alokasi Khusus, Total APBD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan

Konsep

Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan

Definisi

Perbandingan antara Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Interpretasi

Semakin besar Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan, maka semakin besar kontribusi dana alokasi khusus terhadap total pendapatan dana perimbangan pemerintah daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$(DAK / \text{Dana Perimbangan}) \times 100\%$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total APBD

Konsep

Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total APBD

Definisi

Perbandingan antara semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan terhadap total rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total APBD, maka semakin besar andil pendapatan daerah dalam pendanaan total anggaran pendapatan dan belanja daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\text{Pendapatan Daerah} / \text{APBD}) \times 100\%$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pendapatan Daerah, Total APBD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Konsep

Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Definisi

Perubahan nilai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pertumbuhan Total Pendapatan, maka semakin besar pertumbuhan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pertumbuhan yang tinggi dalam total pendapatan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan sumber daya keuangan yang lebih besar untuk mendukung operasional, program pembangunan, dan pelayanan publik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left[\frac{\text{Pendapatan Daerah tahun } t - \text{Pendapatan Daerah tahun } t-1}{\text{Pendapatan Daerah tahun } t-1} \right] \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pendapatan Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Secara Kontinyu dan Mengetahui Kecenderungan Kinerja Pelayanan Pada Masing-Masing Unit Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penanggung Jawab Kegiatan:	Sekretaris BPKAD Prov. Kaltim

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Persyaratan Prosedur Waktu Pelayanan Biaya/ Tarif Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelaksana Perilaku Pelaksana Maklumat Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Prosedur Informasi Publik
Periodisasi:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

VARIABEL 1

Nama Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Alias

Nama Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Konsep

Nama Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Definisi

Nama fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan; serta nama fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Alias

Jenis Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Konsep

Jenis Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Definisi

Jenis fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan; serta jenis fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Kantor Setda
- Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD
- Kantor Inspektorat
- Kantor Bappeda
- Kantor Dinas
- Kantor Lembaga Teknis Daerah

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Alias

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Konsep

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Definisi

Status kepemilikan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan; serta status kepemilikan fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Milik Sendiri
- Sewa
- Pinjam
- Gabung

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Nama Aset

Alias

Nama Aset

Konsep

Nama Aset

Definisi

Nama barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Aset=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jenis Aset

Alias

Jenis Aset

Konsep

Jenis Aset

Definisi

Jenis barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Aset Bergerak
- Aset Tidak Bergerak
- Aset Lainnya

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Aset=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nilai Aset

Alias

Nilai Aset

Konsep

Nilai Aset

Definisi

Nilai dari barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

Nilai Aset=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 7

Penyusutan Aset

Alias

Penyusutan Aset

Konsep

Penyusutan Aset

Definisi

Nilai penyusutan dari barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

Penyusutan Aset=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

INDIKATOR 1

Jumlah Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Konsep

Jumlah Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Definisi

Jumlah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan; serta jumlah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah gedung sarana prasarana pemerintahan, maka semakin memadai fasilitas dan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan.

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh gedung sarana prasarana pemerintahan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kantor, Menurut Status Kepemilikan

Variabel Penyusun

Nama Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan, Jenis Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan, Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Aset Daerah

Konsep

Jumlah Aset Daerah

Definisi

Jumlah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah aset daerah, maka semakin besar potensi kekayaan dan daya dukung finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh nama aset

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Aset

Variabel Penyusun

Nama Aset, Jenis Aset

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Nilai Aset Daerah

Konsep

Nilai Aset Daerah

Definisi

Nilai dari barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Interpretasi

Semakin besar nilai aset daerah, maka semakin besar potensi kekayaan dan daya dukung finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh nilai aset

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Aset

Variabel Penyusun

Nama Aset, Jenis Aset, Nilai Aset

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Nilai Penyusutan

Konsep

Nilai Penyusutan

Definisi

Nilai penyusutan dari barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Interpretasi

Semakin besar nilai penyusutan aset daerah, maka semakin tinggi peran pemeliharaan dan pengelolaan aset dalam pemerintahan daerah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh penyusutan aset

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Aset

Variabel Penyusun

Nama Aset, Jenis Aset, Nilai Aset, Penyusutan Aset

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah**

VARIABEL 1

Luas Wilayah

Alias

LUAS

Konsep

Luas Wilayah

Definisi

Luas wilayah darat provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Kabupaten/Kota

Alias

Kabupaten/Kota

Konsep

Kabupaten/Kota

Definisi

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Luas Wilayah

Konsep

Luas Wilayah

Definisi

Luas wilayah darat provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi

Semakin besar Luas Wilayah, maka semakin luas wilayah geografis dari suatu wilayah pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, atau kota.

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (LUAS)

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Wilayah, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Biro Hukum

VARIABEL 1

Peraturan Daerah yang Ditetapkan

Alias

Perda yang Ditetapkan

Konsep

Peraturan Daerah yang Ditetapkan

Definisi

Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Perda yang Ditetapkan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 2

Peraturan Gubernur yang Ditetapkan

Alias

Pergub yang Ditetapkan

Konsep

Peraturan Gubernur yang Ditetapkan

Definisi

Produk Hukum berupa Peraturan Gubernur yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Pergub yang Ditetapkan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 3

Keputusan Gubernur yang Ditetapkan

Alias

Kepgub yang Ditetapkan

Konsep

Keputusan Gubernur yang Ditetapkan

Definisi

Produk Hukum berupa Keputusan Gubernur yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Kepgub yang Ditetapkan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 4

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan

Alias

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan

Konsep

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan

Definisi

Jumlah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Kabupaten/Kota

Alias

Kabupaten/Kota

Konsep

Kabupaten/Kota

Definisi

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Produk Hukum Perda

Konsep

Jumlah Produk Hukum Perda

Definisi

Jumlah Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Perda, maka semakin banyak Perda yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Perda yang Ditetapkan})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Peraturan Daerah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Peraturan Daerah yang Ditetapkan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Produk Hukum Pergub

Konsep

Jumlah Produk Hukum Pergub

Definisi

Jumlah Produk Hukum berupa Peraturan Gubernur

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Pergub, maka semakin banyak Pergub yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Pergub yang Ditetapkan})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Peraturan Gubernur

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Peraturan Gubernur yang Ditetapkan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur

Konsep

Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur

Definisi

Jumlah Produk Hukum berupa Keputusan Gubernur

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur, maka semakin banyak Keputusan Gubernur yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Kegub yang Ditetapkan})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Keputusan Gubernur

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Keputusan Gubernur yang Ditetapkan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan

Konsep

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan

Definisi

Jumlah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Ditetapkan, maka semakin banyak produk hukum yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Produk Hukum

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Biro Organisasi dan Tata laksana

VARIABEL 1

Sekretariat Daerah

Alias

Sekretariat Daerah

Konsep

Sekretariat Daerah

Definisi

Unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur serta mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Sekretariat Daerah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Sekretariat DPRD

Alias

Sekretariat DPRD

Konsep

Sekretariat DPRD

Definisi

Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi yang dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Sekretariat DPRD=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Nama Dinas Daerah

Alias

Nama Dinas Daerah

Konsep

Nama Dinas Daerah

Definisi

Nama Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Dinas Daerah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Nama Badan Daerah

Alias

Nama Badan Daerah

Konsep

Nama Badan Daerah

Definisi

Nama Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Badan Daerah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Rumah Sakit Daerah

Alias

Nama Rumah Sakit Daerah

Konsep

Nama Rumah Sakit Daerah

Definisi

Nama Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Rumah Sakit Daerah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Alias

Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Konsep

Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Definisi

Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Perangkat Daerah

Alias

Nama Perangkat Daerah

Konsep

Nama Perangkat Daerah

Definisi

Nama unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Perangkat Daerah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Sekretariat Daerah

Konsep

Jumlah Sekretariat Daerah

Definisi

Banyaknya Unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur serta mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Interpretasi

Jumlah Sekretariat Daerah yang ada di tingkat daerah mencerminkan keberadaan sekretariat daerah pada pemerintahan daerah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Sekretariat Daerah})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Sekretariat Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Sekretariat DPRD

Konsep

Jumlah Sekretariat DPRD

Definisi

Banyaknya Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi yang dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Interpretasi

Jumlah Sekretariat DPRD yang ada di tingkat daerah mencerminkan keberadaan sekretariat DPRD pada pemerintahan daerah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Sekretariat DPRD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Sekretariat DPRD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Dinas Daerah

Konsep

Jumlah Dinas Daerah

Definisi

Banyaknya Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Dinas Daerah, maka semakin banyak dinas yang ada dalam pemerintah daerah untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai sektor dan bidang administrasi publik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Dinas Daerah})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Dinas Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Badan Daerah

Konsep

Jumlah Badan Daerah

Definisi

Banyaknya Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Badan Daerah, maka semakin banyak badan yang ada dalam pemerintah daerah untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai sektor dan bidang administrasi publik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Badan Daerah})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Badan Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Rumah Sakit Daerah

Konsep

Jumlah Rumah Sakit Daerah

Definisi

Banyaknya Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Rumah Sakit Daerah, maka semakin banyak rumah sakit yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Rumah Sakit Daerah})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Rumah Sakit Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Konsep

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Definisi

Banyaknya organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maka semakin banyak unit organisasi yang ada dalam pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam berbagai bidang administrasi publik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Perangkat Daerah

Konsep

Jumlah Perangkat Daerah

Definisi

Banyaknya unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Perangkat Daerah, maka semakin banyak unit organisasi yang ada dalam pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Perangkat Daerah})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perangkat Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Biro
Pemerintahan,
Perbatasan dan
Otonomi Daerah**

VARIABEL 1

Kerjasama Dalam Negeri

Alias

Kerjasama Dalam Negeri

Konsep

Kerjasama Dalam Negeri

Definisi

Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain maupun Pihak Ketiga di dalam negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Kerjasama Dalam Negeri=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Kerjasama Luar Negeri

Alias

Kerjasama Luar Negeri

Konsep

Kerjasama Luar Negeri

Definisi

Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain maupun Pihak Ketiga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Kerjasama Luar Negeri=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jenis Kerjasama

Alias

Jenis Kerjasama

Konsep

Jenis Kerjasama

Definisi

Penggolongan Jenis Kerjasama.
Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Kesepakatan Bersama
- Perjanjian

Aturan Validasi

- Harus terisi jika Kerjasama Dalam Negeri atau Kerjasama Luar Negeri terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Kerjasama=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Kerjasama Dalam Negeri

Konsep

Jumlah Kerjasama Dalam Negeri

Definisi

Banyaknya usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain maupun Pihak Ketiga di dalam negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, maka semakin banyak kerjasama dan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berbagai pihak di dalam negeri atau di tingkat nasional

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Kerjasama Dalam Negeri})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perjanjian

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kerjasama

Variabel Penyusun

Kerjasama Dalam Negeri, Jenis Kerjasama

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Kerjasama Luar Negeri

Konsep

Jumlah Kerjasama Luar Negeri

Definisi

Banyaknya usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain maupun Pihak Ketiga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Interpretasi

Semakin tinggi Jumlah Kerjasama Luar Negeri, maka semakin banyak kerjasama dan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berbagai pihak di luar negeri atau di tingkat internasional

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Kerjasama Luar Negeri})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

MoU / Lol

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kerjasama

Variabel Penyusun

Kerjasama Luar Negeri, Jenis Kerjasama

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Biro Perekonomian

VARIABEL 1

Badan Usaha Milik Daerah

Alias

BUMD

Konsep

Badan Usaha Milik Daerah

Definisi

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BUMD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Nama BUMD

Alias

NAMA_BUMD

Konsep

Nama BUMD

Definisi

Nama BUMD adalah identitas atau nama resmi dari BUMD yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah daerah atau entitas pemerintah setempat

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- BPD Kaltim
- Perusda Pertambangan (BKS)
- Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)
- Perusda Agro Kaltim Utara
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)
- Perusda Ketenagalistrikan
- PT, Migas Mandiri Pratama (MMP)
- PT. Jamkrida

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_BUMD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Tempat Kedudukan

Alias

TEMPAT

Konsep

Tempat Kedudukan

Definisi

Tempat kedudukan merujuk kepada lokasi berdirinya BUMD

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TEMPAT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Kegiatan Usaha BUMD

Alias

KEGIATAN_BUMD

Konsep

Kegiatan Usaha BUMD

Definisi

Kegiatan usaha BUMD adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BUMD dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan, mendukung perekonomian daerah, dan memenuhi kebutuhan layanan publik di wilayah tersebut

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KEGIATAN_BUMD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jenis Aset

Alias

JENIS_ASET

Konsep

Jenis Aset

Definisi

Jenis aset adalah klasifikasi atau kategori yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai macam aset berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu yang dimiliki oleh aset tersebut

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Aset Lancar
- Investasi dan Penyertaan
- Aset Tetap (Perolehan)
- Aset Tetap (Penyusutan)
- Aset Lainnya

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_ASET = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Sumber Modal

Alias

SUMBER_MODAL

Konsep

Sumber Modal

Definisi

Sumber Modal adalah dana atau sumber daya finansial yang digunakan oleh BUMD untuk menjalankan operasinya

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Penyertaan Modal Daerah
- Pinjaman
- Hibah
- Sumber Modal Lainnya

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

SUMBER_MODAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah

Alias

KEBIJAKAN_PENINGKATAN_INVESTASI

Konsep

Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah

Definisi

Kebijakan peningkatan investasi daerah adalah serangkaian tindakan, langkah-langkah, aturan, dan strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau entitas terkait untuk mendorong dan meningkatkan investasi di wilayah atau daerah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KEBIJAKAN_PENINGKATAN_INVESTASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Alias

JKPKDBP

Konsep

Jumlah Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Definisi

Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah dalam bidang perekonomian merujuk pada banyaknya tindakan koordinasi yang dilakukan antara berbagai pihak atau instansi yang terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di suatu daerah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JKPKDBP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Alias

JKDBP

Konsep

Jumlah Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Definisi

Jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian merujuk pada total kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengatur, mengembangkan, dan mengelola sektor ekonomi di wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JKDBP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Fasilitasi dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa

Alias

FKBIJ

Konsep

Fasilitasi dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa

Definisi

Fasilitasi dan kebijakan bidang industri dan jasa mengacu pada tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan daya saing sektor industri dan jasa dalam suatu negara atau wilayah

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

FKBIJ = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Kelompok Komoditi yang Dapat Dijaga Kestabilan Harga

Alias

KKDDKH

Konsep

Kelompok Komoditi yang Dapat Dijaga Kestabilan Harga

Definisi

Kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harga merujuk pada sekelompok barang atau produk yang memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara atau wilayah, dan pemerintah atau badan pengatur memiliki kebijakan khusus untuk menjaga harga-harga komoditas ini agar tetap stabil dan terkendali

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KKDDKH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah BUMD

Konsep

Jumlah BUMD

Definisi

Jumlah BUMD mengacu pada banyaknya badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah

Interpretasi

Banyaknya jumlah BUMD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah melalui dividen, pajak, dan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{BUMD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama BUMD, Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Aset BUMD

Konsep

Jumlah Aset BUMD

Definisi

Jumlah aset BUMD merujuk pada total nilai aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada suatu waktu tertentu

Interpretasi

Banyaknya aset BUMD dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, proyek infrastruktur, dan layanan publik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{ASET_BUMD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Triliun Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Nama BUMD

Variabel Penyusun

Nama BUMD, Jenis Aset, Aset BUMD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Modal BUMD

Konsep

Jumlah Modal BUMD

Definisi

Jumlah modal BUMD adalah total modal yang digunakan oleh pemerintah daerah atau entitas pemerintah setempat sebagai pemilik BUMD untuk mendirikan, mengembangkan, dan menjalankan perusahaan milik daerah tersebut

Interpretasi

Dengan modal yang lebih besar, BUMD memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi di berbagai sektor ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{MODAL_BUMD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Triliun Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Nama BUMD

Variabel Penyusun

Nama BUMD, Sumber Modal, Modal BUMD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Kelompok Komoditi yang Dapat Dijaga Kestabilan Harga

Konsep

Jumlah Kelompok Komoditi yang Dapat Dijaga Kestabilan Harga

Definisi

Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harga adalah istilah yang digunakan dalam konteks kebijakan ekonomi dan perdagangan untuk merujuk kepada berapa banyak kelompok atau jenis komoditi yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah atau otoritas ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas harga di pasar

Interpretasi

Banyaknya kelompok komoditas yang dapat dijaga kestabilan harganya dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KKDDKH})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok Komoditi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Komoditi yang Dapat Dijaga Kestabilan Harga

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa

Konsep

Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa

Definisi

Jumlah fasilitas dan kebijakan bidang industri dan jasa merujuk pada banyaknya tindakan, dukungan, regulasi, kebijakan, dan insentif yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait dalam rangka mengembangkan, mengatur, dan mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa dalam perekonomian suatu negara atau wilayah

Interpretasi

Semakin banyak fasilitas dan kebijakan yang mendukung sektor industri dan jasa dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (FKBIJ)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kebijakan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah

Konsep

Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah

Definisi

Kebijakan peningkatan investasi daerah adalah banyaknya langkah, strategi, peraturan, dan insentif yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau entitas pemerintah setempat untuk menarik investasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka

Interpretasi

Dengan koordinasi yang baik di antara berbagai sektor perekonomian, daerah dapat menjadi lebih kompetitif dalam menarik investasi, mengembangkan industri lokal, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (KEBIJAKAN_PENINGKATAN_INVESTASI)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kebijakan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian

Konsep

Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian

Definisi

Perbandingan antara jumlah koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian dengan jumlah kebijakan di bidang perekonomian dikali 100%

Interpretasi

Tingginya koordinasi antara pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tentunya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan komprehensif karena mengambil berbagai perspektif dan kebutuhan ke dalam pertimbangan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JKPKDBP / JKDBP) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian, Jumlah Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengumpulan Data Desa Berlistrik dan Elektrifikasi

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Manfaat: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tujuan : untuk Mendapatkan Data Rasio Elektrifikasi
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Jumlah Desa Keseluruhan Jumlah Desa Berlistrik Jumlah KK Keseluruhan Jumlah KK yang Sudah Dialiri Listrik
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) Dokumentasi
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

Survey Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penyelenggara: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim

Tujuan dan Manfaat Kegiatan:

1. Untuk Mengetahui dan Mempelajari Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Prov. Kaltim, Indeks Kepuasan Masyarakat Adalah Merupakan Gambaran Tentang Kinerja Pelayanan Unit yang Bersangkutan yang Dapat dijadikan Sebagai Bahan untuk Menetapkan Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Selanjutnya.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Antara Harapan dan Kebutuhan Dengan Pelayanan Melalui Data dan Informasi Tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Hasil Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Pelayanan Melalui Hasil Pendapat dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan yang Diberikan Oleh Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Untuk Mengetahui Kelemahan Atau kekurangan Pelayanan Dinas ESDM Prov. Kaltim Sebagai Salah Satu Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Untuk Mengetahui Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan Oleh Dinas ESDM Prov. Kaltim.
6. Adanya Data dan Informasi untuk Bahan Pertimbangan Kebijakan yang Perlu diambil Pada Waktu yang Akan Datang dan Memacu Persaingan Positif Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan.
7. Sebagai Sarana Pengawasan Bagi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Prov. Kaltim
8. Untuk Mengetahui dan Mempelajari Segala Kegiatan Pelayanan yang dilaksanakan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik Pada Dinas ESDM Prov. Kaltim Sebagai Upaya

Penanggung Jawab Kegiatan: Pemenuhan Kebutuhan Penerima Pelayanan, Maupun Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepala Dinas

Data

Variabel yang Dikumpulkan: Persyaratan Pelayanan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian
Biaya / Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Sarana dan Prasarana

Periodisasi: Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data: Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Pengamatan (Observasi)

Tingkat Penyajian yang Diharapkan: Provinsi

VARIABEL 1

Alamat

Alias

Alamat

Konsep

Alamat

Definisi

Nama orang dan tempat yang menjadi tujuan surat

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Alamat=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Energi Listrik

Alias

Jenis Energi Listrik

Konsep

Jenis Energi Listrik

Definisi

Jenis sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomassa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi

Referensi Pemilihan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- PLTG
- PLTU
- PLTD
- PLTS

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Energi Listrik=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jenis Izin Usaha Pertambangan

Alias

Jenis Izin Usaha Pertambangan

Konsep

Jenis Izin Usaha Pertambangan

Definisi

Jenis perizinan yang dimiliki oleh perusahaan dengan kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- PKP2B
- KP/IUP

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Izin Usaha Pertambangan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jenis Pertambangan

Alias

Jenis Pertambangan

Konsep

Jenis Pertambangan

Definisi

Jenis dari sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Pertambangan Batubara
- Pertambangan Migas
- Pertambangan Batuan Mineral Bukan Logam

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Pertambangan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah Desa

Alias

Jumlah Desa

Konsep

Jumlah Desa

Definisi

Banyaknya desa seluruhnya

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Desa=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah Desa yang Menggunakan Listrik

Alias

Jumlah Desa yang Menggunakan Listrik

Konsep

Jumlah Desa yang Menggunakan Listrik

Definisi

Banyaknya desa yang menggunakan sumber penerangan listrik

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif
- Isian tidak boleh lebih besar dari Jumlah Desa

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Desa yang Menggunakan Listrik=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Alias

KK_BELUM_LISTRIK

Konsep

Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Definisi

Banyaknya keluarga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

KK_BELUM_LISTRIK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN

Alias

KK_LISTRIK_NON_PLN

Konsep

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN

Definisi

Banyaknya keluarga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat

Referensi Pemilihan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Pilar Pembangunan Ekonomi, Kementerian PPN

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

KK_LISTRIK_NON_PLN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN

Alias

KK_LISTRIK_PLN

Konsep

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN

Definisi

Banyaknya keluarga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN

Referensi Pemilihan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Pilar Pembangunan Ekonomi, Kementerian PPN

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

KK_LISTRIK_PLN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Luas Izin Lahan Pertambangan

Alias

Luas Izin Lahan Pertambangan

Konsep

Luas Izin Lahan Pertambangan

Definisi

Luas Wilayah Pertambangan sebagaimana tertuang dalam izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan nol dan negatif

Kalimat Pertanyaan

Luas Izin Lahan Pertambangan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Nama Agen LPG

Alias

Nama Agen LPG

Konsep

Nama Agen LPG

Definisi

Nama koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Agen LPG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Nama Instalasi Biogas

Alias

Nama Instalasi Biogas

Konsep

Nama Instalasi Biogas

Definisi

Nama instalasi dan rangkaian alat yang terdiri dari tangki cerna (digester) dan penyaluran Biogas yang berfungsi untuk menghasilkan Biogas

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Instalasi Biogas=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Nama Pembangkit Listrik

Alias

Nama Pembangkit Listrik

Konsep

Nama Pembangkit Listrik

Definisi

Nama Pembangkit suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat

Referensi Pemilihan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Pembangkit Listrik=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Nama Perusahaan Pertambangan

Alias

Nama Perusahaan Pertambangan

Konsep

Nama Perusahaan Pertambangan

Definisi

Nama Perusahaan yang memiliki izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Perusahaan Pertambangan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Nama SPBE

Alias

Nama SPBE

Konsep

Nama SPBE

Definisi

Nama Perusahaan yang menjadi mitra PT Pertamina dalam melakukan pendistribusian elpiji

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama SPBE=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Nama SPBU

Alias

Nama SPBU

Konsep

Nama SPBU

Definisi

Nama Badan Usaha yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada wilayah penyaluran

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama SPBU=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Produksi Batubara

Alias

Produksi Batubara

Konsep

Produksi Batubara

Definisi

Produksi Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

Produksi Batubara=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Total Konsumsi Energi Final

Alias

KEF

Konsep

Total Konsumsi Energi Final

Definisi

Total energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir

Referensi Pemilihan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Pilar Pembangunan Ekonomi, Kementerian PPN

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

KEF=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Total Konsumsi Energi Terbarukan

Alias

KRBT

Konsep

Total Konsumsi Energi Terbarukan

Definisi

Total energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Referensi Pemilihan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Pilar Pembangunan Ekonomi, Kementerian PPN

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

KRBT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Rasio Elektrifikasi Listrik

Konsep

Rasio Elektrifikasi Listrik

Definisi

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Elektrifikasi Listrik, maka semakin besar persentase populasi atau wilayah yang telah teraliri listrik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left[\frac{KK_LISTRIK_NON_PLN + KK_LISTRIK_PLN}{(KK_BELUM_LISTRIK + KK_LISTRIK_NON_PLN + KK_LISTRIK_PLN)} \right] \times 100\%$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN, Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN, Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Persentase Desa Berlistrik

Konsep

Persentase Desa Berlistrik

Definisi

Persentase desa berlistrik adalah Perbandingan antara jumlah desa yang telah menggunakan energi listrik dengan jumlah desa seluruhnya

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase Desa Berlistrik, maka semakin banyak desa yang telah mendapatkan akses listrik

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Desa yang Menggunakan Listrik dibagi dengan Jumlah Desa, dikali 100 persen

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Desa yang Menggunakan Listrik, Jumlah Desa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN

Konsep

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN

Definisi

Jumlah keluarga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN

Interpretasi

Semakin banyak jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN, maka semakin besar jumlah Keluarga yang teraliri listrik oleh PLN di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN

Konsep

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN

Definisi

Jumlah keluarga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah keluarga yang menggunakan listrik non-PLN, maka semakin banyak Keluarga yang mendapatkan akses listrik dari penyedia listrik lain selain PLN

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Konsep

Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Definisi

Jumlah keluarga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik

Interpretasi

Semakin banyak jumlah keluarga yang belum menggunakan listrik, maka semakin besar jumlah Keluarga yang masih belum memiliki akses ke sumber energi listrik

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Sumber Energi Listrik

Konsep

Jumlah Sumber Energi Listrik

Definisi

Jumlah sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomassa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi

Interpretasi

Semakin banyak jumlah sumber energi listrik, maka semakin beragam jenis sumber daya atau teknologi yang digunakan dalam pembangkitan listrik

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya Nama Pembangkit Listrik dirinci menurut Jenis Energi Listrik

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Energi Listrik

Variabel Penyusun

Nama Pembangkit Listrik, Jenis Energi Listrik

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Luas Lahan Pertambangan dan Penggalian

Konsep

Luas Lahan Pertambangan dan Penggalian

Definisi

Luas dari sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Interpretasi

Semakin besar luas lahan pertambangan dan penggalian, maka semakin banyak wilayah yang digunakan untuk aktivitas ekstraksi sumber daya mineral dan bahan galian

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Luas Izin Lahan Pertambangan dirinci menurut Jenis Pertambangan

Ukuran

Luas

Satuan

Hektar

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Pertambangan

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Pertambangan, Jenis Pertambangan, Luas Izin Lahan Pertambangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Produksi Batubara

Konsep

Produksi Batubara

Definisi

Produksi pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Interpretasi

Semakin besar produksi batubara, maka semakin banyak batubara yang ditambang dan dihasilkan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Produksi Batubara

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Izin Usaha Pertambangan

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Pertambangan, Jenis Izin Usaha Pertambangan, Produksi Batubara

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Perusahaan Tambang Batubara

Konsep

Jumlah Perusahaan Tambang Batubara

Definisi

Jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perusahaan tambang batubara, maka semakin banyak unit usaha yang terlibat dalam aktivitas ekstraksi dan produksi batubara

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya Nama Perusahaan
Pertambangan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Pertambangan, Jenis Izin Usaha Pertambangan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah SPBU

Konsep

Jumlah SPBU

Definisi

Jumlah Badan Usaha yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada wilayah penyaluran

Interpretasi

Semakin banyak jumlah SPBU, maka semakin besar akses masyarakat terhadap tempat pengisian bahan bakar

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya Nama SPBU

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama SPBU, Alamat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah SPBE

Konsep

Jumlah SPBE

Definisi

Jumlah Perusahaan yang menjadi mitra PT Pertamina dalam melakukan pendistribusian elpiji

Interpretasi

Semakin banyak jumlah SPBE, maka semakin besar ketersediaan infrastruktur untuk mengisi dan mengangkut gas elpiji

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya Nama SPBE

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama SPBE, Alamat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Agen LPG

Konsep

Jumlah Agen LPG

Definisi

Jumlah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran

Interpretasi

Semakin banyak jumlah agen LPG, maka semakin besar jaringan distribusi LPG yang tersedia untuk masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya Nama Agen LPG

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Agen LPG, Alamat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan

Konsep

Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan

Definisi

Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase bauran energi baru terbarukan, maka semakin besar andil energi baru dan terbarukan dalam total konsumsi energi

Metode/Rumus Penghitungan

$$(KRBT / KEF) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Total Konsumsi Energi Terbarukan, Total Konsumsi Energi Final

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah Instalasi Biogas

Konsep

Jumlah Instalasi Biogas

Definisi

Jumlah instalasi dan rangkaian alat yang terdiri dari tangki cerna (digester) dan penyaluran Biogas yang berfungsi untuk menghasilkan Biogas

Interpretasi

Semakin banyak jumlah instalasi biogas, maka semakin banyak fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya Nama Instalasi Biogas

Ukuran

Jumlah

Satuan

Buah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Instalasi Biogas, Alamat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Kehutanan

VARIABEL 1

Nama Perusahaan

Alias

NM_PERUSAHAAN

Konsep

Nama Perusahaan

Definisi

Nama perusahaan kehutanan adalah nama resmi yang diidentifikasi dan digunakan oleh perusahaan yang beroperasi dalam sektor kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan, memproduksi kayu, produk hasil hutan, atau melakukan kegiatan terkait lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM_PERUSAHAAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Izin

Alias

JENIS_IZIN

Konsep

Jenis Izin

Definisi

Jenis izin kehutanan adalah berbagai bentuk persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas terkait untuk mengizinkan kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya hutan secara sah dan sesuai regulasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Hutan Alam
- Hutan Tanam Industri

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_IZIN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Wilayah Hak Pengusahaan Hutan

Alias

WILAYAH_HPH

Konsep

Wilayah Hak Pengusahaan Hutan

Definisi

Wilayah hak penguasaan hutan adalah area tertentu yang secara hukum diizinkan untuk dikelola, dimanfaatkan, atau diawasi oleh individu atau entitas berdasarkan hak legal atau perizinan yang sah dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

WILAYAH_HPH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Produksi Kayu Bulat

Alias

PROD_KAYU_BULAT

Konsep

Produksi Kayu Bulat

Definisi

Produksi kayu bulat adalah total kuantitas kayu yang dihasilkan dalam bentuk batang utuh dari kegiatan penebangan atau pengolahan kayu dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

PROD_KAYU_BULAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Perusahaan Kayu Olahan

Alias

NM_PERUSAHAAN_KAYU_OLAHAN

Konsep

Nama Perusahaan Kayu Olahan

Definisi

Nama perusahaan kayu olahan adalah nama yang digunakan oleh entitas atau bisnis yang terlibat dalam proses pengolahan kayu mentah menjadi produk olahan kayu

Referensi Pemilihan

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan Dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM_PERUSAHAAN_KAYU_OLAHAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jenis Kayu Olahan

Alias

JENIS_KAYU_OLAHAN

Konsep

Jenis Kayu Olahan

Definisi

Jenis kayu olahan merujuk pada berbagai varietas kayu yang telah melalui proses pengolahan, seperti pemotongan, pengeringan, dan penggergajian, dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri, konstruksi, dan manufaktur

Referensi Pemilihan

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan Dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Kayu Lapis | - Block Board |
| - Veneer | - Moulding |
| - Kayu Gergajian | - Secondary Process |
| - Serpih Kayu | Plywood |
| - Bare Core/Board | |

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_KAYU_OLAHAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Produksi Kayu Olahan

Alias

PROD_KAYU_OLAHAN

Konsep

Produksi Kayu Olahan

Definisi

Produksi kayu olahan adalah total jumlah kayu yang telah melalui proses pengolahan seperti pemotongan, pengeringan, dan penggergajian, dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri, konstruksi, dan manufaktur dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan Dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

PROD_KAYU_OLAHAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Hasil Hutan Ikutan

Alias

HASIL_HUTAN_IKUTAN

Konsep

Hasil Hutan Ikutan

Definisi

Hasil hutan ikutan adalah berbagai produk atau barang yang dihasilkan selain kayu dari aktivitas pengelolaan hutan, seperti getah, rotan, buah-buahan hutan, rempah-rempah, madu, dan bahan non-kayu lainnya, yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat serta industri

Referensi Pemilihan

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan Dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

HASIL_HUTAN_IKUTAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Nama Perusahaan Industri Primer Hasil Hutan

Alias

NM__PERUSAHAAN_INDUSTRI_PRIMER_HASIL_HUTAN

Konsep

Nama Perusahaan Industri Primer Hasil Hutan

Definisi

Nama perusahaan industri primer hasil hutan adalah nama entitas atau bisnis yang terlibat dalam pengolahan langsung produk-produk hasil hutan dan pabrik olahan hasil hutan non-kayu lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM__PERUSAHAAN_INDUSTRI_PRIMER_HASIL_HUTAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Luas Areal Hutan yang Terbakar

Alias

LUAS_HUTAN_TERBAKAR

Konsep

Luas Areal Hutan yang Terbakar

Definisi

Luas areal hutan yang terbakar adalah total luas wilayah hutan yang terkena kebakaran dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, mencerminkan dampak kebakaran terhadap ekosistem hutan dan lingkungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_HUTAN_TERBAKAR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Korban Jiwa Kebakaran Hutan

Alias

JUMLAH_KORBAN_JIWA_KARHUT

Konsep

Jumlah Korban Jiwa Kebakaran Hutan

Definisi

Jumlah korban jiwa kebakaran hutan adalah total banyaknya individu yang kehilangan nyawa akibat kebakaran yang melibatkan wilayah hutan dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_KORBAN_JIWA_KARHUT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Titik Hotspot Kebakaran

Alias

TITIK_HOTSPOT

Konsep

Titik Hotspot Kebakaran

Definisi

Titik hotspot kebakaran adalah titik koordinat yang teridentifikasi sebagai lokasi potensial atau tanda-tanda kebakaran aktif dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, yang sering digunakan untuk memantau dan mengidentifikasi area rawan kebakaran hutan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

TITIK_HOTSPOT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Alias

KARHUTLA

Konsep

Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Definisi

Kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah frekuensi insiden terjadinya kebakaran yang melibatkan wilayah hutan dan lahan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KARHUTLA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Luas Penanaman Mangrove

Alias

LUAS_TANAM_MANGROVE

Konsep

Luas Penanaman Mangrove

Definisi

Luas penanaman mangrove adalah total luas area yang telah ditanami pohon mangrove dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, mencerminkan upaya restorasi dan pelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian dari konservasi lingkungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_TANAM_MANGROVE=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Nama Desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

Alias

NM_DESA_MISKIN_DGN_USAHA_EKONOMI_NON_KAYU

Konsep

Nama Desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

Definisi

Nama Desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM_DESA_MISKIN_DGN_USAHA_EKONOMI_NON_KAYU=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

NIP Polisi Hutan

Alias

NIP_POLISI_HUTAN

Konsep

NIP Polisi Hutan

Definisi

Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk Polisi Hutan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Panjangnya harus tepat 18 digit

Kalimat Pertanyaan

NIP_POLISI_HUTAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Nama Kesatuan Pengelolaan Kehutanan

Alias

NAMA_KPH

Konsep

Nama Kesatuan Pengelolaan Kehutanan

Definisi

Nama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah nama wilayah hutan yang ditetapkan dan dikelola secara terintegrasi oleh pihak berwenang dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 6-2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KPH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Luas Lahan Hutan

Alias

LUAS_HUTAN

Konsep

Luas Lahan Hutan

Definisi

Luas lahan hutan adalah total luas wilayah yang ditutupi oleh hutan, termasuk berbagai jenis hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan lainnya, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_HUTAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jenis Hutan

Alias

JENIS_HUTAN

Konsep

Jenis Hutan

Definisi

Jenis hutan adalah jenis dari wilayah yang ditutupi oleh hutan, termasuk berbagai jenis hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan lainnya, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Hutan Lindung
- Hutan Suaka Alam
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi Terbatas
- Tubuh Air
- Hutan Produksi yang dapat dikonservasi
- Areal Penggunaan Lain

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_HUTAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Nama Kawasan Lindung

Alias

NAMA_KAWASAN_LINDUNG

Konsep

Nama Kawasan Lindung

Definisi

Nama kawasan lindung adalah nama wilayah yang ditetapkan untuk perlindungan alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem dengan tujuan konservasi dan pelestarian, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KAWASAN_LINDUNG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jenis Kawasan Lindung

Alias

JENIS_KAWASAN_LINDUNG

Konsep

Jenis Kawasan Lindung

Definisi

Jenis kawasan lindung adalah jenis wilayah yang ditetapkan untuk perlindungan alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem dengan tujuan konservasi dan pelestarian, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Taman Nasional
- Cagar Alam
- Hutan Suaka Alam
- Hutan Lindung
- Taman Hutan Raya
- Kebun Raya

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_KAWASAN_LINDUNG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Kehutanan

Konsep

Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Kehutanan

Definisi

Jumlah izin untuk hak penguasaan kehutanan adalah total persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas berwenang kepada perusahaan untuk mengelola, memanfaatkan, atau memiliki wilayah hutan tertentu sesuai dengan ketentuan dan tujuan pengelolaan hutan yang ditetapkan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah izin untuk hak pengusahaan kehutanan, maka semakin tinggi potensi aktivitas eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NM_PERUSAHAAN) WHERE  
(JENIS_IZIN NOT BLANK)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Izin Perusahaan

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Jenis Izin, Wilayah Hak Pengusahaan Hutan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Produksi Kayu Bulat

Konsep

Jumlah Produksi Kayu Bulat

Definisi

Jumlah produksi kayu bulat adalah total kuantitas kayu yang dihasilkan dalam bentuk bulat (batang utuh) dari aktivitas penebangan atau pengolahan kayu dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi kayu bulat mengindikasikan semakin tingginya hasil penebangan atau pengolahan kayu dalam bentuk batang utuh, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap industri kayu dan bahan baku dalam berbagai sektor

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(PROD_KAYU_BULAT) SORT BY  
(JENIS_IZIN)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

meter kubik

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Izin Perusahaan

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Jenis Izin, Produksi Kayu Bulat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Produksi Kayu Olahan

Konsep

Jumlah Produksi Kayu Olahan

Definisi

Jumlah produksi kayu olahan adalah total kuantitas kayu yang telah melalui proses pengolahan seperti pemotongan, pengeringan, penggergajian, atau pemrosesan lainnya sehingga siap digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti konstruksi, furnitur, atau industri lainnya, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi kayu olahan mengindikasikan semakin tingginya produksi kayu yang telah melalui proses pengolahan seperti pemotongan, pengeringan, dan penggergajian, siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksi

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(PROD_KAYU_OLAHAN) SORT BY  
(JENIS_KAYU_OLAHAN)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

meter kubik

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kayu Olahan

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Kayu Olahan, Jenis Kayu Olahan, Produksi Kayu Olahan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Hasil Hutan Ikutan

Konsep

Jumlah Hasil Hutan Ikutan

Definisi

Jumlah hasil hutan ikutan adalah total berbagai produk atau barang yang dihasilkan selain kayu dari kegiatan pengelolaan hutan, seperti getah, rotan, buah-buahan hutan, dan produk non-kayu lainnya, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah hasil hutan ikutan menggambarkan semakin tingginya berbagai produk atau barang yang dihasilkan selain kayu dari kegiatan pengelolaan hutan, seperti getah, rotan, buah-buahan hutan, dan produk non-kayu lainnya, yang dapat memberikan nilai ekonomi dan kontribusi terhadap perekonomian lokal

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(HASIL_HUTAN_IKUTAN)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Hasil Hutan Ikutan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Industri Primer Hasil Hutan

Konsep

Jumlah Industri Primer Hasil Hutan

Definisi

Jumlah industri primer hasil hutan adalah total banyaknya industri atau usaha yang berfokus pada pengolahan langsung produk-produk hasil hutan, seperti pabrik penggergajian kayu, pabrik olahan hasil hutan non-kayu, dan sejenisnya, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah industri primer hasil hutan menunjukkan semakin banyaknya industri atau usaha yang langsung terlibat dalam pengolahan produk-produk hasil hutan, seperti pabrik penggergajian kayu, pabrik olahan hasil hutan non-kayu, dan sejenisnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(NM_PERUSAHAAN_INDUSTRI_PRIMER_HASIL_HUTAN)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Industri Primer Hasil Hutan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Luas Areal Hutan yang Terbakar

Konsep

Luas Areal Hutan yang Terbakar

Definisi

Luas areal hutan yang terbakar adalah total luas wilayah hutan yang terkena kebakaran dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, mencerminkan dampak kebakaran terhadap ekosistem hutan dan lingkungan

Interpretasi

Semakin besar luas areal hutan yang terbakar menunjukkan semakin luasnya wilayah hutan yang terkena dampak kebakaran

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(LUAS_HUTAN_TERBAKAR)$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Areal Hutan yang Terbakar

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Korban Jiwa Kebakaran Hutan

Konsep

Jumlah Korban Jiwa Kebakaran Hutan

Definisi

Jumlah korban jiwa kebakaran hutan adalah total banyaknya individu yang kehilangan nyawa akibat kebakaran yang melibatkan wilayah hutan dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah korban jiwa kebakaran hutan menunjukkan semakin seriusnya dampak kebakaran terhadap manusia dan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{JUMLAH_KORBAN_JIWA_KARHUT})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Jiwa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Korban Jiwa Kebakaran Hutan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Titik Hotspot Kebakaran

Konsep

Jumlah Titik Hotspot Kebakaran

Definisi

Jumlah titik hotspot kebakaran adalah total banyaknya titik koordinat yang teridentifikasi sebagai lokasi potensial atau tanda-tanda kebakaran aktif dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, yang sering digunakan untuk memantau dan mengidentifikasi area rawan kebakaran hutan

Interpretasi

Semakin besar jumlah titik hotspot kebakaran mengindikasikan semakin tingginya potensi kebakaran aktif dalam wilayah tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{TITIK_HOTSPOT})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lokasi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Titik Hotspot Kebakaran

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Konsep

Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Definisi

Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah total banyaknya insiden kebakaran yang terjadi pada wilayah hutan dan lahan dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan mencerminkan semakin tingginya frekuensi insiden kebakaran yang terjadi pada wilayah hutan dan lahan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{KARHUTLA})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Luas Penanaman Mangrove

Konsep

Luas Penanaman Mangrove

Definisi

Luas penanaman mangrove adalah total luas area yang telah ditanami pohon mangrove dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, mencerminkan upaya restorasi dan pelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian dari konservasi lingkungan

Interpretasi

Semakin besar luas penanaman mangrove menunjukkan semakin meluasnya upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{LUAS_TANAM_MANGROVE})$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Penanaman Mangrove

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

Konsep

Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

Definisi

Jumlah desa miskin di sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non-kayu adalah total banyaknya desa yang mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis produk-produk hutan non-kayu sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut

Interpretasi

Semakin besar jumlah desa miskin di sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non-kayu menunjukkan semakin besar peluang untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(NM_DESA_MISKIN_DGN_USAHA_EKONOMI_NON_KAYU)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Polisi Hutan

Konsep

Jumlah Polisi Hutan

Definisi

Jumlah polisi hutan adalah total banyaknya personel yang ditugaskan oleh pihak berwenang untuk melakukan tugas penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan terhadap hutan serta sumber daya alam yang terkait, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah polisi hutan menggambarkan semakin meningkatnya upaya untuk penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan terhadap hutan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(NIP_POLISI_HUTAN)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

NIP Polisi Hutan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Konsep

Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Definisi

Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah total banyaknya wilayah hutan yang ditetapkan dan dikelola secara terintegrasi oleh pihak berwenang dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin banyak jumlah KPH yang ada di suatu wilayah, maka semakin meningkatnya upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{NAMA_KPH})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kesatuan Pengelolaan Kehutanan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Luas Lahan Hutan

Konsep

Luas Lahan Hutan

Definisi

Luas lahan hutan adalah total luas wilayah yang ditutupi oleh hutan, termasuk berbagai jenis hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan lainnya, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar luas lahan hutan, semakin besar kontribusi hutan terhadap ekosistem dan keseimbangan lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{LUAS_HUTAN})$ SORT BY
(JENIS_HUTAN)

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Hutan

Variabel Penyusun

Luas Lahan Hutan, Jenis Hutan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Kawasan Lindung

Konsep

Jumlah Kawasan Lindung

Definisi

Jumlah kawasan lindung adalah total banyaknya wilayah yang ditetapkan untuk perlindungan alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem dengan tujuan konservasi dan pelestarian, dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah kawasan lindung, semakin tinggi upaya konservasi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistem alam di suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_KAWASAN_LINDUNG) SORT  
BY (JENIS_KAWASAN_LINDUNG)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kawasan Lindung

Variabel Penyusun

Nama Kawasan Lindung, Jenis Kawasan Lindung

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kompilasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Mendapatkan Data Diri Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang Terdiri dari Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Ikan, Petambak Garam, dan Pemasar Antar Pelabuhan Serta Data Sarana yang Mendukung Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan.
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Nama NIK Jenis Profesi Utama Alamat Tahun Mulai Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan Total Pendapatan Kotor Tahunan Sarana yang dimiliki Pelaku Usaha Pelaku Pendukung
Periodisasi:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Aplikasi Portal Data KKP
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

Kompilasi Produksi Perikanan Tangkap

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Data Statistik Perikanan Tangkap Memiliki Peran Strategis untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan Secara Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Visi Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan. Selain Itu Data Statistik Perikanan Tangkap Juga Dibutuhkan Sebagai Bahan Justifikasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Tercantum Dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Rumah Tangga Perikanan Tangkap Trip Volume Produksi Nilai Produksi Harga Rata-Rata Jenis Ikan Daerah Pengangkapan Ikan Jenis Kapal Alat Penangkap Ikan (API) Ukuran Kapal Pelabuhan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Kabupaten/Kota Provinsi Jenis Perairan Kapal Penangkap Ikan
Periodisasi:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Aplikasi Portal Data KKP
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

Kompilasi Produksi Perikanan Budidaya

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Mendapatkan Data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Beserta Data-Data yang Terkait Dengan Produksi Seperti Penggunaan Sarana Produksi (Benih Atau Induk , Pakan,Pupuk dan Lahan) Dengan Menggunakan Kaidah-Kaidah Statistik yang Berlaku Sehingga Data yang dihasilkan Memenuhi Tingkat Validitas Tertentu dan Terlegitimasi Oleh Stakeholder Terkait.
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kabupaten/Kota Jenis Budidaya Ikan Hias Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan Jenis Pembenihan Ikan Jenis Pembesaran Ikan
Periodisasi:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Aplikasi Portal Data KKP
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	<p>Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk Mengetahuai dan Mempelajari Tingkat Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur2. Untuk Mengetahui Perbandingan Antara Harapan dan Kebutuhan Dengan Pelayanan Melalui Data dan Informasi Tentang Tingkat Kepuasan yang diperoleh dari Hasil Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Memperoleh Pelayanan dari Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik3. Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Pelayanan Melalui Hasil Pendapat dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan yang Diberikan Oleh Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik4. Untuk Mengetahui Kelemahan Atau kekurangan Pelayanan Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur5. Untuk Mengetahui Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur6. Sebagai Sarana Pengawasan Masyarakat Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.7. Indek Kepuasan Masyarakat Adalah Merupakan Gambaran Tentang Kinerja Pelayanan Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang Dapat dijadikan Sebagai Bahan untuk Menetapkan Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Selanjutnya
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Kemudahan Prosedur Pelayanan Kecepatan Waktu Dalam Pemberian Pelayanan Kewajaran Biaya/Tarif Dalam Pelayanan Kesesuaian Produk Pelayanan Antara yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Potensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan Prilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan Maklumat Pelayanan Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
Periodisasi:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Google Form
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

VARIABEL 1

Luas Wilayah Penangkapan Ikan

Alias

LUAS_WIL_TANGKAP_IKAN

Konsep

Luas Wilayah Penangkapan Ikan

Definisi

Luas wilayah penangkapan ikan adalah ukuran total area geografis di mana aktivitas penangkapan ikan dilakukan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LUAS_WIL_TANGKAP_IKAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Luas Lahan Ekosistem Laut

Alias

LUAS_LAHAN_EKOSISTEM_LAUT

Konsep

Luas Lahan Ekosistem Laut

Definisi

Luas lahan ekosistem laut merujuk pada total luas area perairan laut yang meliputi berbagai komponen biotik dan abiotik serta interaksi ekologis di dalamnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LUAS_LAHAN_EKOSISTEM_LAUT= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jenis Ekosistem

Alias

JENIS_EKOSISTEM

Konsep

Jenis Ekosistem

Definisi

Jenis ekosistem adalah berbagai lingkungan perairan laut, seperti terumbu karang, laut dalam, pesisir, zona pelagik, dan zona hadal, yang memiliki ciri-ciri dan organisme khas sesuai dengan kedalaman, suhu, dan kondisi lingkungan di masing-masing wilayah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Hutan Bakau / Mangrove
- Terumbu Karang

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_EKOSISTEM= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Luas Lahan Perikanan Budidaya

Alias

LUAS_LAHAN_IKAN_BUDIDAYA

Konsep

Luas Lahan Perikanan Budidaya

Definisi

Luas lahan perikanan budidaya adalah ukuran total area perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan atau organisme akuatik lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Isian tidak lebih dari
LUAS_WIL_TANGKAP_IKAN

Kalimat Pertanyaan

LUAS_LAHAN_IKAN_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Luas Perairan Umum

Alias

LUAS_PERAIRAN_UMUM

Konsep

Luas Perairan Umum

Definisi

Luas perairan umum mengacu pada total area perairan yang tidak termasuk dalam kepemilikan pribadi dan umumnya diatur oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Isian tidak lebih dari
LUAS_WIL_TANGKAP_IKAN

Kalimat Pertanyaan

LUAS_PERAIRAN_UMUM= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nama Kabupaten / Kota

Alias

NAMA_KABKOTA

Konsep

Nama Kabupaten / Kota

Definisi

Nama kabupaten dan kota adalah istilah untuk unit-unit administratif dalam pemerintahan yang mengatur wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Harus Terisi dengan Nama Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KABKOTA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jenis Perairan Umum

Alias

JENIS_PERAIRAN_UMUM

Konsep

Jenis Perairan Umum

Definisi

Jenis perairan umum merujuk pada berbagai tipe perairan seperti sungai, danau, laut, dan pantai yang diakui sebagai bagian dari kepemilikan publik dan biasanya diatur oleh undang-undang atau regulasi pemerintah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PERAIRAN_UMUM= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap

Alias

JUM_NELAYAN_IKAN_TANGKAP

Konsep

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap

Definisi

Jumlah nelayan perikanan tangkap mengacu pada jumlah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan menangkap ikan dan sumber daya akuatik lainnya dari perairan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Isian tidak lebih dari JUM_PENDUDUK

Kalimat Pertanyaan

JUM_NELAYAN_IKAN_TANGKAP= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Status Nelayan

Alias

STAT_NELAYAN

Konsep

Status Nelayan

Definisi

Status nelayan melibatkan tiga kategori: nelayan penuh waktu yang fokus pada tangkapan ikan sebagai pekerjaan utama, nelayan sambilan utama yang memiliki pekerjaan lain selain menangkap ikan, dan nelayan sambilan tambahan yang menangkap ikan sebagai pendapatan tambahan dari pekerjaan lain

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Nelayan Penuh
- Nelayan Sambilan Utama
- Nelayan Sambilan Tambahan

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

STAT_NELAYAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap

Alias

JUM_RT_IKAN_TANGKAP

Konsep

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap

Definisi

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap mengacu pada total kelompok keluarga atau rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_RT_IKAN_TANGKAP= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jenis Perikanan Tangkap

Alias

JENIS_IKAN_TANGKAP

Konsep

Jenis Perikanan Tangkap

Definisi

Jenis perikanan tangkap yang dapat dibedakan menjadi perikanan laut dan perikanan perairan umum

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Perikanan Laut
- Perikanan Perairan Umum

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_IKAN_TANGKAP= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Armada Perikanan Tangkap

Alias

JUM_ARMADA_IKAN_TANGKAP

Konsep

Jumlah Armada Perikanan Tangkap

Definisi

Jumlah armada perikanan tangkap mengacu pada total jumlah kapal atau alat penangkapan ikan yang digunakan dalam kegiatan perikanan tangkap

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_ARMADA_IKAN_TANGKAP= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jenis Kapal

Alias

JENIS_KAPAL

Konsep

Jenis Kapal

Definisi

Jenis kapal dalam hal ini mencakup perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor yang digunakan dalam kegiatan perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Perahu Tanpa Motor
- Perahu Motor Tempel
- Kapal Motor

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_KAPAL= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Produksi Perikanan Tangkap

Alias

PROD_IKAN_TANGKAP

Konsep

Produksi Perikanan Tangkap

Definisi

Produksi perikanan tangkap mengacu pada total kuantitas ikan dan sumber daya akuatik lainnya yang berhasil ditangkap dari perairan laut dan perairan umum dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROD_IKAN_TANGKAP= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jenis Ikan

Alias

JENIS_IKAN

Konsep

Jenis Ikan

Definisi

Jenis ikan mencakup berbagai spesies ikan yang dapat ditemui di perairan laut dan perairan umum

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Harus Terisi dengan Nama Ikan

Kalimat Pertanyaan

JENIS_IKAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Alias

NILAI_PROD_IKAN_TANGKAP

Konsep

Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Definisi

Nilai produksi perikanan tangkap merujuk pada total nilai ekonomi dari hasil tangkapan ikan dan sumber daya akuatik lainnya yang berhasil ditangkap dari perairan laut dan perairan umum dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NILAI_PROD_IKAN_TANGKAP= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Pembudidaya

Alias

JUM_PEMBUDIDAYA

Konsep

Jumlah Pembudidaya

Definisi

Jumlah pembudidaya merujuk pada total individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan budidaya ikan atau organisme akuatik lainnya di perairan seperti kolam, tambak, atau karamba

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Isian tidak lebih dari JUM_PENDUDUK

Kalimat Pertanyaan

JUM_PEMBUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya

Alias

JUM_RT_IKAN_BUDIDAYA

Konsep

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya

Definisi

Jumlah rumah tangga perikanan budidaya merujuk pada total kelompok keluarga atau rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan budidaya ikan atau organisme akuatik lainnya di perairan seperti kolam, tambak, atau karamba

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_RT_IKAN_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jenis Perikanan Budidaya

Alias

JENIS_IKAN_BUDIDAYA

Konsep

Jenis Perikanan Budidaya

Definisi

Jenis perikanan budidaya mencakup budidaya di perairan umum, tambak, kolam, keramba, dan berbagai metode lainnya yang melibatkan penangkapan ikan atau organisme akuatik dalam lingkungan yang dikontrol untuk tujuan produksi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Perairan Umum
- Tambak
- Kolam
- Keramba
- Budidaya Laut / Pantai
- Budidaya Sawah

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_IKAN_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Armada Perikanan Budidaya

Alias

JUM_ARMADA_IKAN_BUDIDAYA

Konsep

Jumlah Armada Perikanan Budidaya

Definisi

Jumlah armada perikanan budidaya mengacu pada total jumlah peralatan atau sarana yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan atau organisme akuatik, seperti kapal atau keramba, dalam perairan seperti kolam, tambak, atau karamba

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_ARMADA_IKAN_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Produksi Perikanan Budidaya

Alias

PROD_IKAN_BUDIDAYA

Konsep

Produksi Perikanan Budidaya

Definisi

Produksi perikanan budidaya merujuk pada total kuantitas ikan atau organisme akuatik lainnya yang berhasil dihasilkan dari kegiatan budidaya di perairan seperti kolam, tambak, keramba, atau metode lainnya dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROD_IKAN_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Alias

NILAI_PROD_IKAN_BUDIDAYA

Konsep

Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Definisi

Nilai produksi perikanan budidaya merujuk pada total nilai ekonomi dari hasil produksi ikan atau organisme akuatik lainnya yang dihasilkan dari kegiatan budidaya di perairan seperti kolam, tambak, keramba, atau metode lainnya dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NILAI_PROD_IKAN_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Nama UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Alias

NAMA_UMKM_OLAH_IKAN_TAWAR

Konsep

Nama UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Definisi

Nama usaha mikro, kecil, dan menengah yang berfokus pada kegiatan pengolahan ikan dan produk-produk akuatik lainnya yang berasal dari perairan air tawar, seperti sungai, danau, atau kolam budidaya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_UMKM_OLAH_IKAN_TAWAR= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Alias

OMSET_UMKM_OLAH_IKAN_TAWAR

Konsep

Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Definisi

Omset UMKM pengolahan perikanan air tawar mengacu pada total pendapatan atau hasil penjualan dari produk-produk olahan ikan dan sumber daya akuatik lainnya yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dalam periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

OMSET_UMKM_OLAH_IKAN_TAWAR= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Nama UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Alias

NAMA_UMKM_OLAH_IKAN_LAUT

Konsep

Nama UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Definisi

Nama usaha mikro, kecil, dan menengah yang fokus pada kegiatan pengolahan ikan dan produk-produk akuatik lainnya yang berasal dari perairan laut, seperti laut terbuka, pesisir, atau zona pesisir

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_UMKM_OLAH_IKAN_LAUT= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Alias

OMSET_UMKM_OLAH_IKAN_LAUT

Konsep

Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Definisi

Omset UMKM pengolahan perikanan air laut mengacu pada total pendapatan atau hasil penjualan dari produk-produk olahan ikan dan sumber daya akuatik lainnya yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dalam periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

OMSET_UMKM_OLAH_IKAN_LAUT= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Nama Balai Benih Ikan

Alias

NAMA_BBI

Konsep

Nama Balai Benih Ikan

Definisi

Nama lembaga yang bertanggung jawab untuk produksi, pemeliharaan, dan distribusi bibit ikan yang berkualitas guna mendukung kegiatan perikanan budidaya dan pelestarian sumber daya ikan di perairan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_BBI= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Jumlah Produksi Usaha Pembenuhan Balai Benih Ikan

Alias

JUM_PROD_PEMBENIHAN_BBI

Konsep

Jumlah Produksi Usaha Pembenuhan Balai Benih Ikan

Definisi

Jumlah produksi usaha pembenuhan balai benih ikan merujuk pada total kuantitas bibit ikan yang dihasilkan dari kegiatan pembenuhan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROD_PEMBENIHAN_BBI= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 29

Nilai Produksi Usaha Pembenihan Balai Benih Ikan

Alias

NILAI_PROD_PEMBENIHAN_BBI

Konsep

Nilai Produksi Usaha Pembenihan Balai Benih Ikan

Definisi

Nilai produksi usaha pembenihan balai benih ikan mengacu pada total nilai ekonomi dari bibit ikan yang dihasilkan dari kegiatan pembenihan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NILAI_PROD_PEMBENIHAN_BBI= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 30

Produksi Ikan

Alias

PROD_IKAN

Konsep

Produksi Ikan

Definisi

Produksi ikan adalah kuantitas keseluruhan ikan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan perikanan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROD_IKAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 31

Nama Kelompok Nelayan

Alias

NAMA_KEL_NELAYAN

Konsep

Nama Kelompok Nelayan

Definisi

Nama kelompok nelayan adalah istilah yang merujuk pada suatu kelompok individu atau masyarakat nelayan yang bekerja sama dalam kegiatan penangkapan ikan atau sumber daya akuatik lainnya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akses ke sumber daya, dan keberdayaan nelayan secara kolektif

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KEL_NELAYAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 32

Wilayah Target Daerah Produksi Ikan

Alias

WIL_TARGET_PROD_IKAN

Konsep

Wilayah Target Daerah Produksi Ikan

Definisi

Wilayah target daerah produksi ikan merujuk pada area geografis atau lokasi tertentu yang diidentifikasi sebagai fokus utama kegiatan produksi ikan, baik melalui budidaya maupun penangkapan ikan, dengan tujuan mengoptimalkan hasil produksi dan keberlanjutan sumber daya akuatik

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Perikanan Tangkap
- Perikanan Budidaya

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

WIL_TARGET_PROD_IKAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 33

Jenis Perikanan

Alias

JENIS_PERIKANAN

Konsep

Jenis Perikanan

Definisi

Jenis perikanan terbagi menjadi perikanan tangkap, yang melibatkan penangkapan ikan dari perairan alami, dan perikanan budidaya (akuakultur), yang mencakup budidaya ikan dalam lingkungan terkontrol

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PERIKANAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 34

Jenis Bantuan yang Diterima

Alias

JENIS_BANTUAN

Konsep

Jenis Bantuan yang Diterima

Definisi

Jenis bantuan yang diterima adalah berbagai bentuk dukungan teknis, pendidikan, peralatan penangkapan ikan, akses pemasaran, bantuan modal finansial, pelatihan berkelanjutan, dan program-program pengembangan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan aktivitas nelayan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_BANTUAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 35

Nama Kelompok Pembudidaya Ikan

Alias

NAMA_KEL_BUDIDAYA

Konsep

Nama Kelompok Pembudidaya Ikan

Definisi

Nama kelompok pembudidaya ikan adalah istilah yang merujuk pada nama atau identitas yang digunakan oleh sekelompok individu atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan budidaya ikan atau organisme akuatik lainnya, dengan tujuan memperkuat kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mengoptimalkan hasil produksi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KEL_BUDIDAYA= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 36

Nama Tempat Pelelangan Ikan

Alias

NAMA_TPI

Konsep

Nama Tempat Pelelangan Ikan

Definisi

Nama tempat pelelangan ikan adalah istilah yang merujuk pada identitas atau nama lokasi fisik di mana proses pelelangan ikan dan produk-produk akuatik lainnya dilakukan, biasanya untuk mendapatkan harga tertinggi melalui penawaran oleh pembeli atau pedagang

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_TPI= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 37

Nama Pangkalan Pendaratan Ikan

Alias

NAMA_PPI

Konsep

Nama Pangkalan Pendaratan Ikan

Definisi

Nama pangkalan pendaratan ikan adalah istilah yang merujuk pada identitas atau nama lokasi fisik tempat ikan dan hasil tangkapan akuatik lainnya didaratkan setelah proses penangkapan, di mana ikan diurai, dikategorikan, dan dipersiapkan untuk distribusi dan penjualan lebih lanjut

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PPI= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 38

Ketersediaan Ikan

Alias

KETERSEDIAAN

Konsep

Ketersediaan Ikan

Definisi

Ketersediaan ikan adalah tingkat dan jumlah ikan yang tersedia dalam suatu wilayah atau perairan pada suatu periode waktu tertentu, yang mencakup populasi ikan yang dapat ditangkap atau diambil dari lingkungan perairan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KETERSEDIAAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 39

Total Konsumsi Ikan

Alias

TOTAL_KONSUMSLIKAN

Konsep

Total Konsumsi Ikan

Definisi

Total konsumsi ikan adalah jumlah keseluruhan ikan yang dikonsumsi oleh individu atau masyarakat dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, termasuk ikan yang dimasak, diolah, atau dihidangkan sebagai bagian dari makanan.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TOTAL_KONSUMSLIKAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 40

Jumlah Penduduk

Alias

JUM_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah penduduk adalah total keseluruhan individu yang tinggal atau berada dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu pada suatu waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PENDUDUK= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 41

Volume Ikan Diekspor

Alias

VOL_IKAN_EKSPOR

Konsep

Volume Ikan Diekspor

Definisi

Volume ikan diekspor adalah jumlah kuantitas keseluruhan ikan atau produk ikan yang dijual dan dikirim ke luar negeri dari suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

VOL_IKAN_EKSPOR= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 42

Nilai Ekspor Ikan

Alias

NILAI_IKAN_EKSPOR

Konsep

Nilai Ekspor Ikan

Definisi

Nilai ekspor ikan mengacu pada total nilai ekonomi dari ikan atau produk ikan yang dijual dan dikirim ke luar negeri dari suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NILAI_IKAN_EKSPOR= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 43

Luas Terumbu Karang

Alias

LUAS_TERUMBU

Konsep

Luas Terumbu Karang

Definisi

Luas terumbu karang merujuk pada total luas wilayah yang ditutupi oleh ekosistem terumbu karang di perairan laut, yang terdiri dari karang hidup, organisme laut, dan lingkungan terkait lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Isian tidak lebih dari
LUAS_LAHAN_EKOSISTEM_LAUT

Kalimat Pertanyaan

LUAS_TERUMBU= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 44

Wilayah Peremajaan Terumbu Karang

Alias

WIL_PEREMAJAHAN_TERUMBU

Konsep

Wilayah Peremajaan Terumbu Karang

Definisi

Wilayah peremajaan terumbu karang adalah area di mana upaya khusus dilakukan untuk meregenerasi, memulihkan, atau memperbaiki ekosistem terumbu karang yang rusak atau terancam, melalui tindakan seperti penanaman karang, transplantasi organisme karang, dan perlindungan terhadap lingkungan terumbu karang

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

WIL_PEREMAJAHAN_TERUMBU= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 45

Nama Kawasan Konservasi yang Ditata

Alias

NAMA_KAWASAN_KONSERVASI_DITATA

Konsep

Nama Kawasan Konservasi yang Ditata

Definisi

Nama kawasan konservasi yang ditata adalah identifikasi resmi atau nama yang diberikan kepada wilayah tertentu yang telah diatur dan dikelola dengan tujuan konservasi alam, perlindungan lingkungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati melalui pengaturan dan tindakan yang telah ditetapkan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KAWASAN_KONSERVASI_DITATA=

...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 46

Wilayah Laut yang Mendapat Pengawasan

Alias

WIL_LAUT_PENGAWASAN

Konsep

Wilayah Laut yang Mendapat Pengawasan

Definisi

Wilayah laut yang mendapat pengawasan adalah area perairan laut yang secara aktif dan teratur diawasi dan dipantau oleh pihak berwenang, seperti badan pemerintah atau lembaga keamanan, untuk tujuan pengawasan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

- Isian tidak lebih dari WIL_LAUT_12_MIL

Kalimat Pertanyaan

WIL_LAUT_PENGAWASAN= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 47

Total Wilayah Laut sampai 12 mil

Alias

WIL_LAUT_12_MIL

Konsep

Total Wilayah Laut sampai 12 mil

Definisi

Total wilayah laut sampai 12 mil merujuk pada zona perairan yang berjarak hingga 12 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang merupakan bagian dari perairan teritorial negara tersebut dan memiliki yurisdiksi dan hak-hak khusus atas pengelolaan sumber daya dan kegiatan di dalamnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

WIL_LAUT_12_MIL= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 48

Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan

Alias

BAHAN_UJI_PERIKANAN_YANG_DIPERIKSA
A

Konsep

Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan

Definisi

Bahan uji perikanan yang dilakukan pemeriksaan merujuk pada sampel atau contoh bahan yang diambil dari hasil tangkapan ikan atau sumber daya akuatik lainnya untuk keperluan pemeriksaan dan analisis

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BAHAN_UJI_PERIKANAN_YANG_DIPERIKSA
A= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 49

Produksi Ketersediaan Benih

Alias

PROD_KETERSEDIAAN_BENIH

Konsep

Produksi Ketersediaan Benih

Definisi

Produksi ketersediaan benih mengacu pada jumlah total bibit ikan atau organisme akuatik yang dihasilkan atau tersedia dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya atau pelepasan ke lingkungan alam

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROD_KETERSEDIAAN_BENIH= ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Luas Wilayah Penangkapan Ikan

Konsep

Luas Wilayah Penangkapan Ikan

Definisi

Total luas area perairan tertentu di mana kegiatan penangkapan ikan secara komersial atau tradisional dilakukan

Interpretasi

Semakin luas wilayah penangkapan ikan, maka semakin besar potensi untuk menangkap beragam jenis ikan dan sumber daya akuatik lainnya serta mempengaruhi tingkat pemanfaatan dan keseimbangan ekosistem perairan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_WIL_TANGKAP_IKAN})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Wilayah Penangkapan Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Luas Lahan Ekosistem Laut

Konsep

Luas Lahan Ekosistem Laut

Definisi

Luas ekosistem akuatik yang didominasi oleh perairan berkadar garam tinggi pada permukaan yang sangat luas

Interpretasi

Semakin luas lahan ekosistem laut, maka semakin kompleks dan beragam keanekaragaman hayati yang dapat diakomodasi, serta semakin besar peran ekosistem tersebut dalam menjaga keseimbangan ekologi laut dan mendukung kehidupan di perairan global

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_LAHAN_EKOSISTEM_LAUT})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Ekosistem

Variabel Penyusun

Luas Lahan Ekosistem Laut, Jenis Ekosistem

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Luas Lahan Perikanan Budidaya

Konsep

Luas Lahan Perikanan Budidaya

Definisi

Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi bidang budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air

Interpretasi

Semakin luas lahan perikanan budidaya, maka semakin banyak kesempatan untuk memproduksi ikan dan organisme akuatik lainnya secara terencana, sehingga dapat membantu memenuhi permintaan akan produk-produk perikanan, mengurangi tekanan pada sumber daya alam, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_LAHAN_IKAN_BUDIDAYA})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Lahan Perikanan Budidaya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Luas Perairan Umum

Konsep

Luas Perairan Umum

Definisi

Luasan dari suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Perairan umum meliputi danau, waduk, rawa, dan sungai. Pada umumnya perairan umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan transportasi, penangkapan ikan, dan sebagai sumber air untuk kehidupan rumah tangga, serta sebagai plasma nutfah perairan

Interpretasi

Semakin luas luas perairan umum, maka semakin besar peluang bagi masyarakat dan lingkungan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam di perairan tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_PERAIRAN_UMUM})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perairan Umum

Variabel Penyusun

Luas Perairan Umum, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Perairan Umum

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap

Konsep

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap

Definisi

Total individu yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas perikanan tangkap di suatu daerah

Interpretasi

Semakin luas perairan umum, maka semakin besar peluang bagi masyarakat dan lingkungan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam di perairan tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_NELAYAN_IKAN_TANGKAP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Status

Variabel Penyusun

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap, Status Nelayan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap

Konsep

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap

Definisi

Total kelompok rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas perikanan tangkap di suatu daerah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah rumah tangga yang terlibat dalam perikanan tangkap, semakin kuat dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_RT_IKAN_TANGKAP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rumah Tangga Perikanan

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perikanan Tangkap

Variabel Penyusun

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Perikanan Tangkap

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Armada Perikanan Tangkap

Konsep

Jumlah Armada Perikanan Tangkap

Definisi

Total jumlah kapal atau kendaraan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas perikanan tangkap di suatu daerah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah armada perikanan tangkap, semakin besar kapasitas untuk meningkatkan volume tangkapan ikan dan hasil tangkapan lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_ARMADA_IKAN_TANGKAP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kapal

Variabel Penyusun

Jumlah Armada Perikanan Tangkap, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Kapal

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Konsep

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Definisi

Total volume atau berat ikan dan hasil tangkapan lainnya yang dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap di suatu daerah

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi perikanan tangkap, semakin signifikan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PROD_IKAN_TANGKAP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Ikan

Variabel Penyusun

Produksi Perikanan Tangkap, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Ikan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Total Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Konsep

Total Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Definisi

Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari penjualan ikan dan hasil tangkapan lainnya yang berasal dari kegiatan perikanan tangkap di suatu daerah

Interpretasi

Semakin tinggi total nilai produksi perikanan tangkap, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NILAI_PROD_IKAN_TANGKAP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Ikan

Variabel Penyusun

Nilai Produksi Perikanan Tangkap, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Ikan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Pembudidaya

Konsep

Jumlah Pembudidaya

Definisi

Total individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan budidaya atau pemeliharaan organisme, seperti ikan, udang, atau tanaman air, di lingkungan akuakultur atau budidaya air

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pembudidaya, semakin besar peluang untuk meningkatkan produksi hasil budidaya seperti ikan dan organisme akuatik lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PEMBUDIDAYA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pembudidaya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya

Konsep

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya

Definisi

Total kelompok rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan budidaya organisme akuatik, seperti ikan, udang, atau tanaman air, di lingkungan akuakultur atau budidaya air

Interpretasi

Semakin banyak jumlah rumah tangga yang terlibat dalam perikanan budidaya, semakin besar manfaatnya dalam menciptakan peluang mata pencaharian dan peningkatan pendapatan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_RT_IKAN_BUDIDAYA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rumah Tangga Perikanan

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perikanan Budidaya

Variabel Penyusun

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Perikanan Budidaya

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Armada Perikanan Budidaya

Konsep

Jumlah Armada Perikanan Budidaya

Definisi

Total jumlah kapal, peralatan, atau fasilitas lain yang digunakan dalam kegiatan budidaya organisme akuatik, seperti ikan, udang, atau tanaman air, di lingkungan akuakultur atau budidaya air

Interpretasi

Semakin banyak jumlah armada yang digunakan dalam perikanan budidaya, semakin besar kapasitas untuk meningkatkan produksi hasil budidaya seperti ikan dan organisme akuatik lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_ARMADA_IKAN_BUDIDAYA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kapal

Variabel Penyusun

Jumlah Armada Perikanan Budidaya, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Kapal

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Konsep

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Definisi

Total volume atau berat organisme akuatik, seperti ikan, udang, atau tanaman air, yang dihasilkan dari kegiatan budidaya di lingkungan akuakultur atau budidaya air dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi perikanan budidaya, semakin besar kontribusinya terhadap pasokan pangan dan perekonomian masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PROD_IKAN_BUDIDAYA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perikanan Budidaya,
Menurut Jenis Ikan

Variabel Penyusun

Produksi Perikanan Budidaya, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Perikanan Budidaya, Jenis Ikan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Total Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Konsep

Total Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Definisi

Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari penjualan organisme akuatik, seperti ikan, udang, atau tanaman air, yang berasal dari kegiatan budidaya di lingkungan akuakultur atau budidaya air dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi total nilai produksi perikanan budidaya, semakin besar kontribusinya dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NILAI_PROD_IKAN_BUDIDAYA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perikanan Budidaya,
Menurut Jenis Ikan

Variabel Penyusun

Nilai Produksi Perikanan Budidaya, Nama Kabupaten / Kota, Jenis Perikanan Budidaya, Jenis Ikan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Konsep

Jumlah UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Definisi

Total jumlah usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam aktivitas pengolahan atau pengolahan produk-produk perikanan yang berasal dari perairan tawar, seperti ikan dan hasil tangkapan lainnya

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam pengolahan perikanan air tawar, semakin besar potensi untuk menghasilkan produk olahan ikan air tawar yang bervariasi dan berkualitas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_UMKM_OLAH_IKAN_TAWAR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 16

Nilai Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Konsep

Nilai Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Definisi

Total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk-produk hasil pengolahan perikanan yang berasal dari perairan tawar, yang dikelola oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi nilai omset Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan perikanan air tawar, semakin besar dampaknya terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{OMSET_UMKM_OLAH_IKAN_TAWAR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Tawar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 17

Jumlah UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Konsep

Jumlah UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Definisi

Total jumlah usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam aktivitas pengolahan atau pengolahan produk-produk perikanan yang berasal dari perairan laut, seperti ikan dan hasil tangkapan lainnya

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam pengolahan perikanan air laut, semakin besar potensi untuk menghasilkan beragam produk olahan ikan laut yang berkualitas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_UMKM_OLAH_IKAN_LAUT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 18

Nilai Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Konsep

Nilai Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Definisi

Total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk-produk hasil pengolahan perikanan yang berasal dari perairan laut, yang dikelola oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi nilai omset Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan perikanan air laut, semakin besar dampaknya terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat pesisir

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{OMSET_UMKM_OLAH_IKAN_LAUT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Omset UMKM Pengolahan Perikanan Air Laut

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 19

Jumlah Balai Benih Ikan

Konsep

Jumlah Balai Benih Ikan

Definisi

Total jumlah lembaga atau fasilitas yang bertanggung jawab untuk budidaya dan produksi benih ikan (telur ikan yang menetas dan larva ikan) dalam rangka mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan akuakultur

Interpretasi

Semakin banyak jumlah balai benih ikan, semakin besar fasilitas dan kapasitas yang dimiliki untuk produksi dan distribusi benih ikan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_BBI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Balai Benih Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 20

Jumlah Produksi Usaha Pembenuhan Balai Benih Ikan

Konsep

Jumlah Produksi Usaha Pembenuhan Balai Benih Ikan

Definisi

Total volume atau berat benih ikan yang dihasilkan oleh balai benih ikan dalam suatu periode waktu tertentu. Benih ikan ini kemudian digunakan untuk budidaya dan pemeliharaan di sektor perikanan dan akuakultur

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi dari usaha pembenuhan di balai benih ikan, semakin besar kontribusinya dalam menyediakan pasokan benih ikan yang berkualitas untuk kegiatan budidaya perikanan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PROD_PEMBENIHAN_BBI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Produksi Usaha Pembenuhan Balai Benih Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 21

Total Nilai Produksi Usaha Pembenihan Balai Benih Ikan

Konsep

Total Nilai Produksi Usaha Pembenihan Balai Benih Ikan

Definisi

Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari penjualan benih ikan yang diproduksi oleh balai benih ikan dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai ini mencakup pendapatan dari penjualan benih ikan kepada peternak ikan dan pihak-pihak terkait di sektor perikanan dan akuakultur.

Interpretasi

Semakin tinggi total nilai produksi dari usaha pembenihan di balai benih ikan, semakin besar sumbangan kontribusinya dalam mendukung pasokan benih ikan yang berkualitas bagi sektor perikanan budidaya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NILAI_PROD_PEMBENIHAN_BBI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nilai Produksi Usaha Pembenihan Balai Benih Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 22

Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Kelompok Nelayan

Konsep

Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Kelompok Nelayan

Definisi

Total volume atau berat ikan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan atau budidaya ikan dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi ikan yang dikontribusikan oleh kelompok nelayan, semakin besar peran kelompok nelayan dalam memenuhi pasokan ikan dan sumber daya akuatik lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{PROD_IKAN})}{\text{BY}(\text{NAMA_KEL_NELAYAN})}$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Produksi Ikan, Nama Kelompok Nelayan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 23

Jumlah Target Daerah Produksi Ikan

Konsep

Jumlah Target Daerah Produksi Ikan

Definisi

Jumlah wilayah atau daerah yang ditetapkan sebagai sasaran atau tujuan untuk menghasilkan volume atau berat ikan tertentu dalam kegiatan perikanan atau budidaya ikan dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah target daerah produksi ikan, semakin besar fokus dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan di wilayah tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{WIL_TARGET_PROD_IKAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perikanan

Variabel Penyusun

Wilayah Target Daerah Produksi Ikan, Jenis Perikanan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 24

Jumlah Kelompok Nelayan

Konsep

Jumlah Kelompok Nelayan

Definisi

Total jumlah kelompok atau asosiasi yang terbentuk oleh nelayan dalam suatu daerah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kelompok nelayan yang terbentuk, semakin besar dampak positif dalam mengorganisir dan memperkuat komunitas nelayan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_KEL_NELAYAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Nelayan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 25

Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Pemerintah Daerah

Konsep

Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Pemerintah Daerah

Definisi

Total kelompok atau asosiasi nelayan yang menerima dukungan finansial, teknis, atau program lainnya dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan perikanan dan kesejahteraan nelayan di suatu wilayah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, semakin besar upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan dan pengembangan sektor perikanan pesisir

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_KEL_NELAYAN) WHERE  
(JENIS_BANTUAN) NOT BLANK
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Nelayan, Jenis Bantuan yang Diterima

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 26

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan

Konsep

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan

Definisi

Total jumlah kelompok atau asosiasi yang terlibat dalam kegiatan budidaya atau pemeliharaan ikan di lingkungan akuakultur atau budidaya air

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbentuk, semakin besar potensi untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya dan menghasilkan hasil tangkapan yang berkualitas

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_KEL_BUDIDAYA)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Pembudidaya Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 27

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapat Bantuan Pemerintah

Konsep

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapat Bantuan Pemerintah

Definisi

Total kelompok atau asosiasi pembudidaya ikan yang menerima dukungan finansial, teknis, atau program lainnya dari pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan budidaya atau pemeliharaan ikan di lingkungan akuakultur atau budidaya air

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, semakin besar peran pemerintah dalam mendukung perkembangan sektor perikanan budidaya

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_KEL_BUDIDAYA) WHERE  
(JENIS_BANTUAN) NOT BLANK
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Pembudidaya Ikan, Jenis Bantuan yang Diterima

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 28

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan

Konsep

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan

Definisi

Total lokasi atau fasilitas di mana ikan yang ditangkap atau dihasilkan dari budidaya dijual atau dilelang kepada pembeli atau pedagang

Interpretasi

Semakin banyak jumlah tempat pelelangan ikan yang tersedia, semakin baik akses nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka secara efisien dan adil

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_TPI)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Tempat Pelelangan Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 29

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan

Konsep

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan

Definisi

Total lokasi atau fasilitas di mana ikan yang ditangkap atau hasil budidaya ikan dibawa ke darat, didaratkan, dan kemudian diproses, dijual, atau didistribusikan lebih lanjut

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pangkalan pendaratan ikan yang tersedia, semakin baik nelayan dalam mengoptimalkan proses pendaratan hasil tangkapan mereka

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PPI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pangkalan Pendaratan Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 30

Tingkat Ketersediaan Ikan

Konsep

Tingkat Ketersediaan Ikan

Definisi

Jumlah dan variasi jenis ikan yang tersedia dalam suatu wilayah atau daerah tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi tingkat ketersediaan ikan, semakin baik kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan akan sumber protein hewani

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KETERSEDIAAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Perikanan

Variabel Penyusun

Jenis Perikanan, Ketersediaan Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 31

Tingkat Konsumsi Ikan

Konsep

Tingkat Konsumsi Ikan

Definisi

Jumlah ikan yang dikonsumsi oleh individu atau masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi tingkat konsumsi ikan, semakin besar manfaat yang diperoleh dalam mendukung pola makan sehat dan gizi yang seimbang

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{TOTAL_KONSUMSI_IKAN})}{\Sigma(\text{JUM_PENDUDUK})}$$

Ukuran

Angka

Satuan

kg per kapita per tahun

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Total Konsumsi Ikan, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 32

Jumlah Konsumsi Ikan

Konsep

Jumlah Konsumsi Ikan

Definisi

Total volume atau berat ikan yang dikonsumsi oleh individu atau masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah konsumsi ikan, semakin besar manfaat yang diperoleh dalam mendukung kesehatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{TOTAL_KONSUMSI_IKAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Total Konsumsi ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 33

Nilai Ekspor Perikanan

Konsep

Nilai Ekspor Perikanan

Definisi

Total nilai ekonomi dari produk-produk perikanan yang dijual dan diekspor ke pasar internasional oleh suatu negara

Interpretasi

Semakin tinggi nilai ekspor perikanan, semakin besar kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan pendapatan negara

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NILAI_IKAN_EKSPOR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta USD

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Volume Ikan Diekspor, Nilai Ekspor Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 34

Luas Terumbu Karang

Konsep

Luas Terumbu Karang

Definisi

Total luas wilayah yang ditutupi oleh ekosistem terumbu karang, yang terdiri dari struktur karang hidup dan organisme lain yang hidup di sekitarnya

Interpretasi

Semakin luas luas terumbu karang, semakin besar area ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan penting bagi kehidupan laut dan manusia

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_TERUMBU})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Terumbu Karang

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 35

Jumlah Peremajaan Terumbu Karang

Konsep

Jumlah Peremajaan Terumbu Karang

Definisi

Total jumlah upaya atau proyek yang dilakukan untuk melakukan restorasi atau peremajaan terumbu karang yang telah rusak atau terancam

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah peremajaan terumbu karang, semakin besar upaya yang dilakukan untuk memulihkan dan menjaga keberlanjutan terumbu karang

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{WIL_PEREMAJAN_TERUMBU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit/rak

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Wilayah Peremajaan Terumbu Karang

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 36

Jumlah Kawasan Konservasi yang Ditata Menuju Pengelolaan yang Efektif

Konsep

Jumlah Kawasan Konservasi yang Ditata Menuju Pengelolaan yang Efektif

Definisi

Jumlah kawasan konservasi yang diarahkan menuju pengelolaan yang efektif merujuk pada total kawasan atau area perlindungan alam yang sedang dikelola dan ditingkatkan pengelolannya untuk mencapai tujuan konservasi yang lebih efektif

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif, semakin besar peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_KAWASAN_KONSERVASI_DI_TATA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kawasan Konservasi yang Ditata

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 37

Persentase Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 mil yang Diawasi dari IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Konsep

Persentase Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 mil yang Diawasi dari IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Definisi

Proporsi perairan laut yang mendapat pengawasan khusus untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan aktivitas yang dapat merusak sumber daya alam

Interpretasi

Semakin tinggi persentase cakupan wilayah laut sampai 12 mil yang diawasi dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), serta aktivitas merusak sumber daya kelautan dan perikanan, semakin kuat pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan perikanan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{WIL_LAUT_PENGAWASAN})}{\Sigma(\text{WIL_LAUT_12_MIL})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Wilayah Laut yang Mendapat Pengawasan, Total Wilayah Laut sampai 12 mil

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 38

Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan

Konsep

Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan

Definisi

Total hasil dari sampel atau bahan uji yang diperiksa atau diuji dalam kegiatan penelitian atau evaluasi perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah hasil bahan uji perikanan yang dilakukan pemeriksaan, semakin baik upaya pemeriksaan dan penilaian terhadap kualitas dan keamanan hasil tangkapan perikanan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{BAHAN_UJI_PERIKANAN_YANG_DI_PERIKSA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Sampel

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 39

Jumlah Produksi Ketersediaan Benih

Konsep

Jumlah Produksi Ketersediaan Benih

Definisi

Total volume atau berat benih ikan atau organisme akuatik lainnya yang dihasilkan atau tersedia untuk digunakan dalam kegiatan budidaya atau pemeliharaan akuakultur

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi ketersediaan benih, semakin baik kemampuan dalam menyediakan pasokan benih ikan yang berkualitas untuk mendukung sektor perikanan budidaya

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{PROD_KETERSEDIAAN_BENIH})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ribu Ekor

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Ikan

Variabel Penyusun

Produksi Ketersediaan Benih, Jenis Ikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Kependudukan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak**

VARIABEL 1

Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Alias

JMLH_KDRT

Konsep

Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi

Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah istilah yang mengacu pada banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, termasuk tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_KDRT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Rumah Tangga

Alias

JMLH_RT

Konsep

Jumlah Rumah Tangga

Definisi

Jumlah rumah tangga adalah jumlah keluarga atau unit rumah tangga yang tinggal dalam suatu wilayah geografis atau area tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_RT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Alias

JMLH_PPLP

Konsep

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Definisi

Jumlah Pekerja Perempuan adalah banyaknya perempuan yang bekerja pada Lembaga Pemerintah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PPLP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta

Alias

JMLH_PPLS

Konsep

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta

Definisi

Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta merujuk kepada jumlah wanita yang bekerja dalam berbagai perusahaan, organisasi, atau entitas bisnis yang beroperasi di sektor swasta atau sektor non-pemerintah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PPLS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah Pekerja Perempuan

Alias

JMLH_PP

Konsep

Jumlah Pekerja Perempuan

Definisi

Jumlah pekerja perempuan adalah jumlah individu perempuan yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan atau lapangan kerja dalam suatu konteks tertentu, seperti dalam suatu organisasi, industri, wilayah geografis, atau sektor ekonomi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP

Alias

JMLH_PA17_BERKTP

Konsep

Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP

Definisi

Jumlah penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP adalah jumlah individu yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih dan memiliki dokumen identifikasi resmi yang dikenal sebagai KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PA17_BERKTP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Penduduk usia > 17 atau Telah Menikah

Alias

JMLH_PA17_TM

Konsep

Jumlah Penduduk usia > 17 atau Telah Menikah

Definisi

Jumlah Penduduk usia > 17 atau Telah Menikah adalah banyaknya individu yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau mereka yang telah resmi menikah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PA17_TM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Bayi Berakte Kelahiran

Alias

JMLH_BAYI_BERAKTE_LAHIR

Konsep

Jumlah Bayi Berakte Kelahiran

Definisi

Jumlah bayi berakte kelahiran merujuk kepada jumlah bayi yang lahir di sebuah wilayah atau negara tertentu yang memiliki akte kelahiran resmi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_BAYI_BERAKTE_LAHIR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Bayi

Alias

JMLH_BAYI

Konsep

Jumlah Bayi

Definisi

Jumlah anak yang belum lama lahir

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_BAYI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah

Alias

JMLH_PSNGN_BERAKTE_NIKAH

Konsep

Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah

Definisi

Jumlah pasangan nikah berakte nikah
merujuk kepada jumlah pasangan yang
telah sah menikah dan memiliki akte nikah
resmi yang dikeluarkan oleh otoritas
pemerintah yang berwenang

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PSNGN_BERAKTE_NIKAH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah

Alias

JMLH_PSNNGN_NIKAH

Konsep

Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah

Definisi

Jumlah keseluruhan pasangan nikah merujuk kepada total pasangan yang telah melakukan pernikahan, tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki akte nikah resmi atau tidak

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PSNNGN_NIKAH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Kelahiran Pada Perempuan Umur 15 - 19

Alias

JMLH_KLHR_PEREMPUAN(15-19)

Konsep

Jumlah Kelahiran Pada Perempuan Umur 15 - 19

Definisi

Jumlah kelahiran pada perempuan berusia 15 hingga 19 tahun merujuk kepada banyaknya perempuan yang melahirkan pada usia tersebut

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_KLHR_PEREMPUAN(15-19) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jumlah Penduduk Perempuan Umur 15 - 19

Alias

JMLH_PEREMPUAN(15-19)

Konsep

Jumlah Penduduk Perempuan Umur 15 - 19

Definisi

Jumlah penduduk perempuan usia 15 hingga 19 adalah banyaknya individu perempuan yang berusia antara 15 hingga 19 tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEREMPUAN(15-19) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah OPD Provinsi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Alias

JMLH_OPTMDK

Konsep

Jumlah OPD Provinsi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Definisi

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama merujuk kepada jumlah lembaga atau unit administratif di tingkat provinsi yang telah menggunakan data kependudukan sebagai bagian dari kerjasama atau kesepakatan tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_OPTMDK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Kabupaten/Kota

Alias

JMLH_KABKOT

Konsep

Jumlah Kabupaten/Kota

Definisi

Jumlah kabupaten/kota merujuk kepada total wilayah administratif yang terbagi menjadi kabupaten dan kota dalam suatu negara atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_KABKOT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Anak (Penduduk Usia < 18 Tahun) Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Tingkat Provinsi yang Didampingi

Alias

JMLH_ANAK_DIDAMPINGI

Konsep

Jumlah Anak (Penduduk Usia < 18 Tahun) Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Tingkat Provinsi yang Didampingi

Definisi

Jumlah anak (penduduk usia di bawah 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani oleh instansi tingkat provinsi yang didampingi merujuk kepada total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau kekerasan lainnya, dan menerima bantuan, perlindungan, atau layanan dari instansi pemerintah tingkat provinsi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_ANAK_DIDAMPINGI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Anak (Penduduk Usia < 18 Tahun)

Alias

JMLH_ANAK

Konsep

Jumlah Anak (Penduduk Usia < 18 Tahun)

Definisi

Jumlah anak adalah istilah yang mengacu pada total jumlah individu yang berusia anak-anak dalam suatu populasi, wilayah, atau kelompok tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_ANAK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Ingin Anak Ditunda

Alias

JMLH_PUS_NONKB_IAT

Konsep

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Ingin Anak Ditunda

Definisi

Pasangan usia subur bukan peserta KB ingin anak ditunda merujuk kepada pasangan suami-istri atau pasangan yang berada dalam usia subur (mampu untuk memiliki anak biologis) dan belum mengikuti program atau metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, tetapi memiliki niat atau keinginan untuk menunda atau menolak untuk memiliki anak dalam waktu dekat

Referensi Pemilihan

Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/KEP/B1/2020 Tentang Penetapan Peta Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Unit Eselon I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PUS_NONKB_IAT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tidak Ingin Anak Lagi

Alias

JMLH_PUS_NONKB_TIAL

Konsep

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tidak Ingin Anak Lagi

Definisi

Pasangan usia subur bukan peserta KB yang tidak ingin anak lagi merujuk kepada pasangan suami-istri atau pasangan yang berada dalam usia subur (mampu untuk memiliki anak biologis) yang tidak menggunakan metode kontrasepsi atau program perencanaan keluarga tetapi memiliki niatan untuk tidak memiliki anak lagi

Referensi Pemilihan

Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/KEP/B1/2020 Tentang Penetapan Peta Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Unit Eselon I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PUS_NONKB_TIAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Pasangan Usia Subur

Alias

JMLH_PUS

Konsep

Jumlah Pasangan Usia Subur

Definisi

Jumlah pasangan usia subur adalah total pasangan suami-istri atau pasangan yang berada dalam usia yang secara fisik dan biologis memungkinkan mereka untuk memiliki anak

Referensi Pemilihan

Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/KEP/B1/2020 Tentang Penetapan Peta Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Unit Eselon I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PUS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah Perempuan Umur 15 - 64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Oleh Pasangan dan Selain Pasangan Selama 12 Bulan Terakhir

Alias

JMLH_PEREMPUAN(15-64)_MK

Konsep

Jumlah Perempuan Umur 15 - 24 Tahun yang Mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Oleh Pasangan dan Selain Pasangan Selama 12 Bulan Terakhir

Definisi

Jumlah perempuan usia 15 hingga 64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir adalah jumlah perempuan dalam kelompok usia tersebut yang telah mengalami tindakan kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan mereka atau dari orang lain selama periode waktu 12 bulan terakhir sebelum data diambil

Referensi Pemilihan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEREMPUAN(15-64)_MK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Jumlah Perempuan Umur 15 - 64 Tahun Pada Periode 12 Bulan Terakhir

Alias

JMLH_PEREMPUAN(15-64)

Konsep

Jumlah Perempuan Umur 15 - 64 Tahun Pada Periode 12 Bulan Terakhir

Definisi

Jumlah perempuan usia 15 hingga 64 tahun pada periode 12 bulan terakhir merujuk kepada jumlah total individu perempuan yang berusia antara 15 hingga 64 tahun dalam populasi tertentu, dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode 12 bulan terakhir sebelum data tersebut diambil

Referensi Pemilihan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEREMPUAN(15-64) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Alias

JMLH_PKKMLK

Konsep

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Definisi

Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif merujuk kepada total jumlah perempuan yang telah menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun kekerasan lainnya, dan telah menerima berbagai jenis layanan yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, hukum, dan dukungan sosial untuk membantu mereka mengatasi dampak kekerasan yang dialami

Referensi Pemilihan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PKKMLK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan

Alias

JMLH_PER_KORBAN

Konsep

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan

Definisi

Jumlah perempuan korban kekerasan adalah banyaknya individu perempuan yang telah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, pelecehan, atau tindakan kekerasan lainnya dalam suatu konteks tertentu

Referensi Pemilihan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PER_KORBAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Jumlah Pekerja Umur 5 - 14 Tahun

Alias

JMLH_PEKERJA(5-14)

Konsep

Jumlah Pekerja Umur 5 - 14 Tahun

Definisi

Jumlah pekerja usia 5 hingga 14 tahun merupakan total individu yang berusia antara 5 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan atau aktivitas ekonomi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEKERJA(5-14) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Jumlah Pekerja Umur 5 Tahun Keatas

Alias

JMLH_PEKERJA_A15

Konsep

Jumlah Pekerja Umur 5 Tahun Keatas

Definisi

Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas adalah total individu yang berusia 5 tahun atau lebih yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan atau aktivitas ekonomi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEKERJA_A15 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Jumlah Penduduk Laki-Laki

Alias

JMLH_LAKI

Konsep

Jumlah Penduduk Laki-Laki

Definisi

Jumlah penduduk laki-laki adalah istilah yang mengacu pada total jumlah individu yang berjenis kelamin laki-laki dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_LAKI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Jumlah Penduduk Perempuan

Alias

JMLH_PEREMPUAN

Konsep

Jumlah Penduduk Perempuan

Definisi

Jumlah penduduk perempuan adalah banyaknya individu yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEREMPUAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 29

Data Gender

Alias

DATA_GENDER

Konsep

Data Gender

Definisi

Data gender adalah data atau informasi yang mengacu pada perbedaan dan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi antara laki-laki (pria) dan perempuan (wanita) dalam suatu populasi atau kelompok tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DATA_GENDER = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 30

Data Anak

Alias

DATA_ANAK

Konsep

Data Anak

Definisi

Data anak adalah data atau informasi yang berkaitan dengan individu yang berusia anak-anak atau remaja yang mencakup berbagai aspek yang terkait dengan anak-anak dalam berbagai konteks, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perkembangan sosial, ekonomi keluarga, dan kebutuhan mereka dalam masyarakat

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DATA_ANAK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Rasio KDRT

Konsep

Rasio KDRT

Definisi

Perbandingan Jumlah Korban KDRT dengan Jumlah Rumah Tangga

Interpretasi

Semakin kecilnya rasio KDRT berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JMLH_KDRT/JMLH_RT}$$

Ukuran

Proporsi

Satuan

Poin

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Konsep

Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Definisi

Pekerja anak usia 5-14 tahun dibagi Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase tenaga kerja di bawah umur mengindikasikan tingginya pelanggaran hak anak

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\text{JMLH_PPLP} / \text{JMLH_PP}) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pekerja Umur 5 - 14 Tahun, Jumlah Pekerja Umur 5 Tahun Keatas

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Konsep

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Definisi

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengacu pada perbandingan antara jumlah perempuan yang bekerja atau menempati posisi dalam lembaga-lembaga pemerintah dengan jumlah total anggota atau pekerja di lembaga-lembaga tersebut dalam suatu periode waktu tertentu dikali 100%

Interpretasi

Tingginya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dapat memberikan contoh dan pemberdayaan bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam pemerintahan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PPLP/JMLH_PP) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan, Jumlah Pekerja Perempuan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Konsep

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Definisi

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta mengacu pada perbandingan antara jumlah perempuan yang bekerja atau menempati posisi dalam lembaga-lembaga swasta dengan jumlah total anggota atau pekerja di lembaga-lembaga tersebut dalam suatu periode waktu tertentu dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase partisipasi perempuan dalam lembaga swasta mencerminkan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender di sektor swasta

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PPLS/JMLH_PP) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta, Jumlah Pekerja Perempuan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Konsep

Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Definisi

Perbandingan Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

Interpretasi

Dengan rasio yang tinggi, data demografis penduduk, seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi tempat tinggal, dapat dihimpun dan dipelihara dengan lebih baik sehingga dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PA17_BERKTP/JMLH_PA17_TM)$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP, Jumlah Penduduk usia > 17 atau Telah Menikah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Konsep

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Definisi

Perbandingan antara jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dengan jumlah bayi secara keseluruhan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio kepemilikan akte kelahiran menandakan semakin baiknya pencatatan dan taat administrasi masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$JMLH_BAYI_BERAKTE_LAHIR/JMLH_BAYI$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Bayi Berakte Kelahiran, Jumlah Bayi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Konsep

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Definisi

Perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah dengan Jumlah keseluruhan pasangan nikah

Interpretasi

Semakin tinggi rasio pasangan berakte nikah menandakan semakin baiknya pencatatan dan taat administrasi masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_PSNGN_BERAKTE_NIKAH}}{\text{JMLH_PSNGN_NIKAH}}$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah,
Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani

Konsep

Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani

Definisi

Persentase korban kekerasan anak yang terlayani adalah perbandingan antara jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dan telah menerima layanan atau dukungan yang sesuai dengan jumlah total anak yang menjadi korban kekerasan dalam suatu periode waktu tertentu dikali 100%

Interpretasi

Persentase yang meningkat menunjukkan peningkatan kualitas layanan perlindungan anak yang tersedia

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\text{JMLH_ANAK_DIDAMPINGI}}{\text{JMLH_ANAK}}\right) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Anak (Penduduk Usia < 18 Tahun)
Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Tingkat Provinsi yang Didampingi, Jumlah Anak (Penduduk Usia < 18 Tahun)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir

Konsep

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir

Definisi

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun dalam 12 bulan terakhir adalah persentase perempuan dalam kelompok usia tersebut yang melaporkan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan (seperti fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi) selama periode 12 bulan sebelum penelitian atau survei dilakukan

Interpretasi

Prevalensi yang semakin tinggi menunjukkan semakin dalamnya masalah kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_PEREMPUAN}(15-64)_MK}{\text{JMLH_PEREMPUAN}(15-64)}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Perempuan Umur 15 - 64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Oleh Pasangan dan Selain Pasangan Selama 12 Bulan Terakhir, Jumlah Perempuan Umur 15 - 64 Tahun Pada Periode 12 Bulan Terakhir

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

Konsep

Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

Definisi

Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mengacu pada persentase perempuan yang telah menjadi korban kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dan kemudian menerima bantuan atau layanan yang mencakup berbagai aspek yang komprehensif dalam rangka mendukung dan membantu korban mengatasi dampak kekerasan tersebut

Interpretasi

Persentase yang semakin tinggi dapat mengindikasikan peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan akses perempuan yang menjadi korban kekerasan terhadap layanan yang mereka butuhkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_PKKMLK}}{\text{JMLH_PER_KORBAN}}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif, Jumlah Perempuan Korban Kekerasan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Sex Ratio

Konsep

Sex Ratio

Definisi

Perbandingan Jumlah Penduduk berjenis kelamin Perempuan terhadap Jumlah Penduduk berjenis kelamin Laki-Laki dikali 100

Interpretasi

1. Nilai Sex Ratio yang lebih besar dari 100 menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan
2. Nilai Sex Ratio yang sama dengan 100 menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan
3. Nilai Sex Ratio yang lebih kecil dari 100 menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_LAKI/JMLH_PEREMPUAN) \times 100$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Poin

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk Laki-Laki, Jumlah Penduduk Perempuan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak

Konsep

Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak

Definisi

Tersedianya dokumen data gender dan anak mengacu pada ketersediaan informasi dan statistik yang berkaitan dengan aspek gender dan anak-anak dalam suatu konteks tertentu

Interpretasi

Lebih banyak data dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif dalam hal gender dan anak-anak

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{SUM}(\text{DATA_GENDER}) + \text{SUM}(\text{DATA_ANAK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Dokumen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Data Gender, Data Anak

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)

Konsep

Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)

Definisi

Proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menjarangkan dan membatasi jumlah anak dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi unmet need, semakin besar kemungkinan wanita hamil yang tidak menginginkan kehamilan tersebut yang dapat mengarah pada peningkatan angka kelahiran yang tidak diinginkan dan, dalam beberapa kasus, mengakibatkan penambahan populasi yang tidak terkendali

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{((\text{JMLH_PUS_NONKB_IAT} + \text{JMLH_PUS_NONKB_TIAL}) / \text{JMLH_PUS}) \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Ingin Anak Ditunda, Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tidak Ingin Anak Lagi, Jumlah Pasangan Usia Subur

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Konsep

Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Definisi

Perbandingan perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan terhadap seluruh perangkat daerah kali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan menandakan bahwa data kependudukan berguna bagi instansi yang memerlukan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_OPTMDK} / \text{JMLH_KABKOT}) \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah OPD Provinsi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kabupaten/Kota,

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun

Konsep

Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun

Definisi

Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun pada periode tertentu diantara jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1000

Interpretasi

Angka kelahiran yang tinggi pada kelompok usia remaja (15-19 tahun) bisa mengindikasikan masalah kesehatan reproduksi remaja karena mencerminkan rendahnya akses terhadap pendidikan seksual yang komprehensif, kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_KLHR_PEREMPUAN}(15-19)}{\text{JMLH_PEREMPUAN}(15-19)} \times 1000$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Kelahiran per 1000 perempuan 15- 19 tahun

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kelahiran Pada Perempuan Umur 15 - 19, Jumlah Penduduk Perempuan Umur 15 - 19

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Kesehatan

Kompilasi Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Untuk Menjamin Ketersediaan Data dan Informasi Sarana Kesehatan
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non-Rawat Inap Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu Apotek Klinik Pratama Klinik Utama RS Dengan Kemampuan Pelayanan Gadar Level 1
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Dokumentasi
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

Survei Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja Pelayanan Kesehatan Secara Berkala Sebagai Bahan untuk Menetapkan Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Selanjutnya Bagi Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat Dapat Digunakan Sebagai Gambaran Tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Kegiatan:	Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Kaltim

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelaksana Sarana dan Prasarana Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan
Periodisasi:	Saat Penyelenggaraan Survei

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Googleform
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

VARIABEL 1

Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan

Alias

JIBDTK

Konsep

Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu

Definisi

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu adalah ukuran statistik yang mengacu pada jumlah total ibu yang melahirkan anak di suatu wilayah kerja atau area geografis tertentu dalam periode waktu yang menerima bantuan atau pertolongan selama proses persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JIBDTK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin

Alias

JMLH_SIB

Konsep

Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu yang Sama

Definisi

Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu yang Sama adalah banyaknya ibu yang diperkirakan akan melahirkan anak dalam wilayah kerja atau area geografis tertentu selama periode waktu yang sama

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SIB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

Alias

JMLH_DESA_KEL_UCI

Konsep

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

Definisi

Jumlah Desa/Kelurahan UCI adalah istilah yang mengacu pada jumlah desa atau kelurahan dalam suatu wilayah atau negara yang telah mencapai atau terlibat dalam program imunisasi anak secara universal

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DESA_KEL_UCI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jumlah Desa/Kelurahan

Alias

JMLH_DESA_KEL

Konsep

Jumlah Desa/Kelurahan

Definisi

Jumlah Desa/Kelurahan adalah banyaknya unit administratif atau wilayah yang disebut desa atau kelurahan dalam suatu daerah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DESA_KEL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan

Alias

JBGBMP

Konsep

Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan

Definisi

Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan adalah istilah yang mengacu pada total jumlah anak balita (usia 0 hingga 59 bulan) yang menderita gizi buruk dan telah menerima perawatan di fasilitas kesehatan atau sarana pelayanan kesehatan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JBGBMP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk

Alias

JBGB

Konsep

Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk

Definisi

Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk adalah total anak balita (usia 0 hingga 59 bulan) dalam suatu populasi atau wilayah yang mengalami kondisi gizi buruk pada suatu titik waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JBGB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati

Alias

JMLH_PB_TBC_BTA

Konsep

Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati

Definisi

Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati adalah istilah dalam bidang kesehatan yang mengacu pada total individu yang baru saja didiagnosis menderita tuberkulosis (TBC) dengan hasil bakteriologis positif terhadap Basil Tahan Asam (BTA) dan kemudian menerima perawatan untuk TBC tersebut

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PB_TBC_BTA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+)

Alias

JMLH_PPB_TBC_BTA

Konsep

Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+)

Definisi

Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) adalah banyaknya individu baru yang diduga menderita tuberkulosis (TBC) dengan hasil tes bakteriologis positif terhadap Basil Tahan Asam (BTA)

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PPB_TBC_BTA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Alias

JKBMPKSS

Konsep

Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Definisi

Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar adalah istilah yang mengacu pada total jumlah kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan atau pelayanan medis yang memenuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JKBMPKSS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Seluruh Bayi Lahir

Alias

JMLH_BAYLLAHIR

Konsep

Jumlah Seluruh Bayi Lahir

Definisi

Jumlah Seluruh Bayi Lahir mengacu pada total jumlah bayi yang lahir hidup dalam suatu populasi, wilayah, atau negara dalam periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JBL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Puskesmas

Alias

JMLH_PUSKESMAS

Konsep

Jumlah Puskesmas

Definisi

Jumlah Puskesmas adalah istilah yang mengacu pada total jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PUSKESMAS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Kecamatan

Alias

JMLH_KECAMATAN

Konsep

Jumlah Kecamatan

Definisi

Jumlah Kecamatan adalah banyaknya unit administratif yang terletak di bawah tingkat kabupaten atau kotamadya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_KECAMATAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Bayi Meninggal

Alias

BAYI_MENINGGAL

Konsep

Bayi Meninggal

Definisi

Bayi meninggal adalah kejadian ketika seorang bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun

Referensi Pemilihan

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2020 -2024, Direktorat Kesehatan Keluarga Direktorat Jenderal Kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2020

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BAYI_MENINGGAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Balita Stunting

Alias

JMLH_BALITA_STUNTING

Konsep

Jumlah Balita Stunting

Definisi

Jumlah Balita Stunting adalah banyaknya balita yang mengalami gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia mereka

Referensi Pemilihan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_BALITA_STUNTING = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Balita

Alias

JMLH_BALITA

Konsep

Jumlah Balita

Definisi

Jumlah Anak Balita adalah banyaknya anak-anak yang berusia antara 0 hingga 59 bulan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu.

Referensi Pemilihan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_BALITA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Alias

JRTAML

Konsep

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Definisi

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak adalah istilah yang merujuk pada total jumlah rumah tangga dalam suatu populasi atau wilayah yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi standar kelayakan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan atau pemerintah

Referensi Pemilihan

Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berbasis Hasil (Outcome). (2019). Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JRTAML = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Rumah Tangga

Alias

JRT

Konsep

Jumlah Rumah Tangga

Definisi

Jumlah rumah tangga adalah jumlah keluarga atau unit rumah tangga yang tinggal dalam suatu wilayah geografis atau area tertentu

Referensi Pemilihan

Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berbasis Hasil (Outcome). (2019). Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JRT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Nomor Registrasi Tenaga Kesehatan

Alias

NRTK

Konsep

Nomor Registrasi Tenaga Kesehatan

Definisi

Nomor Registrasi Tenaga Kesehatan adalah nomor yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang terdaftar dalam sistem registrasi atau lisensi kesehatan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NRTK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 19

Jenis Tenaga Kesehatan

Alias

JENIS_TENAGA_KESEHATAN

Konsep

Jenis Tenaga Kesehatan

Definisi

Jenis Tenaga Kesehatan mencakup beragam profesi yang bekerja dalam sektor kesehatan untuk memberikan layanan, perawatan, penanganan, edukasi, dan dukungan terkait dengan kesehatan individu dan masyarakat

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - Dokter (Umum, Spesialis, Gigi) | - Tenaga Gizi |
| - Perawat | - Ahli Laboratorium Medik |
| - Bidan | - Terapis Gigi dan Mulut |
| - Tenaga Kesehatan Lingkungan | - Radiografer |
| - Tenaga Kesehatan Masyarakat | - Perekam Medis |
| - Apoteker | - Teknik Elektromedis |

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_TENAGA_KESEHATAN =...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Kejadian Luar Biasa

Alias

KLB

Konsep

Kejadian Luar Biasa

Definisi

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KLB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jenis Penyakit

Alias

JENIS_PENYAKIT

Konsep

Jenis Penyakit

Definisi

Jenis penyakit adalah kategori atau kelompok penyakit yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang serupa atau berbagi kesamaan dalam hal penyebab, gejala, patogenesis (mekanisme perkembangan), atau cara penanganan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Flu Burung | - Suspect Meningitis |
| - Chikungunya | / Encephalitis |
| - Demam Berdarah (DHF) | - Campak |
| - Hepatitis | - Polio |
| - Kolera | - Tetanus |
| - Malaria | - Diare |
| | - Lainnya |

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PENYAKIT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Nama Industri Farmasi

Alias

NAMA_INDUSTRI_FARMASI

Konsep

Nama Industri Farmasi

Definisi

Nama Industri Farmasi adalah identifikasi dari sektor ekonomi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, produksi, pemasaran, dan distribusi produk farmasi, termasuk obat-obatan, vaksin, produk bioteknologi, suplemen makanan, serta produk kesehatan terkait lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_INDUSTRI_FARMASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Nomor Pokok Wajib Pajak

Alias

NPWP

Konsep

Nomor Pokok Wajib Pajak

Definisi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sejenis identifikasi pajak yang diberikan kepada individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NPWP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 24

Jumlah Puskesmas yang Memiliki Minimal 80% Obat dan Vaksin Esensial

Alias

JMLH_PMOVE

Konsep

Jumlah Puskesmas yang Memiliki Minimal 80% Obat dan Vaksin Esensial

Definisi

Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80% obat dan vaksin esensial adalah sejumlah Puskesmas dalam suatu wilayah atau sistem kesehatan yang memiliki persediaan obat-obatan dan vaksin yang dianggap esensial untuk pemenuhan kebutuhan dasar perawatan kesehatan masyarakat setidaknya sebesar 80% dari total obat-obatan dan vaksin yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada penduduk yang dilayani

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PMOVE = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4

Alias

JMLH_IBUHAMIL_K4

Konsep

Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4

Definisi

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 adalah banyaknya ibu hamil dalam suatu populasi atau wilayah yang telah menerima empat kali (K4) pemeriksaan antenatal lengkap selama masa kehamilan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_IBUHAMIL_K4 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Jumlah Sasaran Ibu Hamil

Alias

JMLH_IBU_HAMIL

Konsep

Jumlah Sasaran Ibu Hamil

Definisi

Jumlah sasaran ibu hamil adalah jumlah total ibu hamil yang diidentifikasi dan dihitung dalam suatu populasi atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_IBU_HAMIL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Jumlah Rumah Sakit

Alias

JMLH_RS

Konsep

Jumlah Rumah Sakit

Definisi

Jumlah rumah sakit adalah total keseluruhan fasilitas kesehatan yang memenuhi kriteria sebagai rumah sakit dalam suatu wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_RS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Jumlah Penduduk

Alias

JMLH_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah penduduk adalah total keseluruhan individu atau orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PENDUDUK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Konsep

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Definisi

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%

Interpretasi

Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin minimnya risiko angka kematian maternal (kematian ibu saat hamil atau persalinan) dan neonatal (kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupannya setelah lahir)

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JIBDTK/JMLH_SIB) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan, Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Konsep

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Definisi

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah persentase dari semua anak di suatu desa atau kelurahan yang telah menerima semua vaksin yang direkomendasikan dalam program imunisasi anak secara lengkap dan tepat waktu

Interpretasi

Cakupan UCI yang tinggi menunjukkan bahwa program imunisasi di desa atau kelurahan tersebut efektif dalam mencapai target imunisasi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_DESA_KEL_UCI/JMLH_DESA_KEL) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Desa/Kelurahan UCI, Jumlah Desa/Kelurahan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Konsep

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Definisi

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali 100%

Interpretasi

Meningkatnya cakupan perawatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak-anak dan mengurangi beban penyakit gizi buruk di masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JBGBMP/JBGB) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Konsep

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Definisi

Perbandingan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dikali 100%

Interpretasi

Tingginya cakupan dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit TBC, mempercepat identifikasi kasus, dan memungkinkan pengobatan yang lebih cepat bagi penderita

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PB_TBC_BTA/JMLH_PPB_TBC_BTA) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati, Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+)

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Cakupan Kunjungan Bayi

Konsep

Cakupan Kunjungan Bayi

Definisi

Perbandingan antara jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%

Interpretasi

Tingginya cakupan kunjungan bayi dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup bayi

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JKBMPKSS/JMLH_BAYI_LAHIR) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah Seluruh Bayi Lahir

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Cakupan Puskesmas

Konsep

Cakupan Puskesmas

Definisi

Cakupan Puskesmas adalah istilah yang mengacu pada sejauh mana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh sebuah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dapat mencakup dan melayani penduduk dalam suatu wilayah atau area tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi cakupan puskesmas, maka potensi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar akan semakin besar

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PUSKESMAS/JMLH_KECAMATAN) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Puskesmas, Jumlah Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Kematian Bayi

Konsep

Jumlah Kematian Bayi

Definisi

Jumlah Kematian Bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun pada suatu tempat dan waktu tertentu

Interpretasi

Rendahnya jumlah kematian bayi menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan bayi, termasuk perawatan prenatal, persalinan yang aman, perawatan pasca kelahiran, dan pencegahan penyakit dan komplikasi yang umum terjadi pada bayi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{BAYI_MENINGGAL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bayi Meninggal

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Prevalensi Stunting

Konsep

Prevalensi Stunting

Definisi

Jumlah anak di bawah lima tahun yang mengalami kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005

Interpretasi

Prevalensi stunting yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar anak di populasi tersebut mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\text{JMLH_BALITA_STUNTING}/\text{JMLH_BALITA}) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Balita Stunting, Jumlah Balita

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Yang Layak

Konsep

Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Yang Layak

Definisi

Penduduk yang memiliki akses air minum yang layak dapat diukur dengan perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan memadai dibandingkan dengan total populasi suatu wilayah dikali dengan 100%

Interpretasi

Semakin tinggi penduduk yang memiliki akses air minum yang layak, maka akan meningkatkan kesehatan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JRTAML/JRT) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, Jumlah Rumah Tangga

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Tenaga Kesehatan

Konsep

Jumlah Tenaga Kesehatan

Definisi

Jumlah tenaga kesehatan mengacu pada total individu yang bekerja di berbagai bidang dalam industri kesehatan

Interpretasi

Semakin banyak tenaga kesehatan yang tersedia, maka semakin besar kemungkinan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk diagnosa, pengobatan, dan perawatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(NRTK)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Jenis Tenaga Kesehatan

Variabel Penyusun

Nomor Registrasi Tenaga Kesehatan, Jenis Tenaga Kesehatan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas

Konsep

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas

Definisi

Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas adalah ukuran atau angka yang mencerminkan sejauh mana obat-obatan dan vaksin yang dianggap esensial untuk pelayanan kesehatan dasar tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat di fasilitas kesehatan Puskesmas

Interpretasi

Persentase yang semakin besar menunjukkan tingginya ketersediaan obat dan vaksin esensial dapat membantu Puskesmas dalam memberikan perawatan yang sesuai standar dan berkualitas

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_PMOVE/JMLH_PUSKESMAS) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Puskesmas yang Memiliki Minimal 80% Obat dan Vaksin Esensial, Jumlah Puskesmas

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Kasus KLB Pada Manusia

Konsep

Jumlah Kasus KLB Pada Manusia

Definisi

Jumlah kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) pada manusia mengacu pada angka atau statistik yang mencatat jumlah individu yang terinfeksi atau terkena suatu penyakit atau kondisi tertentu dalam suatu populasi yang dianggap sebagai KLB

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak individu yang terinfeksi atau terkena KLB, risiko penyebaran penyakit tersebut ke orang lain menjadi lebih tinggi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(KLB)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kejadian Luar Biasa, Jenis Penyakit

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Industri Farmasi

Konsep

Jumlah Industri Farmasi

Definisi

Jumlah Industri Farmasi merujuk pada total atau keseluruhan perusahaan atau entitas yang terlibat dalam kegiatan industri farmasi dalam suatu wilayah, negara, atau wilayah tertentu pada suatu waktu tertentu

Interpretasi

Banyaknya industri farmasi dapat menghasilkan beragam produk farmasi yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk obat-obatan generik, obat-obatan inovatif, vaksin, produk bioteknologi, dan produk-produk kesehatan lainnya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_INDUSTRI_FARMASI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Industri Farmasi, Nomor Pokok Wajib Pajak

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Konsep

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Definisi

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase dari total jumlah ibu hamil dalam suatu populasi atau wilayah yang telah melakukan setidaknya empat kunjungan antenatal selama kehamilan

Interpretasi

Tingginya cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah indikator positif dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi serta memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan maternal

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\text{JMLH_IBUHAMIL_K4}/\text{JMLH_IBU_HAMIL}) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4, Jumlah Sasaran Ibu Hamil

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Konsep

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Definisi

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit yang ada dalam suatu wilayah dengan jumlah penduduk dalam wilayah yang sama dikali 1000

Interpretasi

Rasio yang lebih tinggi dapat mengindikasikan bahwa lebih banyak fasilitas rumah sakit tersedia untuk melayani penduduk dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_RS/JMLH_PENDUDUK) \times 1000$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Rumah Sakit, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Komunikasi dan
Informatika**

Survei Pendataan Akses Internet, Komputer, Telekomunikasi/HP di Rumah Tangga di Kalimantan Timur Tahun 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	<ul style="list-style-type: none">· Mendapatkan Informasi yang Lengkap Terkait Akses Internet, Komputer, Telekomunikasi di Rumah Tangga· Memenuhi Indikator SDGs Dinas Kominfo Antara Lain : 1. Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband. 2. Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam 3. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet.
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Statistik

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Nama Jumlah Anggota Keluarga Alamat RT Kelurahan Kecamatan Jenis Kelamin Status Perkawinan Nomor Telepon/HP Pengeluaran/Bulan (P) Umur Pendidikan Terakhir Ketersediaan Akses Terhadap Komputer Jenis Komputer Akses Terhadap Internet Fasilitas Layanan Internet yang Digunakan Kendala Tidak Menggunakan Layanan Internet Akses Terhadap Telepon Genggam Akses Terhadap Televisi Akses Terhadap Telepon Kabel Akses Terhadap Radio Aktivitas Penggunaan Komputer Aktivitas Penggunaan Internet
----------------------------	--

Jenis Komputer
 Aktivitas Pencarian Informasi Layanan
 Pemerintah Melalui Internet
 Media yang Digunakan untuk Melihat
 Informasi Layanan Pemerintah
 Jenis Tampilan yang disukai untuk Melihat
 Informasi Layanan Pemerintah
 Aktivitas E-Commerce
 Aktivitas E-Commerce untuk Pembelian
 Online
 Rata-Rata Frekuensi Pembelian Online
 Perangkat yang Digunakan untuk Aktivitas E-
 Commerce untuk Pembelian Online
 Lokasi Penjual Barang/ Jasa Pembelian Online
 Jenis Barang/ Jasa Pembelian Online
 Metode Pembayaran Pembelian Online
 Aktivitas E-Commerce untuk Penjualan Online
 Jenis Barang/ Jasa Penjualan Online
 Media Pengiriman Dalam Penjualan Online
 Media Penjualan yang Digunakan Dalam
 Penjualan Online
 Rata-Rata Pendapatan Usaha Perbulan Dalam
 Penjualan Online
 Lama Menjalankan Usaha Dalam Penjualan
 Online
 Kepemilikan Telepon Genggam
 Jenis Telepon Genggam
 Rata-Rata Pengeluaran Perbulan Selama
 Menggunakan Telepon Genggam
 Jaringan yang Digunakan Jika Menggunakan
 Smartphone
 Penggunaan Smartphone
 Aktivitas Menonton Televisi
 Durasi Menonton Televisi Tiap Hari
 Jenis Acara Televisi
 Aktivitas Mendengarkan Radio
 Jenis Acara Radio
 Hanya Sekali

Periodisasi:

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Wawancara Langsung Wawancara Melalui Sarana Komunikasi
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

Survei Pendataan Sekolah Berinternet dan Desa Bersinyal di Kalimantan Timur Tahun 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan Informasi yang Lengkap Terkait Banyaknya Sekolah yang Tersedia Koneksi Internet dan Kelancaran Koneksinya• Mengetahui Banyaknya Desa yang Tersedia Koneksi Internet dan Kelancaran Koneksinya dan Desa yang Belum Tersedia Layanan Koneksi Internet dan Permasalahannya• Memenuhi Indikator SDGs Dinas Kominfo Antara Lain : Persentase Kabupaten 3T yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Statistik

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Nama Jabatan Alamat Jenis Kelamin Nomor Telepon/HP Ketersediaan Jaringan Internet Kualitas Jaringan Internet Harga Layanan Internet Fasilitas Layanan Internet Akses Terhadap Komputer Jenis Komputer Akses Terhadap Internet Fasilitas Layanan Internet yang Digunakan Kualitas Sinyal Internet Kendala Tidak Menggunakan Layanan Internet Akses Terhadap Telepon Genggam Akses Terhadap Telepon Kabel Kualitas Sinyal Aktivitas Penggunaan Komputer Aktivitas Penggunaan Internet Media Penggunaan Internet Kepemilikan Telepon Genggam
----------------------------	--

Periodisasi:

Jenis Telepon Genggam
Jaringan Pada Smartphone
Hanya Sekali

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:

Wawancara Langsung
Wawancara Melalui Sarana Komunikasi

Tingkat Penyajian yang
Diharapkan:

Provinsi

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Akses Informasi Publik Kualitas Informasi Publik
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Wawancara
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Memperoleh Data yang Dibutuhkan Sesuai Ruang Lingkup Survei, Sebagai Data dan Bahan Evaluasi untuk Pengambilan keputusan Oleh Pemangku Kebijakan dan Sebagai Publikasi Produk Statistik Diskominfo Prov. Kaltim
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Statistik

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Nama Alamat Jenis Kelamin Nomor Telepon/HP Umur Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Pekerjaan Media Informasi Tema Berita dan Publikasi Kemudahan Penggunaan Kemudahan Akses kelengkapan Informasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Data dan Kebijakan Privasi Biaya/Tarif Ketepatan Fakta Ketertarikan Pengguna Manfaat Bagi Pengguna kelengkapan Informasi Ketepatan Publikasi Eksposisi/Pemaparan Mekanisme Keadilan Perspektif/Pandangan
Periodisasi:	Hanya Sekali

Metodologi

Metode Pengumpulan Data: Wawancara
Lainnya : Wawancara Melalui Sarana
Komunikasi
Tingkat Penyajian yang
Diharapkan: Provinsi

Survei Pengumpulan Data Persepsi kepentingan TIK Dalam Kehidupan Sehari-Hari di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	<p>Pertumbuhan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Saat Ini Tumbuh Pesat. Terutama, Terkait Penggunaan Internet Oleh Masyarakat. Berdasarkan Hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 215,63 Juta Orang Pada Periode 2022-2023. Jumlah Tersebut Meningkatkan 2,67% dibandingkan Pada Periode Sebelumnya yang Sebanyak 210,03 Juta Pengguna. Sedangkan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Merupakan Sektor Dengan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tertinggi di Indonesia Pada Tahun 2015 Sebesar 10,06%. Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Sektor TIK Sangat Penting Bagi Pertumbuhan Perekonomian Kalimantan Timur yang Akan Menjadi Bagian Ibu Kota Negara Indonesia yang Merupakan kedepan Menjadi Pusat Bisnis dan Pusat Pemerintahan Dengan Ketersediaan Infrastruktur TIK yang Lebih Lengkap dibandingkan Kota Lain, Serta Jumlah Penduduk Mencapai Sekitar 3,8 Juta Orang yang Merupakan Penyumbang Terbesar Pengguna Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Merupakan Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik. Tujuan dari Pekerjaan Survei Persepsi Penggunaan TIK di Provinsi Kalimantan Timur,</p>

Adalah:

1. Mengidentifikasi Tingkat Penggunaan Perangkat TIK Pada Masyarakat;
2. Mengidentifikasi Tingkat Penggunaan TIK Pada Masyarakat, dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Pendidikan, dan Sosial Budaya;

Penanggung Jawab Kegiatan: Kepala Bidang Statistik

Data

Variabel yang Dikumpulkan:

- Jenis Kelamin
- Domisili
- Pekerjaan
- Kategori Sosek
- Pendidikan
- Penggunaan Perangkat TIK
- Intensitas Penggunaan TIK
- Jenis Perangkat TIK
- Pengaruh TIK
- Manfaat TIK
- kepercayaan Terhadap TIK
- Privasi dan Keamanan Data
- Konektivitas TIK Saat Pandemi
- Peran Pemerintah Dalam Mematiskan Akses TIK
- kepentingan TIK Dalam Bidang
- kepentingan TIK Dalam Kehidupan Sehari-Hari
- Manfaat dan Pengaruh TIK
- TIK untuk Kualitas Hidup
- Dampak TIK
- Pengaruh TIK Terhadap Pendapatan
- Pengaruh TIK Terhadap Peluang Kerja
- Akses Pendidikan
- Kualitas Pendidikan
- Efektivitas Pendidik
- Pengelolaan Kesehatan
- Perawatan Kesehatan
- Aktif dan Sehat
- Koneksi Dengan Orang Lain
- Konektivitas Dalam Kegiatan Sosial
- Belajar Budaya dan Perspektif
- Hanya Sekali

Periodisasi:

Metodologi

Metode Pengumpulan Data: Wawancara
Mengisi Kuesioner Sendiri

Tingkat Penyajian yang Diharapkan: Provinsi

VARIABEL 1

Provider Telekomunikasi

Alias

PROVIDER

Konsep

Provider Telekomunikasi

Definisi

Provider telekomunikasi adalah perusahaan atau entitas yang menyediakan layanan komunikasi, baik berupa layanan suara (telepon), data (internet), atau layanan lainnya kepada pelanggan mereka melalui jaringan komunikasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Telekomunikasi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROVIDER = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Pameran/EXPO

Alias

EXPO

Konsep

Pameran/EXPO

Definisi

Pameran adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya diseminasi informasi melalui penyajian informasi yang ditampilkan dalam pameran

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

EXPO = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Aplikasi

Alias

APLIKASI

Konsep

Aplikasi

Definisi

Aplikasi yang terintegrasi adalah aplikasi perangkat lunak atau sistem informasi yang dirancang untuk bekerja bersama dan berbagi data dan fungsionalitas antara satu sama lain

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

APLIKASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Nama Stasiun Radio

Alias

NAMA_STASIUN_RADIO

Konsep

Nama Stasiun Radio

Definisi

Nama Stasiun Radio adalah identitas yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu stasiun radio

Referensi Pemilihan

Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_STASIUN_RADIO = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Kode Desa

Alias

NAMA_STASIUN_RADIO

Konsep

Kode Desa

Definisi

Kode Desa adalah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap desa dalam sistem administrasi pemerintah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Administrasi Pemerintah, dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_STASIUN_RADIO = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jenis Surat Kabar

Alias

JNS_SURAT_KABAR

Konsep

Jenis Surat Kabar

Definisi

Klasifikasi atau kategori berbagai surat kabar berdasarkan karakteristik tertentu, seperti fokus liputan, format, atau target audiens

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pos

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Lokal
- Nasional
- Internasional

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JNS_SURAT_KABAR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jenis Media Elektronik

Alias

JNS_MEDIA_ELEKTRONIK

Konsep

Jenis Media Elektronik

Definisi

Jenis media elektronik mengacu pada variasi atau kategori dari berbagai bentuk media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi, berita, hiburan, dan konten lainnya kepada audiens

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- TV Lokal
- TV Nasional
- Radio Lokal
- Radio Nasional

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JNS_MEDIA_ELEKTRONIK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Website Daerah

Alias

WEBSITE_DAERAH

Konsep

Website Daerah

Definisi

Website merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman web beserta file-file pendukungnya seperti file gambar, video, dan file digital lainnya yang disimpan pada sebuah web server yang umumnya dapat diakses melalui internet

Referensi Pemilihan

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

WEBSITE_DAERAH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Penduduk yang Menggunakan HP

Alias

JMLH_PENDUDUK_MENGGUNAKAN HP

Konsep

Jumlah Penduduk yang Menggunakan HP

Definisi

Banyaknya Individu dalam suatu populasi atau wilayah yang secara aktif menggunakan atau memiliki akses ke perangkat telepon seluler (handphone atau HP)

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PENDUDUK_MENGGUNAKAN HP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Penduduk

Alias

JMLH_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Banyaknya individu yang tinggal atau berada dalam suatu wilayah geografis pada suatu waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PENDUDUK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Nama Desa

Alias

NAMA_DESA

Konsep

Nama Desa

Definisi

Nama Desa adalah identitas yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu desa

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Administrasi Pemerintah, dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_DESA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Surat Kabar

Alias

SURAT_KABAR

Konsep

Surat Kabar

Definisi

Surat kabar adalah publikasi cetak yang biasanya diterbitkan secara reguler, seperti harian, mingguan, atau bulanan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

SURAT_KABAR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Penyiaran Media Elektronik

Alias

MEDIA_ELEKTRONIK

Konsep

Penyiaran Media Elektronik

Definisi

Proses distribusi dan siaran konten media elektronik dari luar suatu daerah ke dalam wilayah atau lokasi tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

MEDIA_ELEKTRONIK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Internet

Alias

JMLH_PENDUDUK_MENGGUNAKAN_INTERNET

Konsep

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Internet

Definisi

Jumlah penduduk yang menggunakan internet merujuk kepada jumlah individu dalam suatu wilayah atau populasi yang mengakses internet melalui berbagai perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, atau perangkat lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PENDUDUK_MENGGUNAKAN_INTERNET = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Pengamanan Data Eletronik

Alias

JPDMSPDE

Konsep

Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Pengamanan Data Eletronik

Definisi

Banyaknya perangkat daerah yang telah memiliki sistem pengamanan data elektronik untuk melindungi dan mengamankan data yang dikelola oleh entitas pemerintahan setempat dari potensi ancaman dan risiko keamanan

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPDMSPDE = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Perangkat Daerah

Alias

JPD

Konsep

Jumlah Perangkat Daerah

Definisi

Jumlah perangkat daerah adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di suatu wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Program/Kegiatan dari Hasil Rekomendasi Penelitian TIK yang Dilaksanakan

Alias

JPRPTIK

Konsep

Jumlah Program/Kegiatan dari Hasil Rekomendasi Penelitian TIK yang Dilaksanakan

Definisi

Banyaknya program atau kegiatan yang telah diimplementasikan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPRPTIK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jumlah penelitian TIK yang Dilaksanakan

Alias

JPTIK

Konsep

Jumlah penelitian TIK yang Dilaksanakan

Definisi

Jumlah penelitian TIK yang dilaksanakan mengacu pada banyaknya proyek atau studi penelitian di bidang TIK yang telah dijalankan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPTIK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Lembaga yang Mengembangkan Media Center Informasi Publik

Alias

LEMBAGA_INFORMASI_PUBLIK

Konsep

Lembaga yang Mengembangkan Media Center Informasi Publik

Definisi

Lembaga yang mengembangkan media center informasi publik mengacu pada organisasi atau badan yang bertanggung jawab atas pendirian, pengelolaan, dan pengembangan pusat informasi publik atau media center yang bertujuan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat umum

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LEMBAGA_INFORMASI_PUBLIK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Sistim Informasi Manajemen

Alias

SIM

Konsep

Sistim Informasi Manajemen

Definisi

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk membantu organisasi dalam mengelola, mengambil, dan mengolah informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan manajerial

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2010 Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

SIM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Pelayanan Informasi

Alias

JPMAPI

Konsep

Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Pelayanan Informasi

Definisi

Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi merujuk pada jumlah individu atau anggota masyarakat yang dapat dengan mudah, efektif, dan terjangkau untuk mendapatkan dan menggunakan berbagai bentuk informasi yang mereka butuhkan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
10/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPMAPI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Provider Telekomunikasi

Konsep

Jumlah Provider Telekomunikasi

Definisi

Jumlah entitas atau perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi kepada konsumen

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak provider, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam hal layanan telekomunikasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PROVIDER})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Provider Telekomunikasi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Pameran/EXPO

Konsep

Jumlah Pameran/EXPO

Definisi

Jumlah pameran atau expo mengacu pada jumlah acara pameran yang diadakan dalam suatu periode tertentu

Interpretasi

Semakin banyak pameran dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada para ahli, pelaku industri, dan pengunjung umum untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan belajar tentang tren terbaru, inovasi, dan perkembangan dalam berbagai sektor

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{EXPO})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pameran/Expo

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi

Konsep

Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi

Definisi

Total aplikasi yang semua datanya terpusat tetapi dapat diakses oleh klien melalui user interface di kantornya masing-masing (misalnya melalui web browser)

Interpretasi

Semakin banyak aplikasi yang terintegrasi, semakin baik aliran data dan informasi di dalam sistem dapat mengarah pada efisiensi operasional yang lebih tinggi karena pengguna dapat mengakses informasi dari berbagai sumber tanpa harus berpindah-pindah antaraplikasi

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (APLIKASI)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Aplikasi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Aplikasi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi

Konsep

Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi

Definisi

Jumlah desa di suatu wilayah yang memiliki akses dan layanan telekomunikasi yang memadai

Interpretasi

Jaringan telekomunikasi yang mencapai lebih banyak desa akan memungkinkan penduduk di desa-desa tersebut untuk mengakses informasi lebih mudah, termasuk berita, pendidikan online, dan pengetahuan umum yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (KODE_DESA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Desa, Kode Desa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Stasiun Radio

Konsep

Stasiun Radio

Definisi

Banyaknya stasiun yang memberikan layanan penyiaran audio (suara), yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio (dalam bentuk radiasi elektromagnet) dari sebuah antena pemancar (transmitter) ke alat penerima

Interpretasi

Lebih banyak stasiun radio berarti lebih banyak variasi dalam jenis konten yang disediakan sehingga dapat meningkatkan keanekaragaman informasi yang dapat diakses oleh pendengar

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (NAMA_STASIUN_RADIO)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Stasiun Radio

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Website Daerah

Konsep

Website Daerah

Definisi

Jumlah situs web yang dibuat atau dioperasikan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait di suatu wilayah tertentu

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak website daerah, masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke informasi publik, termasuk kebijakan pemerintah, program sosial, pengumuman, dan layanan publik yang tersedia di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (WEBSITE_DAERAH)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Website Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Surat Kabar Yang Masuk Ke Daerah

Konsep

Jumlah Surat Kabar Yang Masuk Ke Daerah

Definisi

jumlah total surat kabar atau publikasi cetak yang disalurkan atau didistribusikan ke suatu daerah tertentu dalam periode waktu tertentu

Interpretasi

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (SURAT_KABAR)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Surat Kabar

Variabel Penyusun

Surat Kabar, Jenis Surat Kabar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk

Konsep

Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk

Definisi

Banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik lokal maupun nasional suatu daerah menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (MEDIA_ELEKTRONIK)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Media Elektronik

Variabel Penyusun

Media Elektronik, Jenis Media Elektronik

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda yang bersangkutan

Konsep

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda yang bersangkutan

Definisi

Banyaknya sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pemda dalam lingkup wilayah administratifnya

Interpretasi

Dengan lebih banyak Sistem Informasi Manajemen yang dibuat, Pemda dapat mengelola administrasi dan operasi pemerintahan secara lebih efisien

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (SIM)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Sistem Informasi Manajemen

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Penduduk Menggunakan HP

Konsep

Persentase Penduduk Menggunakan HP

Definisi

Jumlah penduduk menggunakan HP dibagi Jumlah penduduk dikali 100

Interpretasi

Tingginya persentase penduduk menggunakan HP dapat mengindikasikan semakin mudahnya akses informasi bagi masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$(JMLH_PENDUDUK_MENGGUNAKAN\ HP) / JMLH_PENDUDUK) \times 100\%$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Penduduk yang Menggunakan HP, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet

Konsep

Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet

Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk pengguna internet terhadap jumlah penduduk dikali 100%

Interpretasi

Pertumbuhan penggunaan internet dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor digital

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_PENDUDUK_MENGGUNAKAN_INTERNET}}{\text{JMLH_PENDUDUK}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Internet, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Persentase Program/Kegiatan dari Hasil Rekomendasi Penelitian TIK yang Dilaksanakan

Konsep

Persentase Program/Kegiatan dari Hasil Rekomendasi Penelitian TIK yang Dilaksanakan

Definisi

Perbandingan antara jumlah program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan dengan jumlah penelitian TIK yang dilaksanakan

Interpretasi

Tingginya persentase program/kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian TIK menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan masalah atau tantangan nyata yang dihadapi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JPRPTIK}}{\text{JPTIK}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Program/Kegiatan dari Hasil Rekomendasi Penelitian TIK yang Dilaksanakan, Jumlah penelitian TIK yang Dilaksanakan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Pengamanan Data Eletronik

Konsep

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Pengamanan Data Eletronik

Definisi

Jumlah perangkat daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase perangkat daerah dengan sistem pengamanan data elektronik menunjukkan semakin banyaknya perangkat daerah yang memprioritaskan keamanan data

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JPDMSPDE} / \text{JPD}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Pengamanan Data Eletronik, Jumlah Perangkat Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Cakupan Masyarakat yang Memiliki Akses Terhadap Pelayanan Informasi

Konsep

Cakupan Masyarakat yang Memiliki Akses Terhadap Pelayanan Informasi

Definisi

Perbandingan antara jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi dengan jumlah penduduk dikali 100%

Interpretasi

Tingginya cakupan menunjukkan bahwa lebih banyak individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JPMAPI} / \text{JMLH_PENDUDUK}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Pelayanan Informasi, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Lembaga yang Mengembangkan Media Center Informasi Publik

Konsep

Jumlah Lembaga yang Mengembangkan Media Center Informasi Publik

Definisi

Jumlah lembaga yang mengembangkan Media Center Informasi Publik merujuk pada jumlah institusi atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mendirikan dan mengoperasikan pusat informasi publik

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak Media Center Informasi Publik, masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke informasi yang relevan

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (LEMBAGA_INFORMASI_PUBLIK)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Lembaga yang Mengembangkan Media Center Informasi Publik

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Lingkungan Hidup

Survei Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan untuk Mengumpulkan dan Menganalisis Pendapat Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Publik yang Telah Diberikan Oleh Aparatur Pemerintah yang Ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.2. Memperoleh Gambaran Secara Objektif Mengenai Kepuasan Masyarakat Maupun Instansi / Unit Terkait Selaku Pengguna Layanan Terhadap Pelayanan yang Diberikan.3. Sebagai Dasar Pijakan Dalam Rangka Menetapkan Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat/ Unit Terkait di Provinsi Kalimantan Timur.4. Sumber Informasi Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Mengenai Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat.
Penanggung Jawab Kegiatan:	Sekretaris

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan Asal Instansi Sub Bagian / Seksi yang dituju Jenis Layanan Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Dengan Jenis Pelayanannya Kemudahan Prosedur Pelayanan Kecepatan Pelayanan Kesesuaian Produk Pelayanan Antara yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil yang Diberikan Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan Kualitas Sarana dan Prasarana Tersedianya Maklumat Pelayanan
----------------------------	---

Periodisasi:

Penanganan Pengaduan Pengguna
Pelayanan
Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:
Tingkat Penyajian yang
Diharapkan:

Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Provinsi

VARIABEL 1

Nama Plasma Nutfah Dilindungi

Alias

Nama Plasma Nutfah Dilindungi

Konsep

Nama Plasma Nutfah Dilindungi

Definisi

Nama substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik yang dilindungi

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Plasma Nutfah Dilindungi=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Plasma Nutfah

Alias

Jenis Plasma Nutfah

Konsep

Jenis Plasma Nutfah

Definisi

Jenis substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Hewan
- Tumbuhan

Aturan Validasi

- Harus terisi jika terdapat isian pada Nama Plasma Nutfah Dilindungi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Plasma Nutfah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Kasus Lingkungan

Alias

Kasus Lingkungan

Konsep

Kasus Lingkungan

Definisi

Kasus masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Kasus Lingkungan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 4

Status Penyelesaian

Alias

Status Penyelesaian

Konsep

Status Penyelesaian

Definisi

Status penyelesaian kasus masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Difasilitasi DLH Provinsi
- Dilimpahkan sesuai kewenangannya

Aturan Validasi

- Harus terisi jika terdapat isian pada Kasus Lingkungan

Kalimat Pertanyaan

Status Penyelesaian=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Laboratorium Penguji Lingkungan

Alias

Nama Laboratorium Penguji Lingkungan

Konsep

Nama Laboratorium Penguji Lingkungan

Definisi

Nama laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Laboratorium Penguji Lingkungan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Alamat

Alias

Alamat

Konsep

Alamat

Definisi

Nama orang dan tempat yang menjadi tujuan surat

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Alamat=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Alias

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Konsep

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Definisi

Jumlah sarana monitoring masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Nama Perusahaan yang Memiliki IPAL

Alias

Nama Perusahaan yang Memiliki IPAL

Konsep

Nama Perusahaan yang Memiliki IPAL

Definisi

Nama perusahaan yang memiliki pengolahan air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Nama Perusahaan yang Memiliki IPAL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 9

Nama Perusahaan yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Alias

Nama Perusahaan yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Konsep

Nama Perusahaan yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Definisi

Nama perusahaan yang memiliki sarana pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Nama Perusahaan yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 10

Kabupaten/Kota Penerima Adipura

Alias

Kabupaten/Kota Penerima Adipura

Konsep

Kabupaten/Kota Penerima Adipura

Definisi

Kabupaten dan kota yang mendapatkan instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Nama Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota Penerima Adipura=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Sekolah Penerima Adiwiyata

Alias

Sekolah Penerima Adiwiyata

Konsep

Sekolah Penerima Adiwiyata

Definisi

Sekolah yang mendapat penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Nama Sekolah adalah Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimat Pertanyaan

Sekolah Penerima Adiwiyata=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Tempat Penampungan Sampah

Alias

Jumlah Tempat Penampungan Sampah

Konsep

Jumlah Tempat Penampungan Sampah

Definisi

Jumlah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Tempat Penampungan Sampah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir

Alias

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir

Konsep

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir

Definisi

Jumlah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa bilangan negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Nama Perusahaan Wajib AMDAL

Alias

Nama Perusahaan Wajib AMDAL

Konsep

Nama Perusahaan Wajib AMDAL

Definisi

Nama perusahaan yang wajib memiliki kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Nama Perusahaan Wajib AMDAL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 15

Nama Perusahaan Wajib AMDAL dan Diawasi

Alias

Nama Perusahaan Wajib AMDAL dan Diawasi

Konsep

Nama Perusahaan Wajib AMDAL dan Diawasi

Definisi

Nama perusahaan yang wajib memiliki kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Jika terisi jumlahnya tidak boleh melebihi banyaknya Nama Perusahaan Wajib AMDAL

Kalimat Pertanyaan

Nama Perusahaan Wajib AMDAL dan Diawasi=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

INDIKATOR 1

Jumlah Plasma Nutfah Dilindungi

Konsep

Jumlah Plasma Nutfah Dilindungi

Definisi

Jumlah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik yang dilindungi

Interpretasi

Jumlah plasma nutfah yang besar mencerminkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan keanekaragaman genetik tanaman

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Nama Plasma Nutfah Dilindungi

Ukuran

Jumlah

Satuan

Jenis

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Plasma Nutfah

Variabel Penyusun

Nama Plasma Nutfah Dilindungi, Jenis Plasma Nutfah

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Kasus Lingkungan

Konsep

Jumlah Kasus Lingkungan

Definisi

Jumlah kasus masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kasus lingkungan, maka semakin banyak peristiwa atau insiden yang melibatkan pelanggaran atau dampak negatif terhadap lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Kasus Lingkungan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kasus Lingkungan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda

Konsep

Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda

Definisi

Jumlah kasus masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah

Interpretasi

Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadapnya

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Kasus Lingkungan dengan Status Penyelesaian "Difasilitasi DLH Provinsi"

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kasus Lingkungan, Status Penyelesaian

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Laboratorium Penguji Lingkungan

Konsep

Jumlah Laboratorium Penguji Lingkungan

Definisi

Jumlah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup

Interpretasi

Semakin banyak jumlah laboratorium penguji lingkungan, maka semakin banyak fasilitas yang tersedia untuk melakukan uji dan analisis lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Nama Laboratorium Penguji Lingkungan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Status Kepemilikan

Variabel Penyusun

Nama Laboratorium Penguji Lingkungan, Alamat

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Konsep

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Definisi

Jumlah sarana monitoring masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya

Interpretasi

Semakin banyak jumlah sarana monitoring polusi udara, maka semakin besar kemampuan suatu wilayah untuk memantau dan mengukur tingkat polusi udara

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Sarana Monitoring Polusi Udara

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Industri yang Memiliki IPAL

Konsep

Jumlah Industri yang Memiliki IPAL

Definisi

Jumlah industri yang memiliki pengolahan air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan

Interpretasi

Peningkatan jumlah industri yang memiliki IPAL dapat mengurangi dampak polusi industri pada ekosistem air dan mendorong praktik produksi yang lebih ramah lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Nama Perusahaan yang Memiliki IPAL

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan yang Memiliki IPAL

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Industri yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Konsep

Jumlah Industri yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Definisi

Jumlah industri yang memiliki sarana pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara

Interpretasi

Peningkatan jumlah industri yang memiliki sarana pengendalian pencemaran udara dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Nama Perusahaan yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Adipura

Konsep

Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Adipura

Definisi

Jumlah kabupaten dan kota yang mendapatkan instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kabupaten/kota yang mendapat Adipura, maka semakin banyak wilayah yang diakui atas upaya mereka dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Kabupaten/Kota Penerima Adipura

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kabupaten/Kota Penerima Adipura

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Sekolah yang mendapat Adiwiyata

Konsep

Jumlah Sekolah yang mendapat Adiwiyata

Definisi

Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah sekolah yang mendapat Adiwiyata, maka semakin banyak sekolah yang diakui karena upaya mereka dalam mengedukasi dan melibatkan siswa dalam isu-isu lingkungan serta praktik berkelanjutan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Sekolah Penerima Adiwiyata

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Sekolah Penerima Adiwiyata

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Tempat Penampungan Sementara

Konsep

Jumlah Tempat Penampungan Sementara

Definisi

Jumlah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu

Interpretasi

Jumlah tempat penampungan sementara sampah yang memadai dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di lokasi yang tidak sesuai, mencegah pencemaran lingkungan, dan memastikan bahwa sampah diangkut dan dikelola dengan benar sesuai dengan regulasi lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Jumlah Tempat Penampungan Sampah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Tempat Penampungan Sampah, Alamat

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir

Konsep

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir

Definisi

Jumlah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

Interpretasi

Jumlah TPA yang memadai dalam suatu wilayah sangat penting untuk mengelola sampah dan limbah dengan efisien dan berkelanjutan.

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir, Alamat

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL)

Konsep

Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL)

Definisi

Jumlah seluruh perusahaan yang wajib memiliki kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perusahaan wajib dokumen lingkungan (AMDAL), maka semakin banyak perusahaan atau proyek yang diharuskan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan sebelum memulai kegiatan mereka

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Nama Perusahaan Wajib AMDAL

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Wajib AMDAL

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah perusahaan Wajib dokumen lingkungan (AMDAL) yang diawasi

Konsep

Jumlah perusahaan Wajib dokumen lingkungan (AMDAL) yang diawasi

Definisi

Jumlah seluruh perusahaan yang wajib memiliki kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perusahaan yang Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL) yang diawasi, maka semakin banyak perusahaan atau proyek yang tunduk pada pengawasan dan pemantauan dari pihak berwenang dalam pelaksanaan AMDAL mereka

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian pada variabel Nama Perusahaan Wajib AMDAL dan Diawasi

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Wajib AMDAL dan Diawasi

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas Pangan,
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura**

VARIABEL 1

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah

Alias

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah

Konsep

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah

Definisi

Luas bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian bukan sawah

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Nama Penyuluh PNS Pertanian

Alias

Nama Penyuluh PNS Pertanian

Konsep

Nama Penyuluh PNS Pertanian

Definisi

Nama pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Penyuluh PNS Pertanian=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Nama Penyuluh Kontrak

Alias

Nama Penyuluh Kontrak

Konsep

Nama Penyuluh Kontrak

Definisi

Nama tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Penyuluh Kontrak=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Nama Penyuluh Swadaya

Alias

Nama Penyuluh Swadaya

Konsep

Nama Penyuluh Swadaya

Definisi

Nama Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Penyuluh Swadaya=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Balai Penyuluhan Pertanian

Alias

Nama Balai Penyuluhan Pertanian

Konsep

Nama Balai Penyuluhan Pertanian

Definisi

Nama unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Balai Penyuluhan Pertanian=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nama Kelompok Tani

Alias

Nama Kelompok Tani

Konsep

Nama Kelompok Tani

Definisi

Nama kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Kelompok Tani=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Kontak Tani Nelayan Andalan

Alias

Nama Kontak Tani Nelayan Andalan

Konsep

Nama Kontak Tani Nelayan Andalan

Definisi

Jumlah organisasi profesi dan bersifat independent yang berorientasi pada kegiatan sosial ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, berbudayakan agribisnis berbasis di pedesaan dan berwawasan lingkungan

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Kontak Tani Nelayan Andalan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Luas Panen Padi Palawija

Alias

Luas Panen Padi Palawija

Konsep

Luas Panen Padi Palawija

Definisi

Luasan tanaman padi palawija yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Luas Panen Padi Palawija=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Produksi Padi Palawija

Alias

Produksi Padi Palawija

Konsep

Produksi Padi Palawija

Definisi

Jumlah hasil perkalian antara luas panen (bersih) padi palawija dengan produktivitas

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Produksi Padi Palawija=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Produksi Buah Tahunan

Alias

Produksi Buah Tahunan

Konsep

Produksi Buah Tahunan

Definisi

Jumlah hasil perkalian antara luas panen (bersih) buah tahunan dengan produktivitas

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Produksi Buah Tahunan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Pohon Buah Tahunan

Alias

Jumlah Pohon Buah Tahunan

Konsep

Jumlah Pohon Buah Tahunan

Definisi

Jumlah total pohon buah tahunan

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Pohon Buah Tahunan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Produksi Tanaman Sayur

Alias

Produksi Tanaman Sayur

Konsep

Produksi Tanaman Sayur

Definisi

Jumlah hasil perkalian antara luas panen (bersih) sayur dengan produktivitas

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berupa angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Produksi Tanaman Sayur=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Nama Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda

Alias

Nama Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda

Konsep

Nama Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda

Definisi

Nama kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh lebih banyak daripada variabel Nama Kelompok Tani

Kalimat Pertanyaan

Nama Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Kabupaten/Kota

Alias

Kabupaten/Kota

Konsep

Kabupaten/Kota

Definisi

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jenis Lahan Pertanian Bukan Sawah

Alias

Jenis Lahan Pertanian Bukan Sawah

Konsep

Jenis Lahan Pertanian Bukan Sawah

Definisi

Jenis bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian bukan sawah

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Tegal/Kebun
- Lahan/Huma
- Lahan yang sementara tidak diusahakan

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Lahan Pertanian Bukan Sawah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Komoditas Padi Palawija

Alias

Komoditas Padi Palawija

Konsep

Komoditas Padi Palawija

Definisi

Hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan, berupa padi dan palawija.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Padi
- Jagung
- Kacang Kedelai
- Kacang Hijau
- Kacang Tanah
- Ubi Kayu
- Ubi Jalar

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Komoditas Padi Palawija=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Komoditas Buah

Alias

Komoditas Buah

Konsep

Komoditas Buah

Definisi

Hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan, berupa buah.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|----------------|------------|
| - Mangga | - Nangka / |
| - Jeruk | Cempedak |
| - Pepaya | - Salak |
| - Pisang | - Rambutan |
| - Nanas | - Sawo |
| - Durian | - Sirsak |
| - Manggis | - Markisa |
| - Melon | - Sukun |
| - Alpukat | - Melinjo |
| - Buah Naga | |
| - Belimbing | |
| - Duku/Langsar | |
| - Jambu Biji | |
| - Jambu Air | |

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Komoditas Buah=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Komoditas Tanaman Hortikultura

Alias

Komoditas Tanaman Hortikultura

Konsep

Komoditas Tanaman Hortikultura

Definisi

Hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan, berupa tanaman hortikultura.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Bawang Merah
- Kubis
- Cabai
- Petsai/Sawi
- Daun Bawang
- Kembang Kol

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Komoditas Tanaman Hortikultura=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah

Konsep

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah

Definisi

Jumlah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian bukan sawah

Interpretasi

Luas lahan pertanian ini mencerminkan diversifikasi pertanian dan keberagaman jenis tanaman yang ditanam dalam suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah

Ukuran

Luas

Satuan

Hektar

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Lahan Pertanian Bukan Sawah

Variabel Penyusun

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah, Kabupaten/Kota, Jenis Lahan Pertanian Bukan Sawah

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Penyuluh PNS Pertanian

Konsep

Jumlah Penyuluh PNS Pertanian

Definisi

Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Penyuluh PNS Pertanian, maka semakin banyak personel pemerintah yang tersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani dalam pengembangan pertanian

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Penyuluh PNS Pertanian

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Penyuluh PNS Pertanian, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Penyuluh Kontrak

Konsep

Jumlah Penyuluh Kontrak

Definisi

Jumlah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Penyuluh Kontrak, maka semakin banyak tenaga ahli lapangan yang disewa atau ditempatkan di bawah kontrak untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada petani

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Penyuluh Kontrak

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Penyuluh Kontrak, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Penyuluh Swadaya

Konsep

Jumlah Penyuluh Swadaya

Definisi

Jumlah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Penyuluh Swadaya, maka semakin banyak individu yang dengan sukarela berkontribusi untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani dan pelaku pertanian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pengetahuan mereka dalam bidang pertanian

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Penyuluh Swadaya

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Penyuluh Swadaya, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian

Konsep

Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian

Definisi

Jumlah unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, maka semakin banyak fasilitas atau lembaga yang tersedia untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan teknis kepada petani dan pelaku pertanian

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Balai Penyuluhan Pertanian

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Balai Penyuluhan Pertanian, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Kelompok Tani

Konsep

Jumlah Kelompok Tani

Definisi

Jumlah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Kelompok Tani, maka semakin banyak komunitas petani yang terorganisir untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kolektif produktivitas pertanian mereka

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Kelompok Tani

Ukuran

Jumlah

Satuan

Poktan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Tani, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Kontak Tani Nelayan Andalan

Konsep

Jumlah Kontak Tani Nelayan Andalan

Definisi

Jumlah organisasi profesi dan bersifat independent yang berorientasi pada kegiatan sosial ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, berbudayakan agribisnis berbasis di pedesaan dan berwawasan lingkungan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Kontak Tani Nelayan Andalan, semakin banyak kumpulan Petani Nelayan yang terpilih mewakili kelompoknya dengan kualifikasi Ketua Kelompok Tani Nelayan (Kontak Tani Nelayan) serta mempunyai jiwa semangat kepeloporan, adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi serta memiliki mekanisme kerja yang mapan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Kontak Tani Nelayan Andalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kontak Tani Nelayan Andalan, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Luas Panen Padi Palawija

Konsep

Luas Panen Padi Palawija

Definisi

Jumlah luasan tanaman padi palawija yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur

Interpretasi

Semakin besar Luas Panen Padi Palawija, maka semakin besar luas area yang digunakan untuk menanam tanaman padi dan palawija

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Luas Panen Padi Palawija

Ukuran

Luas

Satuan

Hektar

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas Padi Palawija

Variabel Penyusun

Luas Panen Padi Palawija, Kabupaten/Kota, Komoditas Padi Palawija

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Produksi Padi Palawija

Konsep

Produksi Padi Palawija

Definisi

Jumlah hasil perkalian antara luas panen (bersih) padi palawija dengan produktivitas

Interpretasi

Semakin besar Produksi Padi Palawija, maka semakin banyak hasil pertanian yang dihasilkan dari tanaman padi dan palawija

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Produksi Padi Palawija

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas Padi Palawija

Variabel Penyusun

Produksi Padi Palawija, Kabupaten/Kota, Komoditas Padi Palawija

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Produksi Buah

Konsep

Produksi Buah

Definisi

Jumlah hasil perkalian antara luas panen (bersih) buah dengan produktivitas

Interpretasi

Semakin besar Produksi Buah, maka semakin banyak jumlah buah yang dihasilkan dari wilayah tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Produksi Buah Tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas Buah

Variabel Penyusun

Produksi Buah Tahunan, Kabupaten/Kota, Komoditas Buah

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Pohon Buah

Konsep

Jumlah Pohon Buah

Definisi

Jumlah total pohon buah

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Pohon Buah, maka semakin banyak pohon yang ada dalam wilayah tertentu yang menghasilkan buah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Pohon Buah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Pohon

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas Buah

Variabel Penyusun

Jumlah Pohon Buah, Kabupaten/Kota, Komoditas Buah

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Produksi Tanaman Hortikultura

Konsep

Produksi Tanaman Hortikultura

Definisi

Jumlah hasil perkalian antara luas panen (bersih) hortikultura dengan produktivitas

Interpretasi

Semakin besar Produksi Tanaman Hortikultura, maka semakin banyak hasil tanaman hortikultura yang dihasilkan dalam wilayah tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Produksi Tanaman Sayur

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas Tanaman Hortikultura

Variabel Penyusun

Produksi Tanaman Hortikultura, Kabupaten/Kota, Komoditas Tanaman Hortikultura

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda

Konsep

Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda

Definisi

Jumlah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda, maka semakin banyak kelompok petani yang menerima dukungan dari Pemda dalam upaya meningkatkan praktik pertanian, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh isian Nama Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Pariwisata

VARIABEL 1

Jumlah Usaha Restoran

Alias

Jumlah Usaha Restoran

Konsep

Jumlah Usaha Restoran

Definisi

Jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Usaha Restoran=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Usaha Rumah Makan

Alias

Jumlah Usaha Rumah Makan

Konsep

Jumlah Usaha Rumah Makan

Definisi

Jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Usaha Rumah Makan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Nama Objek Wisata

Alias

Nama Objek Wisata

Konsep

Nama Objek Wisata

Definisi

Nama dari segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Objek Wisata=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jenis Objek Wisata

Alias

Jenis Objek Wisata

Konsep

Jenis Objek Wisata

Definisi

Jenis dari segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| - Taman Wisata Alam | - Taman Budaya |
| - Event Budaya | - Desa Kerajinan Tradisional |
| - Buatan | - Taman Nasional |
| - Peninggalan Sejarah dan Purbakala | - Taman Hutan Raya |
| - Art Gallery | - Taman Wisata Laut |
| | - Hutan Mangrove |

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Objek Wisata=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Hotel

Alias

Nama Hotel

Konsep

Nama Hotel

Definisi

Nama usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Hotel=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Kelas Hotel

Alias

Kelas Hotel

Konsep

Kelas Hotel

Definisi

Kelas dari usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Bintang Lima
- Bintang Empat
- Bintang Tiga
- Bintang Dua
- Bintang Satu
- Non Bintang

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kelas Hotel=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Kamar

Alias

Jumlah Kamar

Konsep

Jumlah Kamar

Definisi

Banyaknya kamar pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif
- Isian minimal sama dengan banyaknya Nama Hotel

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Kamar=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Tempat Tidur

Alias

Jumlah Tempat Tidur

Konsep

Jumlah Tempat Tidur

Definisi

Banyaknya tempat tidur pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif
- Isian minimal sama dengan Jumlah Kamar

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Tempat Tidur=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Tenaga Kerja

Alias

Jumlah Tenaga Kerja

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja

Definisi

Banyaknya tenaga kerja pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Tenaga Kerja=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Agen Perjalanan Wisata

Alias

Jumlah Agen Perjalanan Wisata

Konsep

Jumlah Agen Perjalanan Wisata

Definisi

Jumlah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Agen Perjalanan Wisata=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Biro Perjalanan Wisata

Alias

Jumlah Biro Perjalanan Wisata

Konsep

Jumlah Biro Perjalanan Wisata

Definisi

Jumlah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh diisi dengan angka negatif

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Biro Perjalanan Wisata=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Nama Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan

Alias

Nama Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan

Konsep

Nama Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan

Definisi

Nama Destinasi pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, yang dipromosikan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Nama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya

Alias

Nama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya

Konsep

Nama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya

Definisi

Nama Kawasan pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, yang difasilitasi pengembangannya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Nama Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan

Alias

Nama Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan

Konsep

Nama Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan

Definisi

Nama kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang terkait dan saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Nama pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan

Alias

Nama pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan

Konsep

Nama pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan

Definisi

Nama orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang dikembangkan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Nama pelaku ekonomi kreatif

Alias

Nama pelaku ekonomi kreatif

Konsep

Nama pelaku ekonomi kreatif

Definisi

Nama orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama pelaku ekonomi kreatif=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Kabupaten/Kota

Alias

Kabupaten/Kota

Konsep

Kabupaten/Kota

Definisi

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2015

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan

Konsep

Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan

Definisi

Jumlah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

Interpretasi

Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan mencerminkan keragaman pilihan kuliner yang tersedia di wilayah tersebut dan tingkat kompetisi dalam industri ini

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Jumlah Usaha Restoran}) + \Sigma(\text{Jumlah Usaha Rumah Makan})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Buah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Usaha Restoran, Jumlah Usaha Rumah Makan, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Objek Wisata

Konsep

Jumlah Objek Wisata

Definisi

Jumlah dari segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

Interpretasi

Jumlah Objek Wisata mencerminkan keragaman daya tarik yang tersedia dalam wilayah tersebut dan potensi untuk menarik wisatawan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Objek Wisata})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Objek Wisata

Variabel Penyusun

Nama Objek Wisata, Jenis Objek Wisata, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Hotel

Konsep

Jumlah Hotel

Definisi

Jumlah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Hotel, maka semakin banyak pilihan akomodasi hotel yang tersedia dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Nama Hotel})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Buah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Kelas Hotel

Variabel Penyusun

Nama Hotel, Kelas Hotel, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Kamar Hotel

Konsep

Jumlah Kamar Hotel

Definisi

Jumlah kamar yang ada di dalam usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Kamar Hotel, maka semakin banyak kapasitas akomodasi yang tersedia dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Jumlah Kamar})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Buah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Kelas Hotel

Variabel Penyusun

Nama Hotel, Kelas Hotel, Jumlah Kamar, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Tempat Tidur

Konsep

Jumlah Tempat Tidur

Definisi

Jumlah tempat tidur yang ada di dalam usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Tempat Tidur, maka semakin besar kapasitas akomodasi tempat tidur yang tersedia dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Jumlah Tempat Tidur})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Buah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Kelas Hotel

Variabel Penyusun

Nama Hotel, Kelas Hotel, Jumlah Kamar, Jumlah Tempat Tidur, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Agen Biro Perjalanan Wisata

Konsep

Jumlah Agen Biro Perjalanan Wisata

Definisi

Jumlah Agen dan Biro Perjalanan Wisata. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Agen Biro Perjalanan Wisata, maka semakin banyak pilihan untuk mendapatkan bantuan dalam merencanakan perjalanan wisata

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{Jumlah Agen Perjalanan Wisata})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Agen Perjalanan Wisata, Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang

Definisi

Jumlah tenaga kerja di hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang, maka semakin banyak orang yang bekerja di sektor perhotelan yang berfokus pada akomodasi berbintang

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Jumlah Tenaga Kerja}) \text{ WHERE}$
(Kelas Hotel ISNOT Non Bintang)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Hotel, Kelas Hotel, Jumlah Tenaga Kerja, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan

Konsep

Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan

Definisi

Jumlah Destinasi pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, yang dipromosikan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang dipromosikan, maka semakin banyak kawasan yang mendapatkan perhatian khusus untuk pengembangan pariwisata

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Nama Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Destinasi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis yang di Promosikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya

Konsep

Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya

Definisi

Jumlah Kawasan pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, yang difasilitasi pengembangannya

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang difasilitasi pengembangannya, maka semakin banyak wilayah di dalam provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dan dukungan untuk pengembangan sektor pariwisata.

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Nama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan

Konsep

Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan

Definisi

Jumlah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang terkait dan saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan, maka semakin banyak destinasi pariwisata unggulan yang menjadi fokus promosi dan pengembangan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Nama Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Destinasi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan

Konsep

Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan

Definisi

Jumlah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang dikembangkan

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang Dikembangkan, maka semakin banyak individu atau perusahaan yang menerima bantuan atau fasilitas dalam pengembangan usaha jasa pariwisata mereka

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Nama pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Konsep

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Definisi

Jumlah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif, maka semakin banyak individu dan entitas yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam industri kreatif

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{Nama pelaku ekonomi kreatif})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama pelaku ekonomi kreatif

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa**

VARIABEL 1

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Alias

LPM

Konsep

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Definisi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan

Referensi Pemilihan

Permendagri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LPM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Kelompok Binaan LPM

Alias

KLMPK_BINAAN_LPM

Konsep

Kelompok Binaan LPM

Definisi

Kelompok Masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KLMPK_BINAAN_LPM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

LPM Berprestasi

Alias

LPM_BERPRESTASI

Konsep

LPM Berprestasi

Definisi

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi adalah suatu penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada LPM yang telah menunjukkan kinerja atau prestasi yang luar biasa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LPM_BERPRESTASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Alias

PKK

Konsep

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Definisi

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat Sejahtera, Maju dan Mandiri, Kesejahteraan dan Keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

Referensi Pemilihan

Permendagri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PKK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Kelompok Binaan PKK

Alias

KLMPK_BINAAN_PKK

Konsep

Kelompok Binaan PKK

Definisi

Kelompok Binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KLMPK_BINAAN_PKK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

PKK Aktif

Alias

PKK_AKTIF

Konsep

PKK Aktif

Definisi

PKK yang secara konsisten dan rutin mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PKK_AKTIF = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Program Pemberdayaan Masyarakat

Alias

NAMA_PROGRAM

Konsep

Nama Program Pemberdayaan Masyarakat

Definisi

Nama Program Pemberdayaan Masyarakat adalah istilah yang merujuk pada program yang dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal

Referensi Pemilihan

Permendes PDDT Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PROGRAM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Posyandu Aktif

Alias

POSYANDU_AKTIF

Konsep

Posyandu Aktif

Definisi

Posyandu Aktif adalah suatu Posyandu yang secara konsisten dan rutin mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

POSYANDU_AKTIF = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Nama Posyandu

Alias

NAMA_POSYANDU

Konsep

Nama Posyandu

Definisi

Salah satu bentuk identitas yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan satu Posyandu dengan yang lainnya

Referensi Pemilihan

Permendes PDPT Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_POSYANDU = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Kode Desa

Alias

KODE_DESA

Konsep

Kode Desa

Definisi

Kode Desa adalah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap desa dalam sistem administrasi pemerintah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 58 Tahun 2021
Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KODE_DESA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Kode Kelurahan

Alias

KODE_KELURAHAN

Konsep

Kode Kelurahan

Definisi

Kode Kelurahan adalah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap kelurahan dalam sistem administrasi pemerintah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 58 Tahun 2021
Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KODE_KELURAHAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Desa Mandiri

Alias

DESA_MANDIRI

Konsep

Desa Mandiri

Definisi

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi serta ketahanan ekologi secara berkelanjutan

Referensi Pemilihan

Keppmendes PDTT Nomor 80 Tahun 2022
Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_MANDIRI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Desa Maju

Alias

DESA_MAJU

Konsep

Desa Maju

Definisi

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta memiliki kemampuan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan

Referensi Pemilihan

Kepmendes PDTT Nomor 80 Tahun 2022
Tentang Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa Tahun 2022

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_MAJU = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Desa Berkembang

Alias

DESA_BERKEMBANG

Konsep

Desa Berkembang

Definisi

Desa berkembang adalah desa yang potensial untuk menjadi desa maju karena memiliki potensi sumber daya soaial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan

Referensi Pemilihan

Kepmendes PDTT Nomor 80 Tahun 2022
Tentang Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa Tahun 2022

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_BERKEMBANG = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Desa Tertinggal

Alias

DESA_TERTINGGAL

Konsep

Desa Tertinggal

Definisi

Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Referensi Pemilihan

Kepmendes PDTT Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_TERTINGGAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Desa Sangat Tertinggal

Alias

DESA_SNGT_TERTINGGAL

Konsep

Desa Sangat Tertinggal

Definisi

Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk

Referensi Pemilihan

Kepmendes PDTT Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_SNGT_TERTINGGAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Kantor Desa

Alias

KANTOR_DESA

Konsep

Kantor Desa

Definisi

Kantor Desa adalah fasilitas fisik atau bangunan yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KANTOR_DESA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Kode Kecamatan

Alias

KODE_KECAMATAN

Konsep

Kode Kecamatan

Definisi

Kode Kecamatan adalah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap kecamatan dalam sistem administrasi pemerintah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 58 Tahun 2021
Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KODE_KECAMATAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Pos Pelayanan Teknologi

Alias

POSYANTEK

Konsep

Pos Pelayanan Teknologi

Definisi

Pos Pelayanan Teknologi adalah sebuah layanan yang menyediakan informasi, bantuan, dan dukungan kepada masyarakat terkait dengan berbagai aspek teknologi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi

Referensi Pemilihan

Permendes PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

POSYANTEK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Posyantek yang Dibina

Alias

POSYANTEK_DIBINA

Konsep

Posyantek yang Dibina

Definisi

Posyantek yang secara aktif mendapatkan bimbingan, pelatihan, atau dukungan dalam penerapan teknologi tepat guna dan inovasi

Referensi Pemilihan

Permendes PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

POSYANTEK_DIBINA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Badan Usaha Milik Desa

Alias

BUMDES

Konsep

Badan Usaha Milik Desa

Definisi

Suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah desa atau kelurahan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal

Referensi Pemilihan

PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BUMDES = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Bumdes Aktif

Alias

BUMDES_AKTIF

Konsep

Bumdes Aktif

Definisi

Bumdes yang secara konsisten dan teratur melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi dan usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan

Referensi Pemilihan

PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BUMDES_AKTIF = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Profil Desa/ Kelurahan

Alias

PROFIL_DESA_KELURAHAN

Konsep

Profil Desa/ Kelurahan

Definisi

Profil Desa/Kelurahan adalah gambaran komprehensif tentang karakteristik, kondisi, potensi, dan aspek lainnya yang menggambarkan suatu wilayah desa atau kelurahan secara detail

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 12 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROFIL_DESA_KELURAHAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Profil Desa/ Kelurahan Yang Dibina

Alias

PROFIL_DESA_KELURAHAN_DIBINA

Konsep

Profil Desa/ Kelurahan Yang Dibina

Definisi

Profil Desa/Kelurahan yang dibina adalah profil desa atau kelurahan yang dalam proses pembuatannya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, serta masyarakat setempat

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 12 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROFIL_DESA_KELURAHAN_DIBINA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Alias

LKD

Konsep

Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan

Definisi

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebuah organisasi atau badan yang berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan, mengelola, dan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan di tingkat desa atau pedesaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LKD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan Desa

Alias

JMLH_MASYARAKAT_TERLIBAT

Konsep

Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan Desa

Definisi

Banyaknya individu yang secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan di suatu desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur desa

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_MASYARAKAT_TERLIBAT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Jumlah Masyarakat Desa

Alias

JMLH_MASYARAKAT

Konsep

Jumlah Masyarakat Desa

Definisi

Banyaknya individu yang bertempat tinggal di suatu desa tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_MASYARAKAT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Kelompok Masyarakat Pemanfaat TTG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Alias

KM_TTG_PK

Konsep

Kelompok Masyarakat Pemanfaat TTG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Definisi

Sekumpulan individu yang bekerja bersama untuk memahami, mengadopsi, dan menerapkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal guna mengatasi masalah kemiskinan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KM_TTG_PK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 29

Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar

Alias

KM_TTG_DSP

Konsep

Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar

Definisi

Sebuah entitas atau kelompok masyarakat yang terdiri dari penduduk desa atau pemukiman yang bekerja sama untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta teknologi tepat guna (TTG) guna meningkatkan daya saing pasar produk-produk mereka

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KM_TTG_DSP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 30

Nama Desa

Alias

NAMA_DESA

Konsep

Nama Desa

Definisi

Nama desa adalah identifikasi yang diberikan kepada sebuah wilayah pedesaan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_DESA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 31

Kampung/Desa Iklim

Alias

DESA_IKLIM

Konsep

Kampung/Desa Iklim

Definisi

Wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan

Referensi Pemilihan

Permen LHK Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_IKLIM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 32

Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal

Alias

DESA_PEMERINTAHAN_OPTIMAL

Konsep

Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal

Definisi

suatu kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik dan lingkungan yang khas terkait dengan iklim, termasuk pola cuaca, curah hujan, suhu, dan faktor-faktor iklim lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan di desa tersebut.

Referensi Pemilihan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_PEMERINTAHAN_OPTIMAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 33

Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa

Alias

DESA_TERFASILITASI_KERJASAMA

Konsep

Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa

Definisi

Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa adalah desa yang telah menerima bantuan atau dukungan fasilitasi untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan desa-desa lain dalam rangka mencapai tujuan bersama, berbagi pengetahuan, sumber daya, serta mengatasi masalah bersama

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_TERFASILITASI_KERJASAMA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 34

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan

Alias

JMLH_DESA_KS_AD(n)

Konsep

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan

Definisi

Desa yang bekerja sama atau berkolaborasi dalam berbagai bentuk proyek, program, atau kegiatan antar desa pada tahun berjalan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DESA_KS_AD(n) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 35

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Alias

JMLH_DESA_KS_AD(n-1)

Konsep

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Definisi

desa yang bekerja sama atau berkolaborasi dalam berbagai bentuk proyek, program, atau kegiatan antar desa pada tahun sebelumnya

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DESA_KS_AD(n-1) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 36

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Alias

LK_KD_TERFASILITASI

Konsep

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Definisi

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan adalah organisasi dan struktur sosial di tingkat desa yang mendapatkan dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam rangka lebih efektif dalam menjalankan peran dan fungsi mereka dalam masyarakat setempat

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LK_KD_TERFASILITASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 37

Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun berjalan

Alias

JMLH_LK_LD_PRODUKTIF(n)

Konsep

Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun berjalan

Definisi

Banyaknya desa yang telah aktif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif dan program pemberdayaan di tahun tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_LK_LD_PRODUKTIF(n) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 38

Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun sebelumnya

Alias

JMLH_LK_LD_PRODUKTIF(n-1)

Konsep

Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun sebelumnya

Definisi

Banyaknya desa yang telah aktif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif dan program pemberdayaan di tahun sebelumnya

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_LK_LD_PRODUKTIF(n-1) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 39

Jumlah Desa Tertinggal yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang per tahun

Alias

JMLH_DT_MKDB

Konsep

Jumlah Desa Tertinggal yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang per tahun

Definisi

Jumlah Desa Tertinggal yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang per tahun adalah total desa yang sebelumnya tergolong sebagai desa tertinggal, namun kemudian mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk status desa berkembang

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DT_MKDB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 40

Jumlah Desa Berkembang yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri per tahun

Alias

JMLH_DB_MKDM

Konsep

Jumlah Desa Berkembang yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri per tahun

Definisi

Jumlah Desa Berkembang yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri per tahun adalah jumlah desa yang sebelumnya tergolong sebagai desa berkembang, namun mengalami perubahan dalam berbagai aspek sehingga memenuhi kriteria untuk berubah menjadi desa mandiri

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_DB_MKDM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Konsep

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Definisi

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah banyaknya organisasi atau lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan potensi masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan memfasilitasi pembangunan masyarakat di tingkat lokal

Interpretasi

Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak dapat mengindikasikan semakin banyaknya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (LPM)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Kelompok Binaan LPM

Konsep

Kelompok Binaan LPM

Definisi

Kelompok Binaan LPM adalah Kelompok Masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Interpretasi

Semakin banyak kelompok binaan LPM dapat mengindikasikan bahwa LPM sedang aktif mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (KLMPK_BINAAN_LPM)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Binaan LPM

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah LPM Berprestasi

Konsep

Jumlah LPM Berprestasi

Definisi

Jumlah LPM Berprestasi adalah banyaknya LPM yang berhasil mengimplementasikan program-program atau proyek-proyek yang efektif dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, budaya, atau lingkungan di dalam komunitas tertentu

Interpretasi

Meningkatnya LPM yang berprestasi mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai LPM berhasil mencapai hasil yang positif

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{LPM_BERPRESTASI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

LPM Berprestasi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Konsep

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Definisi

Jumlah kelompok binaan LPM dibagi dengan jumlah kelompok LPM di suatu wilayah dan periode waktu tertentu

Interpretasi

Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan dapat mengindikasikan bahwa LPM semakin fokus dan efektif dalam mencapai masyarakat lebih luas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KLMPK_BINAAN_LPM}) / \Sigma (\text{LPM})$$

Ukuran

Rata-Rata

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Kelompok Binaan LPM, Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Persentase LPM Berprestasi

Konsep

Persentase LPM Berprestasi

Definisi

Perbandingan antara jumlah LPM berprestasi dengan jumlah LPM dikali 100%

Interpretasi

Meningkatnya persentase LPM berprestasi menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LPM semakin efektif

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\sum (\text{LPM_BERPRESTASI})}{\sum (\text{LPM})} \right) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah LPM Berprestasi, Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Konsep

Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Definisi

Jumlah PKK dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK

Interpretasi

Jika jumlah pemberdayaan kesejahteraan keluarga meningkat, maka lebih banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga

Metode/Rumus Penghitungan

$$\sum (\text{PKK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Kelompok Binaan PKK

Konsep

Kelompok Binaan PKK

Definisi

Kelompok Binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis

Interpretasi

Semakin banyak kelompok binaan PKK dapat mengindikasikan bahwa PKK sedang aktif dalam mendukung dan membina keluarga-keluarga di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KLMPK_BINAAN_PKK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Binaan PKK

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah PKK Aktif

Konsep

Jumlah PKK Aktif

Definisi

Banyaknya PKK yang terlibat secara aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam suatu wilayah atau komunitas

Interpretasi

Peningkatan jumlah PKK yang aktif dapat menunjukkan bahwa PKK semakin berfokus pada upaya pemberdayaan keluarga di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PKK_AKTIF})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

PKK Aktif

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Konsep

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Definisi

Jumlah kelompok binaan PKK dibagi dengan jumlah kelompok PKK di suatu wilayah dan periode waktu tertentu

Interpretasi

Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dapat mengindikasikan bahwa PKK semakin fokus dan efektif dalam mencapai masyarakat lebih luas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KLMPK_BINAAN_PKK}) / \Sigma (\text{PKK})$$

Ukuran

Rata-Rata

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Kelompok Binaan PKK, Jumlah PKK

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase PKK Aktif

Konsep

Persentase PKK Aktif

Definisi

Perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK dikali 100%

Interpretasi

Dengan persentase PKK aktif yang semakin besar, potensi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dapat menjadi lebih besar

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PKK_AKTIF}) / \Sigma (\text{PKK})$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah PKK Aktif, Jumlah PKK

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat

Konsep

Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat

Definisi

Banyaknya program atau kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh lembaga, organisasi, atau badan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan potensi masyarakat dalam berbagai aspek

Interpretasi

Peningkatan Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat dapat mencerminkan pendekatan yang lebih holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (NAMA_PROGRAM)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Program Pemberdayaan Masyarakat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Posyandu Aktif

Konsep

Jumlah Posyandu Aktif

Definisi

Jumlah Posyandu Aktif adalah banyaknya Posyandu yang secara aktif beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam suatu wilayah tertentu

Interpretasi

Jika jumlah Posyandu Aktif meningkat, maka terdapat peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (POSYANDU_AKTIF)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Posyandu Aktif

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Total Posyandu

Konsep

Jumlah Total Posyandu

Definisi

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi

Interpretasi

Peningkatan jumlah Posyandu mencerminkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NAMA_POSYANDU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Posyandu

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Persentase Posyandu Aktif

Konsep

Persentase Posyandu Aktif

Definisi

Perbandingan antara jumlah Posyandu aktif dengan jumlah Posyandu dikali 100%

Interpretasi

Persentase Posyandu Aktif yang semakin besar dapat mencerminkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar di tingkat desa atau kelurahan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\Sigma (\text{POSYANDU_AKTIF})) / \Sigma (\text{NM_POSYANDU})$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Posyandu Aktif, Jumlah Total Posyandu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Desa

Konsep

Jumlah Desa

Definisi

Desa adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan dan cenderung memiliki wilayah yang lebih luas dan memiliki penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan

Interpretasi

Peningkatan jumlah desa dapat memberikan masyarakat lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KODE_DESA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

Klasifikasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Variabel Penyusun

Kode Desa, Nama Desa

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 16

Jumlah Desa Berkembang

Konsep

Jumlah Desa Berkembang

Definisi

Jumlah desa berkembang adalah banyaknya desa yang berada dalam kategori berkembang

Interpretasi

Banyaknya desa berkembang dapat mengindikasikan adanya tantangan dan masalah pembangunan yang lebih besar di suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{DESA_BERKEMBANG})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa Berkembang

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 17

Jumlah Desa Maju

Konsep

Jumlah Desa Maju

Definisi

Jumlah desa maju adalah total desa yang telah memenuhi kriteria desa maju

Interpretasi

Banyaknya Desa Maju menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{DESA_MAJU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa Maju

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 18

Jumlah Desa Mandiri

Konsep

Jumlah Desa Mandiri

Definisi

Jumlah desa mandiri adalah banyaknya desa yang mampu mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan atau dukungan eksternal yang berkelanjutan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah desa mandiri dapat membantu menciptakan ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat lokal

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{DESA_MANDIRI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa Mandiri

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 19

Jumlah Desa Tertinggal

Konsep

Jumlah Desa Tertinggal

Definisi

Jumlah desa tertinggal merupakan istilah yang merujuk kepada jumlah desa atau wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar.

Interpretasi

Banyaknya jumlah desa tertinggal dapat mengindikasikan adanya masalah pembangunan dan tantangan yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{DESA_TERTINGGAL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa Tertinggal

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 20

Jumlah Desa Sangat Tertinggal

Konsep

Jumlah Desa Sangat Tertinggal

Definisi

Jumlah desa sangat tertinggal merujuk pada banyaknya desa yang menghadapi keterbelakangan dan tantangan pembangunan yang sangat serius

Interpretasi

Jika terdapat banyak desa yang sangat tertinggal, ini menunjukkan adanya tantangan pembangunan yang ekstrem dan mendalam di wilayah-wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{DESA_SNGT_TERTINGGAL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa Sangat Tertinggal

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 21

Jumlah Kelurahan

Konsep

Jumlah Kelurahan

Definisi

Kelurahan adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan yang biasanya memiliki penduduk yang lebih padat dan wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan desa

Interpretasi

Peningkatan jumlah kecamatan dapat memberikan masyarakat lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (KODE_KELURAHAN)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelurahan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kode Kelurahan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 22

Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Desa

Konsep

Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Desa

Definisi

Banyaknya kantor atau bangunan yang digunakan sebagai pusat administrasi dan pemerintahan desa

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak kantor pemerintahan desa, perluasan jangkauan wilayah administratif akan memerlukan peningkatan dalam koordinasi dan manajemen

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (KANTOR_DESA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kantor Desa

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 23

Jumlah Kecamatan

Konsep

Jumlah Kecamatan

Definisi

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota

Interpretasi

Dengan lebih banyak kecamatan, pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KODE_KECAMATAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kecamatan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kode Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 24

Jumlah Posyantek

Konsep

Jumlah Posyantek

Definisi

Banyaknya fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas lain untuk memberikan akses, informasi, atau bantuan terkait dengan teknologi, terutama dalam konteks layanan publik

Interpretasi

Lebih banyak Posyantek dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat di daerah pedesaan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{POSYANTEK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pos Pelayanan Teknologi

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 25

Posyantek Yang Dibina

Konsep

Posyantek Yang Dibina

Definisi

Posyantek yang dibina oleh pihak terkait dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka

Interpretasi

Peningkatan jumlah posyantek yang dibina dapat membantu memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{POSYANTEK_DIBINA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Posyantek yang Dibina

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 26

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Konsep

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Definisi

Jumlah Bumdes adalah banyaknya organisasi atau badan hukum yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa atau kelurahan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal

Interpretasi

Dengan lebih banyak Bumdes, masyarakat desa dapat memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha atau mata pencaharian

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{BUMDES})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Badan Usaha Milik Desa

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 27

Jumlah Bumdes Yang Aktif

Konsep

Jumlah Bumdes Yang Aktif

Definisi

Banyaknya Bumdes yang sedang beroperasi dan terlibat dalam kegiatan usaha atau proyek pada suatu periode waktu tertentu

Interpretasi

Dengan lebih banyak Bumdes yang aktif, pemberdayaan ekonomi di tingkat desa dapat meningkat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{BUMDES_AKTIF})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bumdes Aktif

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 28

Bumdes Yang Dibina

Konsep

Bumdes Yang Dibina

Definisi

Bumdes Yang Dibina dapat berarti bahwa badan usaha ini menerima bantuan, pelatihan, pembiayaan, atau pendampingan dalam berbagai aspek, seperti manajemen, pengembangan produk atau layanan, pemasaran, dan aspek teknis lainnya dari pihak-pihak tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah Bumdes yang dibina berpotensi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat tercapai

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{BUMDES_DIBINA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bumdes yang Dibina

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 29

Jumlah Profil Desa/Kelurahan

Konsep

Jumlah Profil Desa/Kelurahan

Definisi

Banyaknya profil atau gambaran umum yang disusun untuk setiap desa atau kelurahan dalam suatu wilayah

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak profil desa atau kelurahan yang tersedia, pemerintah lokal dapat lebih transparan dalam mempublikasikan informasi mengenai wilayah, pengelolaan dana publik, dan program-program pembangunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PROFIL_DESA_KELURAHAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Profil Desa/Kelurahan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 30

Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina

Konsep

Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina

Definisi

Profil Desa Yang Dibina oleh pihak terkait dengan tujuan memberikan panduan kepada pemerintah, lembaga pembangunan, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal

Interpretasi

Semakin banyak profil desa atau kelurahan yang dibina dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas isi profil yang dibuat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PROFIL_DESA_KELURAHAN_DIBINA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Profil Desa/Kelurahan yang Dibina

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 31

Persentase Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina

Konsep

Persentase Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina

Definisi

Perbandingan antara jumlah profil Desa/Kelurahan yang dibina dengan jumlah profil Desa/Kelurahan dikali 100%

Interpretasi

Dengan lebih banyak desa atau kelurahan yang memiliki profil yang dibina, akan ada peningkatan informasi dan pemahaman tentang karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap desa atau kelurahan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma (\text{PROFIL_DESA_KELURAHAN})}{\Sigma (\text{DESA_KELURAHAN})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah Profil Desa/Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 32

Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan

Konsep

Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan

Definisi

Organisasi atau entitas yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan berkelanjutan dalam lingkup lokal

Interpretasi

Dengan lebih banyak lembaga kemasyarakatan yang aktif terlibat dalam pembangunan, kolaborasi antara berbagai kelompok dan lembaga dapat meningkat, sehingga membawa sinergi yang lebih baik dalam usaha pembangunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{LKD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 33

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Konsep

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Definisi

Partisipasi masyarakat dalam membangun desa merujuk pada keterlibatan aktif warga desa atau kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di tingkat lokal

Interpretasi

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil pembangunan sehingga dapat berkontribusi pada keberlanjutan program dan proyek

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_MASYARAKAT_TERLIBAT}}{\text{JMLH_MASYARAKAT}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan Desa, Jumlah Masyarakat Desa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 34

Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat TTG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Konsep

Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat TTG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Definisi

Banyaknya kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan aktif dalam memanfaatkan program-program atau teknologi tepat guna (TTG) sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi atau mengatasi masalah kemiskinan

Interpretasi

Semakin banyak kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG dalam penanggulangan kemiskinan bisa berarti peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya perubahan sosial dan ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KM_TTG_PK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok Masyarakat

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Masyarakat Pemanfaat TTG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 35

Jumlah Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar

Konsep

Jumlah Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar

Definisi

Banyaknya kelompok di desa yang telah terbentuk dengan tujuan mengelola sarana dan prasarana serta memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan tingkat daya saing yang memungkinkan mereka bersaing di pasar ekonomi

Interpretasi

Jika kelompok desa mampu memanfaatkan sarana, prasarana, dan teknologi tepat guna dengan daya saing di pasar, ini dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok dan anggotanya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (KM_TTG_DSP)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 36

Jumlah PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan

Konsep

Jumlah PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan

Definisi

Banyaknya kelompok PKK yang secara aktif terlibat dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta keluarga di desa atau kelurahan

Interpretasi

Semakin banyak PKK yang aktif dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dapat menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (PKK_AKTIF_PM)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 37

Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Konsep

Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Definisi

Banyaknya desa atau kelurahan yang berhasil menjaga keselarasan atau konsistensi antara rencana pembangunan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan

Interpretasi

Peningkatan yang terjadi dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (NAMA_DESA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Desa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 38

Jumlah Kampung/Desa Iklim

Konsep

Jumlah Kampung/Desa Iklim

Definisi

Banyaknya kampung atau desa di suatu wilayah yang secara aktif terlibat dalam upaya penyesuaian dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Interpretasi

Peningkatan Jumlah Kampung/Desa Iklim dapat menindikasikan upaya mitigasi perubahan iklim.

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (DESA_IKLIM)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kampung/Desa Iklim

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 39

Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal

Konsep

Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal

Definisi

Banyaknya desa di suatu wilayah atau negara yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk mengelola urusan pemerintahan desa dengan efisien, efektif, dan transparan

Interpretasi

Peningkatan jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal dapat mengindikasikan peningkatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (DESA_PEMERINTAHAN_OPTIMAL)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 40

Indeks Desa Membangun

Konsep

Indeks Desa Membangun

Definisi

Indeks Desa Membangun adalah alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan kesejahteraan di suatu desa yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

Interpretasi

1. Desa Sangat Tertinggal (<0,491)
2. Desa Tertinggal (>0,491)
3. Desa Berkembang (>0,599 dan <0,707)
4. Desa Maju (>0,707 dan <0,815)
5. Desa Mandiri (>0,815)

Metode/Rumus Penghitungan

$$IDM = 1/3 (IKS \times IKE \times IKL)$$

Ukuran

Indeks

Satuan

Nilai IDM

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Indikator Ketahanan Sosial, Indikator Ketahanan Ekonomi, Indikator Ketahanan Lingkungan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 41

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa

Konsep

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa

Definisi

Banyaknya desa di suatu wilayah yang telah terlibat dalam upaya kerjasama dan kolaborasi antar desa

Interpretasi

Jika lebih banyak desa yang mendapatkan fasilitasi untuk menjalankan kerjasama antar desa, maka kerjasama lintas desa dapat meningkat dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{DESA_TERFASILITASI_KERJASAMA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 42

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Konsep

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Definisi

Perhitungan perubahan jumlah desa yang terlibat dalam kerja sama antar desa dari tahun ke tahun

Interpretasi

Dengan penambahan desa yang terlibat dalam kerja sama antar desa, potensi sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan wilayah dapat meningkat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JMLH_DESA_KS_AD}(n) - \text{JMLH_DESA_KS_AD}(n-1)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan, Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 43

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Konsep

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Definisi

Banyaknya lembaga kemasyarakatan di suatu desa yang telah mendapatkan dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan mereka (peningkatan kapasitas) dan diberdayakan agar dapat berperan lebih efektif dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan desa

Interpretasi

Jika lebih banyak lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa terfasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dan diberdayakan, ini bisa mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di tingkat desa

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{LK_LD_TERFASILITAS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 44

Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan

Konsep

Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan

Definisi

Banyaknya desa di suatu wilayah yang telah mengalami peningkatan dalam hal lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi yang produktif serta upaya pemberdayaan masyarakat

Interpretasi

Jika lebih banyak desa berhasil meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya dalam kegiatan ekonomi produktif, potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat dapat lebih besar

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JMLH_LK_LD_PRODUKTIF}(n) - \text{JMLH_LK_LD_PRODUKTIF}(n-1)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun berjalan, Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun sebelumnya

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 45

Persentase pengentasan desa tertinggal

Konsep

Persentase pengentasan desa tertinggal

Definisi

Proporsi atau bagian dari populasi desa yang sebelumnya dianggap tertinggal dan kurang berkembang yang berhasil mengalami perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya

Interpretasi

Persentase yang meningkat dapat mengindikasikan keberhasilan dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JMLH_DT_MKDB} / \text{JMLH_D} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Desa Tertinggal yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang per tahun

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 46

Persentase peningkatan status desa mandiri

Konsep

Persentase peningkatan status desa mandiri

Definisi

Proporsi desa yang sebelumnya tidak mandiri secara ekonomi atau sosial dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri

Interpretasi

Peningkatan persentase desa yang mencapai status mandiri dapat mengindikasikan peningkatan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya lokal, mengambil keputusan, dan menjalankan program-program pembangunan secara independen

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{JMLH_DB_MKDM} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Desa Berkembang yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri per tahun

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengumpulan Data Lapangan / Gedung Olahraga di Kalimantan Timur 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Sebagai Sarana Penunjang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Meningkatkan Kebugaran Serta Memberikan Ruang Terbuka kepada Masyarakat Luas untuk Berolahraga. Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Karna Ada Aktifitas Jual Beli, Karna Fungsinya Bisa Serbaguna, Maka Acara Nasional Baik Even dan Lainnya Bisa Juga dilaksanakan di Sarpras Tersebut
Penanggung Jawab Kegiatan:	Sekretaris

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Nama GOR / Lapangan
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) Dokumentasi
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

VARIABEL 1

Cabang Olahraga

Alias

CABANG_OLAHRAGA

Konsep

Cabang Olahraga

Definisi

Cabang olahraga adalah disiplin atau jenis aktivitas fisik yang dilakukan oleh individu atau tim yang memiliki aturan, tujuan, dan karakteristik tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Keolahragaan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Bela Diri
- Terukur
- Permainan
- Beregu

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

CABANG_OLAHRAGA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang Berwirausaha

Alias

JMLH_PEMUDA_WIRSAUSAHA

Konsep

Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang Berwirausaha

Definisi

Jumlah pemuda yang berwirausaha adalah jumlah individu pada kelompok usia 16-30 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan wirausaha atau bisnis

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEMUDA_WIRSAUSAHA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jumlah Pemuda (16-30 tahun)

Alias

JMLH_PEMUDA

Konsep

Jumlah Pemuda (16-30 tahun)

Definisi

Jumlah pemuda adalah banyaknya penduduk pada kelompok usia 16-30 tahun pada wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PEMUDA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jumlah Klub Olahraga

Alias

JMLH_KLUB_OLAHRAGA

Konsep

Jumlah Klub Olahraga

Definisi

Jumlah klub olahraga mengacu pada total organisasi yang berfokus pada pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan olahraga dalam berbagai cabang olahraga tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_KLUB_OLAHRAGA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah Gedung Olahraga

Alias

JMLH_GEDUNG_OLAHRAGA

Konsep

Jumlah Gedung Olahraga

Definisi

Jumlah gedung olahraga adalah banyaknya fasilitas fisik berupa gedung yang dirancang dan digunakan khusus untuk kegiatan olahraga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GEDUNG_OLAHRAGA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah Penduduk

Alias

JMLH_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah penduduk adalah banyaknya individu yang tinggal di suatu wilayah geografis pada suatu waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PENDUDUK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Alias

JMLH_GELANGGANG

Konsep

Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Definisi

Jumlah gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta) merujuk pada jumlah fasilitas atau bangunan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-profit untuk tujuan kegiatan dan program remaja

Referensi Pemilihan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GELANGGANG = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Sarana dan Prasarana Olahraga

Alias

SPO

Konsep

Sarana dan Prasarana Olahraga

Definisi

Sarana dan prasarana olahraga adalah elemen-elemen fisik dan non-fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

SPO = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Atlet Daerah yang Berprestasi

Alias

JMLH_ATLET_BERPRESTASI

Konsep

Jumlah Atlet Daerah yang Berprestasi

Definisi

Jumlah atlet daerah yang berprestasi adalah total individu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam bidang olahraga

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Keolahragaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_ATLET_BERPRESTASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Organisasi Pemuda

Alias

ORGANISASI_PEMUDA

Konsep

Organisasi Pemuda

Definisi

Organisasi pemuda adalah kelompok atau entitas yang didirikan dengan tujuan khusus untuk memfasilitasi kegiatan, pembinaan, atau pengembangan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, budaya, kepemimpinan, kewirausahaan, olahraga, atau aktivitas lain yang relevan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2011 Tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan
Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan
Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ORGANISASI_PEMUDA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Pramuka

Alias

PRAMUKA

Konsep

Pramuka

Definisi

Anggota pramuka adalah individu yang terdaftar dan terlibat dalam Gerakan Pramuka, yaitu organisasi kepanduan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter, keterampilan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial anak muda

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PRAMUKA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Tingkatan Pramuka

Alias

TINGKATAN_PRAMUKA

Konsep

Tingkatan Pramuka

Definisi

Tingkatan pramuka adalah sistem hierarki yang digunakan dalam organisasi gerakan pemuda untuk mengelompokkan dan mengatur anggota Pramuka berdasarkan usia, pengalaman, dan tingkat kemampuan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Siaga
- Penggalang
- Penegak
- Pendega
- Pembina

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TINGKATAN_PRAMUKA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Nama Atlet

Alias

NAMA_ATLET

Konsep

Nama Atlet

Definisi

Nama atlet adalah informasi yang mencakup nama lengkap individu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_ATLET = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jenis Kelamin

Alias

JNS_KELAMIN

Konsep

Jenis Kelamin

Definisi

Jenis kelamin atlet mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JNS_KELAMIN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Umur

Alias

UMUR

Konsep

Umur

Definisi

Informasi mengenai umur dari individu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

UMUR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Nama Kegiatan

Alias

NAMA_KEGIATAN

Konsep

Nama Kegiatan

Definisi

Nama kegiatan mengacu pada label atau penamaan yang diberikan kepada suatu kegiatan olahraga

Referensi Pemilihan

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KEGIATAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Kegiatan Kepemudaan

Alias

KEGIATAN_PEMUDA

Konsep

Kegiatan Kepemudaan

Definisi

Kegiatan kepemudaan adalah aktivitas atau program yang ditujukan untuk melibatkan, mengembangkan, dan memberdayakan para pemuda atau generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial, budaya, olahraga, kewirausahaan, dan lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KEGIATAN_PEMUDA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Nama Wirausaha

Alias

NAMA_WIRAUSAHA

Konsep

Nama Wirausaha

Definisi

Nama wirausaha mengacu pada identitas dari individu yang menjalankan suatu usaha tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, Sociopreneur, dan Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2021

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_WIRAUSAHA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Nomor Induk Kependudukan Wirausaha

Alias

NIK_WIRAUSAHA

Konsep

Nomor Induk Kependudukan Wirausaha

Definisi

Nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang merupakan seorang wirausaha muda

Referensi Pemilihan

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, Sociopreneur, dan Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2021

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NIK_WIRAUSAHA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Penghargaan Olahraga

Alias

PENGHARGAAN

Konsep

Penghargaan Olahraga

Definisi

Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi adalah pengakuan resmi atau penghormatan yang diberikan kepada individu, atlet, pelatih, atau orang lain yang telah menunjukkan tingkat komitmen dan prestasi luar biasa dalam dunia olahraga

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PBIOBB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Olahraga Unggulan

Alias

OLAHRAGA_UNGGULAN

Konsep

Olahraga Unggulan

Definisi

Olahraga Unggulan adalah istilah yang mengacu pada cabang olahraga yang memiliki popularitas dan prestasi yang tinggi dalam suatu daerah tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Keolahragaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

OLAHRAGA_UNGGULAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Organisasi Pemuda

Konsep

Jumlah Organisasi Pemuda

Definisi

Jumlah organisasi pemuda adalah banyaknya organisasi yang dibentuk atau dijalankan oleh pemuda

Interpretasi

Kehadiran banyak organisasi pemuda dapat mendorong lebih banyak pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, atau politik, yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran dan peluang bagi pemuda untuk berkontribusi positif pada masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (ORGANISASI_PEMUDA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Organisasi Pemuda

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Konsep

Jumlah Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Definisi

Banyaknya penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi dalam bidang olahraga

Interpretasi

Banyaknya penghargaan dapat memberikan motivasi kepada atlet untuk berlatih lebih keras dan berusaha untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (PENGHARGAAN_OLAHRAGA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Penghargaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Rasio Jumlah Klub Olahraga

Konsep

Rasio Jumlah Klub Olahraga

Definisi

Rasio jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 1000 penduduk suatu wilayah tertentu

Interpretasi

Tingginya rasio jumlah klub olahraga dapat mengindikasikan tingkat aksesibilitas yang lebih baik terhadap klub olahraga dalam suatu wilayah tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\sum \text{KLUB_OLAHRAGA})}{\sum \text{(PENDUDUK)}} \times 1000$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Klub Olahraga, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Rasio Jumlah Gedung Olahraga

Konsep

Rasio Jumlah Gedung Olahraga

Definisi

Rasio jumlah gedung olahraga merujuk pada perbandingan antara jumlah gedung olahraga terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah

Interpretasi

Tingginya rasio jumlah gedung olahraga dapat mengindikasikan tingkat akses yang lebih baik terhadap fasilitas olahraga dalam suatu daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\sum \text{JMLH_GDNG_OLAHRAGA})}{\sum \text{(PENDUDUK)}} \times 1000$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Gedung Olahraga, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Rasio Gelanggang/Balai Remaja

Konsep

Rasio Gelanggang/Balai Remaja

Definisi

Perbandingan banyaknya jumlah gelanggang atau balai remaja terhadap banyaknya jumlah penduduk

Interpretasi

Dengan lebih banyak gelanggang/balai remaja, remaja dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan program yang sesuai dengan minat mereka

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\Sigma \text{JMLH_GELANGGANG})}{\Sigma \text{(PENDUDUK)}} \times 100$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Gelanggang/Balai Remaja, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Lembaga Olahraga

Konsep

Jumlah Lembaga Olahraga

Definisi

Jumlah Lembaga Olahraga merujuk pada total lembaga atau organisasi yang secara resmi terlibat dalam pengembangan, organisasi, atau pengelolaan aktivitas dan program olahraga

Interpretasi

Semakin banyak lembaga olahraga dapat mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam bidang olahraga, baik itu sebagai atlet, pelatih, atau pengurus

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma \text{(LEMBAGA_OLAHRAGA)}$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Cabang Olahraga

Variabel Penyusun

Nama Lembaga Olahraga, Tanggal Berdiri, Cabang Olahraga

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan

Konsep

Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan

Definisi

Banyaknya wirausaha yang telah mencapai tingkat prestasi atau kesuksesan tertentu dan menerima bantuan modal untuk mengembangkan atau meningkatkan usahanya

Interpretasi

Semakin banyak wirausaha muda yang mendapatkan bantuan akses permodalan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (NIK_WIRAUSAHA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Wirausaha, NIK

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Sarana dan Prasarana Olahraga

Konsep

Sarana dan Prasarana Olahraga

Definisi

Sarana dan prasarana olahraga merujuk pada total infrastruktur, fasilitas, dan perlengkapan yang tersedia untuk mendukung berbagai aktivitas olahraga

Interpretasi

Banyaknya sarana dan prasarana olahraga dapat membuka peluang bagi individu yang memiliki bakat olahraga untuk mengembangkan potensi mereka

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (SPO)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Cabang Olahraga

Variabel Penyusun

Sarana dan Prasarana Olahraga, Cabang Olahraga

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Persentase Masyarakat yang Berolahraga

Konsep

Persentase Masyarakat yang Berolahraga

Definisi

Persentase masyarakat yang berolahraga adalah perbandingan total masyarakat yang secara aktif rutin terlibat dalam kegiatan olahraga atau aktivitas fisik terhadap total masyarakat di suatu wilayah dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase masyarakat yang berolahraga menunjukkan semakin besarnya kemungkinan bagi masyarakat untuk memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\text{JMLH_MASYARAKAT_OLAHRAGA}}{\text{JMLH_MASYARAKAT}} \right) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Masyarakat yang Berolahraga,
Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Pemuda yang Berwirausaha

Konsep

Persentase Pemuda yang Berwirausaha

Definisi

Persentase pemuda yang berwirausaha mengacu pada perbandingan jumlah pemuda yang berwirausaha dengan jumlah pemuda di suatu daerah pada waktu tertentu dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pemuda yang berwirausaha dapat menghasilkan inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\text{JMLH_PEMUDA_BERWIRAUSAHA}}{\text{JMLH_WIRAUSAHA}} \right) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pemuda yang Berwirausaha,
Jumlah Pemuda

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Persentase Atlet Daerah yang Berprestasi

Konsep

Persentase Atlet Daerah yang Berprestasi

Definisi

Persentase atlet daerah yang berprestasi adalah perbandingan antara jumlah atlet daerah yang berprestasi dengan jumlah atlet daerah dikali 100%

Interpretasi

Tinggi persentase atlet daerah yang berprestasi dapat mendorong pemerintah dan komunitas lokal untuk meningkatkan fasilitas olahraga di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\text{JMLH_ATLET_BERPRESTASI}}{\text{JMLH_ATLET}}\right) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Atlet yang Berprestasi, Jumlah Atlet, Nama Atlet, Jenis Kelamin, Umur

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Pramuka

Konsep

Jumlah Pramuka

Definisi

Jumlah pramuka adalah banyaknya anggota dari gerakan pramuka, yaitu gerakan kepanduan dan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk mempersiapkan pemuda dan remaja agar menjadi warga negara yang tangguh, beriman, berakhlak mulia, cerdas, sehat, cinta alam, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat dan negara

Interpretasi

Semakin banyak jumlah anggota pramuka berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan masyarakat dan negara, baik melalui kegiatan bakti sosial, pengabdian masyarakat, atau keikutsertaan dalam proyek-proyek komunitas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PRAMUKA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Tingkat Pramuka

Variabel Penyusun

Pramuka, Tingkatan Pramuka

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jenis Olahraga Unggulan

Konsep

Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan

Definisi

Banyaknya pengusaha muda yang telah mengukir jejak prestasi dalam dunia wirausaha dan diakui atas pencapaian mereka, yang mana sebagai hasilnya, mereka mendapatkan dukungan keuangan atau permodalan tambahan untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut

Interpretasi

Banyaknya bantuan permodalan dapat membantu wirausaha muda berprestasi untuk mengembangkan bisnis yang lebih berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (WMBMBAM)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Konsep

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Definisi

Jumlah kegiatan kepemudaan merujuk kepada total aktivitas, program, atau inisiatif yang dirancang dan diselenggarakan untuk melibatkan, mengembangkan, dan memfasilitasi partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kegiatan kepemudaan menunjukkan bahwa lebih banyak peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung pertumbuhan pribadi, perkembangan keterampilan, dan pemberdayaan

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (KEGIATAN_KEPEMUDAAN)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kegiatan Kepemudaan, Waktu Pelaksanaan, Tempat Pelaksanaan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Kegiatan Olahraga

Konsep

Jumlah Kegiatan Olahraga

Definisi

Jumlah kegiatan olahraga adalah banyaknya acara olahraga yang diadakan oleh suatu organisasi atau komunitas tertentu

Interpretasi

Lebih banyak kegiatan olahraga dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan keterampilan olahraga yang mereka miliki

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NAMA_KEGIATAN_OLAHRAGA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kegiatan, Cabang Olahraga

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu**

VARIABEL 1

Izin Usaha yang Dikeluarkan

Alias

IZIN_USAHA_DIKELUARKAN

Konsep

Izin Usaha yang Dikeluarkan

Definisi

Izin usaha yang dikeluarkan merujuk pada jumlah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada entitas bisnis atau individu untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

IZIN_USAHA_DIKELUARKAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Izin

Alias

JENIS_IZIN

Konsep

Jenis Izin

Definisi

Jenis izin usaha mengacu pada variasi klasifikasi izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada entitas bisnis atau individu untuk beroperasi dalam berbagai sektor dan kegiatan ekonomi

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Izin untuk Hak Pengusahaan Perkebunan
- Izin untuk Hak Pengusahaan Kehutanan
- Izin untuk Hak Pengusahaan Pertambangan

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_IZIN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Perizinan Investasi Penanaman Modal Asing yang Dikeluarkan/Setujui

Alias

IZIN_PMA_DISETUIJUI

Konsep

Perizinan Investasi Penanaman Modal Asing yang Dikeluarkan/Setujui

Definisi

Perizinan investasi penanaman modal asing yang disetujui mengacu pada jumlah izin resmi yang telah diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada investor asing untuk melakukan investasi dalam bentuk modal di dalam negeri dan telah mendapatkan persetujuan untuk menjalankan kegiatan tersebut

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

IZIN_PMA_DISETUIJUI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Perizinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Dikeluarkan/Setujui

Alias

IZIN_PMDN_DISETUIJUI

Konsep

Perizinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Dikeluarkan/Setujui

Definisi

Perizinan investasi penanaman modal dalam negeri yang disetujui merujuk pada jumlah izin resmi yang telah diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada investor dalam negeri untuk melakukan investasi modal dalam wilayah negara tersebut dan telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

IZIN_PMDN_DISETUIJUI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

MoU Kerjasama dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku

Alias

MOU_BERLAKU

Konsep

MoU Kerjasama dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku

Definisi

MoU kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku mengacu pada total kesepakatan tertulis yang masih berlaku antara wilayah atau entitas dengan daerah lain, yang mengatur kerja sama dalam berbagai bidang dan tetap berlaku pada saat tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

MOU_BERLAKU=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alias

NAMA_PTSP

Konsep

Nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Definisi

Nama unit atau lembaga yang menyediakan layanan administratif, perizinan, dan informasi terkait bisnis atau investasi dalam satu titik akses untuk memudahkan pelaku usaha atau individu dalam berinteraksi dengan pemerintah atau otoritas terkait

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PTSP=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Status Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Alias

STATUS_SPIPISE

Konsep

Status Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Definisi

Status penggunaan platform elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan informasi dan proses perizinan investasi secara online, memungkinkan pelaku usaha atau individu mengajukan permohonan dan memperoleh izin investasi melalui jaringan digital

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Ya
- Tidak

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

STATUS_SPIPISE=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing

Alias

JUM_PROYEK_PMA

Konsep

Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing

Definisi

Jumlah proyek penanaman modal asing merujuk pada total proyek investasi yang dilakukan oleh investor asing di suatu wilayah atau negara, mencakup berbagai sektor dan jenis kegiatan yang telah diimplementasikan atau sedang berjalan

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROYEK_PMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Nilai Investasi Penanaman Modal Asing

Alias

NILAL_PMA

Konsep

Nilai Investasi Penanaman Modal Asing

Definisi

Nilai investasi penanaman modal asing mengacu pada total jumlah dana yang diinvestasikan oleh investor asing dalam suatu wilayah atau negara, mencakup berbagai bentuk modal seperti modal saham, pinjaman, aset, dan jenis investasi lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

NILAL_PMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Sektor

Alias

SEKTOR

Konsep

Sektor

Definisi

Sektor di mana perusahaan menanamkan modal merujuk pada bidang atau industri spesifik di mana perusahaan melakukan investasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|--|--|
| - Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | - Industri Mineral dan Logam |
| - Kehutanan | - Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya |
| - Perikanan | - Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam |
| - Pertambangan | - Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya |
| - Industri Makanan | - Industri Lainnya |
| - Industri Tekstil | - Listrik, Gas, dan Air |
| - Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | - Konstruksi |
| - Industri Kayu | - Perdagangan dan Reparasi |
| - Industri Kertas dan Percetakan | - Hotel dan Restoran |
| - Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | - Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi |
| - Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | - Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran |
| | - Jasa Lainnya |

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

SEKTOR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Negara Penanam Modal Asing

Alias

NEGARA

Konsep

Negara Penanam Modal Asing

Definisi

Negara penanam modal asing merujuk pada negara asal dari investor atau perusahaan yang menginvestasikan modalnya ke dalam suatu negara lain. Negara ini adalah tempat dimana perusahaan atau individu yang melakukan investasi berasal

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Sesuai nama negara

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NEGARA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Alias

JUM_PROYEK_PMDN

Konsep

Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Jumlah proyek investasi penanaman modal dalam negeri merujuk pada total proyek investasi yang diinisiasi oleh investor domestik di dalam suatu negara, mencakup berbagai sektor dan jenis kegiatan yang telah diimplementasikan atau sedang berlangsung

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROYEK_PMDN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Alias

NILAI_PMDN

Konsep

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Nilai investasi penanaman modal dalam negeri mengacu pada total dana yang diinvestasikan oleh investor domestik di suatu wilayah atau negara dalam berbagai bentuk modal seperti ekuitas, aset, pinjaman, dan jenis investasi lainnya, untuk mendukung kegiatan bisnis dan pengembangan ekonomi dalam negeri

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

NILAI_PMDN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

Alias

NAMA_PERUSAHAAN_PMA

Konsep

Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

Definisi

Identitas unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu entitas bisnis atau organisasi yang melakukan penanaman modal asing

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PERUSAHAAN_PMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Alias

NAMA_PERUSAHAAN_PMDN

Konsep

Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Identitas unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu entitas bisnis atau organisasi yang melakukan penanaman modal dalam negeri

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PERUSAHAAN_PMDN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Nama Proyek Penanaman Modal Asing

Alias

NAMA_PROYEK_PMA

Konsep

Nama Proyek Penanaman Modal Asing

Definisi

Identifikasi khusus yang diberikan pada suatu inisiatif atau kegiatan tertentu yang melibatkan penanaman modal asing yang memiliki tujuan, ruang lingkup, dan durasi yang ditentukan

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PROYEK_PMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Tenaga Kerja

Alias

JUM_TK

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja

Definisi

Total orang yang bekerja atau bekerja dalam suatu proyek

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Nilai harus lebih besar atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_TK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Klasifikasi Tenaga Kerja

Alias

KLAS_TK

Konsep

Klasifikasi Tenaga Kerja

Definisi

Pembagian atau pengelompokan tenaga kerja berdasarkan karakteristiknya, yang dibedakan menjadi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Tenaga Kerja Indonesia
- Tenaga Kerja Asing

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KLAS_TK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Nama Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri

Alias

NAMA_PROYEK_PMDN

Konsep

Nama Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Identifikasi khusus yang diberikan pada suatu inisiatif atau kegiatan tertentu yang melibatkan penanaman modal dalam negeri yang memiliki tujuan, ruang lingkup, dan durasi yang ditentukan

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PROYEK_PMDN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Tanggal Penerimaan Permohonan

Alias

TGL_TERIMA

Konsep

Tanggal Penerimaan Permohonan

Definisi

Tanggal resmi ketika otoritas atau lembaga terkait secara resmi menerima permohonan atau aplikasi yang diajukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain untuk mendapatkan izin atau persetujuan tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pengumpulan Data

Tipe Data

Date

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TGL_TERIMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Tanggal Perizinan Selesai

Alias

TGL_SELESAI

Konsep

Tanggal Perizinan Selesai

Definisi

Tanggal resmi ketika proses evaluasi, verifikasi, dan penilaian terhadap permohonan izin telah diselesaikan oleh otoritas atau lembaga terkait, dan keputusan mengenai izin tersebut telah diambil

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pengumpulan Data

Tipe Data

Date

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Tidak bisa lebih dahulu dari TGL_TERIMA

Kalimat Pertanyaan

TGL_SELESAI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri

Alias

PERUSAHAAN_INDUSTRI_DI_KAWASAN

Konsep

Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri

Definisi

Entitas bisnis yang beroperasi di wilayah yang secara khusus ditetapkan atau diarahkan untuk kegiatan industri

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PERUSAHAAN_INDUSTRI_DI_KAWASAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Alias

KAJIAN_KEBIJAKAN_PM

Konsep

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Definisi

Proses analisis dan evaluasi mendalam yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga riset, atau entitas terkait untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi berbagai aspek kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modal

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KAJIAN_KEBIJAKAN_PM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Nama Penerima Layanan

Alias

NAMA

Konsep

Nama Penerima Layanan

Definisi

Identitas individu, perusahaan, atau entitas lain yang menerima atau mengakses layanan tertentu yang disediakan oleh DPMPSTP

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Kepuasan Terhadap Layanan Advokasi

Alias

PUAS_ADVOKASI

Konsep

Kepuasan Terhadap Layanan Advokasi

Definisi

Tingkat kepuasan individu atau entitas yang menerima atau memanfaatkan layanan advokasi yang disediakan oleh organisasi atau pihak yang memberikan nasihat hukum, dukungan, atau bantuan terkait masalah hukum atau regulasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

- Skala 1 sampai 10

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PUAS_ADVOKASI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Kepuasan Terhadap Layanan Perizinan

Alias

PUAS_PERIZINAN

Konsep

Kepuasan Terhadap Layanan Perizinan

Definisi

Tingkat kepuasan individu atau entitas yang menggunakan atau mengajukan permohonan untuk layanan perizinan dari pemerintah atau lembaga terkait

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

- Skala 1 sampai 10

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PUAS_PERIZINAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

Alias

MOU_PM

Konsep

Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

Definisi

Kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat, yang merinci persyaratan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks investasi atau penanaman modal

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

MOU_PM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Jenis Perijinan

Konsep

Jumlah Jenis Perijinan

Definisi

Jumlah jenis perizinan mengacu pada total variasi izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada entitas bisnis atau individu untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan atau operasi sesuai dengan regulasi yang berlaku

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah jenis perizinan, maka semakin kompleks regulasi dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mencerminkan variasi aspek yang diatur oleh pemerintah terkait izin-izin yang diperlukan dalam berbagai sektor dan kegiatan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{IZIN_USAHA_DIKELUARKAN})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jenis Izin

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Ijin Usaha yang Dikeluarkan

Konsep

Jumlah Ijin Usaha yang Dikeluarkan

Definisi

Jumlah izin usaha yang dikeluarkan merujuk pada total jumlah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada entitas bisnis atau individu untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah izin usaha yang dikeluarkan, maka semakin tinggi aktivitas bisnis dan investasi di wilayah tersebut, mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi dan minat pelaku usaha untuk beroperasi

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{JENIS_IZIN})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Izin

Variabel Penyusun

Izin Usaha yang Dikeluarkan, Jenis Izin

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Perijinan Investasi Penanaman Modal Asing yang Dikeluarkan/Setujui

Konsep

Jumlah Perijinan Investasi Penanaman Modal Asing yang Dikeluarkan/Setujui

Definisi

Jumlah perizinan investasi penanaman modal asing yang dikeluarkan mengacu pada total izin resmi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada investor asing untuk melakukan investasi dalam bentuk modal di dalam negeri

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah perizinan investasi PMA yang dikeluarkan, maka semakin besar minat investor asing untuk berinvestasi di wilayah tersebut, mencerminkan potensi daya tarik ekonomi dan kebijakan yang mendukung investasi luar negeri

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{IZIN_PMA_DISETUJUI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Perizinan Investasi Penanaman Modal Asing yang Dikeluarkan/Setujui

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Perijinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Dikeluarkan/Setujui

Konsep

Jumlah Perijinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Dikeluarkan/Setujui

Definisi

Jumlah perizinan investasi penanaman modal dalam negeri yang dikeluarkan merujuk pada total izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada investor dalam negeri untuk melakukan investasi modal dalam wilayah negara tersebut

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah perizinan investasi PMDN yang dikeluarkan, maka semakin besar minat investor domestik untuk berinvestasi di wilayah tersebut, mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi internal dan kebijakan yang mendukung investasi dalam negeri

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{IZIN_PMDN_DISETUJUI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Perizinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Dikeluarkan/Setujui

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah MoU Kerjasama dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku

Konsep

Jumlah MoU Kerjasama dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku

Definisi

Jumlah MoU kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku mengacu pada total perjanjian tertulis yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dari berbagai wilayah, yang masih berlaku dan mengatur kerja sama dalam berbagai bidang

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah MoU kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku, maka semakin erat hubungan kerjasama antara wilayah tersebut dengan daerah lain, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam berbagai bidang kerjasama

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{MOU_BERLAKU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

MoU Kerjasama dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Konsep

Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Definisi

Jumlah lembaga pelayanan terpadu satu pintu mengacu pada total institusi yang menyediakan layanan terpadu dalam satu titik akses untuk memudahkan proses administratif atau regulasi bagi masyarakat atau pelaku usaha

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah lembaga pelayanan terpadu satu pintu, maka semakin efisien dan terkoordinasinya proses layanan administratif, perizinan, dan regulasi bagi masyarakat dan pelaku usaha, mengurangi birokrasi dan meningkatkan kenyamanan dalam berinteraksi dengan pemerintah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PTSP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Konsep

Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Definisi

Jumlah lembaga pelayanan terpadu satu pintu yang menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik merujuk pada total institusi yang menggunakan platform digital untuk memberikan layanan informasi dan izin investasi kepada pelaku usaha

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pelayanan terpadu satu pintu yang menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik, maka semakin maju dan modernisasi proses administratif, memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien bagi pelaku usaha dalam mengurus izin investasi

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_PTSP) WHERE (STATUS_SPIPISE = "Ya")
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Status Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Realisasi Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing

Konsep

Realisasi Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing

Definisi

Realisasi jumlah proyek penanaman modal asing mengacu pada jumlah aktual proyek yang diimplementasikan oleh investor asing dalam suatu negara, melibatkan investasi modal dan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan perizinan yang telah disepakati

Interpretasi

Semakin tinggi realisasi jumlah proyek penanaman modal asing, maka semakin banyak proyek investasi dari luar negeri yang berhasil diimplementasikan di wilayah tersebut, mencerminkan daya tarik ekonomi dan kepercayaan investor asing terhadap pasar tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(JUM_PROYEK_PMA)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Proyek

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing

Konsep

Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing

Definisi

Realisasi nilai investasi penanaman modal asing adalah jumlah aktual dana yang telah diinvestasikan oleh investor asing dalam suatu negara, mencakup segala bentuk modal seperti modal saham, pinjaman, aset, dan investasi lainnya sesuai dengan perjanjian dan regulasi yang berlaku

Interpretasi

Semakin tinggi realisasi nilai investasi PMA, maka semakin besar jumlah dana yang diinvestasikan oleh investor asing dalam wilayah tersebut, mencerminkan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi kerjasama lintas negara

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NILAI_PMA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

US\$

Klasifikasi Penyajian

Menurut Sektor, Menurut Negara

Variabel Penyusun

Nilai Investasi Penanaman Modal Asing, Sektor, Negara Penanam Modal Asing

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Realisasi Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Konsep

Realisasi Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Realisasi jumlah proyek investasi penanaman modal dalam negeri mengacu pada total proyek yang telah diwujudkan oleh investor domestik di suatu negara, termasuk implementasi investasi modal dan pelaksanaan kegiatan bisnis sesuai dengan perizinan dan rencana yang telah ditetapkan

Interpretasi

Semakin tinggi realisasi proyek investasi PMDN, maka semakin besar jumlah proyek investasi yang diwujudkan oleh investor domestik di wilayah tersebut, mencerminkan kontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PROYEK_PMDN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Proyek

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Konsep

Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Realisasi nilai investasi penanaman modal dalam negeri adalah jumlah sebenarnya dari dana yang telah diinvestasikan oleh investor domestik dalam suatu negara, mencakup berbagai bentuk modal seperti ekuitas, aset, pinjaman, dan jenis investasi lainnya, sesuai dengan persetujuan dan regulasi yang berlaku

Interpretasi

Semakin tinggi realisasi nilai investasi PMDN, maka semakin besar jumlah dana yang diinvestasikan oleh investor domestik dalam wilayah tersebut, mencerminkan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan pengembangan sektor-sektor lokal

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NILAI_PMDN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Klasifikasi Penyajian

Menurut Sektor

Variabel Penyusun

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Sektor

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Asing

Konsep

Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Asing

Definisi

Jumlah perusahaan penanaman modal asing mengacu pada total entitas bisnis yang didirikan oleh investor asing di suatu negara untuk melaksanakan kegiatan investasi dan bisnis, dengan kepemilikan modal asing atau saham mayoritas oleh investor dari luar negeri

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah perusahaan penanaman modal asing, maka semakin besar jumlah entitas bisnis dari luar negeri yang telah mendirikan dan beroperasi di wilayah tersebut, mencerminkan tingkat minat dan kepercayaan investor asing terhadap peluang investasi dalam pasar tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PERUSAHAAN_PMA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Konsep

Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri adalah total entitas bisnis yang didirikan oleh investor domestik di dalam suatu negara untuk melaksanakan kegiatan investasi dan bisnis, dengan kepemilikan modal oleh pihak-pihak dari dalam negeri

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri, maka semakin banyak entitas bisnis domestik yang telah berdiri dan beroperasi di wilayah tersebut, mencerminkan perkembangan sektor ekonomi dalam negeri dan tingkat partisipasi pelaku usaha lokal dalam kegiatan investasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PERUSAHAAN_PMDN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Penanaman Modal Asing

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Penanaman Modal Asing

Definisi

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada penanaman modal asing merujuk pada total individu yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan modal asing di suatu negara, untuk melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka investasi dan operasional bisnis

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA, maka semakin besar dampak terhadap lapangan kerja lokal oleh investasi asing, mencerminkan kontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan ekonomi komunitas di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_TK}) \text{ WHERE } (\text{NAMA_PROYEK_PMA} \text{ NOT NULL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Klasifikasi Tenaga Kerja

Variabel Penyusun

Nama Proyek Penanaman Modal Asing, Jumlah Tenaga Kerja, Klasifikasi Tenaga Kerja

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Penanaman Modal Dalam Negeri

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Penanaman Modal Dalam Negeri

Definisi

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada penanaman modal dalam negeri mengacu pada total individu yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan modal domestik di suatu negara, untuk menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dalam konteks investasi dan operasional bisnis

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMDN, maka semakin besar dampak terhadap lapangan kerja lokal oleh investasi dalam negeri, mencerminkan kontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi internal di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_TK}) \text{ WHERE } (\text{NAMA_PROYEK_PMDN} \text{ NOT NULL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Klasifikasi Tenaga Kerja

Variabel Penyusun

Nama Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri, Jumlah Tenaga Kerja, Klasifikasi Tenaga Kerja

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 16

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Konsep

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Definisi

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total jumlah proyek PMA dan PMDN, yang menggambarkan efisiensi penggunaan tenaga kerja per proyek dalam sektor tersebut

Interpretasi

Semakin tinggi rasio daya serap tenaga kerja, maka semakin efektif dan efisien perusahaan-perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang sesuai dengan kapasitas produksi dan kebutuhan operasional mereka, mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_TK}) / [\Sigma(\text{NAMA_PROYEK_PMA}) + \Sigma(\text{NAMA_PROYEK_PMDN})]$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Orang per Proyek

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Tenaga Kerja, Nama Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri, Nama Proyek Penanaman Modal Asing

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 17

Waktu Penyelesaian Proses Perizinan

Konsep

Waktu Penyelesaian Proses Perizinan

Definisi

Waktu penyelesaian proses perizinan mengacu pada periode yang diperlukan oleh otoritas terkait untuk menyelesaikan dan mengeluarkan izin resmi yang dibutuhkan oleh suatu entitas atau individu untuk melakukan aktivitas atau proyek tertentu

Interpretasi

Semakin pendek waktu penyelesaian proses perizinan, maka semakin cepat dan efisien otoritas terkait dalam memberikan izin resmi, mencerminkan perbaikan dalam lingkungan bisnis yang mendorong percepatan aktivitas ekonomi dan investasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{AVERAGE}(\text{TGL_SELESAI} - \text{TGL_TERIMA})$$

Ukuran

Angka

Satuan

Hari

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tanggal Penerimaan Permohonan,
Tanggal Perizinan Selesai

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 18

Jumlah Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri

Konsep

Jumlah Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri

Definisi

Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri merujuk pada total entitas bisnis yang beroperasi di wilayah atau area yang ditetapkan khusus untuk kegiatan industri, mencakup berbagai sektor dan jenis industri yang berbeda

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri, maka semakin besar potensi pengembangan sektor industri di wilayah tersebut, mencerminkan konsentrasi kegiatan produksi dan manufaktur yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PERUSAHAAN_INDUSTRI_DI_KAWASAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 19

Jumlah Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Konsep

Jumlah Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Definisi

Jumlah kajian kebijakan penanaman modal mengacu pada total analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap berbagai kebijakan terkait investasi dan penanaman modal dalam suatu konteks ekonomi atau negara tertentu

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kajian kebijakan penanaman modal, maka semakin komprehensif analisis yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kerangka regulasi investasi, mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KAJIAN_KEBIJAKAN_PM})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kebijakan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 20

Tingkat Kepuasan Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

Konsep

Tingkat Kepuasan Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

Definisi

Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan adalah ukuran dari sejauh mana pengguna layanan, seperti pelaku usaha atau individu, merasa puas dengan kualitas dan efektivitas dukungan hukum serta informasi yang diberikan terkait proses perizinan

Interpretasi

Semakin tinggi tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan, maka semakin baik respons dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait terhadap permintaan informasi dan bantuan hukum terkait perizinan, mencerminkan efektivitas dalam mendukung pelaku usaha dan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma[(\text{PUAS_ADVOKASI} + \text{PUAS_PERIZINAN})/2]$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Penerima Layanan, Kepuasan Terhadap Layanan Advokasi, Kepuasan Terhadap Layanan Perizinan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 21

Jumlah Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

Konsep

Jumlah Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

Definisi

Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal merujuk pada total kesepakatan yang telah dibuat antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu investor asing atau domestik serta pemerintah atau entitas lainnya, untuk melakukan investasi dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal, maka semakin kuat jaringan kerjasama dan hubungan investasi antara berbagai pihak, mencerminkan upaya untuk mendorong sinergi dalam aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{MOU}_{\text{PM}})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

MoU

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan**

VARIABEL 1

Jumlah Guru SD/MI

Alias

JMLH_GURU_SD

Konsep

Jumlah Guru SD/MI

Definisi

Jumlah guru SD/MI adalah jumlah tenaga pendidik yang mengajar di jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI)

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GURU_SD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Guru SMP/MTs

Alias

JMLH_GURU_SMP

Konsep

Jumlah Guru SMP/MTs

Definisi

Jumlah Guru SMP/MTs mengacu pada banyaknya tenaga pendidik pada jenjang SMP/MTs

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GURU_SMP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jumlah Guru SMA/MA/SMK

Alias

JMLH_GURU_SMA

Konsep

Jumlah Guru SMA/MA/SMK

Definisi

Jumlah Guru SMA/MA/SMK merupakan istilah yang merujuk pada total tenaga pendidik pada jenjang SMA/MA/SMK

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GURU_SMA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jumlah Murid SD/MI

Alias

JMLH_MURID_SD

Konsep

Jumlah Murid SD/MI

Definisi

Jumlah murid SD/MI adalah jumlah siswa yang terdaftar dan aktif belajar di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_MURID_SD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah Murid SMP/MTs

Alias

JMLH_MURID_SMP

Konsep

Jumlah Murid SMP/MTs

Definisi

Jumlah Murid SMP/MTs adalah banyaknya peserta didik pada jenjang SMP/MTs

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_MURID_SMP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah Murid SMA/MA/SMK

Alias

JMLH_MURID_SMA

Konsep

Jumlah Murid SMA/MA/SMK

Definisi

Jumlah Murid SMA/MA/SMK mengacu kepada total peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMK

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_MURID_SMA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini

Alias

JMLH_MURID_PAUD

Konsep

Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini

Definisi

Jumlah murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah anak yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan pra-sekolah pada lembaga-lembaga PAUD

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_MURID_PAUD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun

Alias

JMLH_ANAK_USIA4-6

Konsep

Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun

Definisi

Jumlah anak usia 4-6 tahun merujuk kepada jumlah individu yang berada dalam rentang usia 4 sampai 6 tahun

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_ANAK_USIA4-6 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun Yang Sedang Menempuh Pendidikan Pada Jenjang SMA/MA/SMK

Alias

JSMP SMA16-18

Konsep

Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun Yang Sedang Menempuh Pendidikan Pada Jenjang SMA/MA/SMK

Definisi

Jumlah siswa usia 16-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas), MA (Madrasah Aliyah), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merujuk pada jumlah individu yang berada dalam rentang usia 16 hingga 18 tahun dan saat ini terdaftar sebagai siswa pada jenjang SMA/MA/SMK

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JSMP SMA16-18 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun

Alias

JPU16-18

Konsep

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun

Definisi

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun adalah jumlah individu yang berada dalam rentang usia 16 hingga 18 tahun di suatu populasi atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPU16-18 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan i

Alias

JSBJP(i)

Konsep

Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan i

Definisi

Banyaknya peserta didik tingkat pertama pada jenjang pendidikan tertentu (i)

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA
- Perguruan Tinggi

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JSBJP(i) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Sebelumnya (j) Pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Alias

JLJPS(j)

Konsep

Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Sebelumnya (j) Pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Definisi

Banyaknya peserta didik yang lulus pada jenjang pendidikan sebelumnya dan pada tahun sebelumnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/MA/SMK

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JLJPS(j) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bisa Menulis

Alias

JPBM15+

Konsep

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bisa Menulis

Definisi

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa menulis adalah jumlah individu berusia 15 tahun keatas dalam suatu populasi, yang memiliki kemampuan menulis dan membaca

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPBM15+ = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Alias

JP15+

Konsep

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Definisi

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah total individu yang berusia 15 tahun atau lebih dalam suatu populasi, wilayah, atau negara tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JP15+ = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV

Alias

JGSI

Konsep

Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV

Definisi

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV mengacu pada banyaknya guru dalam suatu sistem pendidikan atau lembaga pendidikan yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang pendidikan atau bidang terkait

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JGSI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan k

Alias

JLJP(k)

Konsep

Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan k

Definisi

Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan k adalah total individu yang berhasil menyelesaikan program pendidikan pada jenjang tersebut dalam suatu periode tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JLJP(k) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang Pendidikan k Pada Tahun Sebelumnya

Alias

JSTTJPTS(k)

Konsep

Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang Pendidikan k Pada Tahun Sebelumnya

Definisi

Banyaknya individu yang berada pada tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan k pada tahun sebelumnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JSTTJPTS(k) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun

Alias

JP7-12

Konsep

Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun

Definisi

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun adalah total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang berusia antara 7 hingga 12 tahun

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JP7-12 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun

Alias

JP13-15

Konsep

Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun

Definisi

Jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang berusia antara 13 hingga 15 tahun

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JP13-15 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah SD/MI

Alias

JMLH_SD

Konsep

Jumlah SD/MI

Definisi

Jumlah SD/MI adalah banyaknya sekolah pada jenjang SD/MI di suatu wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah SMP/MTs

Alias

JMLH_SMP

Konsep

Jumlah SMP/MTs

Definisi

Jumlah SMP/MTs mengacu pada banyaknya sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SMP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Jumlah Gedung Kesenian

Alias

JMLH_GEDUNG_SENI

Konsep

Jumlah Gedung Kesenian

Definisi

Jumlah gedung kesenian adalah total bangunan atau fasilitas yang digunakan untuk pertunjukan seni, seperti teater, gedung konser, auditorium, atau tempat pertunjukan lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GEDUNG_SENI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Jumlah Grup Kesenian

Alias

JMLH_GRUP_SENI

Konsep

Jumlah Grup Kesenian

Definisi

Jumlah grup kesenian adalah total kelompok atau tim yang terlibat dalam kegiatan seni, seperti grup teater, grup musik, grup tari, atau grup seni pertunjukan lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GRUP_SENI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Jumlah Penduduk

Alias

JMLH_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PENDUDUK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Jumlah SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik

Alias

JMLH_SD_KBB

Konsep

Jumlah SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik

Definisi

Jumlah SD/MI dengan kondisi bangunan baik adalah total sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI) yang memiliki bangunan yang dalam keadaan baik atau dalam kondisi fisik yang memadai

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SD_KBB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Jumlah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Alias

JMLH_SMP_KBB

Konsep

Jumlah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Definisi

Jumlah SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mengacu pada banyaknya SMP/MTs yang memiliki bangunan dengan kondisi yang baik dan kondisi fisik yang memadai

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SMP_KBB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Jumlah SMA/MA/SMK Kondisi Bangunan Baik

Alias

JMLH_SMA_KBB

Konsep

Jumlah SMA/MA/SMK Kondisi Bangunan Baik

Definisi

Jumlah SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik merujuk pada total SMA/MA/MTs yang memiliki bangunan dengan kondisi yang baik dan kondisi fisik yang memadai

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SMA_KBB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Jumlah SMA/MA/SMK

Alias

JMLH_SMA

Konsep

Jumlah SMA/MA/SMK

Definisi

Jumlah SMA/MA/SMK adalah total sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SMA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 29

Nomor Induk Kependudukan Penerima Beasiswa

Alias

NIK_PENERIMA_BEASISWA

Konsep

Nomor Induk Kependudukan Penerima Beasiswa

Definisi

Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia milik Penerima Beasiswa

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NIK_PENERIMA_BEASISWA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 30

Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan

Alias

BCBD

Konsep

Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan

Definisi

Benda cagar budaya yang dilestarikan merujuk kepada benda-benda fisik atau struktural yang memiliki nilai budaya, sejarah, atau arkeologis yang signifikan, dan diberikan perlindungan serta perawatan khusus untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan mereka

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BCBD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Konsep

Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Definisi

Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan dasar dikali 10.000

Interpretasi

Rasio yang lebih tinggi dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi seorang guru untuk memberikan bimbingan yang lebih personal dan fokus pada kebutuhan khusus setiap murid pada jenjang pendidikan dasar

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{((\text{JMLH_GURU_SD} + \text{JMLH_GURU_SMP}) / (\text{JMLH_MURID_SD} + \text{JMLH_MURID_SMP})) \times 10.000}$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Guru SD/MI, Jumlah Murid SD/MI

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah

Konsep

Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah

Definisi

Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/MA/SMK dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut dikali 10.000

Interpretasi

Rasio yang lebih tinggi dapat mengindikasikan lebih besarnya peluang seorang guru jenjang pendidikan menengah untuk memberikan bimbingan yang lebih personal dan fokus pada kebutuhan khusus setiap murid

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_GURU_SMA} / \text{JMLH_MURID_SMA}) \times 10.000}$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Guru SMP/MTs, Jumlah Murid SMP/MTs

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini

Konsep

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini

Definisi

Jumlah murid pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini mengindikasikan semakin banyaknya anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan usianya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JMLH_MURID_PAUD}}{\text{JMLH_ANAK_USIA4-6}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini, Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Konsep

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Definisi

Proporsi penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang masih menempuh pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK terhadap penduduk kelompok usia 16-18 tahun dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia 16-18 tahun yang menempuh pendidikan sesuai dengan usianya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{JSMPSMA16-18}}{\text{JPU16-18}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun Yang Sedang Menempuh Pendidikan Pada Jenjang SMA/MA/SMK, Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Angka Melanjutkan

Konsep

Angka Melanjutkan

Definisi

Angka melanjutkan mengacu kepada persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Interpretasi

Tingginya angka melanjutkan menunjukkan bahwa lebih banyak siswa memiliki akses ke pendidikan yang lebih tinggi

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JSBJP(i) / JLJPS(j)) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan i, Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Sebelumnya (j) Pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Angka Melek Huruf

Konsep

Angka Melek Huruf

Definisi

Perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100%

Interpretasi

Tingginya angka melek huruf juga dapat mengarah pada kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih besar dalam suatu negara atau masyarakat karena melek huruf adalah aset penting dalam pembangunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JPBM15+ / JP15+) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bisa Menulis, Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Konsep

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Definisi

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase guru yang berkualifikasi tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JGS1}{(JMLH_GURU_SD + JMLH_GURU_SMP + JMLH_GURU_SMA)}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV, Jumlah Guru SD/MI, Jumlah Guru SMP/MTs, Jumlah Guru SMA/MA/SMK

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Angka Kelulusan

Konsep

Angka Kelulusan

Definisi

Proporsi antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan i terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya (j) pada tahun ajaran sebelumnya dikali 100%

Interpretasi

Tingginya angka kelulusan dapat mengindikasikan bahwa lembaga pendidikantelah berhasil memberikan pendidikan yang berkualitas dan efektif kepada siswa-siswanya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JLJP(k)}{JSTJPTS(k)} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan k, Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang Pendidikan k Pada Tahun Sebelumnya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Pendidikan Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Konsep

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Pendidikan Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Definisi

Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) dikali 10.000

Interpretasi

Ketersediaan sekolah dasar yang merata di berbagai wilayah dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dasar

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{((JMLH_SD + JMLH_SMP) / (JP7-12 + JP13-15)) \times 10.000}{}$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun, Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun, Jumlah SD/MI, Jumlah SMP/MTs

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim

Konsep

Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim

Definisi

Banyaknya penerima beasiswa Kaltim

Interpretasi

Dengan lebih banyak penerima beasiswa, lebih banyak individu memiliki akses ke pendidikan yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau karena masalah keuangan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NIK_PENERIMA_BEASISWA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nomor Induk Kependudukan Penerima Beasiswa

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk

Konsep

Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk

Definisi

Banyaknya jumlah gedung kesenian dibagi dengan jumlah penduduk, dikali 10.000

Interpretasi

Tingginya rasio gedung kesenian dapat memberikan lebih banyak tempat bagi masyarakat untuk mengakses seni dan budaya

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JLM_GEDUNG_SENI / JMLH_PENDUDUK) \times 10.000$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Gedung Kesenian, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk

Konsep

Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk

Definisi

Banyaknya jumlah grup kesenian dibagi dengan jumlah penduduk, dikali 10.000

Interpretasi

Banyaknya grup kesenian dapat membantu meningkatkan pariwisata budaya dan mempromosikan identitas budaya lokal

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JMLH_GRUP_SENI / JMLH_PENDUDUK) \times 10.000$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Gedung Kesenian, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Benda cagar budaya yang dilestarikan

Konsep

Benda cagar budaya yang dilestarikan

Definisi

Banyaknya benda-benda fisik atau struktural yang memiliki nilai budaya, sejarah, atau arkeologis yang signifikan, dan diberikan perlindungan serta perawatan khusus untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan mereka

Interpretasi

Pelestarian benda cagar budaya dapat mendukung pengembangan ekonomi melalui pariwisata budaya, industri kreatif, dan pekerjaan yang berkaitan dengan pelestarian dan restorasi

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (BCBD)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Konsep

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Definisi

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik dibagi Jumlah seluruh sekolah SD/MI dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase menunjukkan adanya komitmen dari lembaga terkait untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa pada jenjang pendidikan SD/MI

Metode/Rumus Penghitungan

$(JMLH_SD_KBB / JMLH_SD) \times 100\%$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik, Jumlah SD/MI

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Konsep

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Definisi

Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik dibagi Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase berarti bahwa lembaga terkait berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang baik bagi murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{((\text{JMLH_SMP_KBB} + \text{JMLH_SMA_KBB}))}{(\text{JMLH_SMP} + \text{JMLH_SMA})} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik, Jumlah SMA/MA/SMK Kondisi Bangunan Baik, Jumlah SMP/MTs, Jumlah SMA/MA/SMK

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Perhubungan

VARIABEL 1

Nama Terminal Bis

Alias

NAMA_TERMINAL_BIS

Konsep

Nama Terminal Bis

Definisi

Nama pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_TERMINAL_BIS=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Tipe Terminal

Alias

TIPE_TERMINAL

Konsep

Tipe Terminal

Definisi

Tipe pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Kelas A
- Kelas B
- Kelas C

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

TIPE_TERMINAL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Nama Kabupaten/Kota

Alias

NAMA_KABUPATEN_KOTA

Konsep

Nama Kabupaten/Kota

Definisi

Nama yang mengacu pada identifikasi geografis dari sebuah wilayah administratif di bawah provinsi

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KABUPATEN_KOTA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Nama Kecamatan

Alias

NAMA_KECAMATAN

Konsep

Nama Kecamatan

Definisi

Nama yang mengacu pada identifikasi geografis dari sebuah wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

Nama Kecamatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KECAMATAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah Orang Melalui Dermaga

Alias

JUMLAH_ORANG_MELALUI_DERMAGA

Konsep

Jumlah Orang Melalui Dermaga

Definisi

Banyaknya orang yang naik dan turun di dermaga

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_ORANG_MELALUI_DERMAGA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah Penumpang Bis Tiba

Alias

JUMLAH_PENUMPANG_BIS_TIBA

Konsep

Jumlah Penumpang Bis Tiba

Definisi

Jumlah orang yang berada di kendaraan bis selain pengemudi dan awak kendaraan yang tiba di suatu terminal

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PENUMPANG_BIS_TIBA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Jembatan Timbang

Alias

NAMA_JEMBATAN_TIMBANG

Konsep

Nama Jembatan Timbang

Definisi

Nama alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_JEMBATAN_TIMBANG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Penumpang Bis Berangkat

Alias

JUMLAH_PENUMPANG_BIS_BERANGKAT

Konsep

Jumlah Penumpang Bis Berangkat

Definisi

Jumlah orang yang berada di kendaraan bis selain pengemudi dan awak kendaraan yang berangkat dari suatu terminal

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PENUMPANG_BIS_BERANGKAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Alias

JUMLAH_PEMASANGAN_RAMBU_RAMBU

Konsep

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Definisi

Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PEMASANGAN_RAMBU_RAMBU=
...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Kendaraan Bermotor

Alias

JUMLAH_KENDARAAN_BERMOTOR

Konsep

Jumlah Kendaraan Bermotor

Definisi

Jumlah sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_KENDARAAN_BERMOTOR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Panjang Jalan

Alias

PANJANG_JALAN

Konsep

Panjang Jalan

Definisi

Panjang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

PANJANG_JALAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Nama Kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan

Alias

KECAMATAN_BELUM_TERAKSES_SARPRAS_TRANSPORTASI_DARAT_ASDP

Konsep

Nama Kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan

Definisi

Nama Kecamatan yang belum memiliki dan mendapatkan akses Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Sungai, Danau dan Penyebrangan

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KECAMATAN_BELUM_TERAKSES_SARPRAS_TRANSPORTASI_DARAT_ASDP=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jenis Pelabuhan

Alias

JENIS_PELABUHAN

Konsep

Jenis Pelabuhan

Definisi

Jenis tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Pelabuhan yang Diusahakan
- Pelabuhan yang Tidak Diusahakan

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PELABUHAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Nama Pelabuhan Laut

Alias

NAMA_PELABUHAN_LAUT

Konsep

Nama Pelabuhan Laut

Definisi

Nama tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PELABUHAN_LAUT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba

Alias

JUMLAH_PENUMPANG_ANGKUTAN_LAUT_
TIBA

Konsep

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba

Definisi

Jumlah orang yang berada di kapal selain pengemudi dan awak kapal yang tiba di suatu pelabuhan

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PENUMPANG_ANGKUTAN_LAUT_
TIBA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Berangkat

Alias

JUMLAH_PENUMPANG_ANGKUTAN_LAUT_
BERANGKAT

Konsep

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Berangkat

Definisi

Jumlah orang yang berada di kapal selain pengemudi dan awak kapal yang berangkat dari suatu pelabuhan

Referensi Pemilihan

Permenhub RI Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PENUMPANG_ANGKUTAN_LAUT_
BERANGKAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Nama Pelabuhan Udara

Alias

NAMA_PELABUHAN_UDARA

Konsep

Nama Pelabuhan Udara

Definisi

Nama kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lain

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PELABUHAN_UDARA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jenis Bandara

Alias

JENIS_BANDARA

Konsep

Jenis Bandara

Definisi

Jenis kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lain

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Internasional
- Lokal

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_BANDARA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tiba

Alias

JUMLAH_PENUMPANG_PESAWAT_UDARA_TIBA

Konsep

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tiba

Definisi

Jumlah orang yang berada di pesawat selain pengemudi dan awak pesawat yang tiba di suatu bandara

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PENUMPANG_PESAWAT_UDARA_TIBA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Berangkat

Alias

JUMLAH_PENUMPANG_PESAWAT_UDARA_BERANGKAT

Konsep

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Berangkat

Definisi

Jumlah orang yang berada di pesawat selain pengemudi dan awak pesawat yang berangkat dari suatu bandara

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari 0

Kalimat Pertanyaan

JUMLAH_PENUMPANG_PESAWAT_UDARA_BERANGKAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Terminal Bis

Konsep

Jumlah Terminal Bis

Definisi

Jumlah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan

Interpretasi

Dengan semakin banyaknya terminal bis yang dibangun di berbagai lokasi, akan semakin mempermudah akses bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas dalam perjalanan sehari-hari

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{NAMA_TERMINAL_BIS}) \text{ SORT BY } (\text{TIPE_TERMINAL})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Tipe Terminal

Variabel Penyusun

Nama Terminal Bis, Tipe Terminal, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Penumpang Bis Tiba

Konsep

Jumlah Penumpang Bis Tiba

Definisi

Jumlah orang yang berada di kendaraan bis selain pengemudi dan awak kendaraan yang tiba di suatu terminal

Interpretasi

Dengan meningkatnya jumlah penumpang yang tiba di terminal bis, akan ada potensi untuk perbaikan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan, efisiensi, dan mungkin juga pendapatan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{JUMLAH_PENUMPANG_BIS_TIBA})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Terminal Bis, Jumlah Penumpang Bis Tiba

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Penumpang Bis Berangkat

Konsep

Jumlah Penumpang Bis Berangkat

Definisi

Jumlah orang yang berada di kendaraan bis selain pengemudi dan awak kendaraan yang berangkat dari suatu terminal

Interpretasi

Dengan meningkatnya jumlah penumpang yang berangkat dari terminal bis, akan ada potensi untuk perbaikan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan, efisiensi, dan mungkin juga pendapatan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{JUMLAH_PENUMPANG_BIS_BERANGKAT})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Terminal Bis, Jumlah Penumpang Bis Berangkat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Orang Melalui Dermaga

Konsep

Jumlah Orang Melalui Dermaga

Definisi

Banyaknya orang yang naik dan turun di dermaga

Interpretasi

Dengan meningkatnya jumlah orang yang menggunakan dermaga sebagai titik masuk atau keluar, akan ada potensi untuk perbaikan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, keamanan, dan efisiensi layanan di dermaga tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{JUMLAH_ORANG_MELALUI_DERMAGA})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Orang Melalui Dermaga, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Jembatan Timbang

Konsep

Jumlah Jembatan Timbang

Definisi

Jumlah alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya

Interpretasi

Dengan meningkatnya jumlah jembatan timbang yang tersedia, akan ada potensi untuk perbaikan dalam pengukuran berat kendaraan, pengawasan keamanan jalan, dan pengendalian beban pada infrastruktur jalan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_JEMBATAN_TIMBANG})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Jembatan Timbang, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Pemasangan Rambu Rambu

Konsep

Jumlah Pemasangan Rambu Rambu

Definisi

Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pemasangan rambu lalu lintas akan meningkatkan kesadaran dan keamanan berlalu lintas, sehingga berpotensi mengurangi risiko kecelakaan dan memudahkan navigasi pengguna jalan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUMLAH_PEMASANGAN_RAMBU_RAMBU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Kendaraan Bermotor

Konsep

Jumlah Kendaraan Bermotor

Definisi

Jumlah sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel

Interpretasi

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang lebih besar dalam masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUMLAH_KENDARAAN_BERMOTOR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kendaraan Bermotor, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Konsep

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Definisi

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan akan mengindikasikan infrastruktur jalan yang lebih luas dan kemungkinan kemacetan yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mobilitas dalam suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{PANJANG_JALAN})}{\Sigma(\text{JUMLAH_KENDARAAN_BERMOTOR})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan Bermotor, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan

Konsep

Jumlah Kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan

Definisi

Jumlah Kecamatan yang belum memiliki dan mendapatkan akses Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Sungai, Danau dan Penyeberangan

Interpretasi

Semakin sedikit jumlah kecamatan yang belum terakses oleh sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau, dan penyeberangan akan mengindikasikan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah-wilayah tersebut, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta distribusi barang dan layanan yang lebih merata

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(KECAMATAN_BELUM_TERAKSES_SARP  
RAS_TRANSPORTASI_DARAT_ASDP)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kecamatan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Pelabuhan Laut

Konsep

Jumlah Pelabuhan Laut

Definisi

Jumlah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pelabuhan laut dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah-wilayah pesisir serta mendukung pertumbuhan perdagangan internasional dan sektor maritim

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_PELABUHAN_LAUT) SORT  
BY (JENIS_PELABUHAN)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Pelabuhan

Variabel Penyusun

Nama Pelabuhan Laut, Jenis Pelabuhan, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba

Konsep

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba

Definisi

Jumlah orang yang berada di kapal selain pengemudi dan awak kapal yang tiba di suatu pelabuhan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penumpang angkutan laut yang tiba dapat mengindikasikan pertumbuhan sektor transportasi maritim, wisata laut, dan konektivitas antarwilayah. Ini dapat mendukung ekonomi lokal, sektor pariwisata, dan memperluas peluang bisnis di daerah pelabuhan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUMLAH_PENUMPANG_ANGKUTAN_LAUT_TIBA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pelabuhan Laut, Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Berangkat

Konsep

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Berangkat

Definisi

Jumlah orang yang berada di kapal selain pengemudi dan awak kapal yang berangkat dari suatu pelabuhan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat mencerminkan tingginya aktivitas perjalanan dan transportasi laut. Ini dapat memberikan dampak positif pada industri pelayaran, pariwisata, serta konektivitas antarwilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUMLAH_PENUMPANG_ANGKUTAN_LAUT_BERANGKAT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pelabuhan Laut, Jumlah Penumpang Angkutan Laut Berangkat, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Pelabuhan Udara

Konsep

Jumlah Pelabuhan Udara

Definisi

Jumlah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lain

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pelabuhan udara mencerminkan peningkatan konektivitas udara dalam suatu wilayah. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan sektor penerbangan, pariwisata udara, serta aksesibilitas ke wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(NAMA_PELABUHAN_UDARA) SORT  
BY (JENIS_BANDARA)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Bandara

Variabel Penyusun

Nama Pelabuhan Udara, Jenis Bandara, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tiba

Konsep

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tiba

Definisi

Jumlah orang yang berada di pesawat selain pengemudi dan awak pesawat yang tiba di suatu bandara

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penumpang pesawat udara yang tiba mencerminkan tingginya aktivitas penerbangan dan konektivitas udara dalam suatu wilayah. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada industri penerbangan, pariwisata udara, serta ekonomi lokal dengan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perdagangan

Metode/Rumus Penghitungan

```
Σ(JUMLAH_PENUMPANG_PESAWAT_  
UDARA_TIBA)
```

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pelabuhan Udara, Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tiba, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Berangkat

Konsep

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Berangkat

Definisi

Jumlah orang yang berada di pesawat selain pengemudi dan awak pesawat yang berangkat dari suatu bandara

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penumpang pesawat udara yang berangkat mencerminkan tingginya permintaan akan perjalanan udara dalam suatu wilayah. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada industri penerbangan, pariwisata udara, serta konektivitas antarwilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUMLAH_PENUMPANG_PESAWAT_UDARA_BERANGKAT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pelabuhan Udara, Jumlah Penumpang Pesawat Udara Berangkat, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah**

VARIABEL 1

Jumlah Industri Besar

Alias

Jumlah Industri Besar

Konsep

Jumlah Industri Besar

Definisi

Jumlah Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Industri Besar=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Industri Kecil

Alias

Jumlah Industri Kecil

Konsep

Jumlah Industri Kecil

Definisi

Jumlah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usahanya merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Industri Kecil=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jumlah Industri Menengah

Alias

Jumlah Industri Menengah

Konsep

Jumlah Industri Menengah

Definisi

Jumlah Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Industri Menengah=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Nama Perusahaan

Alias

Nama Perusahaan

Konsep

Nama Perusahaan

Definisi

Nama Perusahaan sesuai data Sistem OSS

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Perusahaan=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nomor Induk Berusaha

Alias

Nomor Induk Berusaha

Konsep

Nomor Induk Berusaha

Definisi

Bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nomor Induk Berusaha=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 6

Alamat Lokasi Proyek

Alias

Alamat Lokasi Proyek

Konsep

Alamat Lokasi Proyek

Definisi

Alamat Lokasi Proyek sesuai data Sistem OSS

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Alamat Lokasi Proyek=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 7

Alamat Kantor

Alias

Alamat Kantor

Konsep

Alamat Kantor

Definisi

Alamat Lokasi Kantor sesuai data Sistem OSS

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Alamat Kantor=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Total Tenaga Kerja

Alias

Jumlah Total Tenaga Kerja

Konsep

Jumlah Total Tenaga Kerja

Definisi

Akumulasi dari Total tenaga kerja Periode sebelumnya, Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, dan Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Total Tenaga Kerja=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 9

Modal Tetap

Alias

Modal Tetap

Konsep

Modal Tetap

Definisi

a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lain-lain) dalam lokasi proyek. b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi. c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Modal Tetap=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 10

Modal Kerja

Alias

Modal Kerja

Konsep

Modal Kerja

Definisi

Penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya overhead perusahaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Modal Kerja=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 11

Nama Koperasi

Alias

Nama Koperasi

Konsep

Nama Koperasi

Definisi

Nama badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nama Koperasi=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Nomor Badan Hukum

Alias

Nomor Badan Hukum

Konsep

Nomor Badan Hukum

Definisi

Status yang diperoleh oleh Koperasi setelah akta pendiriannya disahkan Menteri.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Nomor Badan Hukum=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Status Koperasi

Alias

Status Koperasi

Konsep

Status Koperasi

Definisi

Penggolongan koperasi menjadi Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Koperasi Aktif
- Koperasi Tidak Aktif

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Status Koperasi=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Anggota

Alias

Jumlah Anggota

Konsep

Jumlah Anggota

Definisi

Jumlah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Anggota=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Bentuk Koperasi

Alias

Bentuk Koperasi

Konsep

Bentuk Koperasi

Definisi

Penggolongan koperasi menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Koperasi Primer
- Koperasi Sekunder

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Bentuk Koperasi=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jenis Usaha

Alias

Jenis Usaha

Konsep

Jenis Usaha

Definisi

Jenis Koperasi seperti tercantum dalam Anggaran Dasar. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Koperasi Produsen
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Jasa
- Koperasi Simpan Pinjam

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Usaha=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Prinsip Keuangan

Alias

Prinsip Keuangan

Konsep

Prinsip Keuangan

Definisi

Penggolongan koperasi menjadi Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Referensi Pemilihan

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Koperasi Konvensional
- Koperasi Syariah

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Prinsip Keuangan=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Klasifikasi Kualitas Koperasi

Alias

Klasifikasi Kualitas Koperasi

Konsep

Klasifikasi Kualitas Koperasi

Definisi

Alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi yang ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas :

Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, dan Tidak Berkualitas

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemingkatan Koperasi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Koperasi Sangat Berkualitas
- Koperasi Berkualitas
- Koperasi Cukup Berkualitas
- Koperasi Tidak Berkualitas

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Klasifikasi Kualitas Koperasi=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jumlah Penduduk

Alias

Jumlah Penduduk

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Penduduk=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

Alias

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

Konsep

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

Definisi

Jumlah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang melaksanakan rapat anggota tahunan.

Referensi Pemilihan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)
- Isian tidak boleh melebihi total Jumlah Koperasi

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah Koperasi Unit Desa

Alias

Jumlah Koperasi Unit Desa

Konsep

Jumlah Koperasi Unit Desa

Definisi

Jumlah koperasi serba usaha yang melakukan usaha pelayanan berbagai barang dan jasa mulai dari produksi sampai dengan pemasarannya yang dibentuk oleh warga desa sendiri baik yang menjadi anggota kelompok tani atau tidak menjadi anggota kelompok tani yang ada di pedesaan, dengan lingkup wilayah kerja meliputi satu atau beberapa desa sesuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dengan mempertimbangkan kemampuan KUD dan potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan

Referensi Pemilihan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Koperasi Unit Desa=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Jumlah Pasar

Alias

Jumlah Pasar

Konsep

Jumlah Pasar

Definisi

Jumlah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah Pasar=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Jumlah UMKM

Alias

Jumlah UMKM

Konsep

Jumlah UMKM

Definisi

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh berisi angka negatif (kurang dari nol)

Kalimat Pertanyaan

Jumlah UMKM=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Kabupaten/Kota

Alias

Kabupaten/Kota

Konsep

Kabupaten/Kota

Definisi

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Jenis Kelamin

Alias

Jenis Kelamin

Konsep

Jenis Kelamin

Definisi

Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Laki-Laki
- Perempuan

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Kelamin=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Jenis Pasar

Alias

Jenis Pasar

Konsep

Jenis Pasar

Definisi

Jenis area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Pasar Tradisional
- Pasar Modern

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Jenis Pasar=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Skala Usaha

Alias

Skala Usaha

Konsep

Skala Usaha

Definisi

Suatu indikator besar kecilnya suatu usaha

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Usaha Mikro
- Usaha Kecil
- Usaha Menengah

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Skala Usaha=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Industri Besar

Konsep

Jumlah Industri Besar

Definisi

Jumlah Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Industri Besar, maka semakin banyak unit usaha atau perusahaan dalam sektor industri besar yang beroperasi dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Industri Besar

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Industri Besar, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Industri Kecil Menengah

Konsep

Jumlah Industri Kecil Menengah

Definisi

Jumlah Industri Kecil dan Menengah. Industri kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usahanya merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Industri Kecil Menengah, maka semakin banyak unit usaha atau perusahaan dalam sektor Industri Kecil Menengah yang beroperasi dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Industri Kecil dan Jumlah Industri Menengah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Industri Kecil, Jumlah Industri Menengah, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Penyerapan Tenaga Kerja

Konsep

Penyerapan Tenaga Kerja

Definisi

Penyerapan orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Interpretasi

Semakin besar Penyerapan Tenaga Kerja, maka semakin banyak lapangan kerja yang diciptakan oleh suatu kegiatan investasi / penanaman modal

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Total Tenaga Kerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Alamat Lokasi Proyek, Alamat Kantor, Jumlah Total Tenaga Kerja

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Nilai Investasi

Konsep

Nilai Investasi

Definisi

Nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

Interpretasi

Nilai Investasi yang meningkat dapat menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi dan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Modal Tetap dan Modal Kerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ribu Rupiah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Alamat Lokasi Proyek, Alamat Kantor, Modal Tetap, Modal Kerja

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Koperasi

Konsep

Jumlah Koperasi

Definisi

Jumlah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Interpretasi

Jumlah Koperasi mencerminkan sejauh mana konsep kerjasama dan ekonomi berbasis keanggotaan diterapkan dalam masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Nomor Badan Hukum

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Status Koperasi, Menurut Bentuk Koperasi, Menurut Jenis Usaha, Menurut Prinsip Keuangan

Variabel Penyusun

Nama Koperasi, Nomor Badan Hukum, Status Koperasi, Bentuk Koperasi, Jenis Usaha, Prinsip Keuangan, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Anggota Koperasi

Konsep

Jumlah Anggota Koperasi

Definisi

Jumlah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi

Interpretasi

Semakin besar Jumlah Anggota Koperasi, maka semakin banyak individu yang berpartisipasi dalam model ekonomi koperasi

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Anggota

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kelamin

Variabel Penyusun

Nama Koperasi, Nomor Badan Hukum, Jumlah Anggota, Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

Konsep

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

Definisi

Jumlah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang melaksanakan rapat anggota tahunan.

Interpretasi

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan mencerminkan sejauh mana koperasi menjalankan praktik-praktik koperasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Persentase Koperasi Aktif

Konsep

Persentase Koperasi Aktif

Definisi

Persentase Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota terhadap seluruh koperasi

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase Koperasi Aktif, maka semakin banyak koperasi yang tetap aktif dan berkontribusi pada ekonomi dan anggotanya

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Nama Koperasi dengan Status Koperasi Aktif, dibagi dengan penjumlahan dari seluruh Nama Koperasi, dikalikan 100 persen

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Koperasi, Nomor Badan Hukum, Status Koperasi, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)

Konsep

Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)

Definisi

Jumlah koperasi serba usaha yang melakukan usaha pelayanan berbagai barang dan jasa mulai dari produksi sampai dengan pemasarannya yang dibentuk oleh warga desa sendiri baik yang menjadi anggota kelompok tani atau tidak menjadi anggota kelompok tani yang ada di pedesaan, dengan lingkup wilayah kerja meliputi satu atau beberapa desa sesuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dengan mempertimbangkan kemampuan KUD dan potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan

Interpretasi

Jumlah Koperasi Unit Desa yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam membangun ekonomi desa berbasis koperasi dan mendukung keberlanjutan pengembangan pedesaan

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Koperasi Unit Desa

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Koperasi Unit Desa, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Pasar

Konsep

Jumlah Pasar

Definisi

Jumlah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Pasar, maka semakin banyak tempat perdagangan yang tersedia dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Pasar

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Pasar

Variabel Penyusun

Jumlah Pasar, Kabupaten/Kota, Jenis Pasar

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Rasio Pasar per 10.000 Penduduk

Konsep

Rasio Pasar per 10.000 Penduduk

Definisi

Perbandingan antara banyaknya Jumlah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya per 10.000 penduduk

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Pasar per 10.000 Penduduk, maka semakin banyak pasar yang tersedia relatif terhadap jumlah penduduk dalam wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah Pasar, dibagi dengan Jumlah Penduduk, dikalikan 10.000

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pasar, Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah UMKM

Konsep

Jumlah UMKM

Definisi

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Interpretasi

Jumlah UMKM yang besar mencerminkan keragaman ekonomi dalam wilayah tersebut dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta pembangunan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Jumlah UMKM

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Skala Usaha

Variabel Penyusun

Jumlah UMKM, Kabupaten/Kota, Skala Usaha

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Koperasi Berkualitas

Konsep

Jumlah Koperasi Berkualitas

Definisi

Jumlah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial

Interpretasi

Semakin banyak Jumlah Koperasi Berkualitas, maka semakin banyak koperasi yang mencapai standar tinggi dalam hal kelembagaan, usaha, keuangan, dan berdampak positif terhadap anggotanya dan komunitasnya

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Nama Koperasi dengan Klasifikasi Kualitas Koperasi Berkualitas dan Sangat Berkualitas

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Koperasi, Nomor Badan Hukum, Klasifikasi Kualitas Koperasi, Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Perkebunan

VARIABEL 1

Nama Perusahaan

Alias

NM_PERUSAHAAN

Konsep

Nama Perusahaan

Definisi

Identitas resmi suatu entitas usaha yang beroperasi di sektor pertanian, khususnya dalam pengelolaan lahan dan produksi berbagai komoditi pertanian seperti buah-buahan, minyak kelapa sawit, atau tanaman lainnya.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NM_PERUSAHAAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis Izin

Alias

IZIN

Konsep

Jenis Izin

Definisi

Kategori otorisasi resmi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada individu atau entitas untuk melakukan kegiatan perkebunan tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

IZIN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Luas Areal Lahan Tanaman Belum Menghasilkan

Alias

LUAS_TBM

Konsep

Luas Areal Lahan Tanaman Belum Menghasilkan

Definisi

Total luas lahan yang telah ditanami tanaman namun belum mencapai tahap produksi atau panen

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LUAS_TBM=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Luas Areal Lahan Tanaman Menghasilkan

Alias

LUAS_TM

Konsep

Luas Areal Lahan Tanaman Menghasilkan

Definisi

Total luas lahan di mana tanaman telah mencapai tahap pertumbuhan dan menghasilkan hasil panen atau produksi yang siap untuk dipanen atau diolah

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LUAS_TM=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Luas Areal Lahan Tanaman Tidak Menghasilkan

Alias

LUAS_TT

Konsep

Luas Areal Lahan Tanaman Tidak Menghasilkan

Definisi

Total luas lahan di mana tanaman telah mencapai tahap pertumbuhan yang tidak lagi menghasilkan panen atau produksi yang signifikan, karena usia atau kondisi tanaman yang tidak optimal

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LUAS_TT=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Komoditas

Alias

KOMODITAS

Konsep

Komoditas

Definisi

Jenis tanaman atau produk pertanian yang ditanam dan diolah dalam skala komersial di lahan pertanian atau perkebunan, seperti buah-buahan, kopi, teh, minyak kelapa sawit, karet, dan sejenisnya

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KOMODITAS=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Luas Tanam

Alias

LUAS_TANAM

Konsep

Luas Tanam

Definisi

total luas keseluruhan yang ditanami dengan tanaman pertanian atau komoditas perkebunan, dan ini merupakan penjumlahan dari tiga kategori, yaitu tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TT).

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LUAS_TANAM=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Status Pengusahaan

Alias

STATUS

Konsep

Status Pengusahaan

Definisi

Klasifikasi berdasarkan tiga kategori utama yaitu perusahaan besar pemerintah, perusahaan besar swasta, dan perkebunan rakyat

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Perusahaan Besar Pemerintah
- Perusahaan Besar Swasta
- Perkebunan Rakyat

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

STATUS=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Jumlah Produksi

Alias

JUM_PROD

Konsep

Jumlah Produksi

Definisi

Kuantitas keseluruhan hasil yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian atau perkebunan dalam bentuk komoditas seperti buah-buahan, minyak kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya, dalam suatu periode tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROD=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Produktivitas

Alias

PRODUKTIVITAS

Konsep

Produktivitas

Definisi

Hasil atau produksi yang dihasilkan oleh tanaman atau komoditas dalam unit luas lahan tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PRODUKTIVITAS=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Alias

JUM_IND_OLAH_HASIL_KEBUN

Konsep

Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Definisi

Jumlah badan usaha yang berfokus pada kegiatan transformasi dan pengolahan hasil-hasil dari sektor perkebunan menjadi produk jadi atau bahan olahan yang siap untuk dipasarkan dan didistribusikan ke konsumen atau industri lainnya. Perusahaan ini bertanggung jawab atas berbagai proses seperti pemrosesan, pengolahan, pemurnian, dan pengemasan produk perkebunan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_IND_OLAH_HASIL_KEBUN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Produk Turunan Perkebunan

Alias

JUM_PROD_TURUNAN_KEBUN

Konsep

Jumlah Produk Turunan Perkebunan

Definisi

Jumlah produk-produk yang dihasilkan melalui proses pengolahan bahan baku dari sektor perkebunan. Produk turunan ini merupakan hasil olahan yang lebih kompleks dan bernilai tambah dibandingkan dengan bahan baku asalnya.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROD_TURUNAN_KEBUN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Produksi CPO

Alias

PROD_CPO

Konsep

Produksi CPO

Definisi

Jumlah minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil) yang dihasilkan dari proses ekstraksi biji kelapa sawit yang telah melalui tahap pengolahan pada pabrik kelapa sawit

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROD_CPO=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Jumlah Konflik yang Ditangani

Alias

JUM_KONFLIK_DITANGANI

Konsep

Jumlah Konflik yang Ditangani

Definisi

Total situasi atau perbedaan yang berhasil diatasi atau diselesaikan oleh pihak terkait di sektor perkebunan, mencakup masalah seperti konflik lahan, hak tenaga kerja, dampak lingkungan, dan isu terkait lainnya, dalam jangka waktu atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_KONFLIK_DITANGANI=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Jumlah Konflik Seluruhnya

Alias

JUM_KONFLIK

Konsep

Jumlah Konflik Seluruhnya

Definisi

Total situasi atau perbedaan yang terjadi di sektor perkebunan, mencakup masalah seperti konflik lahan, hak tenaga kerja, dampak lingkungan, dan isu terkait lainnya, dalam jangka waktu atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_KONFLIK=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Jumlah Produk yang Bersertifikat

Alias

JUML_PROD_SERT

Konsep

Jumlah Produk yang Bersertifikat

Definisi

Total produk yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan dan telah memperoleh sertifikasi resmi berdasarkan standar kualitas, keselamatan, keberlanjutan, atau atribut lain yang diakui dalam suatu periode tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUML_PROD_SERT=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Produk

Alias

JUM_PROD

Konsep

Jumlah Produk

Definisi

Total produk yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan dalam suatu periode tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROD=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Komoditi Produk Olahahan Hasil Perkebunan

Alias

KOMODITI_PROD_OLAHAN

Konsep

Komoditi Produk Olahahan Hasil Perkebunan

Definisi

Jenis barang yang dihasilkan melalui proses pengolahan dari bahan-bahan pertanian seperti buah-buahan, biji-bijian, atau komoditas lainnya dalam sektor perkebunan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KOMODITI_PROD_OLAHAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Komoditi Perkebunan yang Dipasarkan Melalui Kegiatan Pameran Dagang

Alias

KOMODITI_DIPASARKAN_MELALUI_PAMERAN

Konsep

Komoditi Perkebunan yang Dipasarkan Melalui Kegiatan Pameran Dagang

Definisi

Jenis produk perkebunan yang ditampilkan dan ditawarkan kepada publik dalam acara pameran dagang

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KOMODITI_DIPASARKAN_MELALUI_PAMERAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Kelompok Tani yang Dapat Melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu

Alias

POKTAN_PENGENDALI_HAMA

Konsep

Kelompok Tani yang Dapat Melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu

Definisi

Kelompok pertanian yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menerapkan pendekatan pengendalian hama terpadu guna memelihara keberlanjutan tanaman secara efektif

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

POKTAN_PENGENDALI_HAMA=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Besarnya Pengurangan Emisi Kebun

Alias

JUM_PENGURANGAN_EMISI_KEBUN

Konsep

Besarnya Pengurangan Emisi Kebun

Definisi

Besarnya pengurangan gas rumah kaca atau polutan lainnya yang dihasilkan oleh sektor perkebunan dalam rangka mendukung tujuan pengurangan dampak lingkungan dan perubahan iklim

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PENGURANGAN_EMISI_KEBUN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Jumlah Sumber Air dan HCV yang Terlindungi

Alias

JUM_SUMBER_AIR_DAN_HCV_YANG_TERLINDUNGI

Konsep

Jumlah Sumber Air dan HCV yang Terlindungi

Definisi

Luas wilayah sumber air dan daerah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) yang telah dijaga atau dilindungi

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_SUMBER_AIR_DAN_HCV_YANG_TERLINDUNGI=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Jumlah Sumber Air dan HCV Seluruhnya

Alias

JUM_SUMBER_AIR_DAN_HCV

Konsep

Jumlah Sumber Air dan HCV Seluruhnya

Definisi

Luas wilayah sumber air dan daerah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) seluruhnya

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_SUMBER_AIR_DAN_HCV=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

SDM Petani

Alias

JUM_PETANI

Konsep

SDM Petani

Definisi

Total individu yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan perkebunan, mencakup petani atau pekerja yang aktif dalam mengelola lahan dan melakukan aktivitas terkait perkebunan dalam suatu wilayah

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PETANI=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Petugas Lapang Perkebunan

Alias

JUM_LAPANG_PERKEBUNAN

Konsep

Petugas Lapang Perkebunan

Definisi

Total individu yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas pengawasan, pemeliharaan, dan manajemen operasional di lahan perkebunan, termasuk monitoring tanaman, pengendalian hama, dan kegiatan terkait lainnya

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_LAPANG_PERKEBUNAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Petugas Teknis Perkebunan

Alias

JUM_TEKNIS_PERKEBUNAN

Konsep

Petugas Teknis Perkebunan

Definisi

Total individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang teknis perkebunan, bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis, nasihat, serta pelatihan kepada petani atau pekerja perkebunan terkait praktik budidaya, pengolahan, dan manajemen pertanian

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_TEKNIS_PERKEBUNAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Gabungan Kelompok Tani

Alias

JUM_POKTAN

Konsep

Gabungan Kelompok Tani

Definisi

Entitas kolaboratif yang terbentuk dari beberapa kelompok tani yang bekerja bersama untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan dalam aktivitas pertanian atau perkebunan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_POKTAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Jumlah Perusahaan yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan

Alias

JUM_PERUSAHAAN_SERT_PUP

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan

Definisi

Jumlah perusahaan dalam sektor perkebunan yang telah memenuhi kriteria penilaian tertentu dan diberikan sertifikat sebagai pengakuan atas praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan sesuai standar yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

1. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang tentang penyelenggaraan sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi ISPO.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PERUSAHAAN_SERT_PUP=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 29

Lembaga Pekebun yang Bermitra

Alias

JUM_PEBUN_MITRA

Konsep

Lembaga Pekebun yang Bermitra

Definisi

Lembaga atau entitas yang terlibat dalam kemitraan atau kerjasama dengan kelompok petani atau pekebun untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan mengoptimalkan kegiatan dalam sektor perkebunan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PEBUN_MITRA=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 30

Olahan Produk Hasil Perkebunan

Alias

JUM_OLAHAN_PROD_HASIL_KEBUN

Konsep

Olahan Produk Hasil Perkebunan

Definisi

Variasi produk yang dihasilkan melalui proses pengolahan dari bahan-bahan pertanian seperti buah-buahan, biji-bijian, atau komoditas lainnya di sektor perkebunan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_OLAHAN_PROD_HASIL_KEBUN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 31

Jumlah Kebakaran Kebun yang Dikendalikan

Alias

JUM_KEBAKARAN_KEBUN_DIKENDALIKAN

Konsep

Jumlah Kebakaran Kebun yang Dikendalikan

Definisi

Kebakaran di area kebun yang berhasil dikendalikan atau dipadamkan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_KEBAKARAN_KEBUN_DIKENDALIKAN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 32

Jumlah Kebakaran Kebun

Alias

JUM_KEBAKARAN_KEBUN

Konsep

Jumlah Kebakaran Kebun

Definisi

Total jumlah kebakaran yang terjadi di areal kebun

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_KEBAKARAN_KEBUN=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 33

Jumlah Pemenuhan
Kebutuhan Benih Unggul
Bermutu untuk Perkebunan
Rakyat

Alias

JUM_BENIH_UNGGUL_KEBUN_RAKYAT

Konsep

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Benih
Unggul Bermutu untuk Perkebunan
Rakyat

Definisi

Jumlah benih unggul berkualitas yang
disediakan kepada petani dalam
perkebunan rakyat

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_BENIH_UNGGUL_KEBUN_RAKYAT=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 34

Jumlah Pemenuhan
Kebutuhan Benih Unggul
Bermutu

Alias

JUM_BENIH_UNGGUL

Konsep

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Benih
Unggul Bermutu

Definisi

Total kebutuhan benih unggul yang
dibutuhkan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_BENIH_UNGGUL=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 35

Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Alias

JUM_PROD_KEBUN_SERT_SNI

Konsep

Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Definisi

Produk dari sektor perkebunan yang telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROD_KEBUN_SERT_SNI=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 36

Jumlah Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal

Alias

JUM_PEN_KASUS_BENIH_ILEGAL

Konsep

Jumlah Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal

Definisi

Angka total kasus atau tindakan hukum yang dilakukan terhadap peredaran benih ilegal di dalam suatu wilayah dan periode tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PEN_KASUS_BENIH_ILEGAL=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 37

Jumlah Benih yang Disertifikasi

Alias

JUM_BENIH_SERT

Konsep

Jumlah Benih yang Disertifikasi

Definisi

Jumlah benih yang telah memperoleh sertifikasi resmi berdasarkan standar atau kriteria tertentu yang diakui

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_BENIH_SERT=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 38

Jumlah Benih yang Beredar

Alias

JUM_BENIH_BEREDAR

Konsep

Jumlah Benih yang Beredar

Definisi

Benih yang tersedia dan ditawarkan di pasar atau distribusi untuk penggunaan dalam sektor pertanian, perkebunan, atau budidaya lainnya dalam periode tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_BENIH_BEREDAR=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 39

Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang Mengendalikan OPT

Alias

JUM_POKTAN_KENDALI_OPT

Konsep

Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang Mengendalikan OPT

Definisi

Kelompok tani dan tim khusus yang terlibat dalam kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (hama, penyakit, atau gulma) di sektor perkebunan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Perkebunan menindaklanjuti PP No. 06 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 2019 dan UU No. 39 Tahun 2014

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_POKTAN_KENDALI_OPT=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 40

Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT

Alias

JUM_TAX_OPT

Konsep

Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT

Definisi

Total estimasi nilai kerugian ekonomi yang dihasilkan dari serangan hama, penyakit, atau gulma pada tanaman perkebunan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Perkebunan menindaklanjuti PP No. 06 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 2019 dan UU No. 39 Tahun 2014

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_TAX_OPT=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 41

Jumlah Produksi Agens Pengendali Hayati (APH)

Alias

JUM_PROD_APH

Konsep

Jumlah Produksi Agens Pengendali Hayati (APH)

Definisi

Total agensi pengendali organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit, gulma) yang diproduksi untuk digunakan dalam metode pengendalian hayati di sektor perkebunan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Perkebunan menindaklanjuti PP No. 06 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 2019 dan UU No. 39 Tahun 2014

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUM_PROD_APH=.....

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Perkebunan

Konsep

Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Perkebunan

Definisi

Jumlah izin tertulis dari Pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan

Interpretasi

Semakin tinggi indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah izin untuk hak pengusahaan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{IZIN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Jenis Izin

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Luas Areal Perkebunan

Konsep

Luas Areal Perkebunan

Definisi

Jumlah Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha)

Interpretasi

Semakin tinggi indikator ini menunjukkan bahwa semakin luas areal tanaman yang digunakan sebagai lahan perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_TBM} + \text{LUAS_TM} + \text{LUAS_TT})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Luas Areal Lahan Tanaman Belum Menghasilkan, Luas Areal Lahan Tanaman Menghasilkan, Luas Areal Lahan Tanaman Tidak Menghasilkan, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Luas Tanam Perkebunan

Konsep

Luas Tanam Perkebunan

Definisi

Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain

Interpretasi

Semakin besar luas tanam perkebunan menunjukkan bahwa lebih banyak lahan yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_TANAM})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas, Menurut Status Perusahaan

Variabel Penyusun

Luas Tanam, Komoditas, Status Perusahaan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Produksi Perkebunan

Konsep

Jumlah Produksi Perkebunan

Definisi

Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi menunjukkan bahwa tanaman perkebunan tersebut menghasilkan hasil panen yang lebih besar.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PROD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas, Menurut Status Perusahaan

Variabel Penyusun

Jumlah Produksi, Komoditas, Status Perusahaan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Produktivitas Perkebunan

Konsep

Produktivitas Perkebunan

Definisi

Produktivitas diambil dari banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan

Interpretasi

Semakin tinggi produktivitas perkebunan menunjukkan bahwa tanaman perkebunan tersebut menghasilkan lebih banyak hasil per unit luas lahan yang digunakan

Metode/Rumus Penghitungan

AVERAGE(PRODUKTIVITAS)

Ukuran

Rasio

Satuan

Kw/Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas, Menurut Status Pengusahaan

Variabel Penyusun

Produktivitas, Komoditas, Status Pengusahaan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Konsep

Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Definisi

Jumlah badan usaha yang berfokus pada kegiatan transformasi dan pengolahan hasil-hasil dari sektor perkebunan menjadi produk jadi atau bahan olahan yang siap untuk dipasarkan dan didistribusikan ke konsumen atau industri lainnya.

Perusahaan ini bertanggung jawab atas berbagai proses seperti pemrosesan, pengolahan, pemurnian, dan pengemasan produk perkebunan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah industri pengolahan hasil perkebunan mencerminkan tingginya potensi dan permintaan terhadap hasil-hasil perkebunan yang diolah menjadi produk jadi atau bahan olahan

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{JUM_IND_OLAH_HASIL_KEBUN})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Produk Turunan Perkebunan

Konsep

Jumlah Produk Turunan Perkebunan

Definisi

Jumlah produk-produk yang dihasilkan melalui proses pengolahan bahan baku dari sektor perkebunan. Produk turunan ini merupakan hasil olahan yang lebih kompleks dan bernilai tambah dibandingkan dengan bahan baku asalnya.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah produk turunan perkebunan menunjukkan adanya variasi produk yang lebih luas dari hasil-hasil perkebunan yang diolah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PROD_TURUNAN_KEBUN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Produk

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Produk Turunan Perkebunan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Produksi CPO

Konsep

Jumlah Produksi CPO

Definisi

Jumlah produksi komoditas perkebunan berupa tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi CPO menunjukkan bahwa sektor industri kelapa sawit semakin produktif dan aktif dalam menghasilkan minyak kelapa sawit mentah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PROD_CPO})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ton

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Produksi CPO

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Persentase Konflik yang Ditangani

Konsep

Persentase Konflik yang Ditangani

Definisi

Perbandingan antara jumlah konflik yang berhasil diatasi atau diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah konflik yang muncul dalam suatu periode tertentu.

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase konflik yang ditangani mengindikasikan bahwa pihak yang terlibat dalam mengatasi konflik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola situasi konflik dan mencapai solusi yang memuaskan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JUM_KONFLIK_DITANGANI})}{\Sigma(\text{JUM_KONFLIK})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Konflik yang Ditangani, Jumlah Konflik Seluruhnya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Produk yang Bersertifikat

Konsep

Persentase Produk yang Bersertifikat

Definisi

Perbandingan antara jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi dibandingkan dengan total produk yang ada

Interpretasi

Semakin tinggi indikator persentase produk yang bersertifikat menunjukkan bahwa sebagian besar produk dalam kategori tersebut telah memenuhi standar kualitas atau atribut yang disyaratkan oleh sertifikasi tertentu, yang dapat menghasilkan kepercayaan kons

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JUML_PROD_SERT})}{\Sigma(\text{JUM_PROD})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Produk yang Bersertifikat, Jumlah Produk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Komoditi Produk Olahan Hasil Perkebunan

Konsep

Jumlah Komoditi Produk Olahan Hasil Perkebunan

Definisi

Banyaknya jenis barang yang dihasilkan dari pengolahan bahan-bahan perkebunan

Interpretasi

Semakin tingginya jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan dapat membuka peluang pasar yang beragam dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KOMODITI_PROD_OLAHAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Komoditi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Komoditi Produk Olahan Hasil Perkebunan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Komoditi Perkebunan yang Dipasarkan Melalui Kegiatan Pameran Dagang

Konsep

Jumlah Komoditi Perkebunan yang Dipasarkan Melalui Kegiatan Pameran Dagang

Definisi

Banyaknya jenis produk perkebunan yang ditampilkan dan ditawarkan kepada publik dalam acara pameran dagang

Interpretasi

Semakin tingginya jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang dapat mencerminkan keragaman produk yang ditawarkan kepada pasar, meningkatkan visibilitas, dan memungkinkan peluang peningkatan penjualan serta pelanggan baru

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KOMODITI_DIPASARKAN_MELALUI_PAMERAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Komoditi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Komoditi Perkebunan yang Dipasarkan Melalui Kegiatan Pameran Dagang

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Kelompok Tani yang Dapat Melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu

Konsep

Jumlah Kelompok Tani yang Dapat Melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu

Definisi

Banyaknya kelompok pertanian yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menerapkan pendekatan pengendalian hama terpadu guna memelihara keberlanjutan tanaman secara efektif

Interpretasi

Semakin tinggi indikator ini menunjukkan semakin tinggi pula kapasitas petani dalam mengelola hama dengan pendekatan yang terintegrasi, berdampak pada perlindungan tanaman yang lebih efektif dan peningkatan hasil pertanian

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{POKTAN_PENGENDALL_HAMA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok Tani

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Tani yang Dapat Melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan

Konsep

Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan

Definisi

Ukuran dari besarnya pengurangan gas rumah kaca atau polutan lainnya yang dihasilkan oleh sektor perkebunan dalam rangka mendukung tujuan pengurangan dampak lingkungan dan perubahan iklim

Interpretasi

Semakin besar penurunan emisi sektor perkebunan, maka semakin signifikan kontribusi sektor tersebut terhadap pengurangan dampak lingkungan dan mitigasi perubahan iklim

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PENGURANGAN_EMISI_KEBU N})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Juta ton CO₂eq

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Besarnya Pengurangan Emisi Kebun

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Persentase Sumber Air dan HCV yang Terlindungi

Konsep

Persentase Sumber Air dan HCV yang Terlindungi

Definisi

Perbandingan antara luas wilayah sumber air dan daerah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) yang telah dijaga atau dilindungi terhadap total luas wilayah yang memiliki potensi risiko kerusakan atau perubahan

Interpretasi

Semakin besar persentase sumber air dan HCV yang terlindungi, maka semakin tinggi upaya pelestarian sumber daya air dan nilai konservasi yang dijaga dalam konteks perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\sum(\text{JUM_SUMBER_AIR_DAN_HCV_YANG_TERLINDUNGI})}{\sum(\text{JUM_SUMBER_AIR_DAN_HCV})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Sumber Air dan HCV yang Terlindungi, Jumlah Sumber Air dan HCV Seluruhnya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 16

Jumlah SDM Petani, Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan

Konsep

Jumlah SDM Petani, Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan

Definisi

Banyaknya individu yang terlibat dalam aktivitas pertanian, pemantauan lapangan, dan dukungan teknis di sektor perkebunan untuk mencapai tujuan produksi dan manajemen yang optimal

Interpretasi

Semakin besar jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan, maka semakin kuat dukungan manusia dalam mengelola operasional dan meningkatkan produktivitas sektor perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\sum(\text{JUM_PETANI} + \text{JUM_LAPANG_PERKEBUNAN} + \text{JUM_TEKNIS_PERKEBUNAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

SDM Petani, Petugas Lapang Perkebunan, Petugas Teknis Perkebunan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 17

Jumlah Gabungan Kelompok Tani

Konsep

Jumlah Gabungan Kelompok Tani

Definisi

Jumlah keseluruhan dari asosiasi yang terbentuk dari beberapa kelompok tani yang bergabung untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan memperkuat aktivitas perkebunan dan sosial di tingkat lebih luas

Interpretasi

Semakin besar jumlah gabungan kelompok tani, maka semakin kuat kolaborasi antara kelompok-kelompok petani dalam pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta potensi peningkatan kesejahteraan bersama

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_POKTAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Gapoktan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Gabungan Kelompok Tani

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 18

Jumlah Perusahaan yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)

Definisi

Jumlah perusahaan dalam sektor perkebunan yang telah memenuhi kriteria penilaian tertentu dan diberikan sertifikat sebagai pengakuan atas praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan sesuai standar yang ditetapkan

Interpretasi

Semakin besar jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan, maka semakin meningkat kualitas dan keberlanjutan praktik bisnis di sektor perkebunan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PERUSAHAAN_SERT_PUP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Perusahaan yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 19

Jumlah Lembaga Pekebun yang Bermitra

Konsep

Jumlah Lembaga Pekebun yang Bermitra

Definisi

Jumlah total lembaga atau entitas yang terlibat dalam kemitraan atau kerjasama dengan kelompok petani atau pekebun untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan mengoptimalkan kegiatan dalam sektor perkebunan

Interpretasi

Semakin besar jumlah lembaga pekebun yang bermitra, maka semakin luas jaringan kerjasama dan pertukaran pengetahuan di antara lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung perkembangan sektor perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PEKEBUN_MITRA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Lembaga Pekebun yang Bermitra

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 20

Jumlah Olahan Produk Hasil Perkebunan

Konsep

Jumlah Olahan Produk Hasil Perkebunan

Definisi

Banyaknya variasi produk yang dihasilkan melalui proses pengolahan dari bahan-bahan pertanian seperti buah-buahan, biji-bijian, atau komoditas lainnya di sektor perkebunan

Interpretasi

Semakin besar jumlah olahan produk hasil perkebunan, maka semakin beragam dan melimpahnya produk yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan-bahan pertanian, berpotensi meningkatkan nilai tambah dan variasi produk dalam sektor tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_OLAHAN_PROD_HASIL_KEBUN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Komoditi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Olahan Produk Hasil Perkebunan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 21

Persentase Kebakaran Kebun yang Dikendalikan

Konsep

Persentase Kebakaran Kebun yang Dikendalikan

Definisi

Perbandingan antara jumlah kebakaran yang berhasil dikendalikan atau dipadamkan terhadap total jumlah kebakaran yang terjadi di areal kebun

Interpretasi

Semakin tinggi persentase kebakaran kebun yang dikendalikan, maka semakin baik efisiensi upaya pengendalian kebakaran dan penurunan risiko kerusakan serta dampak negatif

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JUM_KEBAKARAN_KEBUN_DIKENDALIKAN})}{\Sigma(\text{JUM_KEBAKARAN_KEBUN})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kebakaran Kebun yang Dikendalikan, Jumlah Kebakaran Kebun

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 22

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Unggul Bermutu untuk Perkebunan Rakyat

Konsep

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Unggul Bermutu untuk Perkebunan Rakyat

Definisi

Perbandingan antara jumlah benih unggul berkualitas yang disediakan kepada petani dalam perkebunan rakyat terhadap total kebutuhan benih unggul yang dibutuhkan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat, maka semakin optimalnya akses petani terhadap benih berkualitas yang dapat mendukung produktivitas dan kualitas hasil pertanian

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JUM_BENIH_UNGGUL_KEBUN_RAKYAT})}{\Sigma(\text{JUM_BENIH_UNGGUL})}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Benih Unggul Bermutu untuk Perkebunan Rakyat, Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Benih Unggul Bermutu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 23

Jumlah Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Konsep

Jumlah Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Definisi

Banyaknya produk dari sektor perkebunan yang telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan

Interpretasi

Semakin besar jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI, maka semakin tinggi standar kualitas dan kesesuaian produk dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PROD_KEBUN_SERT_SNI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Produk

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 24

Jumlah Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal

Konsep

Jumlah Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal

Definisi

Angka total kasus atau tindakan hukum yang dilakukan terhadap peredaran benih ilegal di dalam suatu wilayah dan periode tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal, maka semakin efektif pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal tersebut dalam sektor perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PEN_KASUS_BENIH_ILEGAL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 25

Jumlah Benih yang Disertifikasi

Konsep

Jumlah Benih yang Disertifikasi

Definisi

Banyaknya benih yang telah memperoleh sertifikasi resmi berdasarkan standar atau kriteria tertentu yang diakui

Interpretasi

Semakin besar jumlah benih yang disertifikasi, maka semakin meningkat ketersediaan benih yang telah terverifikasi kualitasnya sesuai dengan standar tertentu dalam sektor perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_BENIH_SERT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Benih

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Benih yang Disertifikasi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 26

Jumlah Benih yang Beredar

Konsep

Jumlah Benih yang Beredar

Definisi

Banyaknya benih yang tersedia dan ditawarkan di pasar atau distribusi untuk penggunaan dalam sektor pertanian, perkebunan, atau budidaya lainnya dalam periode tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah benih yang beredar, maka semakin banyak kesempatan bagi petani dan produsen untuk memperoleh dan menggunakan benih dalam aktivitas pertanian dan perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_BENIH_BEREDAR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Benih

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Benih yang Beredar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 27

Jumlah Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang Mengendalikan OPT

Konsep

Jumlah Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang Mengendalikan OPT

Definisi

Banyaknya kelompok tani dan tim khusus yang terlibat dalam kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (hama, penyakit, atau gulma) di sektor perkebunan

Interpretasi

Semakin besar jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT, maka semakin efektif upaya pengendalian hama, penyakit, atau gulma dalam pertanian atau perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_POKTAN_KENDALI_OPT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang Mengendalikan OPT

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 28

Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT

Konsep

Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT

Definisi

Total estimasi nilai kerugian ekonomi yang dihasilkan dari serangan hama, penyakit, atau gulma pada tanaman perkebunan

Interpretasi

Semakin besar jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT, maka semakin signifikan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh serangan hama, penyakit, atau gulma pada tanaman pertanian atau perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_TAX_OPT})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 29

Jumlah Produksi Agens Pengendali Hayati (APH)

Konsep

Jumlah Produksi Agens Pengendali Hayati (APH)

Definisi

Total agensi pengendali organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit, gulma) yang diproduksi untuk digunakan dalam metode pengendalian hayati di sektor perkebunan

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi agens pengendali hayati, maka semakin besar kapasitas untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) melalui metode pengendalian hayati dalam sektor perkebunan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_PROD_APH})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Liter

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Produksi Agens Pengendali Hayati (APH)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah**

Pengumpulan Data Perpustakaan yang Mempunyai NPP Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Mengumpulkan Data Terkait Perpustakaan yang Memiliki NPP di Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran Membaca

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	NPP Nama Perpustakaan Alamat Provinsi Kabupaten/Kota Jenis Perpustakaan Nama Kepala Perpustakaan Tahun Berdiri
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) Dokumentasi
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

VARIABEL 1

Jenis Perpustakaan

Alias

JENIS_PERPUSTAKAAN

Konsep

Jenis Perpustakaan

Definisi

Jenis perpustakaan mengacu pada klasifikasi atau pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Umum (Tingkat Pemerintah Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan)
- Khusus (Rumah Ibadah, Rutan/LP, Puskesmas, Instansi/OPD)
- Sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat)
- Perguruan Tinggi (PT Negeri, PT Swasta)

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PERPUSTAKAAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Nama Perpustakaan

Alias

NAMA_PERPUSTAKAAN

Konsep

Nama Perpustakaan

Definisi

Nama perpustakaan adalah label yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PERPUSTAKAAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Nomor Pokok Perpustakaan

Alias

NPP

Konsep

Nomor Pokok Perpustakaan

Definisi

Nomor Pokok Perpustakaan merupakan kode identitas khusus pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan kode area provinsi, kabupaten/ kota dan kode unik untuk jenis perpustakaan tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NPP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Alamat

Alias

ALAMAT

Konsep

Alamat

Definisi

Alamat adalah petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan lokasi fisik atau virtual suatu objek, tempat, atau entitas

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAMAT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Kepala Perpustakaan

Alias

NAMA KEPALA PERPUSTAKAAN

Konsep

Nama Kepala Perpustakaan

Definisi

Nama kepala perpustakaan adalah identifikasi dari individu yang memegang posisi kepemimpinan tertinggi dalam suatu perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA KEPALA PERPUSTAKAAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Klasifikasi Pengunjung

Alias

KLASIFIKASI PENGUNJUNG

Konsep

Klasifikasi Pengunjung

Definisi

Klasifikasi pengunjung adalah proses mengelompokkan atau mengategorikan pengunjung atau individu berdasarkan beberapa karakteristik atau atribut tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Standar Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KLASIFIKASI PENGUNJUNG = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Pustakawan

Alias

NAMA_PUSTAKAWAN

Konsep

Nama Pustakawan

Definisi

Nama Pustakawan adalah identitas dari seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Standar Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PUSTAKAWAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Nomor Anggota

Alias

NOMOR_ANGGOTA

Konsep

Nomor Anggota

Definisi

Nomor anggota perpustakaan adalah kode atau identifikasi unik yang diberikan kepada setiap anggota perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NOMOR_ANGGOTA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Nama Pemustaka

Alias

NAMA_PEMUSTAKA

Konsep

Nama Pemustaka

Definisi

Nama pemustaka adalah nama individu yang menjadi anggota perpustakaan atau yang menggunakan layanan perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PEMUSTAKA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Judul Buku

Alias

JUDUL_BUKU

Konsep

Judul Buku

Definisi

Judul buku adalah nama atau frasa yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu karya tulis dalam bentuk buku

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUDUL_BUKU = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Tahun Terbit

Alias

TAHUN_TERBIT

Konsep

Tahun Terbit

Definisi

Tahun terbit adalah tahun di mana suatu buku atau karya cetak lainnya pertama kali diterbitkan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TAHUN_TERBIT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Pengarang

Alias

PENGARANG

Konsep

Pengarang

Definisi

Pengarang adalah individu atau kelompok yang menciptakan dan menulis suatu karya tulis, seperti buku, artikel, esai, puisi, dan karya-karya lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENGARANG = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Penerbit

Alias

PENERBIT

Konsep

Penerbit

Definisi

Penerbit adalah perusahaan atau entitas yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan, mencetak, mendistribusikan, dan memasarkan karya-karya tulis seperti buku, majalah, jurnal, dan karya cetak lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENERBIT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Buku Elektronik

Alias

EBOOK

Konsep

Buku Elektronik

Definisi

Buku elektronik atau lebih dikenal sebagai e-book, adalah bentuk digital dari buku tradisional yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, e-reader (pembaca e-book khusus), atau bahkan smartphone

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

EBOOK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Arsip Statis

Alias

ARSIP_STATIS

Konsep

Arsip Statis

Definisi

Arsip statis adalah istilah yang mengacu pada jenis arsip atau dokumen yang tidak lagi aktif digunakan dalam operasi sehari-hari suatu organisasi atau entitas namun tetap ada untuk keperluan referensi, hukum, atau historis, tetapi jarang diakses atau diperlukan dalam rutinitas harian

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Akuisisi Arsip Statis

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ARSIP_STATIS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Arsip Hasil Akuisisi

Alias

ARSIP_HASIL_AKUISISI

Konsep

Arsip Hasil Akuisisi

Definisi

Arsip Hasil Akuisisi mengacu pada kumpulan dokumen, rekaman, atau informasi lainnya yang diperoleh oleh suatu lembaga, organisasi, atau individu dari sumber eksternal melalui proses akuisisi atau penerimaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Akuisisi Arsip Statis

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ARSIP_HASIL_AKUISISI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Perpustakaan yang Memenuhi Standar

Alias

PERPUSTAKAAN_MEMENUHI_STANDAR

Konsep

Perpustakaan yang Memenuhi Standar

Definisi

Perpustakaan yang memenuhi standar adalah perpustakaan yang telah mengadopsi dan mematuhi pedoman, norma, atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk kualitas, pelayanan, dan operasi perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PERPUSTAKAAN_MEMENUHI_STANDAR =
...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani

Alias

ORANG_HARUS_DILAYANI

Konsep

Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani

Definisi

Orang dalam populasi yang harus dilayani merujuk pada kelompok individu atau masyarakat yang menjadi target pelayanan dari perpustakaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ORANG_HARUS_DILAYANI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Judul Buku Elektronik

Alias

JUDUL_EBOOK

Konsep

Judul Buku Elektronik

Definisi

Judul buku elektronik adalah nama resmi atau identifikasi unik yang diberikan kepada suatu buku dalam format elektronik atau digital

Referensi Pemilihan

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JUDUL_EBOOK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Buku

Alias

BUKU

Konsep

Buku

Definisi

Buku adalah suatu bentuk medium yang berisi teks, gambar, atau informasi lainnya yang diatur dalam halaman-halaman yang dijilid bersama

Referensi Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BUKU = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Pinjaman Buku

Alias

PINJAMAN_BUKU

Konsep

Pinjaman Buku

Definisi

Pinjaman buku adalah proses atau tindakan meminjam buku dari suatu institusi seperti perpustakaan dalam jangka waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Biaya Administrasi Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan dan Denda Pengembalian Buku Terlambat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BUKU_DIPINJAM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Arsiparis

Alias

ARSIPARIS

Konsep

Arsiparis

Definisi

Arsiparis adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab dalam mengelola, mengatur, memelihara, dan menjaga arsip dan dokumen dalam sebuah organisasi, lembaga, atau entitas lainnya

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ARSIPARIS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Bimbingan Teknis Tertib Arsip

Alias

BIMBINGAN ARSIP

Konsep

Bimbingan Teknis Tertib Arsip

Definisi

Bimbingan Teknis Tertib Arsip adalah suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan panduan, pengetahuan, dan informasi kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dan dokumen dalam suatu organisasi atau entitas

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BIMBINGAN ARSIP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Jumah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku

Alias

JMLH_SKPD_MAB

Konsep

Jumah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku

Definisi

Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku adalah banyaknya unit atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah yang telah menerapkan praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau pedoman yang ditetapkan secara resmi atau baku

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SKPD_MAB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Jumlah SKPD

Alias

JMLH_SKPD

Konsep

Jumlah SKPD

Definisi

Jumlah SKPD adalah istilah yang merujuk kepada total jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam suatu pemerintahan daerah atau organisasi pemerintah

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_SKPD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Perpustakaan

Konsep

Jumlah Perpustakaan

Definisi

Jumlah perpustakaan adalah banyaknya perpustakaan yang ada dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perpustakaan dapat menunjukkan bahwa akses terhadap layanan perpustakaan lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NAMA_PERPUSTAKAAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Jenis Perpustakaan

Variabel Penyusun

Nomor Pokok Perpustakaan, Nama Perpustakaan, Alamat, Jenis Perpustakaan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Konsep

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Definisi

Jumlah pengunjung perpustakaan adalah banyaknya orang yang mengunjungi suatu perpustakaan dalam periode waktu tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah pengunjung mungkin dianggap sebagai tanda positif bahwa perpustakaan berhasil menarik dan memenuhi kebutuhan pengunjung

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NAMA_PEMUSTAKA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Menurut Klasifikasi Pengunjung, Pengunjung

Variabel Penyusun

Nama Pengunjung, Profesi, Status Pelajar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Peminjam Buku

Konsep

Jumlah Peminjam Buku

Definisi

Jumlah peminjam buku adalah Total individu atau pengguna yang meminjam buku atau bahan pustaka lainnya dari suatu perpustakaan dalam periode tertentu

Interpretasi

Jika banyak orang meminjam buku, ini bisa berarti bahwa koleksi buku yang ada di perpustakaan memiliki kualitas dan relevansi yang baik terhadap minat dan kebutuhan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NOMOR_ANGGOTA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nomor Anggota, Nama Pemustaka

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Buku yang Dipinjam

Konsep

Jumlah Buku yang Dipinjam

Definisi

Jumlah buku yang dipinjam adalah nilai yang mengindikasikan berapa banyak buku atau bahan pustaka lainnya yang telah dipinjam oleh pengunjung atau peminjam dari suatu perpustakaan dalam jangka waktu tertentu

Interpretasi

Jika banyak buku yang dipinjam, ini bisa menunjukkan bahwa koleksi buku yang ada di perpustakaan memiliki keragaman dan relevansi yang baik terhadap minat dan kebutuhan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{BUKU_DIPINJAM})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Judul Buku, Pinjaman Buku

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani

Konsep

Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani

Definisi

Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani mengacu pada jumlah individu yang menjadi target atau penerima layanan perpustakaan dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu

Interpretasi

Dengan adanya populasi yang lebih besar untuk dilayani, mungkin diperlukan penyesuaian dalam infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang ada agar bisa mengakomodasi kebutuhan semua individu

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (ORANG_HARUS_DILAYANI)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

NIK

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Konsep

Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Definisi

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengacu pada total judul buku atau bahan pustaka lainnya yang ada dalam koleksi suatu perpustakaan yang melayani suatu daerah atau wilayah tertentu

Interpretasi

Semakin banyak koleksi buku yang tersedia dapat memberikan gambaran positif tentang kemampuan perpustakaan untuk menyediakan sumber daya yang berkualitas bagi masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (JUDUL_BUKU)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Judul

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Judul Buku, Tahun Terbit, Pengarang, Penerbit

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Konsep

Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Definisi

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah merujuk pada total kuantitas buku yang ada dalam koleksi suatu perpustakaan yang melayani suatu daerah atau wilayah tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah buku dalam koleksi perpustakaan dapat memberikan masyarakat akses yang lebih kaya ke berbagai jenis informasi, pengetahuan, dan bahan bacaan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{BUKU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Buku

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Judul Buku, Tahun Terbit, Pengarang, Penerbit

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Konsep

Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Definisi

Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

Interpretasi

Semakin tinggi Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah, semakin besar jumlah judul buku yang tersedia untuk setiap penduduk atau orang yang dilayani oleh perpustakaan tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{JUDUL_BUKU}) / \Sigma (\text{ORANG_HARUS_DILAYAN})$$

Ukuran

Rasio

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah, Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Konsep

Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Definisi

Jumlah koleksi judul buku elektronik yang tersedia di perpustakaan daerah mengacu pada total judul buku dalam format elektronik yang dapat diakses dan digunakan oleh pengunjung atau anggota perpustakaan dalam suatu daerah atau wilayah tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah koleksi judul buku elektronik memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dalam format digital

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{JUDUL_EBOOK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Judul

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Judul Buku, Tahun Terbit, Pengarang, Penerbit

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Pustakawan di Provinsi

Konsep

Jumlah Pustakawan di Provinsi

Definisi

Jumlah Pustakawan di Provinsi adalah banyaknya individu yang memiliki posisi atau pekerjaan sebagai pustakawan dalam wilayah provinsi tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah pustakawan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{NAMA_PUSTAKAWAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Pustakawan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Akuisisi yang Terkelola dengan Baik

Konsep

Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Akuisisi yang Terkelola dengan Baik

Definisi

Jumlah arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik mengacu pada total kuantitas arsip yang telah dikumpulkan, dikelola, dan diawetkan dengan efektif oleh suatu institusi atau organisasi

Interpretasi

Peningkatan jumlah arsip yang terkelola dengan baik mencerminkan upaya untuk mengelola informasi dan data dengan cara yang efisien dan terstruktur

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{ARSIP_STATIS}) + \Sigma (\text{ARSIP_HASIL_AKUISISI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Berkas

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Arsip Statis, Arsip Hasil Akuisisi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Lembaga Instansi yang Dibina

Konsep

Jumlah Lembaga Instansi yang Dibina

Definisi

Jumlah lembaga instansi yang dibina merujuk pada banyaknya entitas atau organisasi yang diawasi, dikelola, atau mendapatkan dukungan dari sebuah otoritas atau entitas tertentu

Interpretasi

Dengan membina lebih banyak lembaga instansi, dinas perpustakaan dan kearsipan daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan informasi, bahan pustaka, dan arsip di berbagai wilayah atau sektor

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{LEMBAGA_DIBINA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Instansi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar

Konsep

.Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar

Definisi

.Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar adalah banyaknya lembaga perpustakaan yang telah berhasil memenuhi sejumlah kriteria, pedoman, atau standar tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perpustakaan yang memenuhi standar mengindikasikan bahwa lebih banyak lembaga perpustakaan berupaya memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (PERPUSTAKAAN_MEMENUHI_STANDAR)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nomor Pokok Perpustakaan, Nama Perpustakaan, Alamat, Perpustakaan yang Memenuhi Standar

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Konsep

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Definisi

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan para individu yang bertanggung jawab dalam mengelola arsip dan dokumen

Interpretasi

Semakin banyak kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan dilakukan, maka semakin positif dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip dan dokumen dalam suatu organisasi atau entitas

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (BIMBINGAN_ARSIP)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kegiatan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Bimbingan Teknis Tertib Arsip

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Arsiparis

Konsep

Jumlah Arsiparis

Definisi

Jumlah arsiparis merujuk pada banyaknya individu yang bekerja dalam bidang kearsipan atau manajemen arsip

Interpretasi

Dengan lebih banyak arsiparis, organisasi memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola arsip dan dokumen dengan lebih baik

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (ARSIPARIS)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Arsiparis

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 16

Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku

Konsep

Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku

Definisi

Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah perbandingan jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah SKPD

Interpretasi

semakin tinggi Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di suatu daerah atau organisasi, semakin banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau pedoman yang ditetapkan secara resmi atau baku

Metode/Rumus Penghitungan

$JMLH_SKPD_MAB / JMLH_SKPD$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku, Jumlah SKPD

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas
Peternakan dan
Kesehatan
Hewan**

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Memperoleh Informasi Terkait Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Populasi Ternak Pemotongan Ternak kelahiran Ternak Pengeluaran Ternak Pemasukan Ternak
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

VARIABEL 1

Jumlah Populasi Ternak

Alias

POP_TERNAK

Konsep

Jumlah Populasi Ternak

Definisi

Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging. Populasi ras ayam pedaging (broiler) adalah populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

POP_TERNAK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jumlah Produksi Daging

Alias

PROD_DAGING

Konsep

Jumlah Produksi Daging

Definisi

Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu

Referensi Pemilihan

SK Dirjen PKH No. 14087/2019

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

PROD_DAGING=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jumlah Produksi Susu

Alias

PROD_SUSU

Konsep

Jumlah Produksi Susu

Definisi

Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain

Referensi Pemilihan

SK Dirjen PKH No. 14087/2019

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

PROD_SUSU=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Jumlah Produksi Telur

Alias

PROD_TELUR

Konsep

Jumlah Produksi Telur

Definisi

Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.

Referensi Pemilihan

SK Dirjen PKH No. 14087/2019

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

PROD_TELUR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama Kelompok Peternak

Alias

NM_POK_TERNAK

Konsep

Nama Kelompok Peternak

Definisi

Nama dari kumpulan individu yang terorganisir dan terlibat dalam kegiatan beternak

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM_POK_TERNAK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nama Peternak

Alias

NM_PETERNAK

Konsep

Nama Peternak

Definisi

Nama individu yang secara individu terlibat dalam kegiatan beternak

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NM_PETERNAK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam

Alias

JUM_USAHA_BIBIT_AYAM

Konsep

Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam

Definisi

Jumlah perusahaan pembibitan ayam adalah total banyaknya entitas bisnis yang khusus berfokus pada kegiatan pembibitan dan pemuliaan ayam dalam sektor peternakan

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_USAHA_BIBIT_AYAM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong

Alias

JUM_KEL_PENGGEMUKAN_SAPI

Konsep

Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong

Definisi

Jumlah kelompok penggemukan sapi potong adalah total banyaknya kelompok atau unit usaha yang terlibat dalam kegiatan penggemukan dan pemeliharaan sapi potong sebelum dipotong untuk diambil dagingnya

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_KEL_PENGGEMUKAN_SAPI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Nama Rumah Potong Hewan

Alias

NAMA_RPH

Konsep

Nama Rumah Potong Hewan

Definisi

Nama fasilitas tempat pemotongan dan pengolahan hewan ternak menjadi daging dan produk-produk hewan lainnya

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_RPH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Jumlah Komoditas Masuk

Alias

JUM_KOM_MASUK

Konsep

Jumlah Komoditas Masuk

Definisi

Jumlah komoditas masuk adalah total banyaknya hewan ternak yang memasuki wilayah tertentu dalam suatu periode waktu

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_KOM_MASUK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Komoditas Keluar

Alias

JUM_KOM_KELUAR

Konsep

Jumlah Komoditas Keluar

Definisi

Jumlah komoditas keluar adalah total banyaknya hewan ternak yang keluar dari suatu wilayah tertentu dalam suatu periode waktu

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_KOM_KELUAR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Kasus Wabah pada Hewan

Alias

WABAH

Konsep

Kasus Wabah pada Hewan

Definisi

Kejadian terdeteksinya penyebaran penyakit secara massal di antara populasi hewan dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

WABAH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jenis Wabah

Alias

JENIS_WABAH

Konsep

Jenis Wabah

Definisi

Jenis wabah ternak adalah variasi penyakit infeksi atau gangguan kesehatan yang menyebar secara cepat dan meluas di antara populasi hewan ternak dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Sapi Gila
- Flu Burung
- Flu Babi
- Penyakit Kuku dan Mulut
- Jembrana

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_WABAH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan

Alias

POK_TANI_DILATIH_TERNAK

Konsep

Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan

Definisi

Kelompok pertanian yang mendapatkan pelatihan dalam praktik-praktik budidaya peternakan

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

POK_TANI_DILATIH_TERNAK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Kawasan Peternakan

Alias

KAWASAN_PETERNAKAN

Konsep

Kawasan Peternakan

Definisi

Lahan yang digunakan untuk kegiatan beternak hewan dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KAWASAN_PETERNAKAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Miniranch yang terregister

Alias

MINIRANCH

Konsep

Miniranch yang terregister

Definisi

Lokasi atau area mini peternakan yang telah secara resmi terdaftar oleh otoritas yang berwenang

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

MINIRANCH=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jumlah Kelahiran Sapi

Alias

JUM_SAPILAHIR

Konsep

Jumlah Kelahiran Sapi

Definisi

Jumlah kelahiran sapi adalah total banyaknya anak sapi yang lahir dalam suatu wilayah atau populasi sapi betina dalam periode tertentu

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_SAPILAHIR=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jumlah Ternak Sapi Betina Produktif

Alias

JUM_SAPIBETINA_PRODUKTIF

Konsep

Jumlah Ternak Sapi Betina Produktif

Definisi

Jumlah ternak sapi betina produktif adalah total banyaknya hewan sapi betina yang berada dalam kondisi reproduktif dan mampu menghasilkan keturunan

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari atau sama dengan nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_SAPIBETINA_PRODUKTIF=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Komoditas

Alias

KOMODITAS

Konsep

Komoditas

Definisi

Jenis komoditas peternakan meliputi sejumlah hewan ternak seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, kelinci, puyuh, merpati, dan itik manila

Referensi Pemilihan

Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|---------------|--------------------|
| - Sapi Potong | - Ayam Ras Petelur |
| - Sapi Perah | - Ayam Ras |
| - Kerbau | Pedaging |
| - Kambing | - Itik |
| - Domba | - Kelinci |
| - Babi | - Puyuh |
| - Kuda | - Merpati |
| - Ayam Buras | - Itik Manila |

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

KOMODITAS=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Populasi Ternak

Konsep

Jumlah Populasi Ternak

Definisi

Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging. Populasi ras ayam pedaging (broiler) adalah populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun

Interpretasi

Semakin banyak jumlah populasi ternak menunjukkan semakin besar pula tingkatan produksi hewan ternak dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{POP_TERNAK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ekor

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Jumlah Populasi Ternak, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Produksi Daging

Konsep

Jumlah Produksi Daging

Definisi

Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi daging mengindikasikan peningkatan kuantitas daging yang dihasilkan dari hewan ternak

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PROD_DAGING})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Satuan berat (kg atau ton)

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Jumlah Produksi Daging, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Produksi Susu

Konsep

Jumlah Produksi Susu

Definisi

Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi susu, semakin besar pasokan bahan pangan dan bahan baku industri yang dihasilkan dari sektor peternakan, berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta berbagai industri pengolahan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PROD_SUSU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Satuan berat (kg atau ton)

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Jumlah Produksi Susu, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Produksi Telur

Konsep

Jumlah Produksi Telur

Definisi

Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.

Interpretasi

Semakin besar jumlah produksi telur, semakin tinggi pasokan sumber protein yang dihasilkan dari sektor peternakan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PROD_TELUR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Satuan berat (kg atau ton)

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Jumlah Produksi Telur, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Kelompok Peternak

Konsep

Jumlah Kelompok Peternak

Definisi

Jumlah kelompok peternak adalah total banyaknya kumpulan individu yang terorganisir dan terlibat dalam kegiatan beternak

Interpretasi

Semakin besar jumlah kelompok peternak menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan peternakan yang terorganisir

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(NM_POK_TERNAK)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kelompok Peternak

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Peternak Perorangan

Konsep

Jumlah Peternak Perorangan

Definisi

Jumlah peternak perorangan adalah total individu yang secara individu terlibat dalam kegiatan beternak

Interpretasi

Semakin besar jumlah peternak perorangan mencerminkan semakin banyak individu yang terlibat dalam kegiatan beternak secara mandiri

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(NM_PETERNAK)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Peternak

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Industri Peternakan

Konsep

Jumlah Industri Peternakan

Definisi

Jumlah industri peternakan adalah total banyaknya entitas bisnis yang beroperasi dalam sektor peternakan, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pembibitan ayam dan penggemukan sapi potong

Interpretasi

Semakin besar jumlah industri peternakan menunjukkan semakin luasnya kegiatan pengolahan hewan ternak dan produk-produknya dalam skala industri

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_USAHA_BIBIT_AYAM}) + \Sigma(\text{JUM_KEL_PENGGEMUKAN_SAPI})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis

Variabel Penyusun

Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam, Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Rumah Potong Hewan

Konsep

Jumlah Rumah Potong Hewan

Definisi

Jumlah rumah potong hewan adalah total fasilitas tempat pemotongan dan pengolahan hewan ternak menjadi daging dan produk-produk hewan lainnya

Interpretasi

Semakin besar jumlah rumah potong hewan menandakan semakin banyak fasilitas pemotongan dan pengolahan hewan ternak yang tersedia

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_RPH})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Rumah Potong Hewan

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Komoditas Masuk

Konsep

Jumlah Komoditas Masuk

Definisi

Jumlah komoditas masuk adalah total banyaknya hewan ternak yang memasuki wilayah tertentu dalam suatu periode waktu

Interpretasi

Semakin besar komoditas yang masuk mencerminkan peningkatan arus pasokan hewan ternak ke suatu wilayah atau lokasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_KOM_MASUK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ekor

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Jumlah Komoditas Masuk, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Komoditas Keluar

Konsep

Jumlah Komoditas Keluar

Definisi

Jumlah komoditas keluar adalah total banyaknya hewan ternak yang keluar dari suatu wilayah tertentu dalam suatu periode waktu

Interpretasi

Semakin besar jumlah komoditas yang keluar mengindikasikan peningkatan dalam perdagangan dan distribusi hewan ternak dari suatu wilayah atau lokasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{JUM_KOM_KELUAR})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ekor

Klasifikasi Penyajian

Menurut Komoditas

Variabel Penyusun

Jumlah Komoditas Keluar, Komoditas

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Kasus Wabah pada Hewan

Konsep

Jumlah Kasus Wabah pada Hewan

Definisi

Jumlah kasus wabah pada hewan adalah total kejadian penyebaran penyakit yang melibatkan sejumlah hewan dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah kasus wabah pada hewan menggambarkan peningkatan insiden penyebaran penyakit di antara hewan dalam suatu wilayah atau populasi, yang dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan hewan, kesejahteraan peternak, dan perekonomian peternakan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{WABAH})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Wabah

Variabel Penyusun

Kasus Wabah pada Hewan, Jenis Wabah

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan

Konsep

Jumlah Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan

Definisi

Jumlah kelompok tani yang dilatih budidaya peternakan adalah total banyaknya kelompok pertanian yang mendapatkan pelatihan dalam praktik-praktik budidaya peternakan

Interpretasi

Semakin besar jumlah kelompok tani yang dilatih budidaya peternakan mencerminkan peningkatan partisipasi petani dalam pelatihan dan pengembangan teknik beternak

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{POK_TANI_DILATIH_TERNAK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Kawasan Peternakan

Konsep

Jumlah Kawasan Peternakan

Definisi

Jumlah kawasan peternakan adalah total banyaknya lahan yang digunakan untuk kegiatan beternak hewan dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu

Interpretasi

Semakin besar jumlah kawasan peternakan menunjukkan semakin luasnya area lahan yang dialokasikan untuk kegiatan beternak hewan dalam suatu wilayah atau lokasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KAWASAN_PETERNAKAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kawasan Peternakan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Jumlah Miniranch yang terregister

Konsep

Jumlah Miniranch yang terregister

Definisi

Jumlah mini ranch yang terdaftar adalah total banyaknya lokasi atau area mini peternakan yang telah secara resmi terdaftar oleh otoritas yang berwenang

Interpretasi

Semakin besar jumlah mini ranch yang terdaftar mencerminkan peningkatan popularitas dan adopsi model peternakan mini skala yang terorganisir, yang dapat berdampak pada perkembangan sektor peternakan serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{MINIRANCH})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Miniranch yang terregister

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Angka Kelahiran Sapi

Konsep

Angka Kelahiran Sapi

Definisi

Angka kelahiran sapi adalah hasil perhitungan dari membagi jumlah kelahiran sapi dengan jumlah ternak sapi betina yang sedang memproduksi atau produktif

Interpretasi

Semakin tinggi angka kelahiran sapi mengindikasikan tingkat reproduksi yang lebih tinggi dalam populasi sapi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JUM_SAPL_LAHIR})}{\Sigma(\text{JUM_SAPL_BETINA_PRODUKTIF})}$$

Ukuran

Angka

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Kelahiran Sapi, Jumlah Ternak Sapi Betina Produktif

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

**Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang
dan Perumahan
Rakyat**

Laporan Capaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Tujuan Umum yang Dilakukan Adalah untuk Memperoleh Gambaran Rinci Mengenai: <ul style="list-style-type: none">- Kualitas Air Minum yang Digunakan Oleh Rumah Tangga untuk Keperluan Sehari-Hari- Cakupan Air Minum Layak- Jumlah Masyarakat (Rumah Tangga) yang Terlayani Air Minum Layak- Jumlah Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan Kab/Kota- Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan Kab/Kota
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Cipta Karya

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Cakupan Layanan Air Minum Layak
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Pihak ke Tiga
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	1. Mengetahui Indikator yang Digunakan Dalam Pengklasifikasian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Mengetahui Ketepatan Indikator Pengklasifikasian Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perencanaan Pembangunan Penyediaan Rumah Layak Huni Berdasarkan Data Base yang Tersedia 3. Terverifikasinya Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 4. Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Pondasi Kondisi Kolom dan Balok Kondisi Konstruksi Atap Jendela/Lubang Cahaya Ventilasi Kepemilikan Kamar Mandi/Jamban Jarak Sumber Air Minum ke TPA Tinja Sumber Air Minum Sumber Listrik Luas Rumah (M2) Jumlah Penghuni Material Atap Terluas Kondisi Atap Material Dinding Terluas Kondisi Dinding Material Lantai Terluas Kondisi Lantai
Periodisasi:	Sesuai Kebutuhan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Wawancara Langsung Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

Penguatan Data Base Survei Inspeksi Kondisi Jembatan

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Penguatan Data Base Kondisi Jembatan
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	No.Jembatan Nama Jembatan Dimensi Jembatan Tipe Jembatan Kondisi Jembatan
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Pengamatan (Observasi)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

VARIABEL 1

Ruas Jalan Provinsi

Alias

RUAS_JALAN_PROVINSI

Konsep

Ruas Jalan Provinsi

Definisi

Ruas jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

RUAS_JALAN_PROVINSI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Treatment Trigger Index (TTI)

Alias

TTI

Konsep

Treatment Trigger Index (TTI)

Definisi

Kombinasi kerusakan jalan yang dihitung menggunakan persamaan yang melibatkan nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI, nilai IRI menjadi faktor konversi TTI, area kerusakan, panjang segmen jalan, lebar segmen jalan, dan nilai bobot kerusakan

Referensi Pemilihan

Manual Bidang Jalan dan Jembatan No 04/M/BM/2021

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

TTI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Jenis Permukaan Jalan

Alias

JENIS_PERMUKAAN_JALAN

Konsep

Jenis Permukaan Jalan

Definisi

Tipe perkerasan jalan terdiri dari beton, blok beton, aspal, lapisan penetrasi, batu kali, kerikil, dan tanah

Referensi Pemilihan

Manual Bidang Jalan dan Jembatan No 04/M/BM/2021

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Aspal
- Kerikil
- Tanah
- Cor Beton

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PERMUKAAN_JALAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Ruas Jalan Nasional

Alias

RUAS_JALAN_NASIONAL

Konsep

Ruas Jalan Nasional

Definisi

Ruas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

RUAS_JALAN_NASIONAL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Panjang Jalan Tol

Alias

PANJANG_TOL

Konsep

Panjang Jalan Tol

Definisi

Panjang jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

PANJANG_TOL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Ruas Jalan Tol

Alias

RUAS_TOL

Konsep

Ruas Jalan Tol

Definisi

Ruas jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

RUAS_TOL=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Jumlah Panjang Jalan

Alias

JUM_PANJANG_JALAN

Konsep

Jumlah Panjang Jalan

Definisi

Jumlah panjang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_PANJANG_JALAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Jumlah Penduduk

Alias

JUM_PENDUDUK

Konsep

Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

JUM_PENDUDUK=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang

Alias

JALAN_BAIK_SEDANG

Konsep

Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang

Definisi

Panjang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; yang berada dalam kondisi baik dan sedang

Referensi Pemilihan

Manual Bidang Jalan dan Jembatan No 04/M/BM/2021

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

JALAN_BAIK_SEDANG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat

Alias

JALAN_RUSAK_RINGAN_RUSAK_BERAT

Konsep

Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat

Definisi

Panjang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; yang berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat

Referensi Pemilihan

Manual Bidang Jalan dan Jembatan No 04/M/BM/2021

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

JALAN_RUSAK_RINGAN_RUSAK_BERAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Nama Jembatan

Alias

NAMA_JEMBATAN

Konsep

Nama Jembatan

Definisi

Nama jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_JEMBATAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Panjang Jembatan

Alias

PANJANG_JEMBATAN

Konsep

Panjang Jembatan

Definisi

Panjang jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

PANJANG_JEMBATAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Luas Kawasan Pemukiman

Alias

LUAS_PEMUKIMAN

Konsep

Luas Kawasan Pemukiman

Definisi

Luas lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_PEMUKIMAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Luas Lahan Hutan Rakyat

Alias

LUAS_HUTAN_RAKYAT

Konsep

Luas Lahan Hutan Rakyat

Definisi

Luas hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Kehutanan RI No P.69/Menhut-II/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_HUTAN_RAKYAT=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Luas Wilayah Budidaya

Alias

LUAS_WIL_BUDIDAYA

Konsep

Luas Wilayah Budidaya

Definisi

Luas wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_WIL_BUDIDAYA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Luas Kawasan Lindung

Alias

LUAS_KAWASAN_LINDUNG

Konsep

Luas Kawasan Lindung

Definisi

Luas wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_KAWASAN_LINDUNG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Jenis Kawasan Lindung

Alias

JENIS_KAWASAN_LINDUNG

Konsep

Jenis Kawasan Lindung

Definisi

Jenis wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Hutan
- Bukan Hutan

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_KAWASAN_LINDUNG=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Luas Kawasan Industri

Alias

LUAS_KAWASAN_INDUSTRI

Konsep

Luas Kawasan Industri

Definisi

Luas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_KAWASAN_INDUSTRI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Realisasi RTRW

Alias

REALISASLRTRW

Konsep

Realisasi RTRW

Definisi

Realisasi RTRW adalah Luas area yang sesuai dengan realisasi dari hasil perencanaan tata ruang di suatu wilayah

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

REALISASLRTRW=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Rencana Peruntukan

Alias

RENCANA_PERUNTUKAN

Konsep

Rencana Peruntukan

Definisi

Luas wilayah yang sudah sesuai dengan peruntukkan kawasannya; meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian harus lebih dari nol

Kalimat Pertanyaan

RENCANA_PERUNTUKAN=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Luas Wilayah Industri

Alias

LUAS_WIL_INDUSTRI

Konsep

Luas Wilayah Industri

Definisi

Luas bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_WIL_INDUSTRI=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Alias

LUAS_KALTIM

Konsep

Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Definisi

Luas wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain; yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Float

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

LUAS_KALTIM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Nama PDAM

Alias

NAMA_PDAM

Konsep

Nama PDAM

Definisi

Nama Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PDAM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Banyaknya Pengguna Layanan

Alias

PENGGUNA_PDAM

Konsep

Banyaknya Pengguna Layanan

Definisi

Banyaknya pengguna layanan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi
- Isian tidak boleh kurang dari nol

Kalimat Pertanyaan

PENGGUNA_PDAM=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Nama Kabupaten/Kota

Alias

NAMA_KABKOTA

Konsep

Nama Kabupaten/Kota

Definisi

Nama bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KABKOTA=...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Total Panjang Jalan Provinsi

Konsep

Total Panjang Jalan Provinsi

Definisi

Total panjang jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi

Interpretasi

Semakin tinggi total panjang jalan provinsi di suatu provinsi, maka akan menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki infrastruktur jalan provinsi yang lebih lengkap dan berkembang

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{RUAS_JALAN_PROVINSI}) \text{ BY (TTI)}$
atau $\Sigma(\text{RUAS_JALAN_PROVINSI}) \text{ BY (JENIS_PERMUKAAN_JALAN)}$

Ukuran

Jumlah

Satuan

km

Klasifikasi Penyajian

Menurut Kondisi, Menurut Jenis Permukaan

Variabel Penyusun

Ruas Jalan Provinsi, Treatment Trigger Index (TTI), Jenis Permukaan Jalan, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Total Panjang Jalan Nasional

Konsep

Total Panjang Jalan Nasional

Definisi

Total panjang jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol

Interpretasi

Semakin tinggi total panjang jalan nasional di suatu provinsi, maka akan menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki infrastruktur jalan nasional yang lebih luas dan berkembang

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{RUAS_JALAN_NASIONAL}) \text{ BY (TTI)}$
atau $\Sigma(\text{RUAS_JALAN_NASIONAL}) \text{ BY (JENIS_PERMUKAAN_JALAN)}$

Ukuran

Jumlah

Satuan

km

Klasifikasi Penyajian

Menurut Kondisi, Menurut Jenis Permukaan

Variabel Penyusun

Ruas Jalan Nasional, Treatment Trigger Index (TTI), Jenis Permukaan Jalan, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Total Panjang Jalan Tol

Konsep

Total Panjang Jalan Tol

Definisi

Total panjang jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

Interpretasi

Semakin tinggi total panjang jalan tol di suatu provinsi, maka akan menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki infrastruktur jalan tol yang lebih luas dan berkembang

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PANJANG_TOL})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

km

Klasifikasi Penyajian

Menurut Ruas Jalan Tol

Variabel Penyusun

Panjang Jalan Tol, Ruas Jalan Tol

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Rasio Jumlah Panjang Jalan per Jumlah Penduduk

Konsep

Rasio Jumlah Panjang Jalan per Jumlah Penduduk

Definisi

Jumlah panjang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel dibagi dengan Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur

Interpretasi

Semakin tinggi rasio jumlah panjang jalan per jumlah penduduk, maka akan menunjukkan bahwa dalam suatu wilayah terdapat lebih banyak jalan per penduduk. Hal ini dapat mengindikasikan tingkat infrastruktur jalan yang baik, aksesibilitas yang lebih baik, serta mobilitas yang lebih tinggi bagi penduduk wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{[\Sigma(\text{JUM_PANJANG_JALAN})/\Sigma(\text{JUM_PENDUDUK})] \times 100\%}{}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Panjang Jalan, Jumlah Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Konsep

Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Definisi

Pembagian antara panjang jalan mantap dengan panjang jalan seluruhnya. Jalan Mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat

Interpretasi

Semakin tinggi rasio kemantapan jalan provinsi di suatu wilayah, maka akan menunjukkan bahwa sebagian besar jalan provinsi dalam wilayah tersebut dalam kondisi yang baik dan sedang

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\Sigma(\text{JALAN_BAIK_SEDANG}) \times 100\%}{[\Sigma(\text{JALAN_BAIK_SEDANG}) + \Sigma(\text{JALAN_RUSAK_RINGAN_RUSAK_BERAT})]}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang, Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Total Panjang Jembatan

Konsep

Total Panjang Jembatan

Definisi

Total panjang jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah

Interpretasi

Semakin tinggi total panjang jembatan, maka akan menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki infrastruktur jembatan yang luas

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PANJANG_JEMBATAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

km

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Jembatan, Panjang Jembatan, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Total Jumlah Jembatan

Konsep

Total Jumlah Jembatan

Definisi

Banyaknya jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah

Interpretasi

Semakin tinggi total jumlah jembatan, maka akan menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki sejumlah besar jembatan yang berfungsi

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{NAMA_JEMBATAN})$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Jembatan, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Luas Kawasan Pemukiman

Konsep

Luas Kawasan Pemukiman

Definisi

Luas lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Interpretasi

Semakin tinggi luas kawasan pemukiman, menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki lebih banyak lahan yang digunakan untuk pemukiman penduduk

Metode/Rumus Penghitungan

$\Sigma(\text{LUAS_PEMUKIMAN})$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Kawasan Pemukiman

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Luas Lahan Hutan Rakyat

Konsep

Luas Lahan Hutan Rakyat

Definisi

Luas hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %

Interpretasi

Semakin tinggi luas lahan hutan rakyat, maka akan menunjukkan bahwa masyarakat di suatu wilayah memiliki sejumlah besar lahan yang digunakan untuk pengelolaan hutan secara bersama-sama

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_HUTAN_RAKYAT})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Lahan Hutan Rakyat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Luas Wilayah Budidaya

Konsep

Luas Wilayah Budidaya

Definisi

Luas wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Interpretasi

Semakin tinggi luas wilayah budidaya, maka akan menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki lahan yang signifikan yang digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, perkebunan, atau budidaya tanaman dan hewan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_WIL_BUDIDAYA})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Wilayah Budidaya

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Luas Kawasan Lindung

Konsep

Luas Kawasan Lindung

Definisi

Luas wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

Interpretasi

Semakin tinggi luas kawasan lindung, maka akan menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki sejumlah besar lahan yang diatur untuk tujuan pelestarian alam, konservasi, dan perlindungan lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_KAWASAN_LINDUNG}) \text{ BY } (\text{JENIS_KAWASAN_LINDUNG})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

Menurut Jenis Kawasan Lindung

Variabel Penyusun

Luas Kawasan Lindung, Jenis Kawasan Lindung

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Luas Kawasan Industri

Konsep

Luas Kawasan Industri

Definisi

Luas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri

Interpretasi

Semakin tinggi luas kawasan industri, maka akan menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki sejumlah besar lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan industri dan manufaktur

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_KAWASAN_INDUSTRI})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Kawasan Industri

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Rasio Ketaatan terhadap RTRW

Konsep

Rasio Ketaatan terhadap RTRW

Definisi

Ketaatan terhadap RTRW adalah persentase realisasi RTRW terhadap Rencana Peruntukan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Metode/Rumus Penghitungan

$$[\Sigma(\text{REALISASI_RTRW})/\Sigma(\text{RENCANA_PERUNTUKAN})]\times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Realisasi RTRW, Rencana Peruntukan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Persentase Luas Wilayah Industri

Konsep

Persentase Luas Wilayah Industri

Definisi

Pembagian antara luas bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Interpretasi

Semakin tinggi persentase luas wilayah industri, maka akan menunjukkan seberapa besar bagian dari total luas wilayah suatu daerah yang digunakan untuk kegiatan industri dan manufaktur

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LUAS_WIL_INDUSTRI})\times 100\% / (\text{LUAS_KALTIM})$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Luas Wilayah Industri, Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Air Bersih

Konsep

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Air Bersih

Definisi

Jumlah pengguna layanan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih, maka akan menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga dalam suatu wilayah memiliki akses terhadap sumber air yang aman dan bersih

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PENGGUNA_PDAM})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rumah Tangga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama PDAM, Banyaknya Pengguna Layanan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Sosial

Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Untuk Pendataan kembali Keluarga Miskin/Kurang Mampu dan PMKS Lainnya Apabila Ada Terkait Pemberian Bantuan Sosial Melalui APBN dan APBD Agar Bantuan yang Diberikan Dapat Terlaksana Dengan Baik, Tepat Sasaran dan Bermanfaat Sehingga Seseorang Atau Kelompok Mampu Memenuhi Hak Hak Dasarnya untuk Mempertahankan dan Mengembangkan Kehidupan yang Bermartabat.
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Data PMKS
Periodisasi:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Pengumpulan Matriks Tabel PMKS
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

VARIABEL 1

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Alias

PMKS

Konsep

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Definisi

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Referensi Pemilihan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PMKS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Jenis PMKS

Alias

JENIS_PMKS

Konsep

Jenis PMKS

Definisi

Jenis penyanggah masalah sosial adalah kategori atau kelompok individu yang mengalami berbagai masalah sosial

Referensi Pemilihan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- | | |
|--|------------------------------|
| - Anak Bayi Terlantar | - Kelompok Minoritas |
| - Anak Terlantar | - Bekas Warga Binaan Lembaga |
| - Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | - Masyarakatan (BWBLP) |
| - Anak Jalanan | - Korban |
| - Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) | - Penyalahgunaan Napza |
| - Anak Korban Tindak Kekerasan | - Korban Trafficking |
| - Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | - Korban Tindak Kekerasan |
| - Lanjut Usia Terlantar | - Korban Bencana Alam |
| - Penyanggah Disabilitas | - Korban Bencana Sosial |
| - Gelandangan | - Wanita Rawan Sosial |
| - Pengemis | - Ekonomi |
| - Pemulung | - Fakir Miskin |
| | - Komunitas Adat Terpencil |

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_PMKS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Alias

TKS

Konsep

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Definisi

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TKS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Rumah Tangga Sasaran

Alias

RTS

Konsep

Rumah Tangga Sasaran

Definisi

Rumah tangga sasaran penerima manfaat beras miskin adalah rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu dan berhak menerima bantuan berupa beras dengan harga yang lebih terjangkau atau subsidi beras dari pemerintah atau lembaga sosial

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

RTS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan

Alias

JPMKSDB

Konsep

Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan

Definisi

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan bantuan adalah jumlah individu atau keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan menerima bantuan atau dukungan dari lembaga terkait

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

- Perda
- Pergub
- Keputusan Gubernur

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPMKSDB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan

Alias

JPMKSSMB

Konsep

Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan

Definisi

Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan adalah angka yang menunjukkan berapa banyak individu atau keluarga yang secara objektif memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan untuk menerima bantuan atau dukungan sosial

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPMKSSMB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Kepala Keluarga Penerima PKH

Alias

NAMA_KKP_PKH

Konsep

Nama Kepala Keluarga Penerima PKH

Definisi

Nama Kepala Keluarga Penerima PKH adalah identitas dari individu yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam suatu keluarga yang menjadi penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KKP_PKH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Alamat Keluarga Penerima PKH

Alias

ALAMAT_KP_PKH

Konsep

Alamat Keluarga Penerima PKH

Definisi

Informasi lengkap mengenai lokasi tempat tinggal atau domisili dari keluarga penerima PKH

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAMAT_KP_PKH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Nomor Induk Kependudukan Kepala Keluarga Penerima PKH

Alias

NIK_KKP_PKH

Konsep

Nomor Induk Kependudukan Kepala Keluarga Penerima PKH

Definisi

Nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang merupakan penerima PKH

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NIK_KKP_PKH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 10

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Alias

JPDTPTKD

Konsep

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Definisi

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya adalah angka atau statistik yang mencerminkan berapa banyak individu dengan disabilitas yang tinggal di panti atau fasilitas perawatan jangka panjang yang memenuhi kebutuhan dasar mereka

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPDTPTKD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Alias

JPDTMRSD

Konsep

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Definisi

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti adalah banyaknya individu dengan disabilitas yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi sosial dasar, dan mereka tinggal di fasilitas panti atau perawatan jangka panjang di suatu provinsi atau daerah tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPDTMRSD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Alias

JKBASTKD

Konsep

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Definisi

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya adalah total individu yang menjadi korban dari bencana alam atau bencana sosial tertentu dan telah menerima bantuan atau dukungan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JKBASTKD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi

Alias

JKBASMJS

Konsep

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi

Definisi

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi adalah angka yang mencerminkan berapa banyak individu atau keluarga yang menjadi korban dari bencana alam atau bencana sosial tertentu di suatu provinsi atau daerah dan memerlukan perlindungan serta jaminan sosial selama dan setelah respon darurat terhadap bencana di daerah provinsi tersebut

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JKBASMJS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Nomor Induk Anggota Tagana

Alias

NI_TAGANA

Konsep

Nomor Induk Anggota Tagana

Definisi

Nomor Induk Anggota Tagana adalah sebuah nomor identifikasi yang diberikan kepada anggota Tim Relawan Penanggulangan Bencana (Tagana)

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NI_TAGANA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 15

Nama Penyuluh Sosial

Alias

NAMA_PS

Konsep

Nama Penyuluh Sosial

Definisi

Nama Penyuluh Sosial adalah istilah yang mengacu kepada nama lengkap dari individu yang bekerja sebagai penyuluh sosial

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/Inpassing

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

SDM Penyuluh Sosial

Alias

SDM_PS

Konsep

SDM Penyuluh Sosial

Definisi

SDM Penyuluh Sosial adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan bantuan, dukungan, serta informasi kepada individu, keluarga, atau komunitas yang menghadapi masalah sosial, emosional, atau kesejahteraan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyuluh Sosial

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Penyuluh Sosial Fungsional
- Penyuluh Sosial Masyarakat

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

SDM_PS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Nomor Induk Pegawai

Alias

NIP

Konsep

Nomor Induk Pegawai

Definisi

Nomor Induk Pegawai adalah sebuah kode atau nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sektor pemerintahan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/Inpassing

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NIP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 18

Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Alias

JGPPTKD

Konsep

Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Definisi

Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya mengacu pada banyaknya individu yang sebelumnya menjadi gelandangan atau pengemis, namun sekarang tinggal di panti atau fasilitas perawatan yang memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JGPPTKD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Alias

JGPTMRSD

Konsep

Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Definisi

Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti adalah total individu yang terlantar dan sebelumnya menjalani kehidupan sebagai gelandangan atau pengemis di suatu provinsi atau daerah tertentu, dan mereka membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dasar yang diberikan di panti atau fasilitas perawatan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JGPTMRSD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Alias

JLUTPTKD

Konsep

Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Definisi

Jumlah orang lanjut usia yang tinggal di panti jompo atau fasilitas perawatan dimana kebutuhan dasar mereka terpenuhi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JLUTPTKD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Alias

JLUTDPMRSD

Konsep

Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Definisi

Jumlah orang lanjut usia yang memerlukan rehabilitasi sosial dasar dan perlu tinggal di panti jompo atau fasilitas perawatan di suatu provinsi

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JLUTDPMRSD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Alias

JATDPTKD

Konsep

Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya

Definisi

Jumlah anak yang ditinggalkan atau terlantar dan tinggal di panti atau fasilitas perawatan yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JATDPTKD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Jumlah Anak Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti

Alias

JATDPMRSD

Konsep

Jumlah Anak Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti

Definisi

Jumlah anak yang terlantar di suatu provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dan tinggal di panti atau fasilitas perawatan di daerah tersebut

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JATDPMRSD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Nama Lembaga Sosial

Alias

NAMA_LS

Konsep

Nama Lembaga Sosial

Definisi

Nama Lembaga Sosial adalah istilah yang merujuk kepada nama atau identifikasi resmi dari suatu organisasi, badan amal, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yayasan, atau entitas lain yang berfokus pada masalah sosial, kesejahteraan, atau pembangunan masyarakat

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_LS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Alamat Lembaga Sosial

Alias

ALAMAT_LS

Konsep

Alamat Lembaga Sosial

Definisi

Informasi lengkap mengenai lokasi tempat berdirinya suatu lembaga sosial

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAMAT_LS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Alat Bantu

Alias

ALAT_BANTU

Konsep

Alat Bantu

Definisi

Alat bantu adalah segala jenis perangkat, sumber daya, atau fasilitas yang disediakan untuk membantu individu atau kelompok yang tinggal di panti sosial dalam memenuhi segala kebutuhan mereka

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAT_BANTU = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Konsep

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Definisi

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada banyaknya individu atau kelompok yang mengalami berbagai masalah sosial, ekonomi, atau kesejahteraan yang signifikan dalam masyarakat

Interpretasi

Peningkatan jumlah PMKS dapat menjadi panggilan bagi pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial yang lebih efektif

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PMKS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

Jenis PMKS

Variabel Penyusun

Jenis PMKS, PMKS

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Disediakan di Dalam Panti

Konsep

Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Disediakan di Dalam Panti

Definisi

Jumlah Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti merujuk kepada jumlah profesional yang bekerja di lembaga panti atau fasilitas perawatan sosial yang bertanggung jawab memberikan dukungan, perawatan, dan layanan sosial kepada individu atau kelompok yang berada di dalam panti tersebut

Interpretasi

Dengan lebih banyak profesional yang tersedia, panti memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberikan perawatan yang lebih individual dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{TKS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin

Konsep

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin

Definisi

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin adalah banyaknya rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima bantuan berupa beras atau makanan pokok secara gratis atau dengan subsidi yang signifikan karena dianggap sebagai rumah tangga yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu

Interpretasi

Bantuan beras miskin yang disediakan kepada lebih banyak rumah tangga dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan dan defisiensi gizi di masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(RTS)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Rumah Tangga Sasaran

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Konsep

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Definisi

Perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial, maka dapat diartikan bahwa program atau upaya pemberian bantuan sosial telah mencapai lebih banyak individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JPMKSDB/JPMKSSMB) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan, Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan

Konsep

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan

Definisi

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan mengacu pada banyaknya rumah tangga yang menjadi penerima bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan atau program serupa

Interpretasi

Semakin banyak penerima bantuan akan membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NIK_KKP_PKH})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Keluarga Penerima Manfaat

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kepala Keluarga Penerima PKH, Alamat Keluarga Penerima PKH, Nomor Induk Kependudukan Kepala Keluarga Penerima PKH

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti

Konsep

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti

Definisi

Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase dapat menunjukkan bahwa panti memiliki staf yang terlatih dan kompeten, serta menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, seperti makanan, tempat tinggal yang aman, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\text{JPDTPTKD}/\text{JPDTMRSD}) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza

Konsep

Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza

Definisi

Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza adalah angka yang mencerminkan berapa banyak individu atau kelompok yang telah menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Napza)

Interpretasi

Semakin banyak korban penyalahgunaan Napza, semakin penting upaya pencegahan dan perawatan yang efektif, yang mencakup program-program pendidikan tentang risiko penyalahgunaan Napza, akses ke layanan rehabilitasi, dan dukungan bagi individu yang ingin berhenti menggunakan Napza

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_KPN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Korban Penyalahgunaan Napza,
Umur Korban Penyalahgunaan Napza

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Lembaga Sosial yang Diberdayakan

Konsep

Jumlah Lembaga Sosial yang Diberdayakan

Definisi

Jumlah Lembaga Sosial yang Diberdayakan adalah istilah yang mengacu pada jumlah organisasi atau lembaga sosial yang telah diberikan dukungan, bantuan, atau pelatihan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dan misi mereka yang terkait dengan penyediaan layanan sosial, kesejahteraan, atau pembangunan masyarakat.

Interpretasi

Dengan lebih banyak lembaga sosial yang diberdayakan, kemampuan mereka dalam memberikan layanan sosial yang berkualitas dan berkelanjutan dapat meningkat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_LS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Lembaga

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Lembaga Sosial, Alamat Lembaga Sosial

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti

Konsep

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti

Definisi

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti mencerminkan persentase individu yang sebelumnya hidup sebagai gelandangan dan pengemis, namun kini tinggal di panti atau fasilitas perawatan yang memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi

Interpretasi

Tingginya persentase ini mengindikasikan bahwa gelandangan dan pengemis yang tinggal di panti telah mendapatkan akses ke tempat tinggal yang aman, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial yang dibutuhkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JGPPTKD/JGPTMRSD) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya, Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi

Konsep

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi

Definisi

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi adalah ukuran statistik yang mencerminkan persentase individu atau kelompok yang menjadi korban bencana alam atau sosial di tingkat provinsi dan telah menerima atau memiliki akses ke kebutuhan dasar mereka baik selama tanggap darurat bencana maupun setelahnya

Interpretasi

Tingginya persentase ini mengindikasikan bahwa upaya tanggap darurat di provinsi tersebut telah berhasil dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan yang diperlukan kepada korban bencana

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JKBASTKD/JKBASMJS) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya, Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Jumlah Penyuluh Sosial

Konsep

Jumlah Penyuluh Sosial

Definisi

Jumlah Penyuluh Sosial mengacu pada total individu atau profesional yang bekerja sebagai penyuluh sosial dalam suatu wilayah tertentu

Interpretasi

Dengan lebih banyak penyuluh sosial, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik ke dukungan sosial, bimbingan, dan layanan yang mereka butuhkan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

SDM Penyuluh

Variabel Penyusun

Nama Penyuluh Sosial, SDM Penyuluh Sosial, Nomor Induk Pegawai

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Konsep

Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Definisi

Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah statistik yang mencerminkan berapa banyak individu yang tergabung dalam program atau organisasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) di suatu wilayah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana), semakin besar kemampuan dan potensi untuk memberikan bantuan dan tanggap darurat dalam situasi bencana

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NL_TAGANA})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nomor Induk Anggota Tagana

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti

Konsep

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti

Definisi

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti adalah perbandingan antara banyaknya lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap banyaknya lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada lanjut usia terlantar di suatu daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JLUTPTKD/JLUTDPMRSD) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti

Konsep

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti

Definisi

Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dapat menunjukkan bahwa lembaga terkait, termasuk panti sosial dan badan yang bertanggung jawab atas perawatan anak terlantar di suatu provinsi, telah berusaha untuk merawat anak-anak terlantar dengan baik di wilayah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JATDPTKD/JATDPMRSD) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Jumlah Anak Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Alat Bantu yang Disediakan didalam Panti

Konsep

Jumlah Alat Bantu yang Disediakan didalam Panti

Definisi

Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti adalah banyaknya perangkat, fasilitas, atau peralatan yang tersedia untuk membantu penghuni panti dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka

Interpretasi

Semakin banyak jumlah alat bantu panti, maka panti tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penghuninya

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{ALAT_BANTU})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Alat Bantu

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengumpulan Data Pencari Kerja di Kalimantan Timur Tahun 2023

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Tersedianya Data Pencari Kerja Kabupaten Kota Tahun 2023, Memudahkan Ketersediaan Data Pencari Kerja
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Jumlah Pencari Kerja Menurut Usia Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Jumlah Pencari Kerja Menurut Sektor Jumlah Pencari Kerja Menurut Jabatan
Periodisasi:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi

VARIABEL 1

Nama Pencari Kerja

Alias

NAMA_PK

Konsep

Nama Pencari Kerja

Definisi

Nama pencari kerja adalah informasi yang mencakup nama lengkap individu yang sedang mencari pekerjaan atau peluang karier

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 2

Nomor Induk Kependudukan Pencari Kerja

Alias

NIK_PK

Konsep

Nomor Induk Kependudukan Pencari Kerja

Definisi

Nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang merupakan pencari kerja

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Tepat 16 Digit

Kalimat Pertanyaan

NIK_PK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 3

Alamat Pencari Kerja

Alias

ALAMAT_PK

Konsep

Alamat Pencari Kerja

Definisi

Informasi lengkap mengenai lokasi tempat tinggal atau domisili dari pencari kerja

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAMAT_PK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Umur Pencari Kerja

Alias

UMUR_PK

Konsep

Umur Pencari Kerja

Definisi

Informasi mengenai umur dari individu yang sedang mencari pekerjaan atau peluang karier

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

UMUR_PK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Jenis Kelamin

Alias

JENIS_KELAMIN

Konsep

Jenis Kelamin Pencari Kerja

Definisi

Jenis kelamin pencari kerja mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_KELAMIN

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Pendidikan Pencari Kerja

Alias

PENDIDIKAN_PK

Konsep

Pendidikan Pencari Kerja

Definisi

Pendidikan pencari kerja adalah informasi yang mencerminkan tingkat pendidikan atau kualifikasi akademis yang dimiliki oleh seorang individu yang sedang mencari pekerjaan atau peluang karier

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENDIDIKAN_PK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Kompetensi Pencari Kerja

Alias

KOMPETENSLPK

Konsep

Kompetensi Pencari Kerja

Definisi

Kompetensi pencari kerja adalah istilah yang mengacu pada kumpulan keterampilan, pengetahuan, sifat, dan kemampuan pencari kerja

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KOMPETENSLPK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 8

Nama Kepala Keluarga

Alias

NAMA_KK

Konsep

Nama Kepala Keluarga

Definisi

Nama kepala keluarga adalah informasi yang mencakup nama lengkap individu yang dianggap sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga atau keluarga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_KK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 9

Nomor Induk Kependudukan Kepala Keluarga

Alias

NIK_KK

Konsep

Nomor Induk Kependudukan Kepala Keluarga

Definisi

Nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang merupakan kepala keluarga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi
- Tepat 16 Digit

Kalimat Pertanyaan

NIK_KK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 10

Jenis Transmigrasi

Alias

JENIS_TRANSMIGRASI

Konsep

Jenis Transmigrasi

Definisi

Jenis transmigrasi adalah istilah yang merujuk kepada berbagai macam program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JENIS_TRANSMIGRASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Jumlah Anggota Keluarga

Alias

JMLH_ANGGOTA_KELUARGA

Konsep

Jumlah Anggota Keluarga

Definisi

Jumlah anggota keluarga adalah informasi yang mencerminkan total individu yang termasuk dalam satu keluarga atau rumah tangga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_ANGGOTA_KELUARGA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Nama Anggota Keluarga

Alias

NAMA_ANGGOTA_KELUARGA

Konsep

Nama Anggota Keluarga

Definisi

Nama anggota keluarga adalah informasi yang mencakup nama lengkap individu yang termasuk dalam satu keluarga atau rumah tangga

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_ANGGOTA_KELUARGA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 13

Daerah Asal

Alias

ASAL

Konsep

Daerah Asal

Definisi

Daerah asal adalah wilayah atau lokasi geografis tempat transmigran berasal

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ASAL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Daerah Tujuan

Alias

TUJUAN

Konsep

Daerah Tujuan

Definisi

Daerah tujuan adalah wilayah atau lokasi geografis yang akan dituju oleh transmigran

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TUJUAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Provinsi

Alias

PROVINSI

Konsep

Provinsi

Definisi

Provinsi adalah unit administratif dalam struktur pemerintahan suatu negara atau wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa daerah atau kabupaten yang lebih kecil

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PROVINSI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Kabupaten

Alias

KABUPATEN

Konsep

Kabupaten

Definisi

Kabupaten adalah unit administratif yang lebih kecil dibandingkan dengan provinsi dalam struktur pemerintahan suatu negara atau wilayah

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KABUPATEN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Nama Lokasi

Alias

NAMA_LOKASI

Konsep

Nama Lokasi

Definisi

Nama lokasi transmigrasi mengacu pada daerah atau lokasi khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk program transmigrasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_LOKASI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

Alias

JPMTKKL

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

Definisi

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah banyaknya perusahaan yang telah mengadopsi praktik-praktik tata kelola kerja yang sesuai dan baik dalam operasional dan manajemennya, diantaranya adalah PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPMTKKL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Jumlah Perusahaan

Alias

JMLH_PERUSAHAAN'

Konsep

Jumlah Perusahaan

Definisi

Jumlah perusahaan adalah istilah yang mengacu pada angka atau bilangan yang menunjukkan berapa banyak perusahaan yang ada dalam suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_PERUSAHAAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan

Alias

JPMPPK

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan

Definisi

Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan merujuk kepada jumlah perusahaan yang mematuhi dan menjalankan segala ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di suatu negara tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPMPPK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Balai Pelatihan Kerja

Alias

BLK

Konsep

Balai Pelatihan Kerja

Definisi

Balai latihan kerja adalah tempat diselenggarakannya pelatihan kerja dengan tujuan agar peserta pelatihan menguasai kompetensi tertentu sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

BLK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Perusahaan yang Memperkerjakan Penyandang Disabilitas

Alias

PMPD

Konsep

Perusahaan yang Memperkerjakan Penyandang Disabilitas

Definisi

Perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas adalah perusahaan atau organisasi yang memberikan kesempatan kerja kepada individu yang memiliki berbagai jenis disabilitas atau keterbatasan fisik, mental, atau sensorik

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan BUMN yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PMPD = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Kategori Perusahaan

Alias

KATEGORI_PRSHN

Konsep

Kategori Perusahaan

Definisi

Kategori perusahaan adalah cara untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan berbagai karakteristik atau kriteria tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan BUMN yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

- Perusahaan Besar
- Perusahaan Sedang
- Perusahaan Kecil

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KATEGORI_PRSHN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Perusahaan yang Menerapkan SMK3

Alias

PM_SMK3

Konsep

Perusahaan yang Menerapkan SMK3

Definisi

Perusahaan yang menerapkan SMK3 adalah perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang dirancang dan dijalankan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik bagi semua karyawan dan pihak terkait dalam lingkungan kerja

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan BUMN yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PM_SMK3 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Alias

JTKMSK

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Definisi

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi mengacu pada total pekerja di suatu daerah yang telah menerima sertifikat atau bukti resmi bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang sesuai dengan standar kompetensi dalam pekerjaan atau bidang tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JTKMSK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Jumlah Tenaga Kerja

Alias

JTK

Konsep

Jumlah Tenaga Kerja

Definisi

Jumlah tenaga kerja adalah istilah yang merujuk pada total individu yang bekerja di suatu wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JTK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 27

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda

Alias

JPPBPKP

Konsep

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda

Definisi

Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) mengacu pada jumlah kasus di mana terjadi ketidaksetujuan atau konflik antara buruh (pekerja) dan pengusaha (perusahaan) terhadap kebijakan atau peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah tertentu, dan kemudian konflik tersebut berhasil diselesaikan atau diatasi melalui berbagai mekanisme penyelesaian

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPPBPKP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 28

Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda

Alias

JPBPKP

Konsep

Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda

Definisi

Jumlah perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) mengacu pada total kasus konflik, pertentangan, atau ketidaksepakatan yang terjadi antara pekerja (buruh) dan pihak pengusaha (biasanya perusahaan) dengan kebijakan atau peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam konteks hubungan industrial atau ketenagakerjaan di wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPBPKP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 29

Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja

Alias

JPTUAK

Konsep

Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja

Definisi

Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja adalah banyaknya penduduk usia kerja (berusia 15 tahun dan lebih) yang berpotensi bekerja tetapi saat ini tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari peluang pekerjaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPTUAK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 30

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Alias

JPAK

Konsep

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Definisi

Jumlah penduduk angkatan kerja adalah total penduduk berusia 15 tahun dan lebih yang sedang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JPAK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 31

Kelompok Umur

Alias

KELOMPOK_UMUR

Konsep

Kelompok Umur

Definisi

Kelompok umur adalah pengelompokan individu dalam suatu populasi berdasarkan rentang usia tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KELOMPOK_UMUR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 32

Nama Perusahaan

Alias

NAMA_PERUSAHAAN

Konsep

Nama Perusahaan

Definisi

Nama Perusahaan adalah identitas unik yang secara resmi digunakan untuk mengidentifikasi suatu perusahaan tertentu

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_PERUSAHAAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 33

Alamat Perusahaan

Alias

ALAMAT_PERUSAHAAN

Konsep

Alamat Perusahaan

Definisi

Informasi lengkap mengenai lokasi berdirinya suatu perusahaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Referensi Waktu

Saat Pendaftaran

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ALAMAT_PERUSAHAAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 34

Nomor Induk Berusaha

Alias

NIB

Konsep

Nomor Induk Berusaha

Definisi

Nomor Induk Berusaha adalah nomor identifikasi resmi yang diberikan kepada setiap badan usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Referensi Waktu

Saat Pendaftaran

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NIB = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 35

Nomor Akta Pendirian

Alias

NAP

Konsep

Nomor Akta Pendirian

Definisi

Nomor akta pendirian adalah nomor identifikasi yang biasanya diberikan oleh badan pemerintah atau lembaga berwenang yang mengatur badan usaha atau perusahaan di wilayah hukum yang bersangkutan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 36

Nomor Pokok Wajib Pajak

Alias

NPWP

Konsep

Nomor Pokok Wajib Pajak

Definisi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi pajak yang diberikan kepada individu atau entitas hukum yang memiliki kewajiban pajak di Indonesia

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NPWP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 37

Pemutusan Hubungan Kerja

Alias

PHK

Konsep

Pemutusan Hubungan Kerja

Definisi

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PHK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 38

Kawasan Transmigrasi

Alias

KAWASAN_TRANS

Konsep

Kawasan Transmigrasi

Definisi

Kawasan Transmigrasi adalah wilayah atau area yang secara khusus ditetapkan oleh pemerintah untuk program transmigrasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Transmigran

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KAWASAN_TRANS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 39

Kecamatan

Alias

KECAMATAN

Konsep

Kecamatan

Definisi

Kecamatan adalah unit administratif yang berada di bawah tingkat kabupaten/kota

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KECAMATAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 40

Desa/Kelurahan

Alias

DESA_KEL

Konsep

Desa/Kelurahan

Definisi

Desa/Kelurahan adalah unit administratif yang berada di bawah kecamatan

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DESA_KEL = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 41

Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Alias

LWPKT

Konsep

Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Definisi

Luas wilayah perencanaan kawasan transmigrasi adalah ukuran atau besaran wilayah tertentu yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah sebagai daerah atau kawasan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program transmigrasi

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

LWPKT = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar

Konsep

Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar

Definisi

Jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah individu yang telah mendaftar atau mendaftarkan diri mereka di lembaga tertentu sebagai pencari kerja

Interpretasi

Peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftar bisa mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran dalam suatu wilayah atau negara mungkin meningkat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NIK_PK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Kompetensi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Transmigrasi

Konsep

Jumlah Transmigrasi

Definisi

Jumlah transmigrasi mengacu pada banyaknya jumlah individu atau keluarga yang telah terlibat dalam program transmigrasi suatu negara

Interpretasi

Peningkatan jumlah individu atau keluarga yang mengikuti transmigrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, apabila individu tersebut dapat terlibat dalam sektor ekonomi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_KK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kepala Keluarga, NIK Kepala Keluarga, Jenis Transmigrasi, Jumlah Anggota Keluarga, Nama Anggota Keluarga, Daerah Asal, Daerah Tujuan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Kawasan Transmigrasi

Konsep

Jumlah Kawasan Transmigrasi

Definisi

Jumlah kawasan transmigrasi adalah total dari luas wilayah atau daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah suatu negara untuk dijadikan lokasi program transmigrasi

Interpretasi

Peningkatan jumlah kawasan transmigrasi dapat membantu dalam pengembangan wilayah yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{KAWASAN_TRANS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ha

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Provinsi, Kabupaten, Nama Lokasi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Konsep

Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Definisi

Perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan jumlah seluruh perusahaan di suatu daerah dikali 100%

Interpretasi

Persentase yang meningkat menunjukkan semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja dalam suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$(\text{JPMTKKL}/\text{JMLH_PERUSAHAAN}') \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak, Jumlah Perusahaan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan

Konsep

Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan

Definisi

Perbandingan jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan terhadap jumlah seluruh perusahaan di suatu daerah dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan, maka semakin baik kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JPMPPK/JMLH_PERUSAHAAN') \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, Jumlah Perusahaan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Balai Pelatihan Kerja (BLK)

Konsep

Jumlah Balai Pelatihan Kerja (BLK)

Definisi

Jumlah Balai Pelatihan Kerja (BLK) adalah banyaknya lembaga pelatihan yang bertugas menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja dan keahlian bagi tenaga kerja atau calon tenaga kerja dalam berbagai bidang

Interpretasi

Semakin banyak BLK dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk mengakses pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(BLK)$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Balai Pelatihan Kerja

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Definisi

Jumlah perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas merujuk pada total perusahaan yang aktif memberikan kesempatan kerja kepada individu dengan berbagai jenis disabilitas

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh penghasilan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PMPD})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan SMK3

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan SMK3

Definisi

Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 adalah jumlah perusahaan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam operasional mereka

Interpretasi

Semakin banyak perusahaan yang menerapkan SMK3 dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan cidera pada tenaga kerja

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PM_SMK3})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Perusahaan yang Menerapkan SMK3

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Konsep

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Definisi

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja di suatu daerah yang telah memperoleh sertifikat kompetensi atau kualifikasi tertentu dengan jumlah total tenaga kerja di daerah tersebut dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dapat mengindikasikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terampil dan mampu menjalankan pekerjaan dengan lebih efisien

Metode/Rumus Penghitungan

(JTKMSK/JTK)

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi, Jumlah Tenaga Kerja

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Konsep

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Definisi

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah adalah perbandingan atau rasio antara jumlah perselisihan atau konflik yang timbul antara kelompok pekerja (buruh) dan pengusaha (biasanya pemilik perusahaan atau manajemen) dengan pemerintah daerah terkait kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah setempat, dibandingkan dengan jumlah total perusahaan di wilayah tersebut dikali 100%

Interpretasi

Tingginya persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa ada perluasan pandangan dan isu-isu yang harus diperhatikan serta perbaikan dalam manajemen hubungan industrial dan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih inklusif

Metode/Rumus Penghitungan

(JPPBPKP/JPBPKP)x100%

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda, Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Tingkat Pengangguran Terbuka

Konsep

Tingkat Pengangguran Terbuka

Definisi

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase dari angkatan kerja suatu negara atau wilayah yang sedang mencari pekerjaan aktif dan siap bekerja, tetapi belum berhasil menemukan pekerjaan dalam periode tertentu dan siap untuk memulai bekerja dalam waktu yang sesuai jika ada kesempatan

Interpretasi

Tingkat pengangguran yang rendah dapat mengurangi tekanan pada program dukungan sosial karena lebih banyak orang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Metode/Rumus Penghitungan

$$(JPTUAK/JPAK) \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Variabel Penyusun

Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online

Definisi

Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online adalah banyaknya perusahaan atau entitas usaha yang telah mendaftarkan diri mereka secara online dalam sistem pelaporan ketenagakerjaan yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang

Interpretasi

Pendaftaran WLKP secara online dapat meningkatkan efisiensi administratif baik bagi perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data ketenagakerjaan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NIB})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Nomor Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Jumlah Kasus Pemutusan Hubungan Kerja

Konsep

Jumlah Kasus Pemutusan Hubungan Kerja

Definisi

Jumlah Kasus Pemutusan Hubungan Kerja adalah jumlah kejadian di mana suatu perusahaan atau organisasi mengakhiri hubungan kerja dengan satu atau lebih karyawan atau pekerja

Interpretasi

Peningkatan jumlah kasus PHK dapat memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan sosial, relokasi pekerja, atau pelatihan keterampilan bagi pekerja yang di-PHK

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{PHK})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pemutusan Hubungan Kerja

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Konsep

Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Definisi

Luas wilayah perencanaan kawasan transmigrasi adalah total besarnya wilayah yang ditentukan sebagai kawasan transmigrasi oleh pemerintah

Interpretasi

Dengan luas wilayah yang lebih besar, kawasan transmigrasi dapat menampung lebih banyak penduduk yang dipindahkan dari daerah asal mereka, sehingga dapat membantu mengurangi tekanan demografis di daerah asal dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk berpindah dan memulai hidup baru di wilayah transmigrasi

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{LWPKT})$$

Ukuran

Luas

Satuan

Hektar

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan, Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi

Konsep

Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi

Definisi

Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi mengacu pada jumlah keseluruhan perusahaan atau badan usaha yang telah didirikan dan beroperasi di bawah pengawasan pemerintah atau otoritas terkait

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi, maka semakin banyak perusahaan yang akan cenderung menaati hukum, regulasi, dan standar yang berlaku

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma(\text{NAMA_PERUSAHAAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Alamat Perusahaan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Inspektorat Wilayah

VARIABEL 1

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Alias

Daftar Temuan BPK

Konsep

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Definisi

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Daftar Temuan BPK=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 2

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Alias

Daftar Temuan APIP

Konsep

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Definisi

Temuan dalam sebuah audit kinerja berupa ketidakekonomisan, ketidak efisienan dan ketidakefektifan pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit. Di samping itu, temuan juga berupa kurang memadainya sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan (abuse).

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Daftar Temuan APIP=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 3

Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Alias

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Konsep

Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Definisi

Daftar Rekomendasi BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan

Referensi Pemilihan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 4

Daftar Tindak Lanjut APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Alias

Tindak Lanjut APIP

Konsep

Daftar Tindak Lanjut APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Definisi

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Tindak Lanjut APIP=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 5

Nama SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

Alias

SKPD WBK-WBBM

Konsep

Nama SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

Definisi

Nama SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

SKPD WBK-WBBM=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 6

Nama Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP

Alias

Kabupaten/Kota WTP

Konsep

Nama Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP

Definisi

Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota WTP=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 7

Nama Kabupaten/Kota

Alias

Kabupaten/Kota

Konsep

Nama Kabupaten/Kota

Definisi

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

Referensi Pemilihan

-

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan

Kabupaten/Kota=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Nama Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Alias

Nama AP Bersertifikat

Konsep

Nama Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Definisi

Daftar nama aparaturnya yang bersertifikat. Aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Referensi Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Nama AP Bersertifikat=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 9

LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi

Alias

LPPD yang mendapatkan nilai sangat tinggi

Konsep

LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi

Definisi

LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Referensi Pemilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

LPPD yang mendapatkan nilai sangat tinggi=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Kejadian Kasus KKN

Alias

Kejadian KKN

Konsep

Kejadian Kasus KKN

Definisi

Kejadian Kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Referensi Pemilihan

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

-

Kalimat Pertanyaan

Kejadian KKN=

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

INDIKATOR 1

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Konsep

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Definisi

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK

Interpretasi

Semakin banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka semakin besar indikasi ketidakberesan atau masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan pemerintah atau lembaga yang diperiksa

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Temuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Konsep

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Definisi

Temuan dalam sebuah audit kinerja berupa ketidakekonomisan, ketidak efisienan dan ketidakefektifan pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit. Di samping itu, temuan juga berupa kurang memadainya sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan (abuse).

Interpretasi

Semakin banyak jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP, maka semakin besar tingkat ketidakberesan atau masalah yang teridentifikasi dalam pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Temuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Konsep

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Definisi

Daftar Rekomendasi BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan

Interpretasi

Semakin banyaknya jumlah tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan BPK, maka semakin besar keseriusan pemerintah atau lembaga dalam menangani temuan-temuan BPK dan upaya mereka untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasi

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rekomendasi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Jumlah Tindak Lanjut APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Konsep

Jumlah Tindak Lanjut APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Definisi

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.

Interpretasi

Semakin banyaknya jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP terhadap hasil pemeriksaan mereka, maka semakin besar komitmen dalam organisasi pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi temuan-temuan dan masalah yang diidentifikasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Daftar Tindak Lanjut APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rekomendasi

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Daftar Tindak Lanjut APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

Konsep

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

Definisi

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Interpretasi

Semakin banyaknya SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM menunjukkan komitmen pemerintah atau entitas terkait untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

Ukuran

Jumlah

Satuan

SKPD

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP

Konsep

Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP

Definisi

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP, maka tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik di tingkat daerah akan semakin baik

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP dibagi dengan banyaknya Kabupaten/Kota

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Konsep

Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Definisi

Aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Interpretasi

Semakin banyak Aparatur Pengawasan yang bersertifikat, maka kualitas pengawasan dan pengendalian dalam organisasi atau lembaga akan semakin meningkat

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi

Konsep

Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi

Definisi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Interpretasi

Semakin besar Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi dibagi dengan banyaknya Kabupaten/Kota

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi, Nama Kabupaten/Kota

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Kasus KKN

Konsep

Jumlah Kasus KKN

Definisi

Jumlah Kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kasus KKN, maka semakin buruk tata kelola dan integritas dalam lingkungan tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan dari seluruh Kejadian Kasus KKN

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kejadian Kasus KKN

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

Satuan Polisi Pamong Praja

Survei Kepuasan Masyarakat Satpol PP Provinsi Kaltim

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	· Memperoleh Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur · Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Sebagai Penerima Layanan · Memperoleh Umpan Balik Berupa Masukan/Keluhan dari Perangkat Daerah dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Upaya Perbaikan/Peningkatan · Melakukan Analisis Terhadap Tingkat Kepuasan dan Harapan Perangkat Daerah dan Masyarakat untuk Melakukan Perbaikan Terhadap Pelayanan · Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kasatpol PP

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Persyaratan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya (Tarif) Produk Pelayanan Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan Kualitas Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
Periodisasi:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Wawancara Langsung Wawancara Melalui Sarana Komunikasi Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) Lainnya: Google Form
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota

Kompilasi Data Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)

Identitas Kegiatan

Penyelenggara:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan:	Mendapatkan Data dan Informasi yang Akurat dan Lengkap Terkait Sub Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penanggung Jawab Kegiatan:	Kasatpol PP

Data

Variabel yang Dikumpulkan:	Data Penegakkan Perda/Perkada Keamanan, Ketertiban Masyarakat Capaian Indikator RPJMD Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Periodisasi:	Lainnya: Data Real Time

Metodologi

Metode Pengumpulan Data:	Lainnya: Wawancara Langsung, Melalui Pengamatan/Observasi
Tingkat Penyajian yang Diharapkan:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

VARIABEL 1

Penyelesaian Penegakan Perda

Alias

PENYELESAIAN_PERDA

Konsep

Penyelesaian Penegakan Perda

Definisi

Penyelesaian Penegakan Perda mengacu pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang atau lembaga pemerintah untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) atau undang-undang tingkat daerah

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENYELESAIAN_PERDA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 2

Pelanggaran Perda

Alias

PELANGGARAN PERDA

Konsep

Pelanggaran Perda

Definisi

Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kemudian dilanggar oleh individu, kelompok, atau entitas dalam wilayah administratif yang sama di mana Perda tersebut berlaku

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PELANGGARAN PERDA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 3

Kasus Pelanggaran Perda

Alias

KASUS_PELANGGARAN

Konsep

Kasus Pelanggaran Perda

Definisi

Situasi di mana seseorang atau sebuah entitas melanggar atau tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perda yang berlaku di suatu daerah

Referensi Pemilihan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

KASUS_PELANGGARAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 4

Aparat Satuan Pamong Praja

Alias

APARAT_SATPOL_PP

Konsep

Aparat Satuan Pamong Praja

Definisi

Personel yang bekerja di lembaga penegak peraturan daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan penegakan peraturan daerah di suatu wilayah pemerintahan daerah

Referensi Pemilihan

PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

APARAT_SATPOL_PP = ,,,

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 5

Nama

Alias

NAMA_SATPOL_PP

Konsep

Nama

Definisi

Nama adalah pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

String

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NAMA_SATPOL_PP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 6

Nomor Induk Pegawai

Alias

NIP

Konsep

Nomor Induk Pegawai

Definisi

Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Referensi Waktu

Saat Pendataan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NIP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Tidak

VARIABEL 7

Petugas Perlindungan Masyarakat

Alias

PETUGAS_LINMAS

Konsep

Petugas Perlindungan Masyarakat

Definisi

Petugas Perlindungan Masyarakat adalah individu yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan memelihara, menjaga, dan meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan lingkungan sosial dan masyarakat di suatu wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Pemendagri Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PETUGAS_LINMAS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 8

Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam

Alias

PATROLI_SATPOL_PP

Konsep

Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam

Definisi

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam waktu 24 jam untuk memantau, mendeteksi, dan menyelesaikan pelanggaran yang terkait dengan ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) lingkungan atau wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PATROLI_SATPOL_PP = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 9

Pelanggaran K3

Alias

PELANGGARAN_K3

Konsep

Pelanggaran K3

Definisi

Pelanggaran terhadap peraturan atau tindakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PELANGGARAN_K3 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 10

Penyelesaian Pelanggaran K3

Alias

PENYELESAIAN_PELANGGARAN_K3

Konsep

Penyelesaian Pelanggaran K3

Definisi

Tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menangani atau menyelesaikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ketertiban, ketentraman, dan keindahan dalam suatu lingkungan atau masyarakat

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENYELESAIAN_PELANGGARAN_K3 = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 11

Penindakan Atas Gangguan trantibum

Alias

PENINDAKAN

Konsep

Penindakan Atas Gangguan trantibum

Definisi

Tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang atau instansi terkait untuk mengatasi atau menangani gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENINDAKAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 12

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Alias

ANGGOTA_SATLINMAS

Konsep

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Definisi

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah individu yang telah dilatih dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam lingkup tertentu

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ANGGOTA_SATLINMAS = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 13

Daerah Rawan Kebakaran

Alias

DAERAH_RAWAN

Konsep

Daerah Rawan Kebakaran

Definisi

Wilayah atau lokasi yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap terjadinya kebakaran atau penyebaran api

Referensi Pemilihan

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DAERAH_RAWAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 14

Peta

Alias

PETA

Konsep

Peta

Definisi

Peta yang biasanya disusun berdasarkan analisis data dan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kebakaran, seperti kondisi geografis, jenis vegetasi, iklim, topografi, serta faktor-faktor manusia seperti populasi dan aktivitas

Referensi Pemilihan

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PETA = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 15

Penduduk

Alias

PENDUDUK

Konsep

Penduduk

Definisi

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap

Referensi Pemilihan

PermenPAN_RB Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENDUDUK = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 16

Pos Siskamling

Alias

POS_SISKAMLING

Konsep

Pos Siskamling

Definisi

Pos atau tempat yang didirikan oleh warga atau masyarakat di suatu lingkungan atau daerah dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di lingkungan tersebut

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

POS_SISKAMLING = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 17

Anggota Satlinmas yang Dikukuhkan

Alias

ANGGOTA_DIKUKUHKAN

Konsep

Anggota Satlinmas yang Dikukuhkan

Definisi

Individu yang telah secara resmi bergabung dengan program Satlinmas dan telah mendapatkan pengukuhan atau pengesahan dari kepolisian

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

ANGGOTA_DIKUKUHKAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 18

Gangguan Tantribum Pada Tahun ke-t

Alias

JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM(t)

Konsep

Jumlah Gangguan Tantribum Pada Tahun ke-t

Definisi

suatu tindakan atau perilaku yang mengacaukan atau mengganggu ketenangan dan ketertiban di lingkungan sosial atau masyarakat pada tahun ke-t

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM(t) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 19

Gangguan Tantribum Pada Tahun ke-(t-1)

Alias

JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM(t-1)

Konsep

Jumlah Gangguan Tantribum Pada Tahun ke-(t-1)

Definisi

suatu tindakan atau perilaku yang mengacaukan atau mengganggu ketenangan dan ketertiban di lingkungan sosial atau masyarakat pada tahun ke-(t-1)

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM(t-1) = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 20

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

Alias

TOTAL_PERSEPSI_UNSUR

Konsep

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

Definisi

agregasi atau penjumlahan dari nilai-nilai persepsi yang diberikan oleh masyarakat terhadap setiap unsur atau dimensi yang diukur

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TOTAL_PERSEPSI_UNSUR = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 21

Total Unsur yang Terisi

Alias

TOTAL_UNSUR_TERISI

Konsep

Total Unsur yang Terisi

Definisi

jumlah keseluruhan unsur atau dimensi yang dinilai atau dinilai oleh responden

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

TOTAL_UNSUR_TERISI = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 22

Nilai Penimbang

Alias

NILAL_PENIMBANG

Konsep

Nilai Penimbang

Definisi

bobot yang diberikan pada setiap unsur atau dimensi yang diukur dalam indeks tersebut

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

NILAL_PENIMBANG = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 23

Pencegahan Gangguan Trantibum

Alias

PENCEGAHAN

Konsep

Pencegahan Gangguan Trantibum

Definisi

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, masyarakat, dan institusi terkait untuk mencegah terjadinya gangguan yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat

Referensi Pemilihan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

PENCEGAHAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 24

Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Pelatihan

Alias

APARATUR_PEMADAM_PELATIHAN

Konsep

Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Pelatihan

Definisi

petugas atau personel yang bekerja di lembaga atau instansi pemadam kebakaran dan telah mengikuti pelatihan resmi terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam penanganan kebakaran dan situasi darurat terkait

Referensi Pemilihan

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

APARATUR_PEMADAM_PELATIHAN = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 25

Aparatur Pemadam Kebakaran

Alias

APARATUR_PEMADAM

Konsep

Aparatur Pemadam Kebakaran

Definisi

Sekelompok individu yang bekerja dalam lembaga atau instansi yang memiliki tanggung jawab untuk merespons, mencegah, dan memadamkan kebakaran serta mengatasi situasi darurat terkait lainnya

Referensi Pemilihan

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

APARATUR_PEMADAM = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

VARIABEL 26

Daerah

Alias

DAERAH

Konsep

Daerah

Definisi

Banyaknya daerah di suatu wilayah tertentu

Referensi Pemilihan

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Referensi Waktu

Tahunan

Tipe Data

Integer

Klasifikasi Isian

-

Aturan Validasi

- Harus Terisi

Kalimat Pertanyaan

DAERAH = ...

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 1

Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda

Konsep

Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda

Definisi

Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda adalah banyaknya kasus atau insiden di mana pemerintah daerah atau lembaga berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda)

Interpretasi

Banyaknya penyelesaian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Perda ditindaklanjuti dengan baik dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ditegakkan

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (PENYELESAIAN_PERDA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Penyelesaian Penegakan Perda

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 2

Jumlah Pelanggaran Perda

Konsep

Jumlah Pelanggaran Perda

Definisi

Banyaknya Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kemudian dilanggar oleh individu, kelompok, atau entitas dalam suatu wilayah administratif dalam periode waktu tertentu

Interpretasi

Banyaknya pelanggaran Perda juga dapat menjadi indikasi perlunya upaya lebih lanjut dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang peraturan yang berlaku

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (PELANGGARAN_PERDA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perda

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pelanggaran Perda

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 3

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda

Konsep

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda

Definisi

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda adalah banyaknya kasus atau insiden di mana individu, perusahaan, atau entitas lain melanggar aturan-aturan yang diatur oleh Perda yang berlaku di suatu daerah atau wilayah

Interpretasi

Banyaknya jumlah pelanggaran perda menunjukkan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih besar terkait dengan aturan-aturan Perda

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{KASUS_PELANGGARAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Kasus Pelanggaran Perda

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 4

Rasio Penegakan Perda

Konsep

Rasio Penegakan Perda

Definisi

Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi Jumlah pelanggaran Perda dikali 100%

Interpretasi

Jika rasio penegakan Perda semakin tinggi, maka dapat diartikan bahwa ada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diatur dalam Perda

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\Sigma (\text{PENYELESAIAN_PENEGAKAN_PERDA}))}{\Sigma (\text{KASUS_PELANGGARAN})} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda, Jumlah Kasus Pelanggaran Perda

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 5

Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja

Konsep

Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja

Definisi

Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja adalah banyaknya anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Interpretasi

Dengan jumlah ASPP yang lebih banyak, pemerintah daerah dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi masalah ketertiban umum, seperti pengamanan acara besar, penanganan konflik, dan penegakan peraturan daerah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{APARAT_SATPOL_PP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Nama, NIP, Aparat Satpol PP

Level Estimasi

Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 6

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat

Konsep

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat

Definisi

merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Interpretasi

Jumlah petugas perlindungan masyarakat yang lebih besar biasanya menunjukkan fokus yang lebih tinggi pada ketahanan keamanan suatu wilayah

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PETUGAS_LINMAS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Petugas Perlindungan Masyarakat

Level Estimasi

Kabupaten/Kota

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 7

Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam

Konsep

Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam

Definisi

Banyaknya patroli yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jangka waktu 24 jam untuk memantau dan menangani pelanggaran yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan atau wilayah tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah patroli menunjukkan adanya upaya yang lebih kuat dalam mengawasi dan mengontrol lingkungan. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, pelanggaran K3 dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PATROLI_SATPOL_PP})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang/Kali

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 8

Jumlah Pos Siskamling

Konsep

Jumlah Pos Siskamling

Definisi

upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Interpretasi

Jumlah pos Siskamling yang lebih besar juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya keamanan lingkungan, yaitu mengajak warga untuk lebih proaktif dalam melaporkan kejadian mencurigakan dan berkontribusi pada menjaga keamanan bersama

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{POS_SISKAMLING})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pos Siskamling

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 9

Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Konsep

Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Definisi

Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah banyaknya insiden atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip K3 dalam suatu lingkungan atau area tertentu

Interpretasi

Peningkatan jumlah patroli menunjukkan adanya upaya yang lebih kuat dalam mengawasi dan mengontrol lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PELANGGARAN_K3})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus/Kali

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pelanggaran K3

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 10

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Konsep

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Definisi

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah banyaknya tindakan atau langkah yang diambil oleh pihak berwenang, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau instansi terkait, untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan K3 dalam suatu lingkungan atau area tertentu

Interpretasi

Peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 dapat menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap tata tertib dan norma sosial

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PENYELESAIAN_PELANGGARAN_K3})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Penyelesaian Pelanggaran K3

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 11

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Konsep

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Definisi

Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP dikali 100%

Interpretasi

Semakin tinggi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) mengindikasikan bahwa pihak yang terlibat, seperti pemerintah, otoritas, dan masyarakat, mengutamakan tata tertib dan kesejahteraan masyarakat

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\sum (\text{PENYELESAIAN_PELANGGARAN_K3})}{\sum (\text{PELANGGARAN_K3})} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 12

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Konsep

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Definisi

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk adalah ukuran statistik yang menggambarkan proporsi atau perbandingan antara jumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu, diukur per kelompok 10.000 penduduk

Interpretasi

Jika rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat, ini bisa menandakan adanya peningkatan upaya dalam pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\sum (\text{APARAT_SATPOL_PP})}{\sum (\text{PENDUDUK})} \times 10.000$$

Ukuran

Tidak ada satuan

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Penduduk

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 13

Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Konsep

Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Definisi

Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli adalah perbandingan antara jumlah kegiatan pengamanan, penjagaan, pengawasan, dan patroli yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah total kegiatan yang direncanakan atau dibutuhkan dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat

Interpretasi

Peningkatan persentase pengamanan dan upaya menjaga ketertiban umum dapat menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan terkendali

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\text{JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM}(t) - \text{JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM}(t-1))}{\text{JMLH_GANGGUAN_TANTRIBUM}(t)} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Jumlah Gangguan Tantribum Pada Tahun ke-t, Jumlah Gangguan Tantribum Pada Tahun ke-(t-1)

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 14

Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat

Konsep

Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat

Definisi

Peningkatan kemampuan dan kesiapan Satlinmas dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan masyarakat di wilayah tertentu

Interpretasi

Dengan meningkatnya kapasitas atau kemampuan Satlinmas di suatu daerah, Satlinmas akan memiliki lebih banyak pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dengan lebih baik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{(\sum (\text{ANGGOTA_SATLINMAS_DIKUKUHKAN}))}{\sum (\text{ANGGOTA_SATLINMAS})} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Indikator Penyusun

Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat, Anggota Satlinmas yang Dikukuhkan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 15

Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran

Konsep

Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran

Definisi

Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan pembinaan dalam bidang kebakaran adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran, merespons dengan cepat jika kebakaran terjadi, serta melatih dan membina individu atau kelompok untuk menjadi lebih kompeten dalam menghadapi situasi kebakaran

Interpretasi

Dengan meningkatkan upaya pencegahan, seperti menetapkan standar keselamatan yang lebih ketat, memastikan fasilitas dan infrastruktur yang aman dari segi kebakaran, serta meminimalkan potensi pemicu kebakaran, risiko terjadinya kebakaran dapat dikurangi secara signifikan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\sum (\text{DAERAH_RAWAN})}{\sum (\text{DAERAH})} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Daerah

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 16

Pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran

Konsep

Pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran

Definisi

Serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap individu atau kelompok dalam menghadapi situasi kebakaran

Interpretasi

Persentase ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana petugas pemadam telah terlibat dalam proses pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi kebakaran

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\sum (\text{APARATUR_PELATIHAN})}{\sum (\text{APARATUR_PEMADAM})} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

Persen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Pelatihan, Aparatur Pemadam Kebakaran

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 17

Angka pelayanan publik

Konsep

Angka pelayanan publik

Definisi

Angka Pelayanan Publik adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana layanan-layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah atau badan publik telah diakses atau diterima oleh masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu yang diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Interpretasi

25 - 43,75 : Tidak Baik
43,76 - 62,50 : Kurang Baik
62,51 - 81,25 : Baik
81,26 - 100 : Sangat Baik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\left(\frac{\text{TOTAL_UNSUR}}{\text{TOTAL_TERISI}} \right) \times \text{NILAI_PENIMBANG}$$

Ukuran

Indeks

Satuan

Tidak ada satuan

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur, Total Unsur yang Terisi, Nilai Penimbang

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 18

Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Konsep

Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Definisi

Jumlah Aduan Warga, Aparatur, dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah banyaknya laporan atau keluhan yang diajukan oleh warga masyarakat, aparat pemerintahan, atau badan hukum terhadap terjadinya gangguan ketenangan dan ketertiban umum dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu

Interpretasi

Jumlah aduan yang tinggi bisa mendorong pihak berwenang, seperti kepolisian atau badan pemerintah terkait lainnya, untuk mengambil tindakan lebih serius dalam menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{ADUAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Aduan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 19

Jumlah pencegahan gangguan trantibum

Konsep

Jumlah pencegahan gangguan trantibum

Definisi

Jumlah pencegahan gangguan trantibum mengacu pada seberapa banyak tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang atau instansi terkait dalam rangka mencegah terjadinya gangguan terhadap tata tertib umum (trantibum) di suatu wilayah atau lingkungan tertentu

Interpretasi

Peningkatan pencegahan gangguan ketertiban dapat membantu mencegah terjadinya situasi yang mengganggu ketertiban umum sejak dini

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PENCEGAHAN_GANGGUAN_TRANTI-} \\ \text{BUM})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Pencegahan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 20

Jumlah penindakan atas gangguan trantibum

Konsep

Jumlah penindakan atas gangguan trantibum

Definisi

Jumlah penindakan atas gangguan trantibum adalah banyaknya tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang atau instansi terkait untuk menegakkan tata tertib dan ketertiban umum (trantibum) dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu

Interpretasi

Jumlah penindakan yang meningkat bisa mengindikasikan komitmen untuk memastikan ketertiban umum di lingkungan tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{PENINDAKAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Penindakan

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 21

Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat

Konsep

Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat

Definisi

Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat adalah banyaknya individu yang menjadi anggota dari Satuan Perlindungan Masyarakat dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu

Interpretasi

Jumlah anggota yang lebih banyak dalam satuan perlindungan masyarakat dapat mengarah pada peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap lingkungan lokal

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{ANGGOTA_SATLINMAS})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Satuan Pelindungan Masyarakat

Level Estimasi

Provinsi

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 22

Jumlah daerah rawan kebakaran

Konsep

Jumlah daerah rawan kebakaran

Definisi

Jumlah daerah rawan kebakaran adalah banyaknya lokasi yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran

Interpretasi

Jika ada peningkatan jumlah daerah yang dianggap rawan kebakaran, ini dapat mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti kondisi cuaca kering, vegetasi yang rentan terbakar, atau tata kelola lingkungan yang buruk telah meningkatkan risiko kebakaran hutan atau lahan

Metode/Rumus Penghitungan

$$\Sigma (\text{DAERAH_RAWAN})$$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Daerah

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Daerah rawan

Level Estimasi

Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya

INDIKATOR 23

Peta rawan kebakaran

Konsep

Peta rawan kebakaran

Definisi

Peta rawan kebakaran adalah representasi visual dari wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi terjadinya kebakaran

Interpretasi

Semakin banyak peta rawan kebakaran di suatu daerah, semakin tinggi tingkat perhatian dan kesadaran terhadap risiko kebakaran di daerah tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Σ (PETA)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Dokumen

Klasifikasi Penyajian

-

Variabel Penyusun

Peta

Level Estimasi

Kecamatan

Apakah Dapat Diakses Umum?

Ya



DISKOMINFO
KALTIM

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.41, Sungai Pinang Luar
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
Kalimantan Timur 75121

 diskominfo.kaltimprov.go.id